



RANCANGAN AWAL

RKPD

Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
Provinsi Lampung

TAHUN
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi: Persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan rancangan awal RKPD, Penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan rancangan akhir RKPD, dan Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan.

Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua periode Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2029 sekaligus tahun kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Diharapkan tahun 2026 sebagai tahun awal momentum perubahan kearah lebih baik dibawah kepemimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Momentum untuk memperkuat sinergi pembangunan baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan memperkuat sinergi antar stakeholder pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Penting untuk mengawal Konsistensi antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD. Konsistensi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen

perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*), dan atas-bawah (*top-down*); dengan deskripsi sebagai berikut:

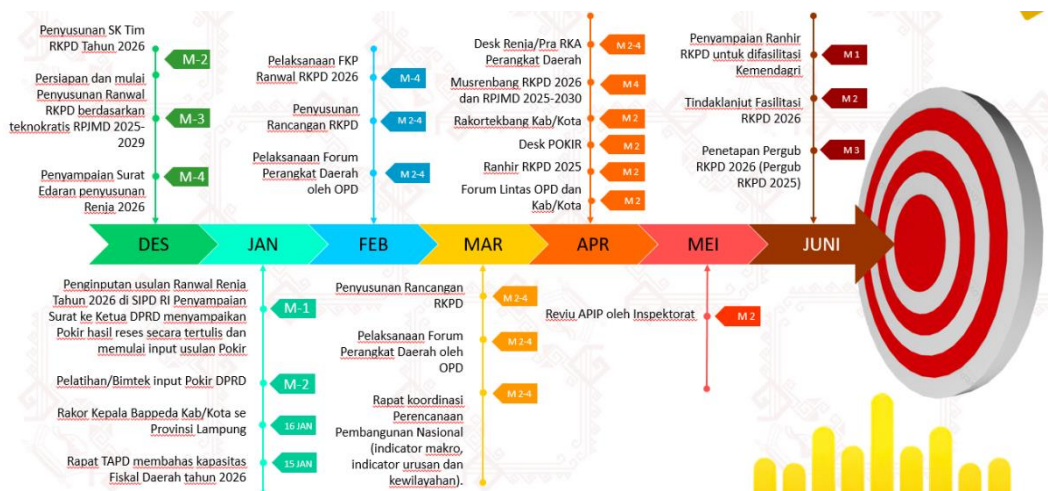
- Proses perencanaan dengan *pendekatan politik* dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.
- Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif *pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif*, substansi RKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah diperkaya pula dengan informasi berupa saran/masukan yang dihimpun dari kelompok akademisi, asosiasi profesi, pelaku dunia usaha, kalangan pers, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, yang dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2026. Dengan demikian, produk perencanaan yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan telah pula memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance*.
- Penyusunan RKPD merupakan kesatuan rangkaian dari *proses pendekatan perencanaan pembangunan secara bawah-atas (bottom-up)*, dimulai dari: Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan, Musrenbang kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Musrenbang Provinsi Lampung hingga Musrenbang Nasional; bertujuan untuk menyerap aspirasi dan penyampaian usulan kegiatan pembangunan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang.
- Dalam hal proses *pendekatan perencanaan secara atas-bawah (top-down)*, penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 juga dipaduserasikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan

memperhatikan peraturan maupun kebijakan nasional lainnya.

Berdasarkan pendekatan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan Rapat Koordinasi Perencanaan Bappeda kabupaten/kota se Provinsi Lampung sekaligus *kick off* Penyusunan Perencanaan Tahun 2026, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, Musrenbang Kabupaten/Kota, dan diakhiri dengan Musrenbang Provinsi. Pasca pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2026 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas Provinsi Lampung. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2025 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2026 melalui Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 pada bulan Juni 2025.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026



Penyusunan RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan prakiraan maju, berdasarkan urusan yang merupakan

- kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
 3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
 4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 adalah *“Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”* selaras dengan tema RKP 2026, yaitu : *“Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”*.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

- RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencanan Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...).
 27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi

Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);

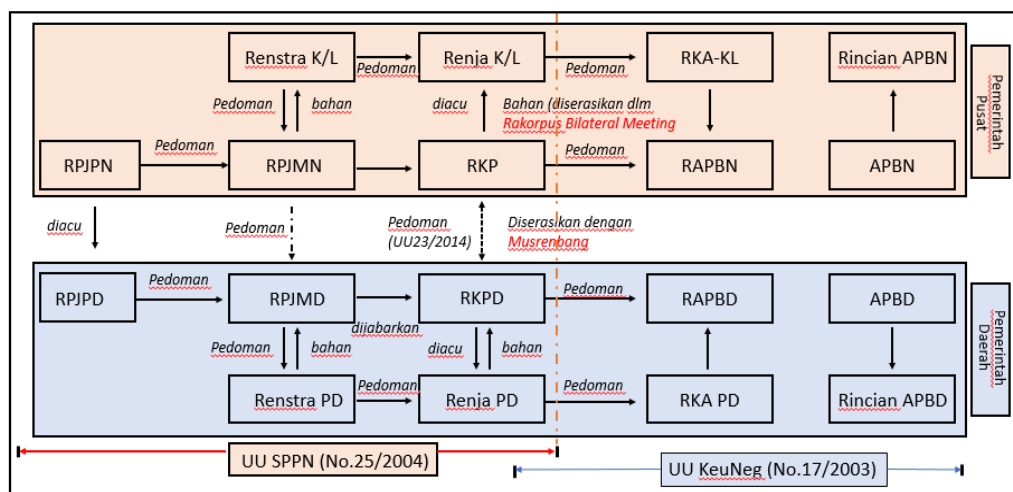
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD sampai dengan tahap penganggaran daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

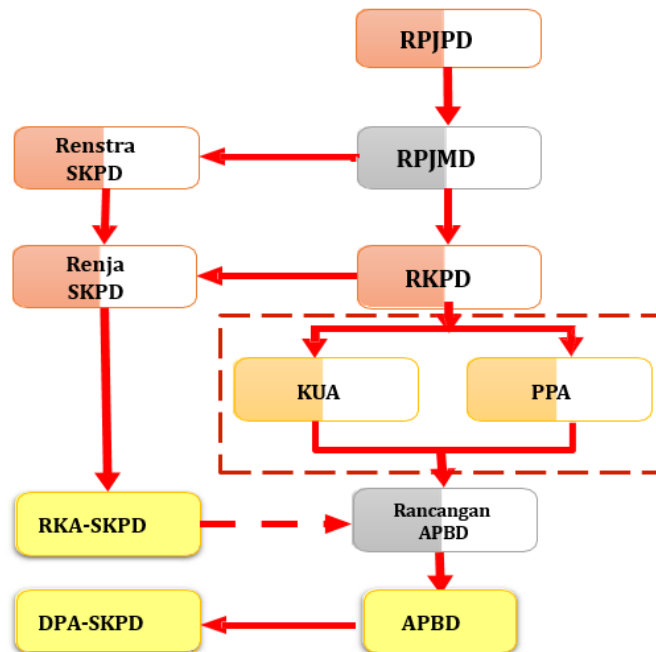
Gambar 1. 2 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau Rancangan KUA PPAS. Rancangan KUA PPAS disusun minimal sesuai target

kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Selanjutnya Rancangan KUA PPAS dibahas menjadi KUA PPAS dan menjadi dasar penyusunan RAPBD.

Gambar 1.3 Hubungan antara RKPD dan APBD



1.4 Maksud dan Tujuan

Secara substantif, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang disinergikan dengan arah kebijakan Nasional dan RKP Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

- 1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan

- (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
 - 3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
 - 4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
 - 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang diusulkan oleh Gubernur Lampung untuk disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2025.
 - 6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.
 - 7) Dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebagai acuan penyusunan RKPD kabupaten dan kota tahun 2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

- 1.3. Hubungan Antardokumen
Menjelaskan tentang keterkaitan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.
- 1.5. Sistematika
Menjelaskan sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan tentang gambaran umum dan capaian pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun lalu dan RPJMD 2019-2024.
Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2024 dan pencapaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2024.
- 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Menjelaskan tinjauan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung hingga tahun 2026, serta arah kebijakan, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2025 dan tahun 2026.
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2026.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2026 serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026.

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026

Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

4.3 Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung

Menjelaskan rencana pembangunan tahun 2026 menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Pokok- Pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2026.

5.2 Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan target capaian sasaran makro kabupaten/kota tahun 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2026, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2026.

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menjelaskan indikator keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

7.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan RKPD tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum dan Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara astronomis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40' - 105°50' Bujur Timur dan 6°45' - 3°45' Lintang Selatan. Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Selat Sunda.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Provinsi Lampung mempunyai posisi strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, cakupan wilayah Lampung meliputi 13 kabupaten dan 2 (dua) kota, dengan 172 pulau dan panjang garis pantai mencapai 1.345,20 km, luas keseluruhan mencapai 4.997.290 ha, terdiri dari luas daratan 3.357.026,40 ha dan wilayah perairan pesisir mencakup wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut provinsi yang berdekatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Lampung memiliki 30 segmen batas wilayah antar kabupaten dan provinsi yang terdiri dari 21 segmen batas antar kabupaten/kota serta 8 (delapan) segmen batas antar Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) segmen batas antar Provinsi Bengkulu. Kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten dengan wilayah terluas yaitu sebesar 13,58 persen dari luas Provinsi Lampung, sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Metro dengan proporsi luasan hanya sebesar 0,21 persen dari total luas wilayah Lampung.

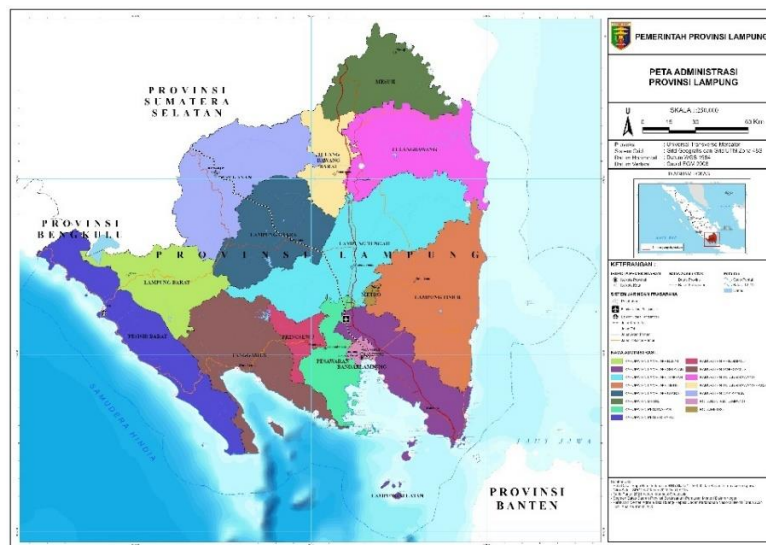
Berikut Provinsi Lampung yang dibagi dalam 15 Kabupaten/Kota, yaitu:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Ibukota	Jumlah Pulau
1	Lampung Tengah	4.559,57	Gunung Sugih	-
2	Lampung Timur	3.860,92	Sukadana	5
3	Way Kanan	3.522,11	Blambangan Umpu	-
4	Tulang Bawang	3.116,06	Menggala	-
5	Tanggamus	2.947,59	Kota Agung	76
6	Pesisir Barat	2.939,60	Krui	3
7	Lampung Utara	2.669,30	Kotabumi	-
8	Lampung Selatan	2.227,38	Kalianda	50
9	Mesuji	2.200,41	Wiralaga Mulya	-
10	Lampung Barat	2.107,99	Liwa	-
11	Pesawaran	1.288,08	Gedong Tataan	36
12	Tulang Bawang Barat	1.257,09	Panaragan	-
13	Pringsewu	617,19	Pringsewu	-
14	Kota Bandar Lampung	183,75	Bandar Lampung	2
15	Kota Metro	73,21	Metro	-
Provinsi Lampung		33.570,26		172

Sumber: Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Lampung



Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2023

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Lampung dibagi dalam 5 (lima) unit topografi meliputi daerah topografis berbukit sampai bergunung, daerah topografis berombak sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah dataran

rawa pasang surut dan daerah *river* basin. Kemiringan lereng Provinsi Lampung didominasi kemiringan <2% seluas 1.359.206,7 ha. Kemiringan 2-8% seluas 1.161.679,4 ha yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Ketinggian di Provinsi Lampung terbagi menjadi beberapa klasifikasi ketinggian dengan ketinggian yang mendominasi yaitu pada ketinggian <200 mdpl dengan luas 2.558.180,9 ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Geologi di Provinsi Lampung didominasi oleh jenis Formasi Lampung dengan luas 585.365,98 ha atau 17,44% dan Formasi Ranau dengan luas 482.602,68 ha atau 14,38%. Jenis tanah di Provinsi Lampung terdiri dari *Andaquepts*; *Tropaquepts*, *Dystrandepts*; *Eutrandepts*; *Dystrandepts*, *Humitropepts*, *Eutropepts*, *Fluvaquents*. Jenis tanah dominan berupa *Tropudults*; *Dystropepts*; *Haplorthox* dengan luas sekitar 1.361.278,6 ha atau 40,54 % dari total luas wilayah Provinsi Lampung.

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung yang terbesar yaitu DAS Tulang Bawang dengan luas 946.428,81 Ha, DAS Seputih seluas 752.388,09 Ha, DAS Sekampung seluas 482.198,31 Ha dan DAS Mesuji seluas 277.370,52 Ha. Terdapat 9 (sembilan) Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Lampung dengan luas total 3.357.463,5 ha meliputi CAT Bandar Lampung, CAT Baturaja, CAT Gedung Meneng, CAT Kalianda, CAT Kota Agung, CAT Metro-Kotabumi, CAT Ranau, dan CAT Talang Padang. CAT Metro-Kotabumi merupakan CAT paling besar dengan luas 2.043.098,1 ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Lampung.

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata rata berkisar antara 26°C - 28°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan setiap

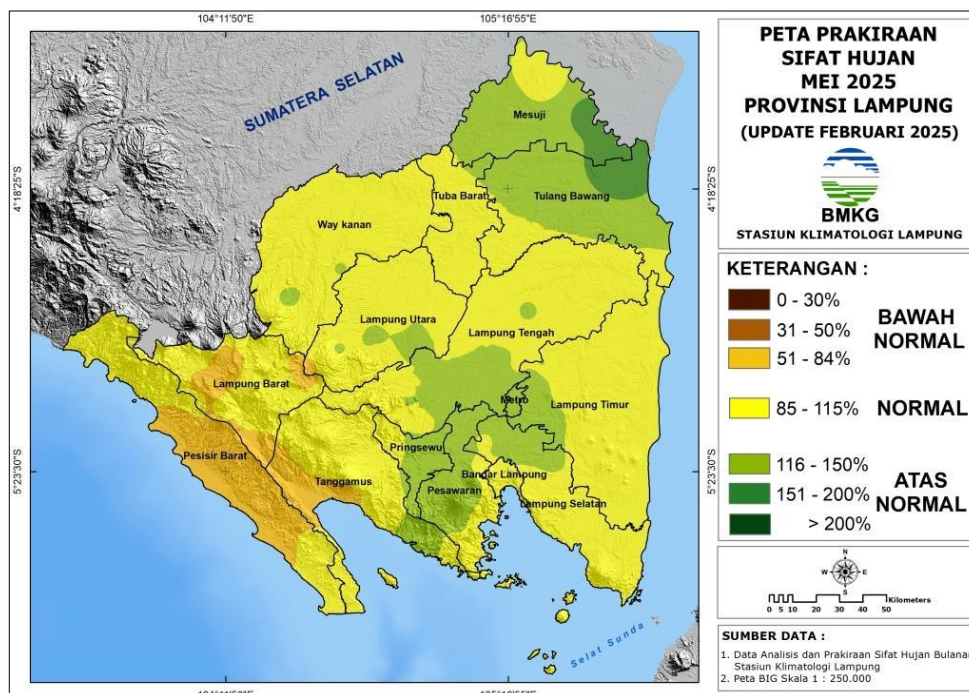
tahunnya sebesar 168,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan adalah antara 1.500 s/d 3.500 mm.

Tabel 2.2 Curah Hujan Rata-Rata per Tahun (Mm)

No.	Kabupaten/ Kota	Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan (mm)				
		<1.800	1.800-2.500	2.500-2.800	2.800-3.000	>3.000
1	Bandar Lampung	-	1.95	-	-	-
2	Lampung Barat	-	2.301	-	-	-
3	Lampung Selatan	-	1.994	-	-	-
4	Lampung Tengah	-	2.22	-	-	-
5	Lampung Timur	-	2.147	-	-	-
6	Lampung Utara	-	2.373	-	-	-
7	Mesuji	1.726	-	-	-	-
8	Metro	-	2.164	-	-	-
9	Pesawaran	-	1.905	-	-	-
10	Pesisir Barat	-	-	-	2.828	-
11	Tanggamus	-	2.067	-	-	-
12	Pringsewu	1.696	-	-	-	-
13	Tulang Bawang Barat	-	2.233	-	-	-
14	Tulang Bawang	-	2.155	-	-	-
15	Way Kanan	-	2.442	-	-	-

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, 2022

Gambar 2.2 Peta Klimatologi Provinsi Lampung



Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, 2025

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Kondisi potensi pengembangan wilayah dapat ditinjau dari rencana tata ruang. Berdasarkan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 dengan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis sebagai berikut :

1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur wilayah provinsi Lampung adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem pusat permukiman di Provinsi Lampung didasarkan pada penetapan sistem perkotaan di dalam RTRWN Tahun 2018-2038. Untuk mendorong pertumbuhan pengembangan wilayah, maka arahan sistem pusat perkotaan Provinsi Lampung meliputi:

A. Rencana Sistem Pusat Pelayanan

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi; PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Arahan sistem perkotaan di Kota Bandar Lampung,

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi; PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Arahkan sistem perkotaan di Kota Metro, Kawasan Perkotaan Kotabumi (Lampung Utara), Kawasan Perkotaan Liwa (Lampung Barat), Kawasan Perkotaan Kalianda (Lampung Selatan), Kawasan Perkotaan Kotaagung (Tanggamus), Kawasan Perkotaan Menggala (Tulang Bawang).
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Arahkan sistem pusat permukiman di kawasan perkotaan Bakauheni (Lampung Selatan), kawasan perkotaan Tanjung Bintang (Lampung Selatan), kawasan perkotaan Sidomulyo (Lampung Selatan), kawasan perkotaan Unit II Banjar Agung (Tulang Bawang), kawasan perkotaan Seputih Banyak dan Kalirejo (Lampung Tengah), kawasan perkotaan Way Jepara (Lampung Timur), kawasan perkotaan Fajar Bulan (Lampung Barat), kawasan perkotaan Labuhan Maringgai (Lampung Timur), kawasan perkotaan Bukit Kemuning (Lampung Utara), kawasan perkotaan Wiralaga (Mesuji), kawasan perkotaan Wonosobo (Tanggamus), kawasan perkotaan Natar-Jati Agung (Lampung Selatan), Kawasan Perkotaan Sukadana (Lampung Timur), Kawasan Perkotaan Pringsewu (Pringsewu), Kawasan Perkotaan Gedong Tataan (Pesawaran), Kawasan Perkotaan Krui (Pesisir Barat), Kawasan Perkotaan Simpang Pematang (Mesuji), Kawasan Perkotaan Panaragan (Tulang Bawang Barat), Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu (Way Kanan), Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar - Bandar Jaya - Gunung Sugih (Terbagus) (Lampung Tengah), Kawasan Perkotaan Lumbok Seminung (Lampung Barat); dan Kawasan Perkotaan Pura Jaya (Lampung Barat).

Gambar 2. 3 Struktur Ruang Provinsi Lampung



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

A. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

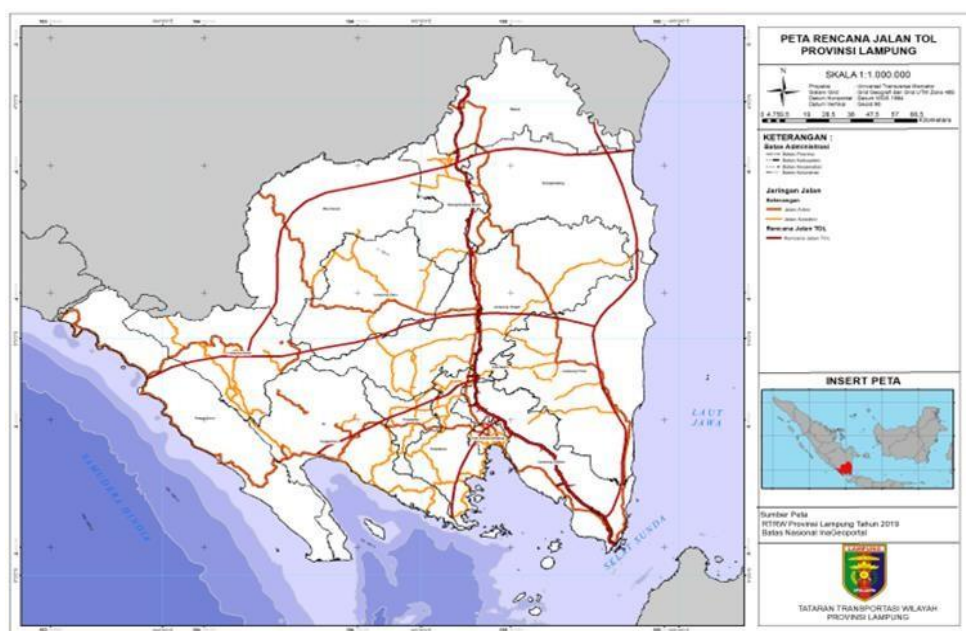
Jaringan jalan, merupakan satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, pada Pasal 9 dijelaskan bahwa Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala. Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, disebutkan bahwa persyaratan teknis untuk jalan diantaranya:

1. Jalan Arteri, Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2022, jalan arteri primer sejumlah 44 ruas jalan;
2. Jalan Kolektor, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022, jalan arteri primer sejumlah 21 ruas jalan; berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/297/V.03/HK/2023 tentang Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor

Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer dan Semua Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder serta Jalan Strategis Provinsi sejumlah 98 ruas jalan menurut fungsinya berupa Jalan Strategis Provinsi, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-2, dengan panjang 1.695,379 km;

3. Jalan Tol, Pengembangan jalan tol di Provinsi Lampung, meliputi 8 (delapan) ruas jalan;
4. Terminal Penumpang, Terminal Tipe A, meliputi: Terminal Rajabasa di (Bandar Lampung), dan Terminal Betan Subing (Lampung Tengah). Saat ini terdapat Terminal Tipe B yaitu Terminal 16C Mulyojati dan Terminal Propau dan direncanakan akan dikembangkan 15 terminal Tipe B yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung;
5. Terminal Barang, Rencana pengembangan Terminal Agribisnis di kawasan industri Way Pisang dan Terminal Barang Gayam;
6. Jembatan Timbang, Rencana pengembangan Jembatan Timbang Way Urang, Jembatan Timbang Simpang Pematang dan Jembatan Timbang Blambangan Umpu.

Gambar 2.4 Peta Rencana Jalan Tol Provinsi Lampung



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

Sistem Jaringan Kereta Api, Provinsi Lampung mempunyai jalur kereta api antara Bandar Lampung – Palembang, yang merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api di Sumatera Bagian Selatan yang dioperasikan oleh PT Kereta Api (Persero) Divre IV Tanjung Karang, selain bersifat merakyat (SAUM/sarana angkutan umum massal) dan ekonomis juga dapat mengurangi beban jalan. Oleh karena itu, rencana pengembangan sistem jaringan kereta api di Provinsi Lampung meliputi, Jaringan dan Layanan Kereta Api antar Kota, Jaringan dan Layanan Kereta Api Perkotaan dan Stasiun Kereta Api. Jaringan jalur kereta api yang terdapat di Provinsi Lampung diantaranya : Prabumulih (Sumatera Selatan) - Tegineneng - Tarahan; Reaktivasi jalur menuju Pelabuhan Panjang; dan beberapa rencana pengembangan antara lain : 1) Rencana jalur kereta api ganda (*double track*) Tanjung Karang - Kertapati; 2) Rencana jalur kereta api ganda (*double track*) Tanjung Karang - Pringsewu; 3) Rencana Shortcut Tegineneng - ITERA - Tarahan; 4) Rencana jalur Bandar Lampung - Bakauheni; 5) Terbanggi Besar - Unit II; dan Unit II - Simpang Pematang.

Sistem Jaringan (SDP) Sungai, Danau dan Penyeberangan, dimanfaatkan sebagai alternatif angkutan penumpang dan barang di wilayah Provinsi Lampung melalui jalur sungai dan danau. Selain dimanfaatkan sebagai sarana transportasi juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata air menuju objek-objek wisata yang ada di kabupaten/kota. Pengembangan jaringan sungai, danau dan penyeberangan didukung dengan pengelolaan dan peningkatan sarana dan prasarana jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung angkutan penumpang dan sumberdaya alam serta transportasi logistik.

Pelabuhan sungai dan danau berdasarkan Kepmenhub Nomor KP 432 Tahun 2017, pelabuhan sungai dan danau di Provinsi Lampung meliputi: 1) Pelabuhan Pagar Dewa; 2) Pelabuhan Dermaga Lumbok; 3) Pelabuhan Sukau; 4) Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung; 5) Pelabuhan Wiralaga; 6) Pelabuhan Mesuji Timur; 7) Pelabuhan Sungai Sidang; 8) Pelabuhan Dermaga Sungai Cabang Way Seputih; 9) Pelabuhan Dermaga Sungai Kota Terpadu Mandiri SP.VIII; 10) Pelabuhan Dermaga Kuala Teladas; 11) Pelabuhan Dermaga Panaragan; 12) Pelabuhan Dermaga Karta; dan 13) Pelabuhan Dermaga Gunung Terang.

Pelabuhan penyeberangan di Provinsi Lampung meliputi: 1) Pelabuhan Bakauheni; 2) Pelabuhan Ketapang; 3) Pelabuhan Tabuan; 4) Pelabuhan

Madang; 5) Pelabuhan Pulau Sebesi; 6) Pelabuhan Canti; 7) Pelabuhan Teluk Betung dan Rencana Pelabuhan di Tanah Merah di Kabupaten Mesuji. Pelabuhan Lintas penyeberangan antarnegara di Provinsi Lampung meliputi: Kota Agung di Perairan Teluk Semangka; dan Panjang di Perairan Teluk Lampung. Sedangkan Pelabuhan Lintas penyeberangan antar provinsi berada di Lempasing di Kota Bandar Lampung.

Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi pelabuhan laut dan pelayaran di laut. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. Adapun rencana pengembangan pelabuhan laut yang terdapat di Provinsi Lampung berdasarkan KepMen Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, meliputi: Pelabuhan utama adalah Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung. Pelabuhan Pengumpul meliputi Pelabuhan Kota Agung/Tanjung Balai di Kabupaten Tanggamus. Pelabuhan pengumpan regional, meliputi: 1) Pelabuhan Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan; 2) Pelabuhan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur; 3) Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang; 4) Pelabuhan Mesuji di Kabupaten Mesuji; dan 5) Pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung.

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai dan danau. Adapun alur pelayaran berdasarkan RZWP3K Provinsi Lampung meliputi alur pelayaran internasional/nasional. Alur Pelayaran terbagi menjadi alur pelayaran umum dan perlintasan, alur-pelayaran masuk pelabuhan; dan alur-pelayaran khusus.

- Alur pelayanan umum dan perlintasan meliputi Alur Laut Kepulauan Indonesia/ALKI Perairan Selat Sunda; dan Perairan Timur Lampung.
- Alur Pelayaran masuk pelabuhan meliputi: Pelabuhan Kuala Penet; Pelabuhan Labuhan Maringgai; Pelabuhan Ketapang; Pelabuhan Muara Piluk; Pelabuhan Kalianda; Pelabuhan Sebesi; Pelabuhan Pahawang; Pelabuhan Siuncal; Pelabuhan Legundi; Pelabuhan Penyandingan; Pelabuhan Tegineneng; Pelabuhan P. Tabuan; Pelabuhan Kota Agung; Pelabuhan Pematang Sawa; Pelabuhan Way Haru; Pelabuhan P. Betuah; Pelabuhan Siging; dan Pelabuhan Tanjung Setia.

- Alur pelayaran khusus meliputi: Bakauheni - Merak di Kabupaten Lampung Selatan; dan Merak - Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan.
- Alur-pelayaran di laut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Sistem Jaringan Transportasi Udara, Sistem jaringan transportasi udara di Provinsi Lampung terdiri atas: 1) Bandar Udara pengumpul berada di Bandar Udara Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan. 2) Bandar Udara pengumpan meliputi: Bandar Udara Muhammad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat; dan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan (sebagai bandar udara pengumpan dan bandara khusus TNI).

B. Rencana Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pentingnya energi listrik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari tiap penduduk membuat pentingnya untuk memproyeksikan kebutuhan listrik tiap individu agar dapat tercukupi dalam masa mendatang.

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan :

1. Infrastruktur Ketenagalistrikan meliputi: Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi : PLTA Besai, PLTA Batu Tegi, dan PLTA Semangka.
2. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi : PLTU Tarahan, PLTU Sebalang, PLTU Gunung Sugih, PLTU Gunung Sugih, dan PLTU Pelabuhan Tarahan.
3. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi: PLTP Ulu Belu, dan Rencana PLTP Rajabasa, Rencana PLTP Suoh Sekincau dan Rencana PLTP Way Ratai.
4. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi: PLTD Tarahan, PLTD Teluk Betung, PLTD Tegineneng; PLTD Pulau Sebesi; PLTD Pulau Tabuan; PLTD Pulau Legundi; PLTD Pulau Pahawang; PLTD Pulau Pisang; dan PLTD Natar.

5. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang meliputi: PLTG MPP Tarahan; dan PLTG Sebalang.
6. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang ditetapkan di PLTMG Sutami di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang ditetapkan di PLTBg Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah.
8. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) meliputi: PLTMH Batu Brak; PLTMH Melesom 2 (masih progres); PLTMH Besai Kemu; PLTMH Sumber Jaya; PLTMH Sukarame; PLTMH Kukusan; PLTMH Pahiton; dan PLTMH Tiga Orehon Putra.
9. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang direncanakan di: PLTS Way Tias; PLTS Way Haru; PLTS Margomulyo; PLTS Suka Maju; Rencana PLTS Pulau Legundi; Rencana PLTS Pulau Tabuhan; dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) meliputi PLTBm Bumiwaras dan PLTBm Bumi Acid Jaya.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

1. Jaringan transmisi tenaga listrik bersumber dari energi non terbarukan yang bertujuan untuk menghubungkan provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, meliputi: Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) dengan tegangan 500 KV; Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kekuatan 275 KV; Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) dengan kekuatan 150 KV; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150 KV;
2. Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik meliputi: Koridor Labuhan Maringgai-Tanjung Pakis; Koridor Lampung Barat-Pulau Pisang; Koridor Zona Ekonomi Eksklusif-Laut Jawa; Legundi, Punduh Pidada; Pahawang; Kabel Laut Pulau Pisang; dan Potensi Kabel Laut Tegal Mas;

3. Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota di Wilayah Provinsi.

C. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Lampung terdiri atas:

1. Jaringan Tetap meliputi; Koridor Kalianda – Anyer; Koridor Lampung Barat - Pulau Pisang; dan Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi Koridor ZEE - Laut Jawa.
2. Jaringan Bergerak berupa jaringan 2G, 3G dan 4G tersebar di Kabupaten dan Kota.

D. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pembangunan waduk diarahkan untuk fungsi ekologis, ekosistem, konservasi sumber daya air, pengendalian banjir serta untuk menyuplai ke kawasan-kawasan strategis dan Pemanfaatan sumberdaya air guna menunjang program pemanfaatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Pengembangan Sistem jaringan sumber daya air meliputi: Sistem Jaringan Irigasi meliputi:

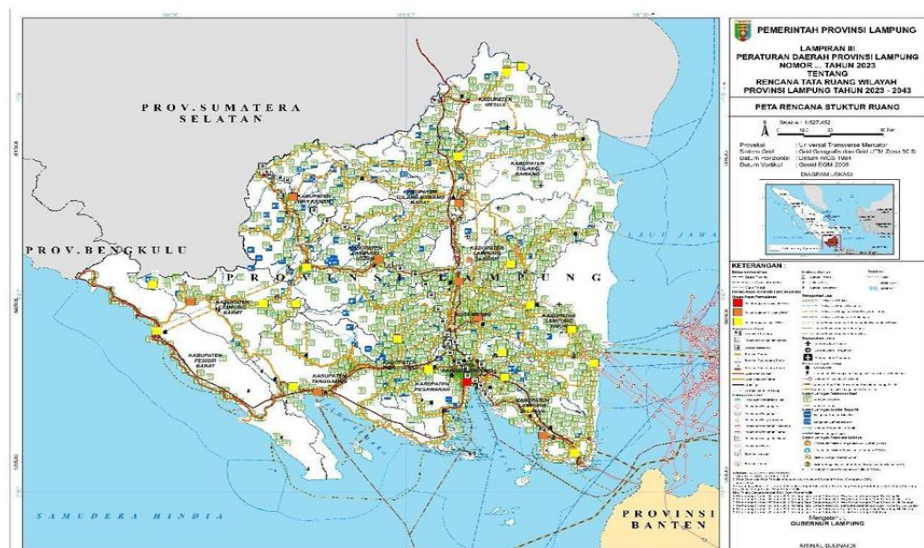
1. Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas provinsi, yaitu: D.I Komering Selatan/Way Komering; Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota, Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota;
2. Sistem Pengendalian Banjir berupa bangunan pengendalian banjir meliputi: Bendungan Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus; Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur; Banjir Bendungan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur; Banjir Bendungan Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara; dan Banjir Bendungan Way Sabu di Kabupaten Pesawaran;
3. Bangunan Sumber Daya Air meliputi bangunan prasarana air baku berupa Bendung irigasi sebanyak 49 Bendung dan Bendungan sebanyak 8 Bendungan;

4. Bangunan prasarana air baku berupa Embung berada di seluruh Kabupaten dan Kota;
5. Sumber air baku meliputi Danau Ranau dan Danau Suoh di Kabupaten Lampung Barat;

E. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam pembangunan dan pengembangan air minum Provinsi Lampung, cakupan pelayanan masih merupakan tujuan utama. Oleh karena itu, pembangunan konstruksi prasarana dan sarana air minum menjadi kegiatan utama sedangkan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi masih cenderung terabaikan. Kebijakan pengembangan air minum harus mampu menjangkau semua daerah kawasan permukiman perkotaan, khususnya daerah rawan air serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) di Provinsi Lampung meliputi: SPAM Regional Bandar Lampung; dan SPAM Regional Way Sabu/Way Sabu Atas/Pesawaran;
2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAL). Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah Provinsi Lampung bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Gambar 2. 5 Peta Struktur Ruang Provinsi Lampung



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi Lampung yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya Provinsi Lampung. Rencana pola ruang wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023- 2043 yang meliputi Kawasan Peruntukan Lindung dan Kawasan Peruntukan Budidaya seluas kurang lebih 4.990.415 ha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Lampung

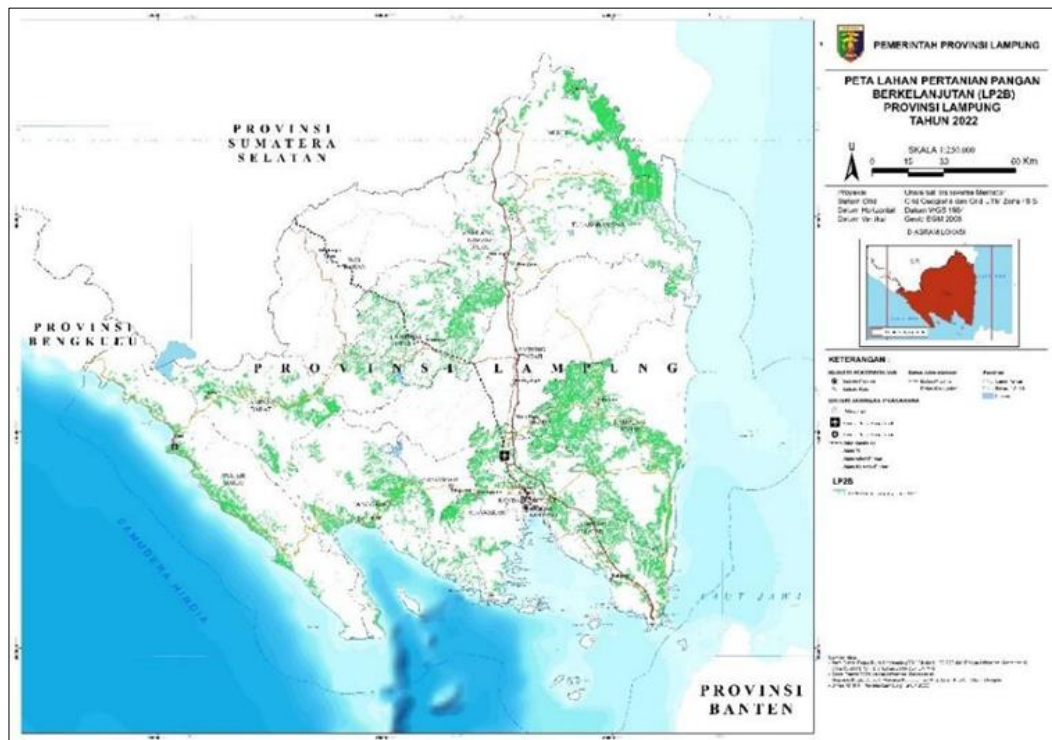
RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
Kawasan Peruntukan Lindung	920.839	18,45
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	321.753	34,94
Kawasan Konservasi	501.114	54,42
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	97.632	10,60
Kawasan Ekosistem Mangrove	340	0,04
Kawasan Peruntukan Budi Daya	4.047.342	81,55
Kawasan Hutan Produksi	197.881	4,86
Kawasan Pertanian	2.118.565	52,06
Kawasan Perikanan	1.430.824	35,16
Kawasan Pertambangan dan Energi	26.513	0,65
Kawasan Peruntukan Industri	22.417	0,55
Kawasan Pariwisata	28.235	0,69
Kawasan Permukiman	213.205	5,24
Kawasan Transportasi	29.827	0,73
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2.109	0,05
TOTAL	4.990.415	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Lampung

Pengembangan pertanian pangan diarahkan untuk tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan kebijakan pengembangan Lahan Sawah Lestari/Abadi (Lahan Pertanian Berkelanjutan) di setiap kabupaten dan kota. Karakteristik wilayah di Provinsi Lampung didominasi dari kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 2.118.565 ha (52,06%) dari luas Provinsi Lampung tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Kota Metro, Kota Bandar Lampung. Arah pengembangan kawasan pertanian meliputi:

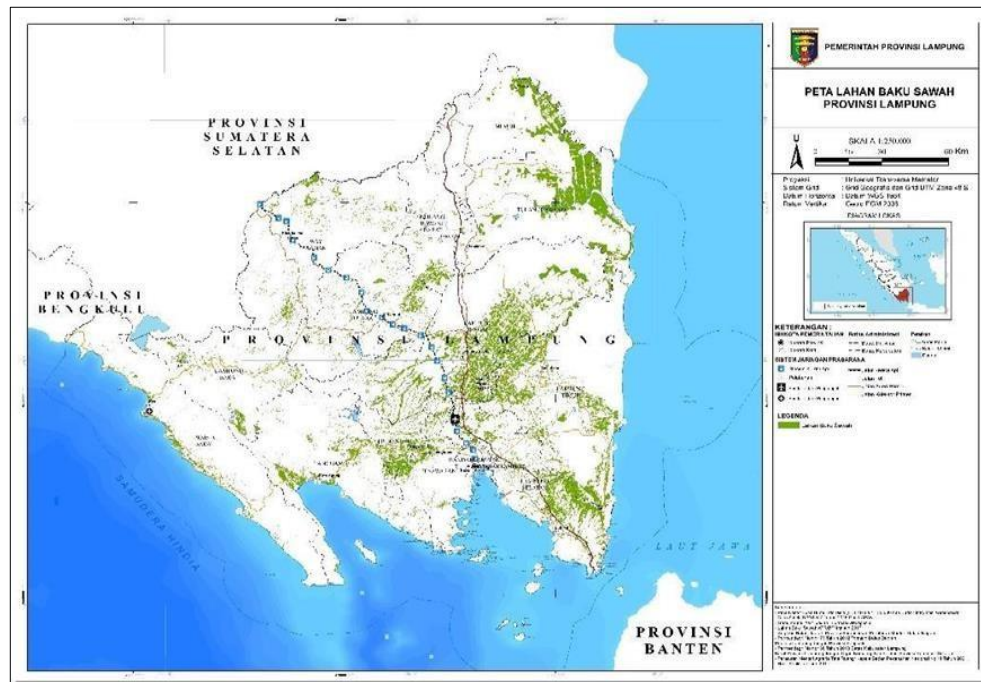
- Perwujudan kawasan tanaman pangan
- Pengembangan kawasan perkebunan
- Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) kawasan pertanian juga meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Baku Sawah (LBS).

Gambar 2. 6 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Provinsi Lampung Tahun 2022



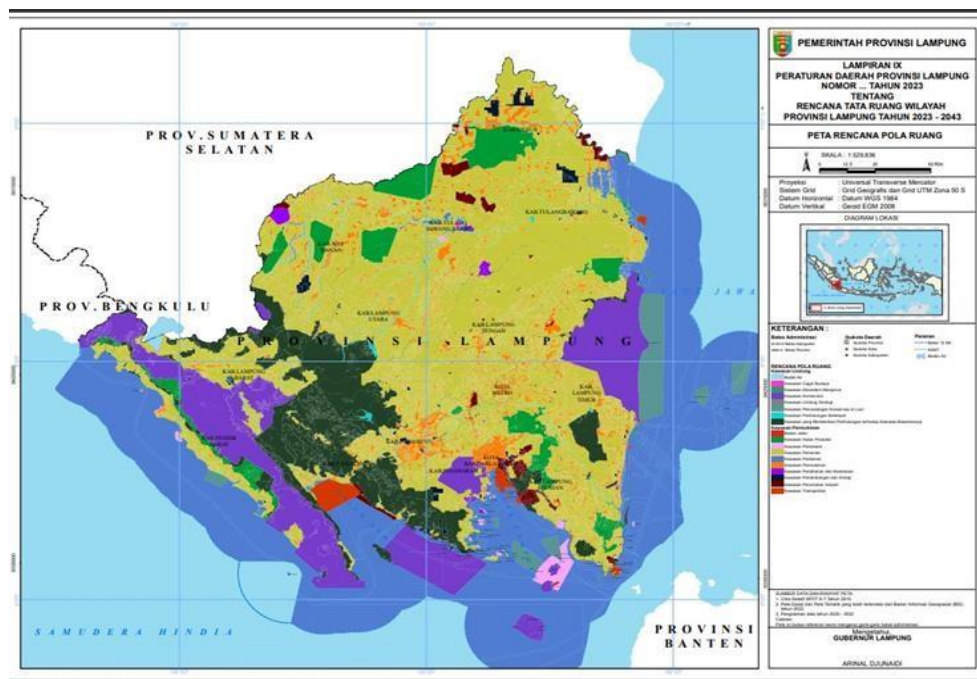
Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

Luas lahan baku sawah di Provinsi Lampung seluas 361.699 ha. Lahan baku sawah terluas di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Tengah seluas 79.664 ha.



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

3. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Lampung termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi: Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung) dan Kawasan Selat Sunda (Provinsi Lampung dan Banten)

a. Kawasan Strategis Provinsi Lampung

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Kawasan Strategis Provinsi Lampung, ditetapkan berdasarkan dua sudut kepentingan diantaranya kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung meliputi:

KSP	Deliniasi	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
Kawasan Metropolitan Lampung dan sekitarnya	Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Pesawaran, Lampung Timur dan Lampung Tengah	Mewujudkan Kawasan Metropolitan Lampung dan sekitarnya sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Industri, dan pendidikan yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan	• Pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi • Mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau • Menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan • Ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan,

KSP	Deliniasi	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
			jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi.
Kawasan Pariwisata Pesisir Barat	Kabupaten Pesisir Barat (kawasan pantai Labuan Jukung dan tanjung setia yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil, dan Kabupaten Lampung Barat (Danau Ranau)	Mewujudkan Pariwisata Pesisir Barat sebagai pusat pariwisata skala internasional	• Pengembangan wisata bahari dan ekowisata berbasis kelestarian alam • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata • Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata
Kawasan Teluk Lampung	Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Tanggamus, Pesawaran	Mewujudkan kawasan Teluk Lampung sebagai pusat pengembangan Pariwisata, Perikanan, industri didukung oleh infrastruktur terpadu	• Pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Wisata Teluk Lampung sebagai Ecotourism Centre terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di Teluk Lampung • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, dan perikanan • Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perikanan

Adapun deliniasi kawasan strategis dari sudut kepentingan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi:

KSP	Deliniasi	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	Kabupaten Pesawaran (Gedong Tataan, Kedondong, Padang Cermin, Way Lima) dan Kota Bandar Lampung (Teluk Betung Barat, Teluk Betung	Mewujudkan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman sebagai kawasan konservasi serta ekowisata	• Pelestarian kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman • pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan • pengembangan kegiatan ekowisata dengan memperhatikan lingkungan hidup

b. Tinjauan Aglomerasi Metropolitan Bandar Lampung Raya

Berdasarkan kajian awal rencana pengembangan aglomerasi kawasan metropolitan bandar lampung raya tahun 2022 lingkup deliniasi kawasan metropolitan meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah Dan Kabupaten Pringsewu. Deliniasi tersebut diperoleh berdasarkan serangkaian analisa ekologi, sosial dan ekonomi wilayah.

1. Potensi dan Masalah

Adapun potensi dan masalah yang ditemukan dari kajian tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Daya dukung lahan pada wilayah aglomerasi sebagian besar memiliki klasifikasi kemampuan lahan pada kategori tinggi, sehingga pada aspek lingkungan/ekologi dapat mendukung pengembangan kawasan Metropolitan;
- b. Pada aspek kependudukan (tenaga kerja) beberapa wilayah kecamatan sudah menunjukkan kriteria dari kawasan metropolitan yaitu proporsi tenaga kerja pada bidang pertanian < 25 %;
- c. Berdasarkan analisis Tutupan Lahan Permukiman pada tahun 2010-2020, beberapa wilayah yang termasuk dalam delineasi kawasan metropolitan mengalami perkembangan secara signifikan diantaranya:
 - Bandar Lampung (Kecamatan Rajabasa, Sukabumi, Tanjung Senang);
 - Metro (Kecamatan Metro Utara, Metro Pusat);
 - Lampung Selatan (Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Jatiagung)
 - Lampung Tengah (Kecamatan Gunung sugih, Terbanggi Besar)
 - Lampung Timur (Kecamatan Sekampung, Sekampung Udik, Pekalongan)
 - Pringsewu (Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu)
 - Pesawaran (Kecamatan Gedong Tataan, Negerikaton, Tegineneng)
- d. Berdasarkan kondisi fiskal daerah, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam klasifikasi sedang-sangat tinggi. Selain itu, berdasarkan analisis tipologi klassen, kedua wilayah tersebut masuk dalam kuadran 1 yang berarti bahwa memiliki potensi besar bagi sumber pendapatan daerah, dan berpotensi memiliki tingkat kemakmuran rakyat yang tinggi

- e. Daya Dukung Lahan pada wilayah Kecamatan Kedondong, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, dan Way Lima memiliki klasifikasi kemampuan lahan pada kategori Rendah-Sedang, sehingga pada aspek lingkungan/ekologi akan sangat terbatas dalam mendukung pengembangan kawasan Metropolitan
- f. Pada aspek Kependudukan, di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sebagian besar masih bekerja pada sektor pertanian. Sehingga terdapat batasan-batasan dalam pengembangan kawasan metropolitan
- g. Berdasarkan kondisi fiskal daerah pada Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Pesawaran, dan Pringsewu termasuk dalam klasifikasi sangat rendah-sedang sehingga perlu perhatian dan penanganan khusus dalam meningkatkan kondisi fiskal daerah masing-masing agar dapat mendukung pengembangan kawasan metropolitan
- h. Berdasarkan rasio kemandirian daerah, seluruh wilayah kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan metropolitan masih tergolong dalam klasifikasi rendah. Artinya bahwa masing-masing wilayah masih bergantung pada dana yang berasal dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota masih tergolong rendah. Perlunya untuk memperkuat perekonomian dari seluruh Kab/Kota dalam upaya pengembangan kawasan metropolitan.
- i. Berdasarkan kondisi ekonomi wilayah (analisis tipologi klassen), kabupaten Pesawaran termasuk dalam posisi kuadran 4 (daerah relatif tertinggal). Artinya bahwa Kabupaten tersebut memiliki tingkat pembangunan yang rendah, dan belum sepenuhnya didukung oleh SDM maupun SDA. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas SDM dimasa datang agar dapat mendukung pengembangan kawasan metropolitan.

2. Potensi dan Masalah

Tujuan Pengembangan Aglomerasi Kawasan Metropolitan Bandar Lampung Raya Kota yaitu Bandar Lampung sebagai kota inti yang memiliki peran sebagai PKN dikelilingi oleh kota dan kawasan perkotaan yang memiliki hirarki lebih kecil (PKW dan PKL) dengan fungsi dan peran sesuai dengan karakteristiknya. Secara umum arahan pengembangannya cenderung pada pengembangan pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. Berdasarkan hasil analisis isi (*Content Analysis*) dan tujuan pengembangan

masing-masing kabupaten/kota, maka tujuan Pengembangan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Sekitarnya sebagai Kota Perdagangan dan jasa, Industri, dan Pendidikan yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan”.

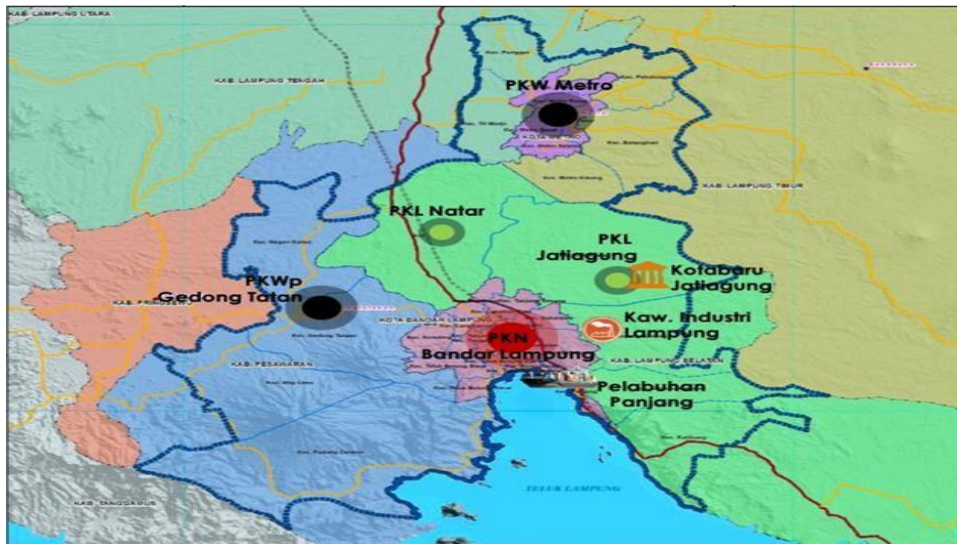
3. Perwujudan Rencana Pembangunan

Prioritas pemanfaatan ruang yang diperoleh adalah program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahap I di 5 (lima) tahun pertama tahun perencanaan. Prioritas pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung adalah:

- a. Perwujudan Struktur Ruang
 - Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu
 - Revitalisasi permukiman kumuh kota
 - Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan umum secara merata
 - Peningkatan status jalan antar kota satelit menjadi jalan provinsi
 - Meningkatkan kapasitas jalan dengan melakukan pelebaran jalan dan desain geometrik jalan
 - Menyediakan lahan parkir sesuai dengan analisis dampak lalu lintas bagi gedung untuk fasilitas umum
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana listrik
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana telekomunikasi
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana drainase
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana sampah
- b. Perwujudan Pola Ruang
 - Pengadaan ruang terbuka hijau diutamakan pada daerah-daerah yang secara alami peka dan dapat berdampak luas
 - Penataan dan pengendalian ruang kota sesuai dengan peruntukannya
 - Penataan bangunan di Teluk Lampung
 - Pengawasan dan pengendalian daerah konservasi
 - Mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan

- Pembinaan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan di sekitar wilayah reklamasi pantai (Teluk Lampung)
- Penyusunan Road Map industri-industri potensial di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung.

Gambar 2. 10 Rencana Aglomerasi Kota Bandar Lampung Raya



Sumber: Paparan Semiar Nasional Undip dan IAP Lampung oleh Ketua umum IAP 2023

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk dari bahaya tertentu. Kawasan rawan bencana yang ada di Provinsi Lampung terdiri dari longsor, gempa bumi dan letusan gunung api.

a. Longsor

Rawan bencana longsor di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan longsor rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan kawasan rawan longsor yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan longsor rendah dengan luas 2.650.713,2 ha, sedangkan luasan rawan longsor tinggi adalah sebesar 195.535,5 ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten hanya Kota Metro tidak termasuk pada bencana longsor tinggi.

Tabel 2.4 Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Bencana Longsor (Ha)			Luas (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	46.105,4	101.414,8	63.279,2	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	208.678,0	10.974,1	3.080,9	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	436.499,4	16.218,7	3.238,9	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	382.858,4	3.506,1	12,4	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	202.272,6	53.460,6	11.197,2	266.930,4
6	Kab. Mesuji	215.352,8	4.666,6	21,9	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	94.530,6	25.852,5	8.428,6	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	154.739,3	97.837,7	41.446,9	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	56.075,0	4.752,7	891,5	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	126.866,6	114.713,0	53.264,9	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	301.625,9	9.865,7	118,1	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	119.806,0	5.843,2	59,5	125.708,8
13	Kab. Way Kanan	284.612,1	57.646,7	9.952,6	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	15.521,1	2.310,8	542,9	18.374,9
15	Kota Metro	7.305,3	16,1	-	7.321,4
Jumlah		2.652.848,4	509.076,9	195.535,50	3.357.463,50

Sumber : BPBD Prov. Lampung

Gambar 2. 11 Peta Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2024 – 2029, Tahun 2024

b. Tsunami

Rawan bencana tsunami di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan

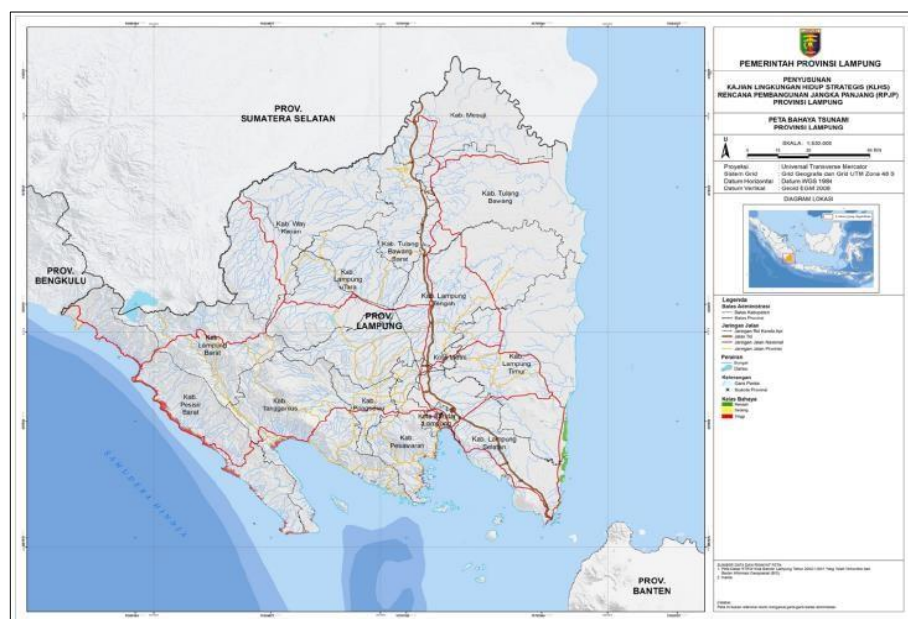
rawan tsunami rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan Kawasan rawan tsunami yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan tsunami tinggi dengan luas 23.868,2 ha yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung dengan luasan rawan tsunami tinggi berada di Kabupaten Pesisir Barat seluas 15.046,9 ha. Sedangkan rawan tsunami sedang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung dengan luas 3.073,6 ha.

Tabel 2. 5 Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Bencana Tsunami (Ha)			Luas (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Selatan	2.214,8	837,5	1.779,5	4.831,8
2	Kab. Lampung Timur	3.317,2	474,2		3.791,4
3	Kab. Pesawaran	116,7	131,4	2.704,2	2.952,4
4	Kab. Pesisir Barat	1.238,5	1.019,0	15.046,9	17.304,4
5	Kab. Tanggamus	469,6	550,5	3.977,5	4.997,6
6	Kab. Tulang Bawang	465,0			465,0
7	Kota Bandar Lampung	61,6	60,9	360,1	482,6
Jumlah		7.883,4	3.037,6	23.868,2	34.852,2

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024

Gambar 2.12 Peta Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov Lampung 2025-2045, Tahun 2024

c. Gempa Bumi

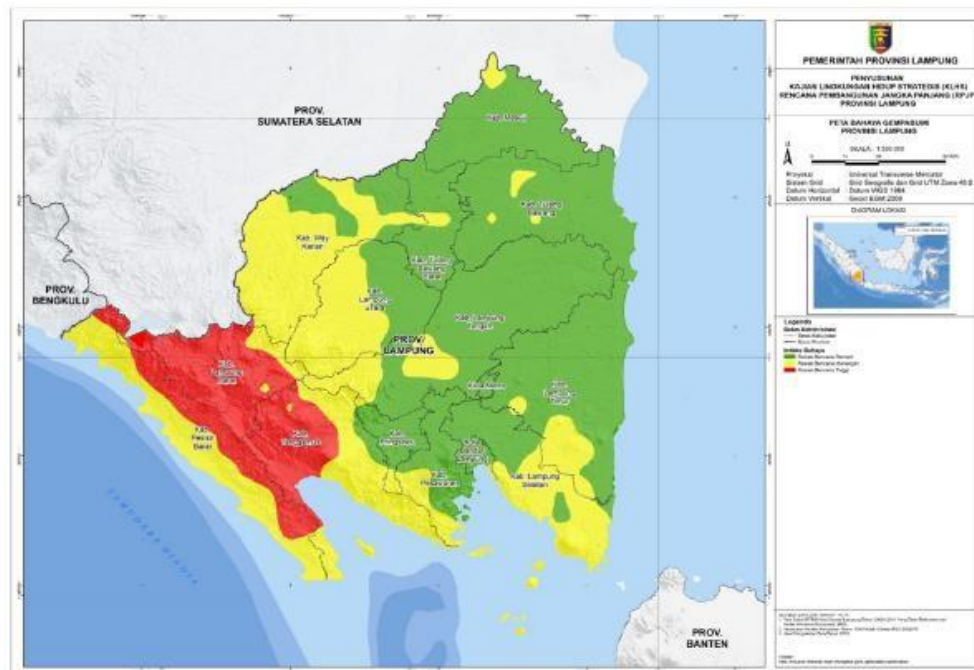
Rawan gempa bumi di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan gempa bumi rendah, gempa bumi menengah dan tinggi, namun dilihat dari luasan kawasan rawan gempa bumi yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan gempa bumi rendah dengan luas 1.804.548,2 ha, sedangkan luasan rawan gempa bumi tinggi adalah sebesar 442.617,1 ha yang tersebar hanya di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2.7 Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Bencana Gempa (Ha)			Luas (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat		24.243,2	186.556,1	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	90.010,3	132.722,7		222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	382.472,0	73.484,9		455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	327.935,0	58.441,9		386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	103.420,9	163.509,5		266.930,4
6	Kab. Mesuji	209.552,7	10.488,7		220.041,4
7	Kab. Pesawaran	92.132,6	36.679,1		128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat		174.945,4	119.078,5	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	53.628,4	8.090,8		61.719,2
10	Kab. Tanggamus	12.970,6	145.811,3	136.062,6	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	301.061,7	10.547,9		311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	118.836,2	6.872,6		125.708,8
13	Kab. Way Kanan	88.075,7	263.215,8	919,8	352.211,4
14	Kota Bandar Lampung	17.130,6	1.244,3		18.374,9
15	Kota Metro	7.321,4			7.321,4
Jumlah		1.804.548,2	1.110.298,2	442.617,10	3.357.463,50

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024

Gambar 2. 13 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov Lampung 2025-2045

d. Letusan Gunung Api

Rawan bencana letusan gunung api di Provinsi Lampung terdiri dari letusan gunung api berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava, berpotensi terhadap aliran lahar hujan, berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar, berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar hujan, berpotensi terlanda aliran lahar, berpotensi terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas, berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm, berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar ukuran kerikil, berpotensi terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar, berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter 2 - 6 cm dan hujan abu lebat, sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan gas vulkanik beracun, sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun, sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat, sering terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas, sering terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar atau bom vulkanik. Namun untuk Kabupaten Lampung Barat rata-rata berada pada rawan bencana letusan gunung api yang berpotensi terlanda hujan abu dan

kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm dengan luas 5.025,7 ha, sedangkan untuk Kabupaten Lampung Selatan berada pada rawan letusan gunung api berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar seluas 9.600,2 ha. Untuk luasan rawan letusan gunung api dengan kategori sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun memiliki luas 860,7 ha.

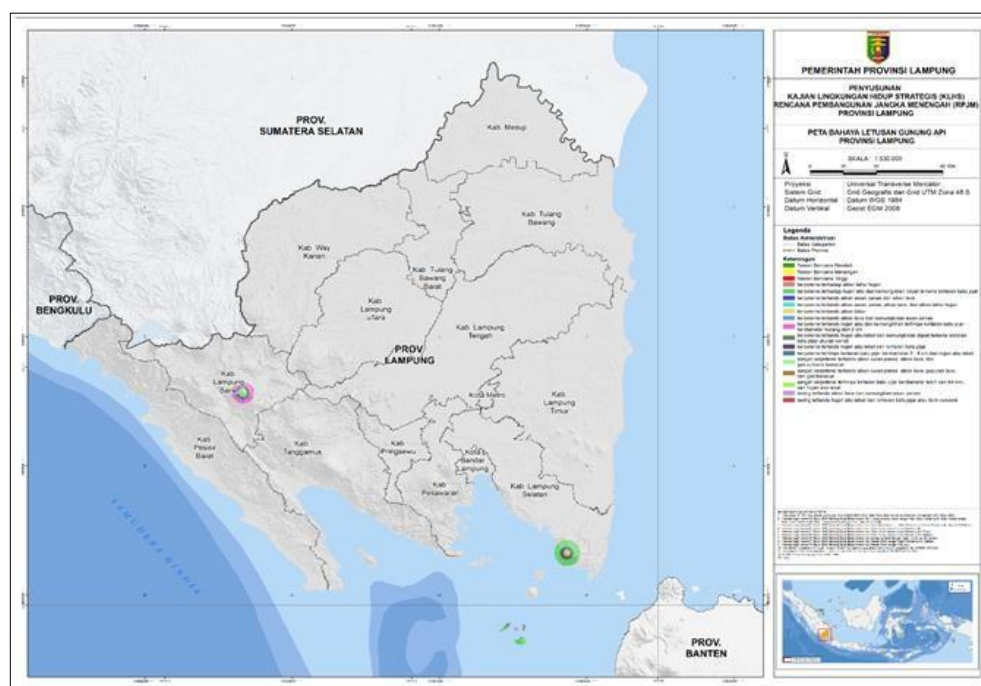
Tabel 2.8 Kondisi Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung

Kabupaten	Rawan Bencana Letusan Gunung Api	Luasan (ha)
Lampung Barat	Berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava	868,92
	Berpotensi terlanda aliran lahar	501,75
	Berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm	5.025,73
	Berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter 2 - 6 cm dan hujan abu lebat	2.119,94
	Sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan gas vulkanik beracun	1.273,55
	Sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat	706,24
	Zona Tidak Bahaya	200.303,22
	Berpotensi terhadap aliran lahar hujan	1.263,49
	Berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar	9.600,20
	Berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar hujan	2.002,62
Lampung Selatan	Berpotensi terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas	22,16
	Berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar ukuran kerikil	798,63
	Berpotensi terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar	2.119,94
	Sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun	860,71
	Sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat	706,24
	Sering terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas	254,54
	Sering terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar atau bom vulkanik	276,70
	Zona Tidak Bahaya	204.827,76
	Zona Tidak Bahaya	455.956,96
	Zona Tidak Bahaya	386.376,91
Lampung Tengah	Zona Tidak Bahaya	266.930,41
Lampung Timur	Zona Tidak Bahaya	220.041,37
Lampung Utara	Zona Tidak Bahaya	
Mesuji	Zona Tidak Bahaya	

Kabupaten	Rawan Bencana Letusan Gunung Api	Luasan (ha)
Pesawaran	Zona Tidak Bahaya	128.811,70
Pesisir Barat	Zona Tidak Bahaya	294.023,95
Pringsewu	Zona Tidak Bahaya	61.719,21
Tanggamus	Zona Tidak Bahaya	294.844,56
Tulang Bawang	Zona Tidak Bahaya	311.609,61
Tulang Bawang Barat	Zona Tidak Bahaya	125.708,76
Way Kanan	Zona Tidak Bahaya	352.211,37
Kota Bandar Lampung	Zona Tidak Bahaya	18.374,90
Kota Metro	Zona Tidak Bahaya	7.321,40
Jumlah		3.357.463,46

Sumber: INARISK BNPB

Gambar 2. 14 Peta Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov Lampung 2025-2029, Tahun 2024

2.1.1.8 Kondisi Demografi

Penduduk Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 9,01 juta jiwa atau tepatnya 9.007.848 jiwa. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, jumlah penduduk Provinsi Lampung berada di posisi ke-8 (delapan) terbanyak di Indonesia atau ke-2 (dua) terbanyak di Pulau Sumatra setelah

provinsi Sumatera Utara. *Share* penduduk Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 3,33 persen sedangkan di Sumatra mencapai 15,38 persen.

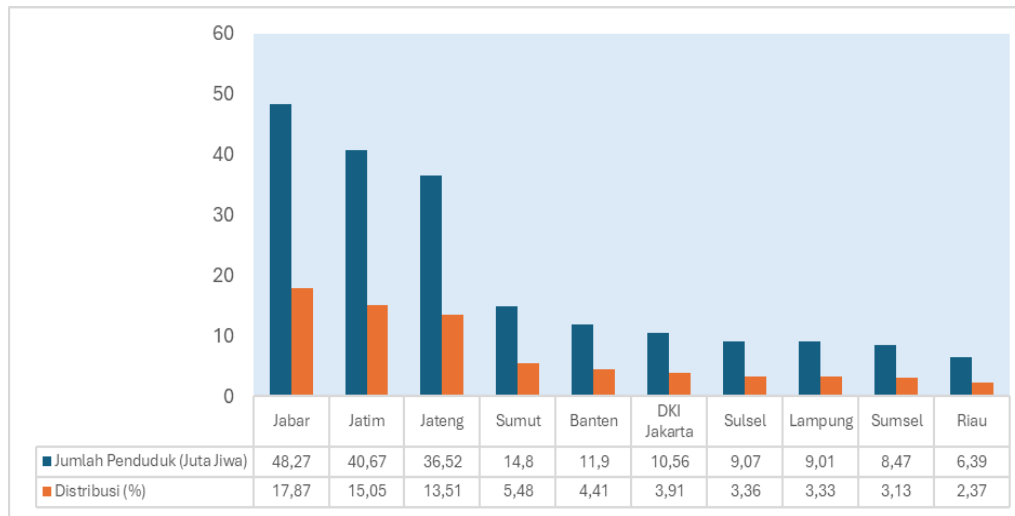
Grafik 2. 15 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Lampung Tahun 1971-2020



Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan publikasi BPS Lampung, sepanjang sensus penduduk yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali di Provinsi Lampung, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Lampung terjadi antara tahun 1971-1980, yang mencapai 5,77 persen. Laju Pertumbuhan penduduk pada periode tersebut jauh lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 2,31 persen. Sementara pada periode selanjutnya 1980–2020, laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi di antara tahun 1990–2000 yang mencapai 1,17 persen (angka nasional mencapai 1,44 persen). Pada periode terakhir, tahun 2010–2020, laju pertumbuhan mencapai 1,65 persen sedangkan angka nasional sebesar 1,25 persen.

Grafik 2. 16 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Distribusinya di Indonesia, Tahun 2020

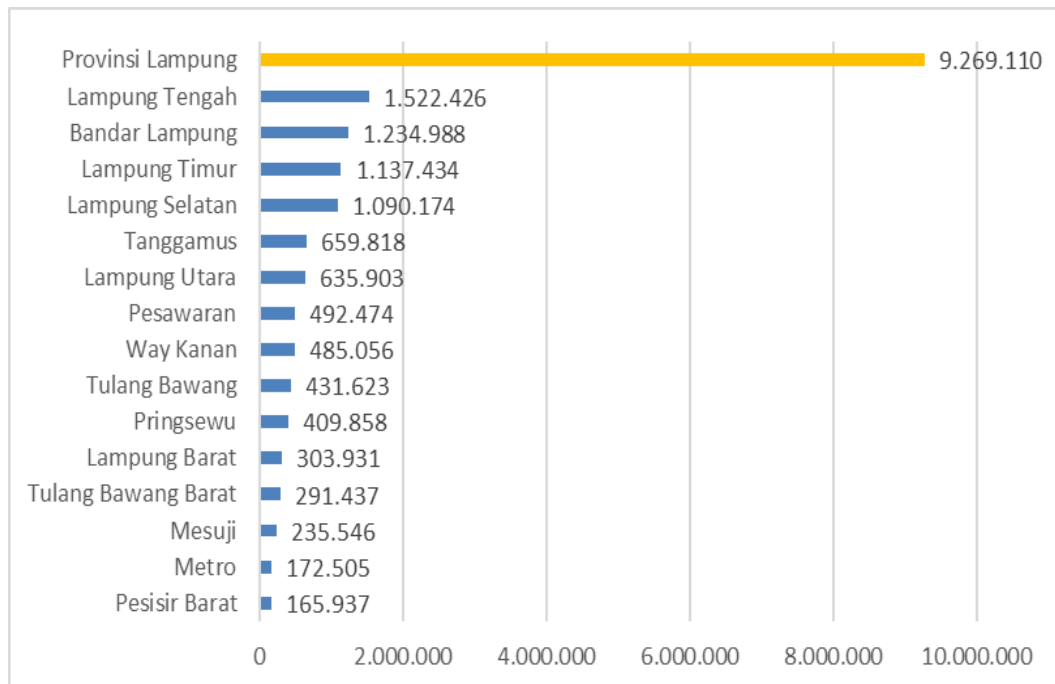


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Dinamika penduduk di 3 (tiga) provinsi terbanyak di Indonesia sepanjang 2010–2020 mengalami tren penurunan kontribusi. Hal ini berbeda dengan kontribusi penduduk di Provinsi Lampung. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 mencapai 18,12 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 17,87 persen. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 mencapai 15,77 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 15,05 persen. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 mencapai 13,63 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 13,51 persen. Sementara itu, distribusi penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2010 mencapai 3,20 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 3,33 persen. Terjadinya pergeseran persentase penduduk di provinsi-provinsi besar (seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) dan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia mengalami dinamika.

Pada Tahun 2023, Kabupaten Lampung Tengah memiliki sumbangan terbesar terhadap total jumlah penduduk Provinsi Lampung yaitu sebesar 1.522.426 Jiwa yang diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 1.234.988 Jiwa, Kabupaten Lampung Timur sebesar 1.137.434 Jiwa, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 1.090.174 Jiwa.

Grafik 2. 17 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2023

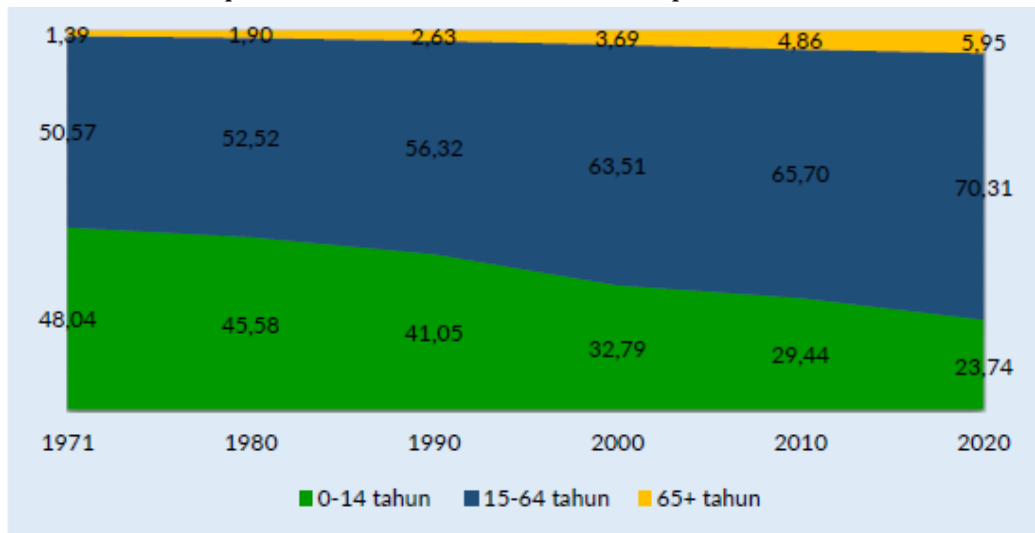


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023

a. Perubahan Struktur Penduduk Lampung

Seiring dengan peristiwa menurunnya tingkat kelahiran sejak tahun 70-an, persentase penduduk usia anak (0–14 tahun) di Provinsi Lampung terus menurun. Pada tahun 1971, persentase penduduk usia anak (0–14 tahun) mencapai 48,04 persen. Periode selanjutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 1980 persentasenya mencapai 45,58 persen, tahun 1990 mencapai 41,05 persen, tahun 2000 mencapai 32,79 persen, tahun 2010 mencapai 29,44 persen, dan tahun 2020 mencapai 23,74 persen. Sementara itu, persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 50,57 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,31 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Lampung masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 70,31 persen penduduknya masih berada di usia produktif.

Grafik 2. 18 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1971-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung

b. Keberadaan Masyarakat Adat

Secara historis, masyarakat asli Lampung yang terdiri dari dua suku adat besar yang mendiami wilayah dengan topografis yang berbeda. Lampung Pesisir (Ulun Peminggir) yaitu mereka suku Lampung asli yang mendiami wilayah Lampung bagian pesisir dan Lampung Pepadun (Ulun Pepadun) adalah suku asli Lampung yang mendiami wilayah dataran rendah dan tinggi yaitu di daerah Abung, Tulangbawang, Waykanan/Sungkai, Pubian dan daerah lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung sendiri sebagai entitas yang berbudaya mempunyai kearifan lokal. Sifat dan watak orang Lampung mencakup: (1) *Piil pesenggiri*, rasa malu untuk melakukan sikap yang terhina menurut agama dan lingkungan sosial-budaya, (2) *Bejuluk-beadok* yakni kepribadian yang sesuai dengan gelar adat yang disandangnya, (3) *Nemui Nyimah* adalah sikap saling beramah tamah dengan tamu, (4) *Nengah Nyappur* ialah perilaku aktif dalam bermasyarakat serta tidak individualis, dan terakhir (5) *Sakai Sambayan* yaitu gotong royong dan saling membantu. Acuan keseluruhan sifat ideal tersebut merupakan sikap dan watak yang diharapkan dimiliki orang Lampung. Keseluruhan prinsip ini membangun konsepsi *piil ulun* Lampung, memiliki keterikatan yang kuat antara masing-masing prinsip dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.

Keseluruhan sikap individu tersebutlah yang akhirnya membentuk karakter masyarakat Lampung yang menjunjung nilai-nilai luhur, menjaga sikap yang baik, saling menghormati antar sesama. Karakter masyarakat

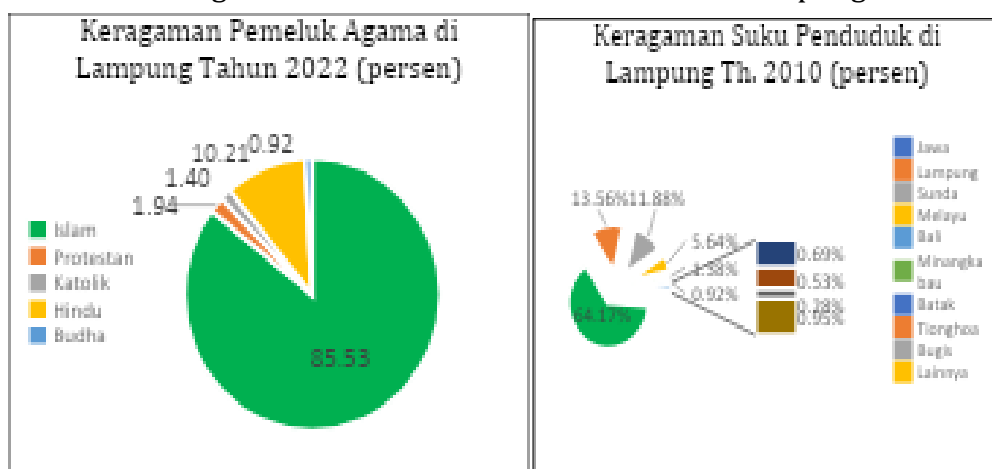
Lampung tersebut menjadi landasan bagi sikap individu maupun masyarakat Lampung sehingga menjadi slogan provinsi yang bermakna dalam kesatuan daerah Lampung, yang memiliki dua golongan yaitu adat pepadun dan saibatin sekaligus orang asli dan orang pendatang di Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki toleransi yang cukup baik terhadap keragaman budaya dan pengaruh dari luar termasuk pendatang dari daerah lain. Piil Pesenggiri adalah salah satu cara masyarakat Lampung dalam menerima keberadaan masyarakat pendatang agar bersama-sama dapat saling menjaga keharmonisan dan saling bekerjasama.

Dari perspektif perdamaian, nilai-nilai yang terkandung dalam *piil pesenggiri* secara jelas membimbing masyarakat untuk saling menghargai, tolong-menolong, bermasyarakat, berjiwa besar dan bergaul dengan baik. Tindakan ideal bagi masyarakat Lampung adalah mengacu kepada nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal tersebut. Dalam konteks masyarakat yang masih berpegang pada adat, institusi lokal berperan sebagai rujukan dalam tata kelola birokrasi dan pola interaksi masyarakat. Semua didasarkan kepada kearifan lokal dan dilembagakan demi kepentingan bersama. Dalam kehidupan masyarakat Lampung, terdapat sebuah institusi lokal yang mempunyai peran penting, yaitu kekerabatan (Djausal, 2018). Ikatan kekerabatan yang kuat terdorong oleh prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piil pesenggiri. *Bejuluk-beadok* menciptakan kedekatan emosional antara yang memberi *juluk* dan *adok* kepada pemberinya. *Nemuy nyimah* dan *nengah nyappur* menjaga kedekatan tersebut dan peluang untuk membangun relasi baru. Dan *sakai sambayan* mengikat kuat kekerabatan tersebut menjadi sebuah komunitas yang saling menghargai, membutuhkan dan tolong menolong. Memperkuat ikatan kekerabatan yang terus diperluas dalam interaksi sosial, merupakan *wujud keterbukaan masyarakat Lampung* selama berabad-abad.

Dalam perkembangannya, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat majemuk. Beragam suku, ras, etnik, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat hidup berdampingan di dalamnya. Kehidupan sosial kemasyarakatan yang plural tersebut menjadikan Lampung berjudul sebagai “Miniatur Indonesia”. Bersatunya keberagaman masyarakat di Provinsi Lampung selaras dengan semboyan *Sang Bumi Ruwa Jurai* yang juga menggambarkan bahwa penduduk Lampung terdiri dari *Jurai*/golongan penduduk asli dan pendatang sebagai wujud keharmonisan kehidupan

bermasyarakat yang tentunya sangat sejalan dengan amanah dasar negara Pancasila dan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang tercermin dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dengan beragam suku, budaya, ras dan agama maupun status sosial. Modal sosial tersebut akan saling melengkapi dan menjadi kekuatan besar untuk mencapai cita-cita pembangunan yang diharapkan, dan menjadi landasan dari proses pembangunan yang telah dan akan dijalankan.

Grafik 2. 19 Keragaman Pemeluk Agama Tahun 2022 dan Keragaman Suku Penduduk Tahun 2010 di Lampung

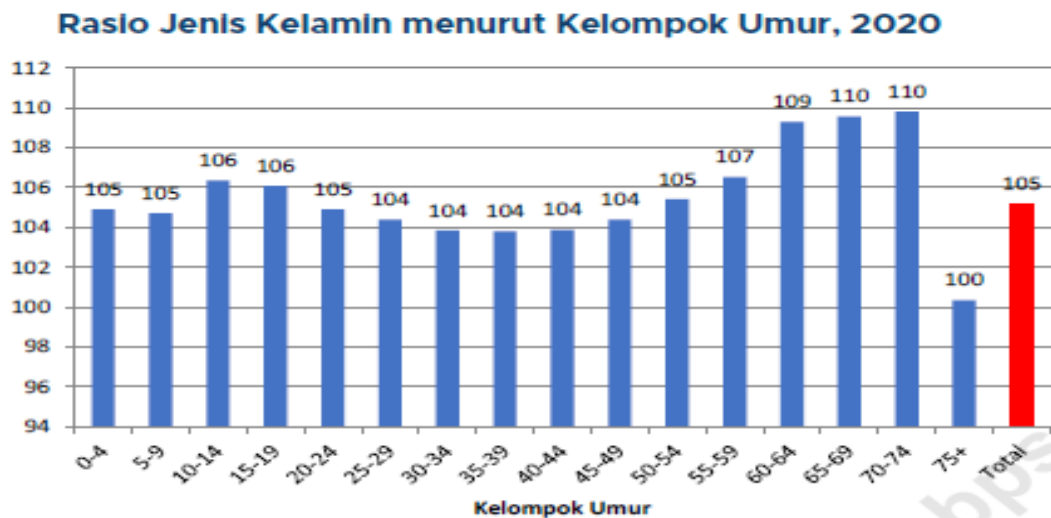


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

c. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin laki-laki masih lebih banyak dari pada perempuan, hasil Sensus Penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Lampung sebanyak 4,62 juta orang, atau 51,25 persen dari penduduk Provinsi Lampung. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Provinsi Lampung sebanyak 4,39 juta orang, atau 48,75 persen dari penduduk Provinsi Lampung. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Lampung sebesar 105, yang artinya terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Provinsi Lampung pada tahun 2020.

Grafik 2. 20 Rasio Jenis Kelamin dan Piramida Penduduk Lampung Tahun 2020

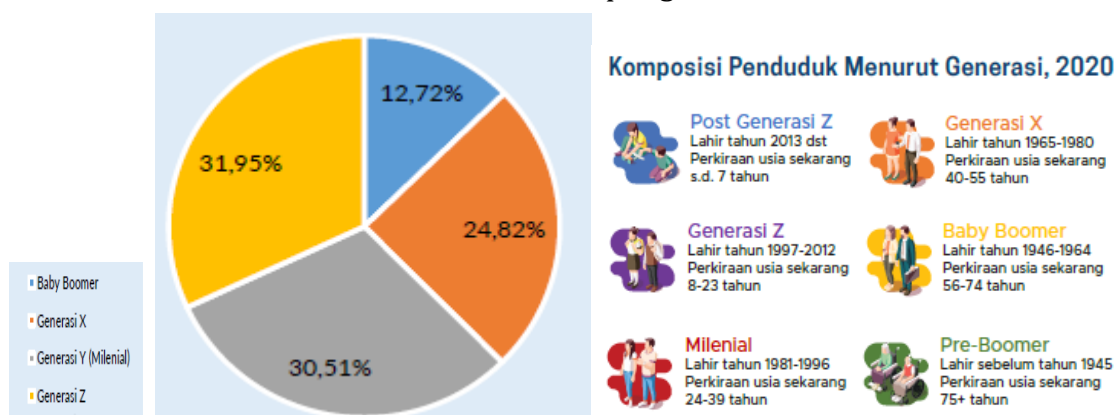


Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

d. Penduduk menurut Generasi.

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Provinsi Lampung didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 27,80 persen dari total populasi (2,48 Juta orang) dan generasi milenial sebanyak 26,54 persen dari total populasi Provinsi Lampung. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2. 21 Persentase Penduduk Lampung Menurut Generasi, Tahun 2020



Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun

2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Beberapa tahun ke depan, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Kelompok Penduduk usia produktif terdiri dari kelompok generasi Z, Y, X (milenial) dan *baby boomer*. Generasi Z memiliki persentase paling besar dibandingkan generasi lainnya. Persentase generasi Z mencapai 31,95 persen dari total penduduk usia produktif. Selanjutnya generasi Y yang mencapai 30,51 persen, generasi X mencapai 24,82 persen, dan generasi *baby boomer* mencapai 12,72 persen.

1. Kepadatan Penduduk

Tabel 2. 9 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020, 2023, dan 2024 (km²)

Kabupaten/Kota	2020	2023	2024
Lampung Barat	142,60	147,65	149,30
Tanggamus	220,76	228,31	231,00
Lampung Selatan	479,53	498,01	504,46
Lampung Timur	287,30	295,44	298,33
Lampung Tengah	321,31	331,58	335,26
Lampung Utara	250,28	246,14	248,42
Way Kanan	129,48	139,08	140,82
Tulang Bawang	139,12	143,26	144,92
Pesawaran	373,54	386,28	390,98
Pringsewu	659,85	682,29	690,57
Mesuji	103,17	108,13	109,79
Tulang Bawang Barat	222,57	230,58	233,10
Pesisir Barat	54,45	56,70	57,56
Bandar Lampung	6361,17	6542,95	6609,68
Metro	2305,89	2374,95	2400,08
Lampung	268,46	277,41	280,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

- Tahun 2020 : Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)/*The Result of 2020 Population Census (September)*
- Tahun 2023 dan 2024 : Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)/*The result of 2020–2050 Indonesia population projection result of 2020 Population Census (mid year/June)*

Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai 280,55 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung

dengan kepadatan sebesar 6.609,68 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 57,56 jiwa/km².

2. Proyeksi Jumlah Penduduk

Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung 2020-2030 berdasarkan buku proyeksi penduduk indonesia 2020-2045 yang di publikasikan BPS Provinsi Lampung menjelaskan bahwa jumlah penduduk lampung di tahun 2029 diproyeksikan sebanyak 9,910 juta jiwa dan menyentuh angka 10 juta jiwa pada tahun 2030.

Tabel 2. 10 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2025-2029

Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung, 2020–2029						
Parameter	2020	2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk						
Laki-Laki (000)	4 605,04	4 857,47	4 904,02	4 949,10	4 992,67	5 034,75
Perempuan (000)	4 379,84	4 665,44	4 719,77	4 772,93	4 824,88	4 875,61
Total (000)	8 984,88	9 522,91	9 623,79	9 722,03	9 817,55	9 910,36
Sex Ratio (%)	105,14	104,12	103,90	103,69	103,48	103,26
Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin						
0–4	773,96	796,36	793,07	789,50	785,68	781,73
5–9	777,07	772,83	776,69	781,14	786,16	791,23
10–14	732,88	777,38	781,56	782,29	780,25	776,64
15–19	730,43	731,59	738,84	748,48	759,03	768,72
20–24	749,66	727,57	724,6	722,69	722,38	724,3
25–29	742,85	746,73	743,66	739,13	733,86	728,83
30–34	736,07	739,6	740,79	742,54	744,17	744,72
35–39	701,00	731,72	734,17	735,09	735,06	734,95
40–44	662,37	695,68	702,33	709,36	716,22	722,07
45–49	592,02	654,11	662,66	669,62	675,57	681,29
50–54	506,18	579,38	593,11	606,45	619,06	630,53
55–59	417,45	488,32	502,81	\$17,34	531,78	545,96
60–64	321,67	393,54	407,39	420,92	434,28	447,72
65–69	234,97	291,97	304,82	318,21	331,87	345,44
70–74	147,62	199,57	209,61	219,33	229,01	239,07
75+	158,70	196,56	207,66	219,94	233,19	247,15
Total	8 984,88	9522,91	9623,79	9722,03	9817,55	9 910,36

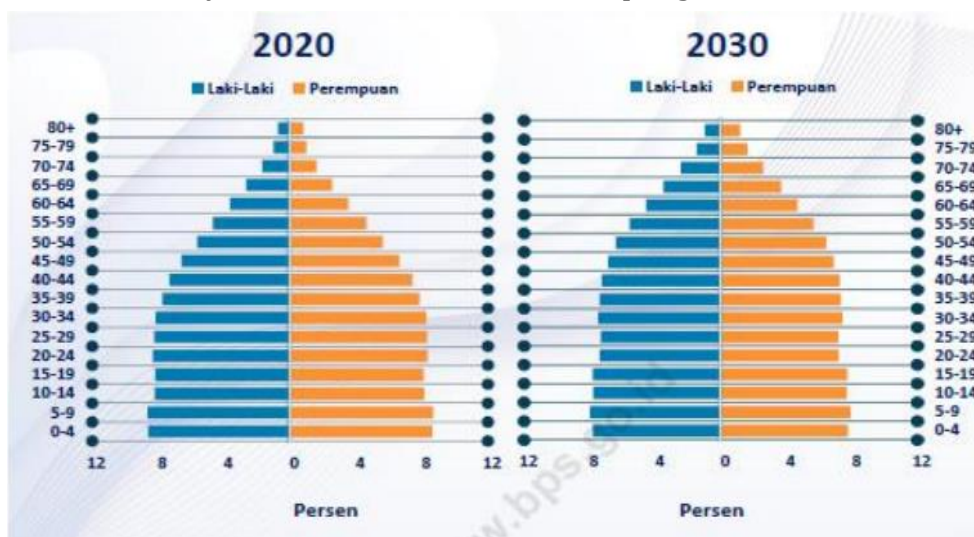
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Besarnya jumlah penduduk Provinsi Lampung menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup besar terutama pada jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) dan potensi pasar domestik bagi perekonomian. Pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya

saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk.

Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Setiap wilayah pasti mengalaminya. Perbedaannya hanya pada masalah waktu dan kecepatannya. Indonesia dan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mongolia, Thailand, Vietnam diperkirakan mengalami ageing population mulai tahun 2040. Di Indonesia, bonus demografi diperkirakan berakhir pada tahun 2036. Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan Indonesia mengalami fase penuaan penduduk.

Grafik 2. 22 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2050



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Tabel 2.11 Proyeksi Jumlah Penduduk kabupaten/kota se Provinsi Lampung
Tahun 2025 – 2030

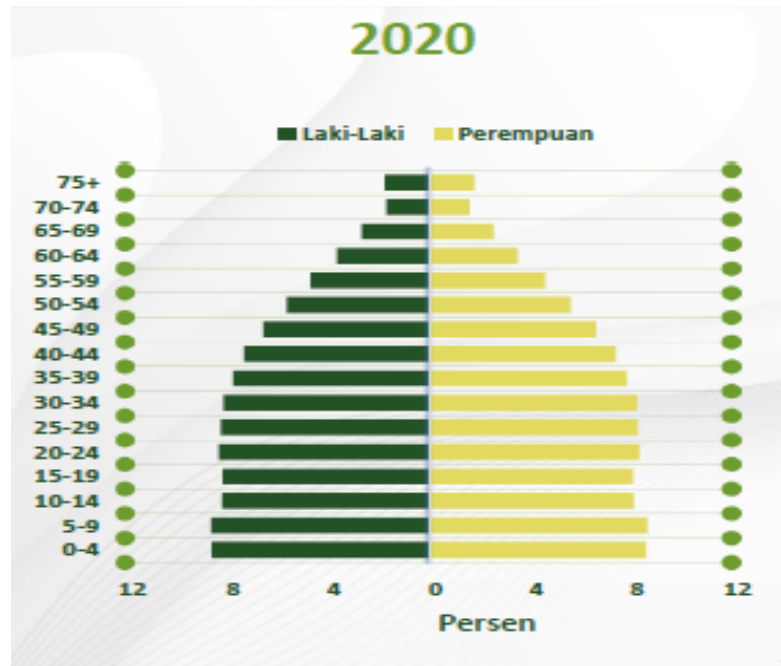
No.	Kabupaten/ Kota						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Lampung Barat	319,30	322,59	325,77	328,86	331,85	334,74
2	Tanggamus	678,02	685,54	692,88	700,03	707,01	713,82
3	Lampung Selatan	1.133,39	1.147,20	1.160,72	1.173,95	1.186,89	1.199,54
4	Lampung Timur	1.164,70	1.175,37	1.185,74	1.195,82	1.205,62	1.215,12
5	Lampung Tengah	1.541,43	1.557,29	1.572,66	1.587,53	1.601,85	1.615,63
6	Lampung Utara	665,76	671,49	677,04	682,43	687,65	692,71
7	Way Kanan	503,31	509,25	515,06	520,75	526,31	531,76
8	Tulang Bawang	455,40	460,34	465,17	469,88	474,46	478,94
9	Pesawaran	506,26	512,16	518,00	523,75	529,44	535,04
10	Pringsewu	429,74	434,74	439,68	444,51	449,27	453,93
11	Mesuji	245,21	248,75	252,21	255,60	258,91	262,15
12	Tulang Bawang Barat	301,79	304,76	307,62	310,39	313,03	315,60
13	Pesisir Barat	174,86	177,39	179,91	182,40	184,89	187,36
14	Bandar Lampung	1.226,21	1.237,63	1.248,53	1.258,92	1.268,79	1.278,14
15	Metro	177,52	179,31	181,05	182,74	184,39	185,98
Provinsi Lampung		9.522,91	9.623,79	9.722,03	9.817,55	9.910,36	10.000,47

Sumber: Data Diolah 2023

3. Penduduk Usia Produktif

Penduduk Usia Produktif. Berdasarkan komposisi penduduknya, penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2020 berbentuk konstruktif, yang berarti sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur produktif yang ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang cembung di bagian tengah. Dalam kondisi ini, penduduk usia kerja akan mengalami peningkatan sehingga menurunkan rasio ketergantungan umur. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, rasio ketergantungan umur penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif adalah sebesar 45,87, yang berarti dari setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) terdapat sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 52,20. Kondisi peningkatan penduduk usia kerja dan penurunan rasio ketergantungan penduduk disebut sebagai bonus demografi atau *windows of opportunity*.

Grafik 2. 23 Komposisi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

Dalam konteks kependudukan, setiap pertumbuhan penduduk harus disertai dengan peningkatan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas salah satunya dipicu oleh kualitas SDM. Keseimbangan antara laju pertumbuhan kuantitas dan pertumbuhan kualitas penduduk adalah modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang optimal. Banyak faktor yang memengaruhi kualitas pembangunan di suatu wilayah. Tabel di bawah ini mendeskripsikan bahwa jumlah penduduk yang banyak tidak selalu selaras dengan kualitas yang tinggi penduduknya.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk di Sepuluh Provinsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2020

Provinsi	Jumlah (Juta) ¹	Kepadatan (Orang/km ²) ¹	Sex Ratio (Laki-laki Per 100 Perempuan) ¹	Rasio Ketergantungan ¹	Tingkat Pengangguran (%) ²	PDRB Per Kapita (Juta/Tahun) ²	Peringkat IPM ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jawa Barat	48.27	1.365	103.13	42.94	10.46	41.81	10
Jawa Timur	40.67	851	99.60	42.33	5.84	57.65	16
Jawa Tengah	36.52	1.113	101.15	43.16	6.48	38.60	14
Sumatera Utara	14.80	203	100.61	48.32	6.91	55.18	15
Banten	11.90	1.232	104.04	42.89	10.64	47.60	8
DKI Jakarta	10.56	15.907	102.06	39.73	10.95	260.44	1
Sulawesi Selatan	9.07	194	98.59	45.84	6.31	56.51	13
Lampung	9.01	260	105.14	45.87	4.67	41.62	25
Sumatera Selatan	8.47	92	104.16	47.09	5.51	53.51	24
Riau	6.39	73	105.11	46.24	6.32	102.29	7

Sumber Tabel : ¹Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), ²BPS, Diolah

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional sehingga masih menjadi perhatian banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan maka diperlukan sejumlah indikator yang menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia. Indikator-indikator tersebut antara lain jumlah dan persentase penduduk miskin serta berbagai karakteristik kemiskinan lainnya yang terbanding antar waktu dan antar wilayah. Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Angka kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,62 persen di tahun 2019 menjadi 10,69 persen di Tahun 2024, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,03 persen.

Grafik 2. 24 Capaian Angka Kemiskinan Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Bila dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 11,43 ribu orang. Untuk September 2022, Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 6,82 ribu orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2023 mencapai 970,67 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 31,74 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 24,9 ribu orang.

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel di bawah ini menunjukkan pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 697,19 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 737,71 ribu jiwa. Namun, di perkotaan jumlah penduduk miskin Tahun 2024 mengalami peningkatan dari 232,96 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 244,04 ribu jiwa pada Tahun 2024.

Hal yang patut dicermati pula bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan cukup fluktuatif, dimana pada periode 2019 mengalami penurunan, namun kembali meningkat di tahun 2020 ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemic Covid-19. Untuk kemiskinan di pedesaan, tren pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan tidak stabil dan memiliki karakteristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan

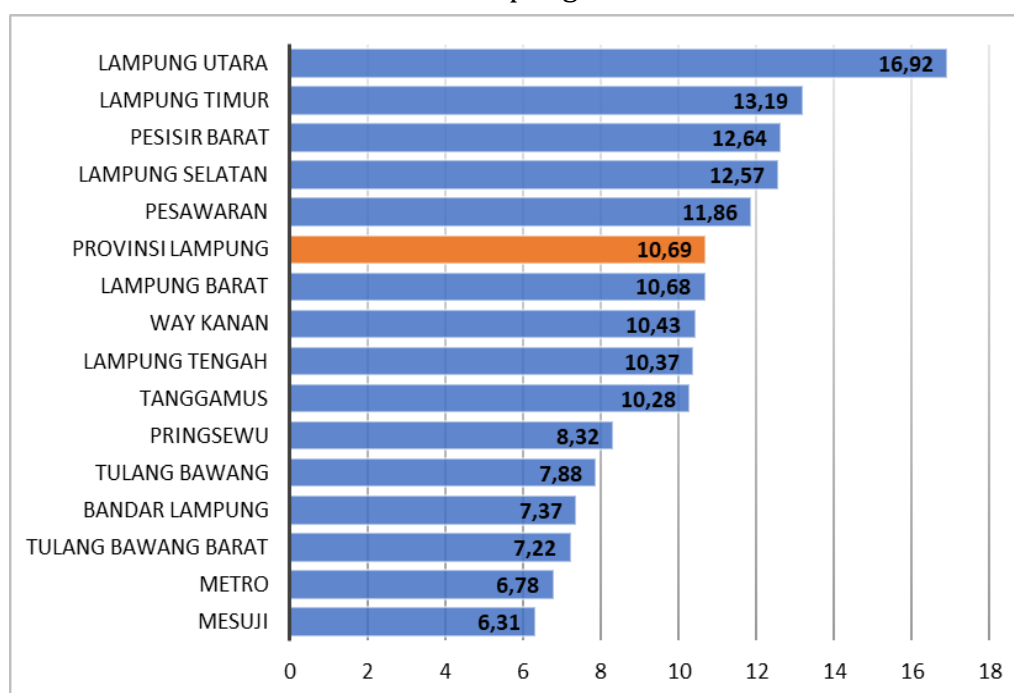
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung
Tahun 2019 – 2024 (Ribuan Jiwa)

LOKASI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota	224.69	259,28	236,48	239,11	232,96	244,04
Desa	816.79	831,86	770,54	756,48	737,71	697,19
Kota + Desa	1041.48	1.091,14	1.007,02	995,59	970,67	941,23

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Selanjutnya kondisi kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara (16,92%), Kabupaten Lampung Timur (13,9 %) dan Kabupaten Pesisir Barat (12,64 %), yang merupakan 3 (tiga) kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data BPS, terdapat 6 (enam) kabupaten/kota yang capaian persentase penduduk miskin tahun 2024 lebih baik daripada Nasional, yaitu Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Pringsewu serta Kota Metro dan Bandar Lampung.

Grafik 2. 25 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



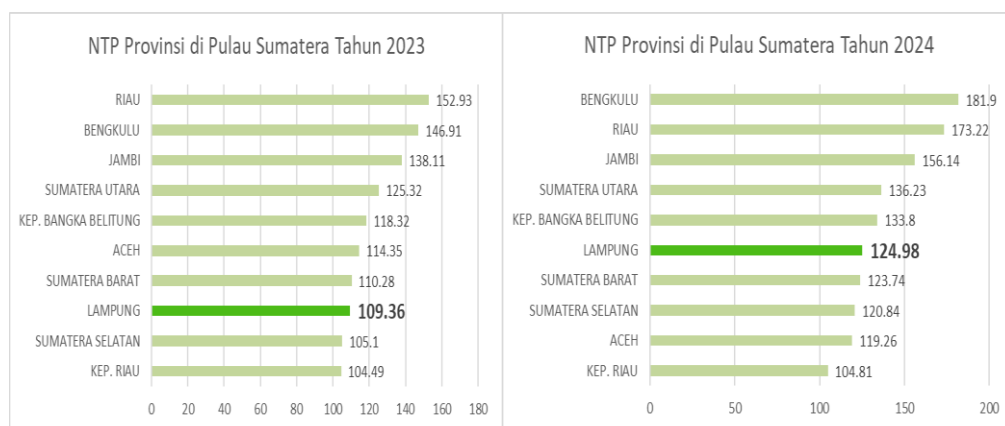
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

2.1.2.2 Nilai Tukar Petani

Nilai NTP kurang bersaing secara nasional. Data statistik ekonomi Lampung beberapa tahun terakhir masih menunjukkan bahwa perekonomian Lampung masih didominasi pada Lapangan Usaha **lingkup pertanian** (dengan *share* sekitar 27-30 persen) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian daerah secara signifikan. Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar

43 persen penduduk yang bekerja. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka keberhasilan pembangunan pada sektor ini juga merupakan tumpuan untuk menjaga stabilitas stok pangan daerah, memelihara tingkat stabilitas harga pangan masyarakat, dan menjadi *bumper* untuk menahan peningkatan laju kemiskinan serta mempersempit celah ketimpangan antar penduduk. Capaian pertumbuhan 2 persen di tahun 2022 merupakan capaian terbaik sepanjang periode pengamatan tahun 2017-2022 perlu terus dijaga kesinambungannya.

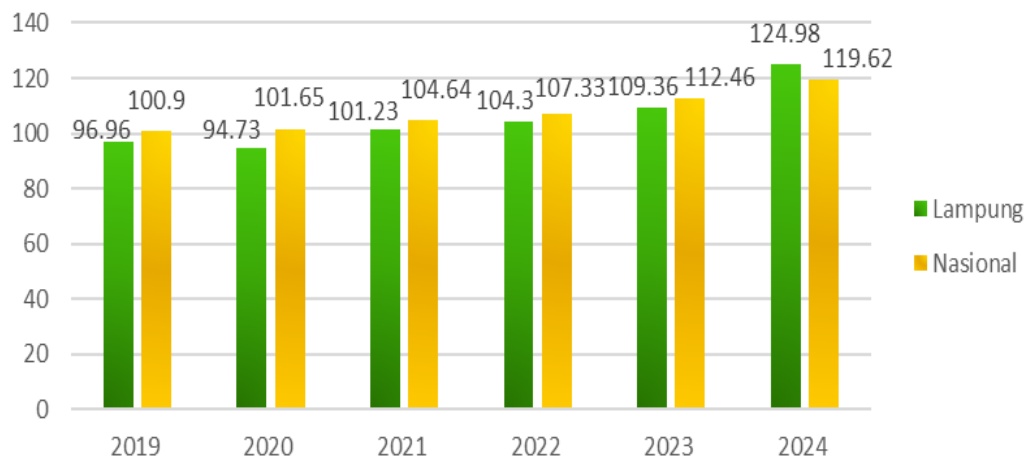
Grafik 2. 26 NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di pedesaan. NTP juga menjadi indikator dari kesejahteraan pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian relatif melambat. Di lingkup regional Sumatera, Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung berada pada posisi ke 6(enam) dengan nilai 124,98, NTP tertinggi ada di Provinsi Bengkulu dengan nilai 181,9. Riau 173,,22 , Jambi 156,34, Sumatera Utara 136,23 dan Kep Bangka Belitung 134,8. NTP terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 1104,81 . Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada tahun 2023 berada pada posisi ke 8 sebesar 109,36, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada NTP Provinsi Lampung yakni sebesar 15,62 poin .

Grafik 2. 27 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2019-2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

(Penghitungan NTP sejak tahun 2020 dst menggunakan tahun dasar 2018=100, dimana terjadi peningkatan cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib dibandingkan dengan tahun dasar 2012=100).

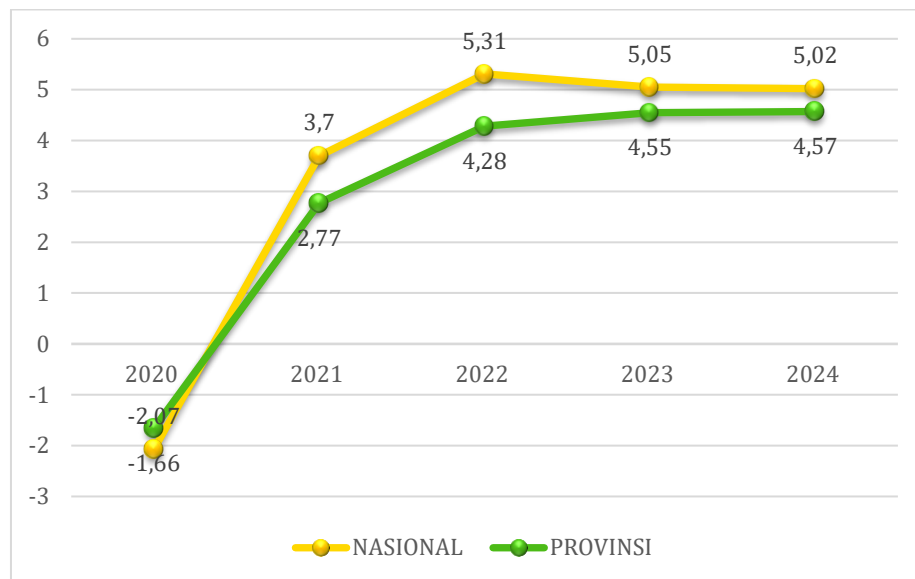
2.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Ekonomi.

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

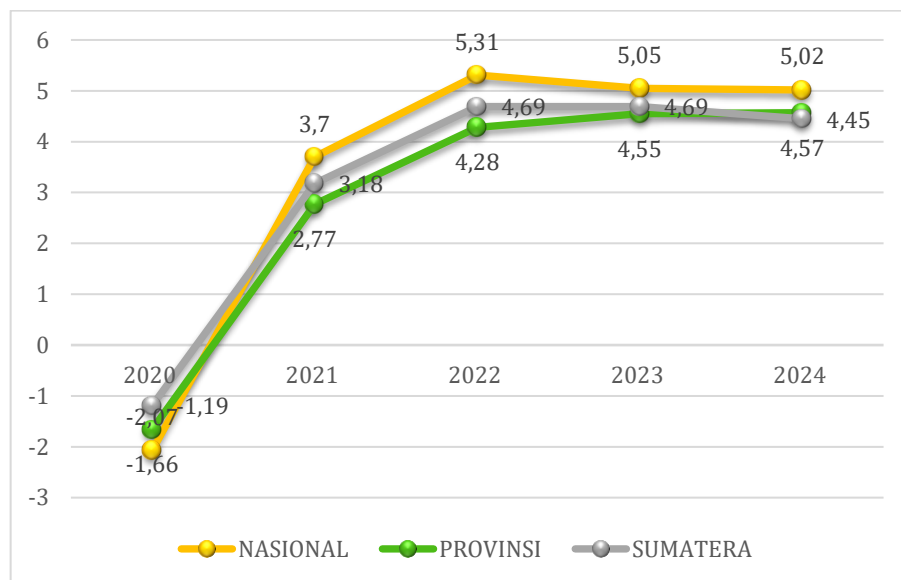
Grafik 2. 28 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap target daerah dan Capaian Nasional Tahun 2019-2023



Sumber; BPS dan BPS Provinsi Lampung 2025.

Selama periode 2020-2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung setelah pandemic Covid 19 memperlihatkan trend yang terus meningkat dari -1,66 persen di tahun 2020 menjadi 4,57 persen pada tahun 2024. Selama periode ini Provinsi Lampung selalu berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen. Sejalan waktu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus mengalami *recovery*, untuk Tahun 2024, pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (*c to c*), tumbuh sebesar 4,81 persen, menguat dibanding Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,55 persen.

Grafik 2. 29 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Indonesia, 2025

Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2021 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp371.903,17 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp247.001,67 miliar. Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,05) dan Sumatera (4,63). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2023 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 448.880,25 Miliar dan Rp. 269.240,54 Miliar.

Tabel 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	5.18	-1.16	2.55	4.09	4.69
Tanggamus	5.02	-1.77	2.34	4.16	4.70
Lampung Selatan	5.13	-1.73	2.6	4.81	4.82

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Timur	3.79	-2.26	0.24	2.02	3.51
Lampung Tengah	5.35	-1.02	2.88	4.65	4.70
Lampung Utara	5.33	-1.45	2.82	3.16	4.22
Way Kanan	5.17	-1.16	2.9	4.41	4.63
Tulang Bawang	5.41	-1.34	2.88	3.85	4.27
Pesawaran	5	-1.26	2.08	4.55	4.49
Pringsewu	5.03	-1.21	2.91	4.37	4.78
Mesuji	5.26	-1.35	2.84	3.49	4.06
Tulang Bawang Barat	5.36	-1.32	2.89	4.49	4.53
Pesisir Barat	5.47	-1.18	2.06	2.82	3.42
Bandar Lampung	6.17	-1.88	3.12	4.93	4.99
Metro	5.57	-1.79	2.91	4.51	4.86
Provinsi Lampung	5.26	-1.67	2.77	4.28	4.55
Nasional	5.02	-2.07	3.69	5.31	5.05

Sumber; BPS Provinsi Lampung 2023

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2024 tumbuh sebesar 4,57 persen, menguat dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 8,26 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,78 persen.

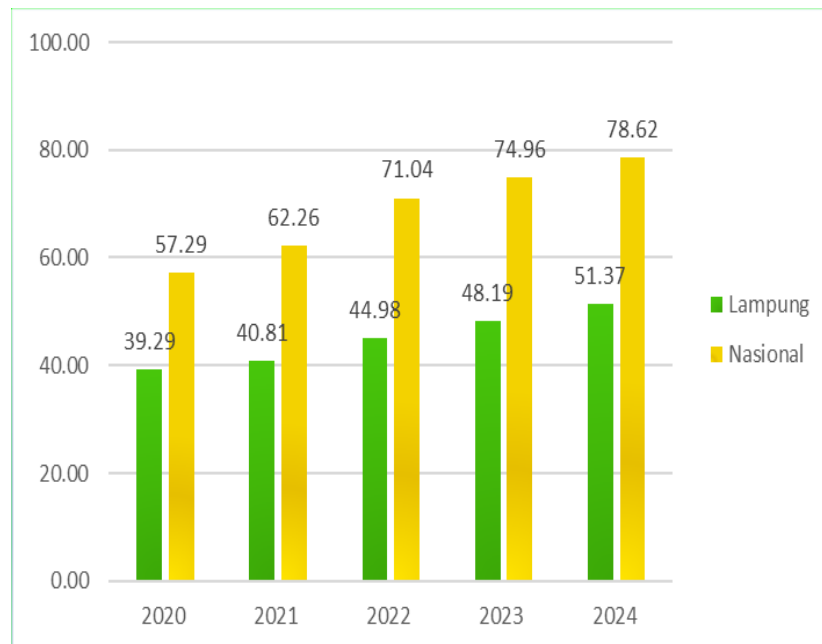
2.1.3.2 PDRB Perkapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan dari Rp. 32,29 juta menjadi Rp. 51,37 juta.

Sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukkan peningkatan sampai dengan Tahun 2024 senilai Rp 51,37 Juta.

Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 78,62 Juta Rupiah pada tahun 2024.

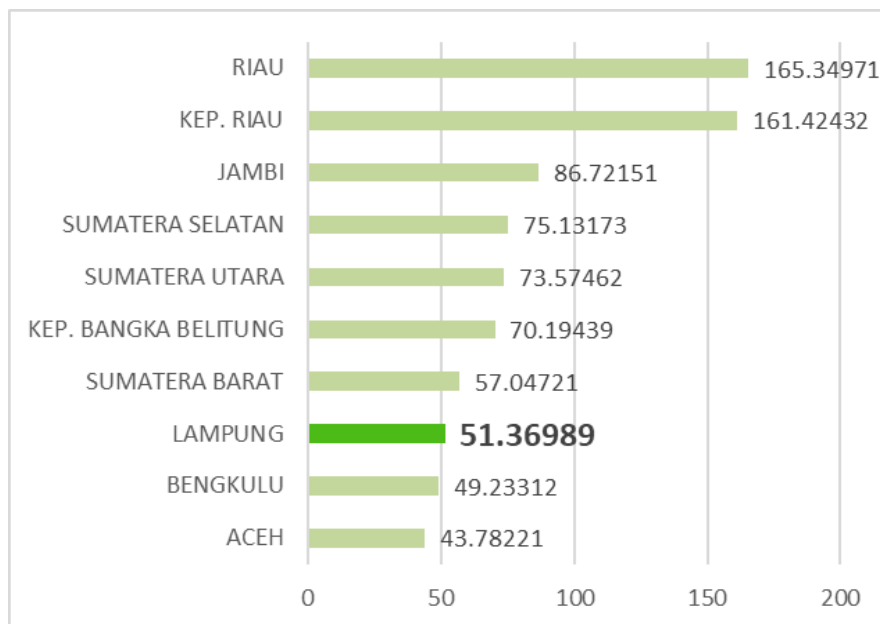
Grafik 2. 30 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 (ADHB, Juta Rupiah)



Sumber: Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Bila dibandingkan dengan regional Sumatera, PDRB Perkapita Provinsi Lampung hanya menempati 3 terendah bersama-sama Provinsi Aceh dan Bengkulu. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan produktivitas pada sektor-sektor strategis di Provinsi Lampung yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2. 31 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2024
(ADHB, Juta Rupiah)



Sumber: Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan Kabupaten Lampung Barat merupakan Kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan perkapita tertinggi sebesar 5,61 persen, diikuti Kabupaten Tulang Bawang sebesar 5,51 persen dan Kabupaten Pringsewu sebesar 5,05 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Mesuji dan Bandar Lampung, masing-masing sebesar 2,39 persen dan 3,32 persen. Pada Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar dengan capaian sebesar Rp. 63,34 juta, lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung sebesar Rp. 48,18 juta.

Tabel 2. 15 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
Tahun 2019-2023

Wilayah	PDRB PER KAPITA ADHB (RUPIAH)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	23.404.088	23.614.681	24.714.990	27.297.350	28.864.000
Tanggamus	26.034.307	24.224.635	25.297.765	27.758.940	29.597.000
Lampung Selatan	44.129.169	41.704.922	43.307.952	47.827.730	50.461.000
Lampung Timur	39.797.485	36.710.498	38.323.275	44.151.640	46.276.000
Lampung Tengah	55.368.656	48.861.769	50.315.555	54.968.950	59.720.000
Lampung Utara	38.512.596	37.549.879	39.212.125	42.521.960	44.751.000

Wilayah	PDRB PER KAPITA ADHB (RUPIAH)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Way Kanan	31.022.091	29.594.040	30.746.033	33.579.500	35.580.000
Tulang Bawang	51.065.626	53.691.359	56.118.778	60.292.390	63.341.000
Pesawaran	36.433.510	34.047.403	34.965.125	38.360.410	40.903.000
Pringsewu	27.851.928	27.563.217	28.666.813	31.468.770	33.390.000
Mesuji	51.934.466	45.812.389	47.414.096	51.459.870	54.421.000
Tulang Bawang Barat	41.859.787	39.971.513	41.571.981	45.690.960	48.702.000
Pesisir Barat	30.246.494	28.889.489	30.062.936	32.457.020	33.782.000

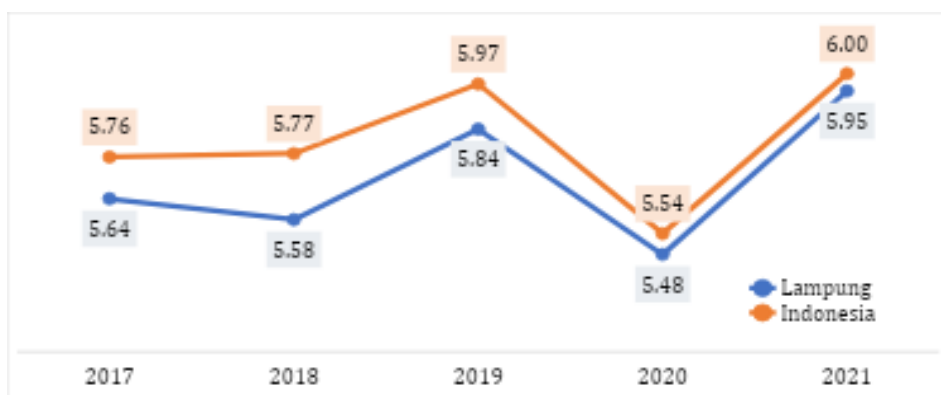
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas yang menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memantau dan mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Capaian IPEI Provinsi Lampung selama Tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali pada Tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Pola perkembangan IPEI Provinsi Lampung mengikuti pola IPEI Indonesia, namun capaiannya selalu di bawah capaian Indonesia.

Grafik 2. 32 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Tahun 2017 – 2021



Sumber : Bappenas RI

Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi terdiri dari 16 (enam belas) indikator di bawah 3 (tiga) pilar, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung dari tahun 2015 – 2021 masuk dalam kategori sedang tier 2 pada rentang 40,82 – 47,33.

Gambar 2. 33 Indeks Ekonomi Hijau Seluruh Provinsi Tahun 2015 – 2021



Sumber : Ringkasan Eksekutif Capaian & Progres Ekonomi Hijau Provinsi 2015 – 2021
Bappenas RI Tahun 2023

Rata-rata pertumbuhan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2021 sebesar 2,58 %. Capaian Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung didorong oleh skor pilar lingkungan (kualitas air permukaan pada parameter BOD, bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer, dan kualitas udara pada parameter NO₂), pilar ekonomi (intensitas emisi, intensitas energi final, serta produktivitas tenaga kerja sektor industri dan jasa), dan pilar sosial (rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran).

Indonesia Blue Economy Indeks (IBEI)

Indonesia Blue Economy Index adalah indeks dalam mengukur ekonomi maritim yang terdiversifikasi dan berkelanjutan untuk Indonesia, berdasarkan pada kepastian kesehatan dan ketahanan ekosistem laut dan pelestarian manfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang. IBEI terdiri dari tiga pilar, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial dengan bobot masing-

masing 36,9% untuk pilar lingkungan, 32,6% untuk pilar ekonomi, dan 30,5% untuk pilar sosial. Pembuatan estimasi bobot tersebut menggunakan metode multi-level Principal Component Analysis (PCA). *Principal Component Analysis* adalah metode reduksi dimensi yang akan tetap mempertahankan variasi dan pola dominan dari data.

Rasio Kewirausahaan Nasional

Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia, diproyeksikan akan mendapat puncak bonus demografi di 2030. Berdasarkan survei World Economic Forum tahun 2019, sebanyak 35,5% pemuda usia 15-35 tahun di Indonesia berkeinginan menjadi pengusaha. Kewirausahaan (Enterpreneurship) menjadi isu nasional yang cukup mendapat perhatian saat ini. Aktivitas kewirausahaan yang masih belum optimal perlu didorong melalui peningkatan kualitas SDM dengan target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% di 2024.

Guna mencapai target rasio kewirausahaan dan pertumbuhan wirausaha baru, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Pengaturan dalam Perpres tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penguatan ekosistem kewirausahaan. Pengaturan tersebut juga menjadi pedoman yang menyinergikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, keberadaan Perpres juga bertujuan memperkuat ekosistem kewirausahaan, menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas wirausaha dan skala usaha.

Dalam Perpres disebutkan kemudahan yang diberikan kepada wirausaha, yakni pendaftaran perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, fasilitasi standarisasi dan sertifikasi, akses pembiayaan dan peminjaman, pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, akses pasar digital BUMN, akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, akses area komersial dan tempat perbelanjaan, akses riset dan pengembangan usaha, serta akses peningkatan kapasitas usaha.

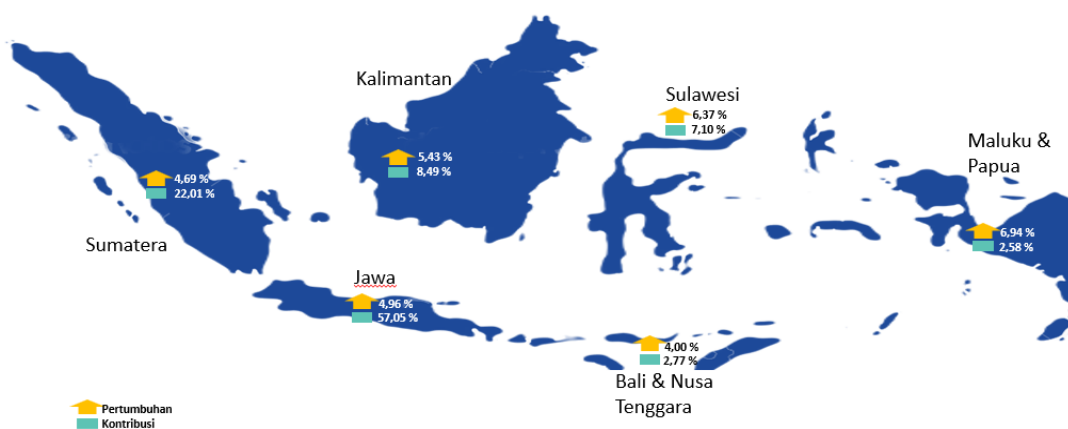
Misi Transformasi ekonomi yang tercantum dalam rancangan akhir RPJPD Provinsi Lampung diarahkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya para generasi muda yang membuka usaha sendiri atau berwirausaha sebagai dampak bonus demografi yang akan mencapai puncak dalam 5-10 tahun ke depan.

Aktivitas pembelajaran tidak hanya diarahkan pada transfer of knowledge semata, akan tetapi juga peningkatan aspek soft skill dan entrepreneur yang akan membuat peserta didik memiliki bekal keilmuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, riset, manajemen risiko, analisis, dan kemampuan pengambilan keputusan. Semua itu jika dipadukan dengan aspek kewirausahaan (entrepreneur) akan mampu menghasilkan generasi masa depan dengan tingkat produktivitas tinggi.

Kontribusi PDRB Provinsi

Sepanjang tahun 2023, Pulau Jawa merupakan kontributor terbesar dalam struktur perekonomian nasional sebesar 57,05 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,01 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,49 persen dan Pulau Sulawesi sebesar 7,10 persen. Sementara Maluku dan Papua memiliki kontribusi terendah yaitu sebesar 2,58 persen. Sementara itu dilihat dari pertumbuhan, Pulau dengan pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi di Pulau Maluku dan Papua, sebesar 6,94 persen. Di sisi lain, pertumbuhan terendah terjadi di Pulau Bali dan nusa Tenggara sebesar 4 persen.

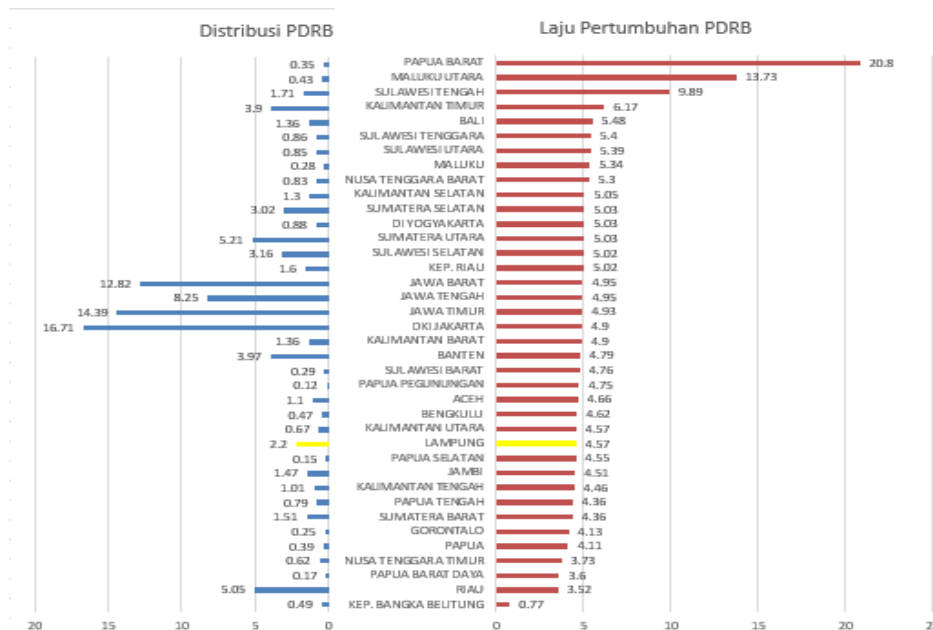
Gambar 2. 34 Pertumbuhan dan Kontribusi Pulau-Pulau se-Indonesia terhadap PDB Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Dalam lingkup Nasional, ekonomi Provinsi Lampung berhasil tumbuh sebesar 4,55 persen pada tahun 2023, berada pada urutan ke-23 dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara itu, Provinsi Lampung berkontribusi terhadap Struktur Perekonomian Nasional sebesar 2,19 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,08 persen dari tahun 2022.

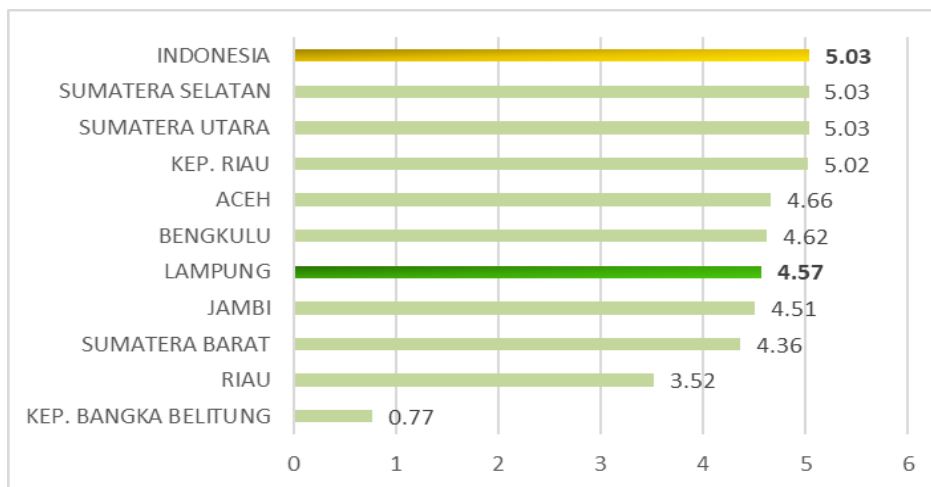
Grafik 2. 35 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Indonesia Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Dalam lingkup regional Sumatera, kinerja ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen, berada pada urutan ke-6 (enam) setelah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat dan Jambi. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2. 36 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2024

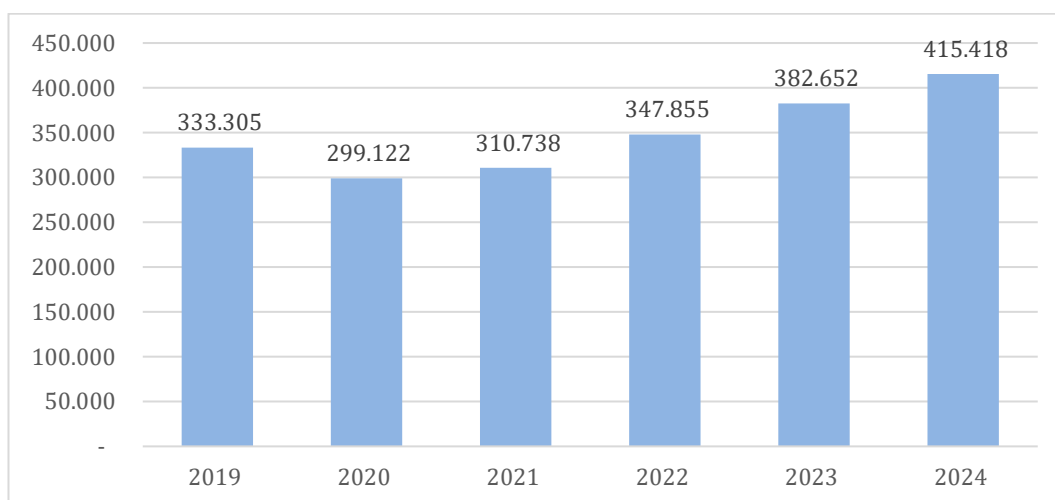


Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Penyediaan akomodasi makan dan minum merupakan salah satu sektor lapangan usaha dalam PDRB. Dalam kurun waktu 2019-2023, PDRB (ADHK) sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu senilai Rp333,305 juta, menjadi Rp415,418 juta yang menunjukkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Grafik 2. 37 PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Indonesia

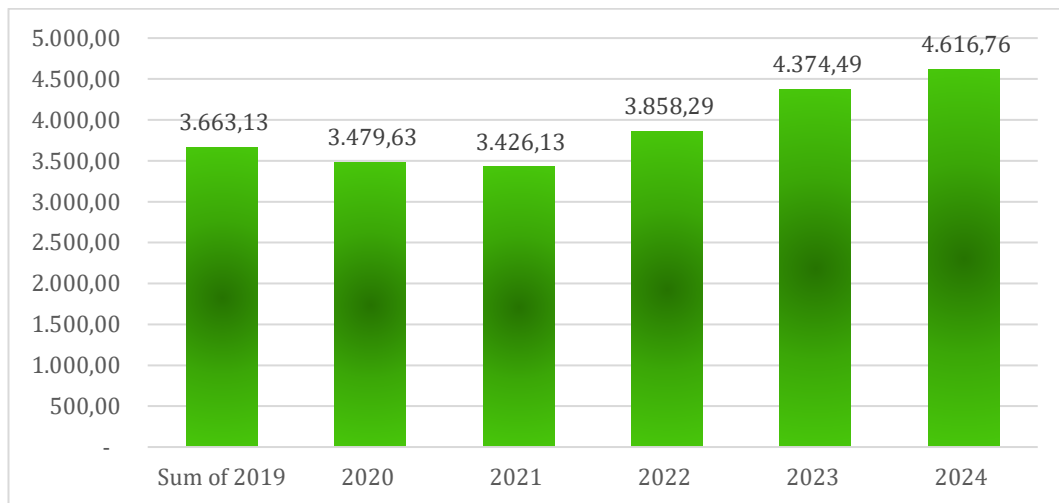


Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

PDRB ADHK Sektor Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 10,26 persen yang mana pada tahun 2019 sebesar Rp333,304 Juta menjadi Rp299,122 Juta pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan pada tahun 2020 kemampuan masyarakat Indonesia mengalami penurunan dalam hal konsumsi akomodasi makan dan minum namun perlahan membaik pada tahun 2021 hingga tahun 2024.

Pada Provinsi Lampung, dalam kurun waktu 2023-2024, PDRB (ADHK) sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu senilai Rp4,37 juta, menjadi Rp4,62 juta. Ini berarti pendapatan per kapita penduduk Provinsi Lampung pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen pada tahun 2024.

Grafik 2. 38 PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Lampung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Namun di Tahun 2020, terjadi penurunan PDRB Provinsi Lampung pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 1,54% pada tahun 2020 menjadi Rp3,43 juta pada 2021 akan tetapi PDRB Indonesia pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari Rp299,12 Juta menjadi Rp310,73 Juta. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi antara Provinsi Lampung dengan Indonesia secara keseluruhan. Provinsi Lampung mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yang artinya kemampuan masyarakat Lampung mengalami penurunan dalam hal

konsumsi akomodasi makan dan minum dan baru kembali membaik pada tahun 2022.

2.1.3.3 Inflasi

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

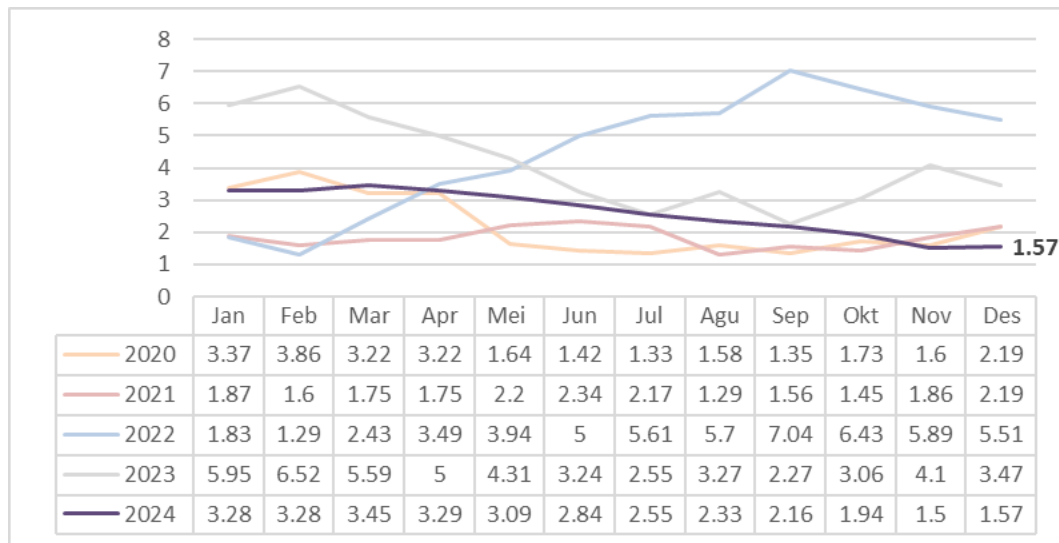
Grafik 2. 39 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Secara tahunan (y to d), inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada Triwulan IV 2023 tercatat masih berada pada rentang sasaran inflasi yaitu $3\% \pm 1$, yaitu senilai 3,47%, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2022 sebesar 5,51% yang merupakan angka inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir. Capaian Tahun 2023 tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,61% (y on y), namun lebih rendah daripada inflasi gabungan 28 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 2,17% (y to d).

Grafik 2. 40 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Secara tahunan (years to date), penyumbang inflasi terbesar pada Triwulan IV 2023 disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 2,27% dan Nilai Inflasi 9,36 % (ytd), diikuti oleh kelompok Pendidikan dengan andil sebesar 0,12% dan nilai inflasi 3,68% serta Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,11% dan nilai inflasi 2,15% (ytd).

Untuk wilayah Sumatera, pada tahun 2023 Provinsi Lampung Lampung menjadi provinsi dengan Inflasi tertinggi di Pulau Sumatera dengan capaian sebesar 3,47 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Provinsi Aceh dengan capaian sebesar 1,53 persen. Secara spasial, Inflasi Provinsi Lampung berada di atas rata-rata inflasi wilayah Sumatera maupun nasional.

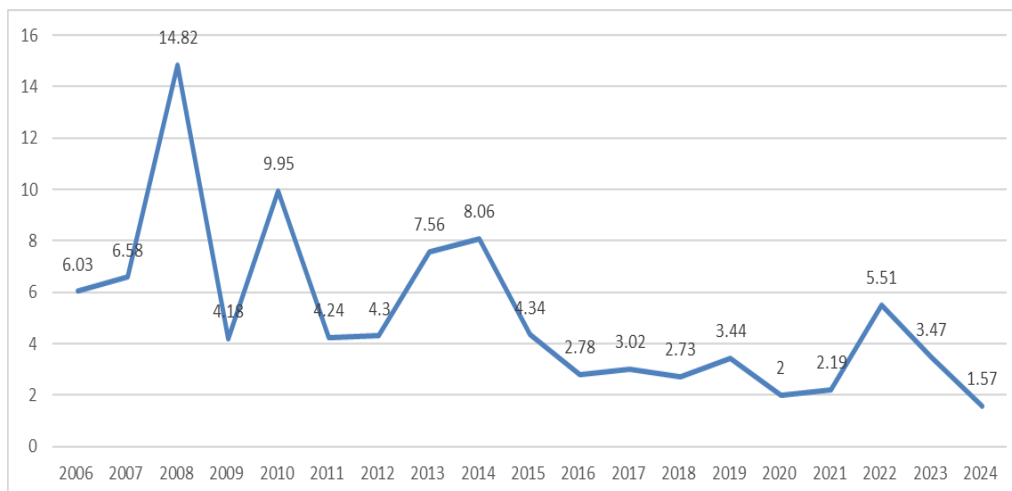
Secara garis besar, meningkatnya tekanan inflasi di triwulan IV 2023 dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan peningkatan tekanan inflasi pada seluruh kelompok Core Inflation, Volatile Food, dan Administered Price. Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan IV 2023, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi

ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, terdapat Gerakan Nasional (Gernas) Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Pengendalian Inflasi. Data statistik Lampung menunjukkan bahwa lebih 60 persen porsi perekonomian Lampung ditopang oleh konsumsi masyarakat, dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang juga dominan pada sisi permintaan (*demand*). Pengendalian inflasi dilaksanakan untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat, diantaranya dengan memperkuat program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, melalui strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif). Menguatnya daya beli masyarakat akan mendorong bergeraknya perekonomian pada sisi penawaran (*supply*). Pengendalian inflasi dalam tingkat yang wajar, akan menjadi insentif bagi pelaku ekonomi untuk terus berproduksi. Inflasi yang berlebihan akan menurunkan daya beli masyarakat yang akhirnya menggerus kualitas pertumbuhan ekonomi.

Tingkat inflasi Lampung pada periode tahun 2005-2010 sangat fluktuatif dan sempat berada pada level dua digit. Sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang diarahkan oleh pemerintah pusat, sinergitas pengendalian inflasi di daerah dan antardaerah semakin diperkuat untuk menghadapi berbagai tekanan inflasi yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal dalam perekonomian. Sejak tahun 2011 tingkat inflasi terus dijaga pada rentang sasaran yang mendukung kondisi perekonomian. Pengendalian inflasi berfokus untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis, yang didukung dengan upaya untuk memperbaiki kualitas infrastruktur dan antisipasi terhadap ancaman cuaca ekstrim yang dapat mengganggu rantai pasok bahan pangan masyarakat. Catatan pada lima tahun terakhir telah menunjukkan bahwa tingkat inflasi Lampung berada pada level 2-5 persen dan menjadi momentum untuk terus mendukung upaya pembangunan ekonomi yang diharapkan.

Grafik 2. 41 Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2006-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

2.1.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson

• Rasio Gini

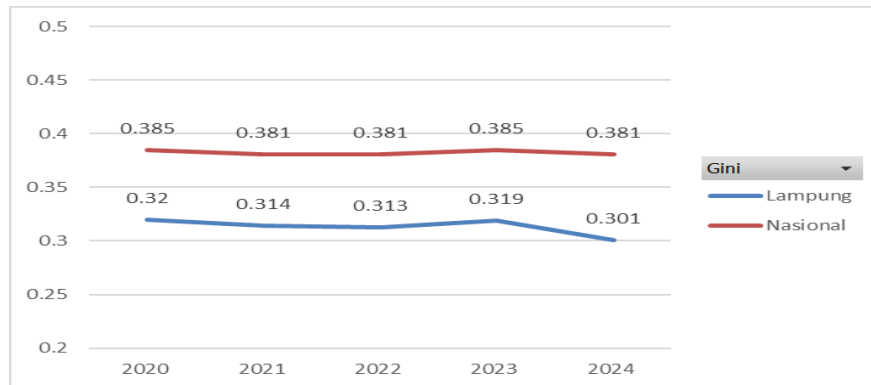
Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2019 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,330 tahun 2019 menjadi 0,313 pada Tahun 2022, Namun pada tahun 2023 Rasio Gini Provinsi Lampung sedikit meningkat menjadi 0,319 dan nilai ini masih berada dibawah rata-rata Nasional (0,385), dan pada Tahun 2024 nilai Rasio Gini Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,301 angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu turun sebesar 0,018 point. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Beberapa upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor

(*crosscutting*), perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, percepatan pembangunan pedesaan serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan.

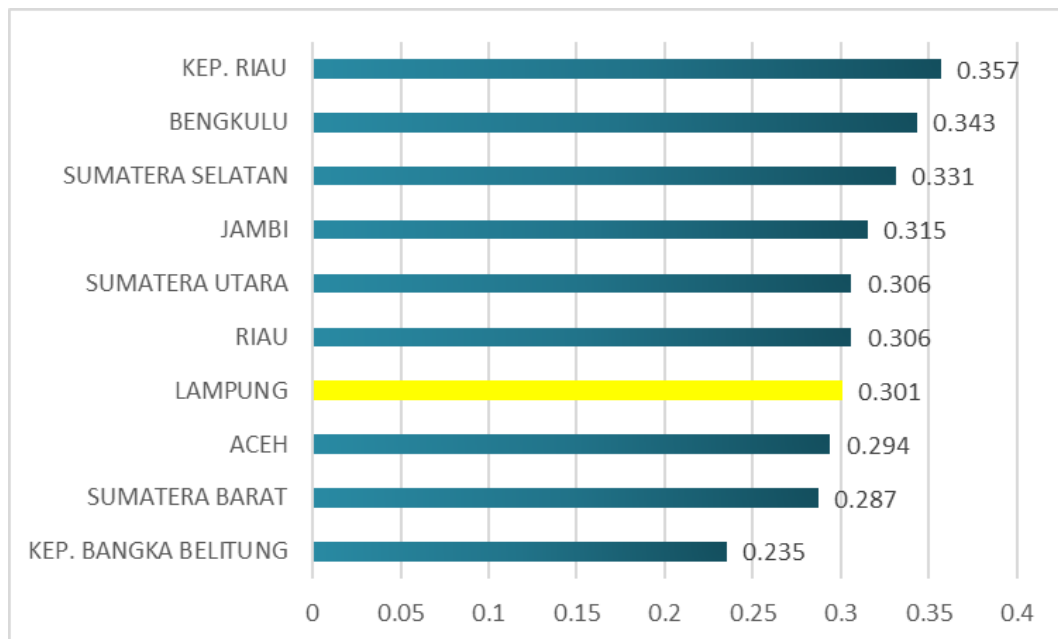
Grafik 2. 42 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025 (diolah).

Secara regional Sumatera, ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan menempati urutan keempat terendah bersama-sama Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat, Aceh.

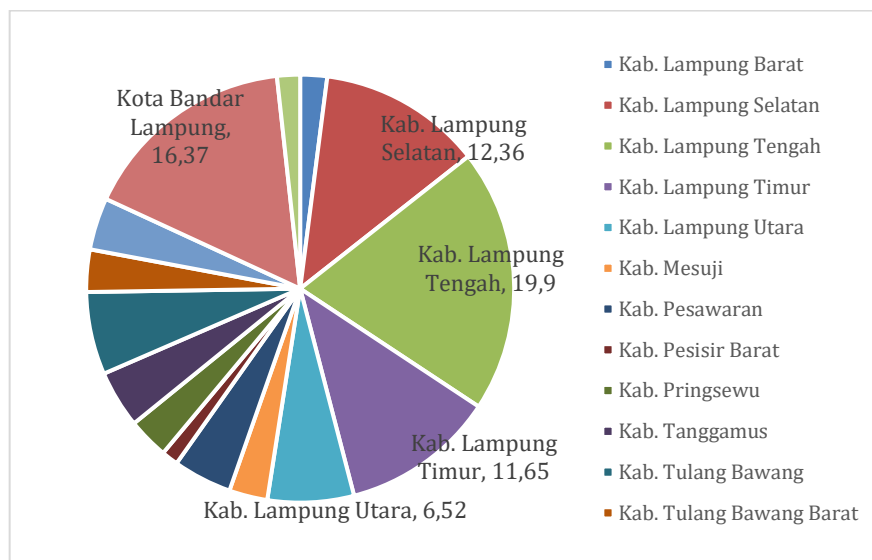
Grafik 2. 43 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025 (diolah).

Di Provinsi Lampung, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari angka gini ratio lebih disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini tergambarkan dari peranan PDRB kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung, dimana dimana 59 persennya disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur serta 1 (satu) kota yaitu Kota Bandar Lampung.

Grafik 2. 44 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

• Indeks Williamson

2.1.3.5 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks ini menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berdasarkan peta sebaran skor IDSD pada gambar di bawah, skor IDSD yang lebih dari 3,51 di Tahun 2023 masih terpusat di Pulau Jawa. Sementara hampir semua provinsi di Pulau Sumatera berada pada rentang skor IDSD 3,01 – 3,50.

Gambar 2. 45 Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2023



Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah 2023 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional

Skor IDSD Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah 3, yang termasuk dalam tiga provinsi dengan skor terendah di Pulau Sumatera, namun capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,02. Provinsi Lampung memiliki skor yang cukup tinggi pada pilar institusi, adopsi TIK (determinan kemajuan industri), kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja, dan dinamisme bisnis. Sementara skor IDSD rendah terdapat pada pilar infrastruktur, pasar produk, sistem keuangan, ukuran pasar dan kapabilitas inovasi. Sementara itu berdasarkan data pada tabel di bawah, rata-rata skor IDSD kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih berada di bawah capaian provinsi serta masih terdapat beberapa kabupaten yang belum memiliki skor IDSD. Daerah yang memiliki skor IDSD di atas capaian Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Tabel 2. 16 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung Tahun 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. LAMPUNG	4,16	2,76	3,66	3,70	3,84	3,48	2,12	3,41	2,10	4,55	3,81	2,80	3,36
RATA-RATA KAB/KOTA	4,11	2,46	4,40	3,22	3,81	3,22	2,61	3,06	1,61	4,21	3,07	1,64	3,25
LAMPUNG BARAT	4,42	1,98	4,41	3,37	3,68	3,25	2,85	2,72	0,88	3,82	2,70	0,88	2,91
TANGGAMUS	4,02	2,33	3,81	2,72	3,76	3,08	2,69	3,04	1,42	4,16	2,73	0,99	2,90
LAMPUNG SELATAN	3,97	2,06	4,69	3,23	3,82	2,97	2,26	3,38	1,66	4,62	2,60	2,67	3,16
LAMPUNG TIMUR	3,93	2,45	4,37	3,56	3,92	3,14	1,81	2,76	-	4,59	2,73	1,51	-
LAMPUNG TENGAH	3,90	2,32	4,31	3,38	3,85	3,04	1,89	3,09	2,28	4,83	2,97	1,54	3,12
LAMPUNG UTARA	-	2,79	4,19	2,74	3,81	3,14	2,67	3,13	1,48	4,35	3,09	1,84	-
WAY KANAN	4,21	2,50	4,49	3,31	3,82	3,03	2,03	3,01	-	4,11	2,43	0,72	-
TULANGBAWANG	4,01	2,14	4,54	3,52	3,86	3,03	1,97	2,99	0,82	4,33	3,74	1,30	3,02
PESAWARAN	4,10	2,55	4,31	3,24	3,80	3,15	2,34	2,93	-	4,19	3,24	1,48	-
PRINGSEWU	4,31	2,81	4,45	3,13	3,89	3,40	3,34	3,10	0,58	4,02	2,53	2,23	3,15
MESUJI	4,05	1,87	4,62	3,65	3,73	2,59	1,83	2,31	-	3,97	4,01	0,74	-
TULANG BAWANG BARAT	4,12	2,64	4,48	3,25	3,86	2,92	1,91	3,23	-	4,02	3,28	0,61	-
PESISIR BARAT	4,06	1,76	3,49	3,30	3,38	3,07	2,48	2,77	-	3,60	2,24	0,76	-
BANDAR LAMPUNG	3,90	3,01	4,88	2,92	3,97	4,04	4,20	3,67	2,74	4,74	3,38	3,59	3,75
METRO	4,54	3,74	4,90	2,94	3,99	4,38	4,88	3,73	2,65	3,75	4,33	3,69	3,96

Keterangan :

Pilar 1 : Institusi	Pilar 5 : Kesehatan	Pilar 9 : Sistem Keuangan
Pilar 2 : Infrastruktur	Pilar 6 : Keterampilan	Pilar 10: Ukuran Pasar
Pilar 3 : Adopsi TIK	Pilar 7 : Pasar Produk	Pilar 11: Dinamisme Bisnis
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja	Pilar12 : Kapabilitas Inovasi

Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah 2023 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional

2.1.3.6 Investasi

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki dengan potensi investasi yang cukup menjanjikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tren kenaikan realisasi investasi setiap tahunnya. Investasi atau penanaman modal di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan investasi ini diharapkan akan memicu pertumbuhan ekonomi dan

menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga secara langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 17 Target dan Realisasi Investasi di Provinsi Lampung
Tahun 2019–2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSEN
2019	6.000.000.000	4.756.685.700	79,28
2020	4.930.000.000	14.297.627.790	290,01
2021	10.800.000.000.000	13.050.668.202.202	120,84
2022	11.000.000.000.000	9.365.537.953.166	85,14
2023	11.000.000.000.000	10.890.002.000,00	99

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

• Pertumbuhan PMDN

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung periode Tahun 2019 - 2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, capaian terendah Tahun 2019 yaitu sebesar 2.480,9 Miliar Rupiah dan tertinggi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 10.513,2 Miliar Rupiah. Secara pertumbuhan nilai investasi, tahun 2020 adalah tahun dengan pertumbuhan nilai investasi tahunan tertinggi yaitu sebesar 193,15 %, capaian ini sebagai dampak pembangunan jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang berakhir pembangunannya pada tahun 2019.

Tabel 2. 18 Realisasi PMDN Provinsi Lampung Tahun 2019–2023

TAHUN	PMDN (Rp. Miliar)	Total Proyek
2019	2.428,90	241
2020	7.120,50	1.271
2021	10.513,20	2.169
2022	5.809,23	2.163
2023	7.625,80	5.957

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

• Pertumbuhan PMA

Pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Bahkan pada Tahun 2020, realisasi nilai investasi PMA mencatat rekor kenaikan terbesar yaitu dengan nilai investasi sebesar 498,41 US\$ Juta atau meningkat sebesar 221,18 % dibandingkan capaian Tahun 2019.

Tabel 2. 19 Realisasi PMA Provinsi Lampung Tahun 2019–2023

TAHUN	PMA (US\$. Ribu)	Total Proyek
2019	155.187,70	158
2020	498.411,00	384
2021	173.800,00	363
2022	247.826,10	435
2023	220.553,90	911

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

2.1.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan

- Kawasan Pertanian

Potensi kawasan pertanian di Provinsi Lampung terdiri dari hortikultura, perkebunan, tanaman pangan dan peternakan yang tersebar disetiap kabupaten/kota seluas 880.758,21 ha atau 26,24%. Luas potensi hortikultura seluas 72.820,47 ha, perkebunan seluas 446.346,52 ha, tanaman pangan seluas 361.407,17 ha dan peternakan seluas 184,05 ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20 Luas Kawasan Pertanian Provinsi Lampung

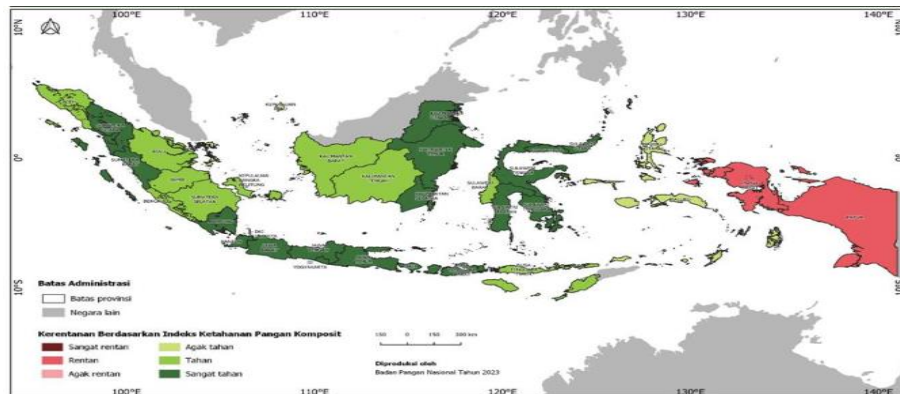
Kabupaten/Kota	Kawasan Hortikultura	Kawasan Perkebunan	Kawasan Peternakan	Kawasan Tanaman Pangan	Grand Total (ha)
Bandar Lampung	0,18	0,12	-	602,62	602,93
Lampung Barat	7.117,16	63.833,24	-	10.276,56	81.226,97
Lampung Selatan	164,85	13.050,17	-	39.082,55	52.297,57
Lampung Tengah	21.832,20	111.793,29	181,46	79.566,71	213.373,65
Lampung Timur	-	-	-	58.275,68	58.275,68
Lampung Utara	-	0,03	-	15.094,48	15.094,51
Mesuji	-	56.920,45	-	29.653,76	86.574,21
Metro	45,69	-	2,59	2.945,62	2.993,90
Pesawaran	13.193,57	43.813,14	-	13.134,45	70.141,17
Pesisir Barat	-	-	-	8.583,44	8.583,44
Pringsewu	8.229,78	4.422,31	-	13.886,39	26.538,48
Tanggamus	0,39	24,46	-	17.123,52	17.148,34
Tulang Bawang	-	503,61	-	52.108,49	52.612,10
Tulang Bawang Barat	1.584,50	69.259,16	-	6.918,72	77.762,38
Way Kanan	20.652,16	82.726,54	-	14.154,17	117.532,88
Jumlah	72.820,47	446.346,52	184,05	361.407,17	880.758,21

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

- Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan Daerah Lampung Kuat dan Mantap dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung yang sangat baik dan masuk dalam kategori “sangat tahan” dengan nilai capaian 81,56 pada tahun 2023.

Gambar 2. 46 Peta Sebaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Seluruh Provinsi di Indonesia 2023



Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 oleh Badan Pangan Nasional

Berdasarkan data IKP Tahun 2023, terdapat 11 kabupaten dan 2 (dua) kota di Provinsi Lampung yang masuk dalam kategori “sangat tahan” dengan IKP lebih dari 74,40. Sementara hanya terdapat 2 (dua) kabupaten yang masih masuk dalam kategori “tahan” yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2. 21 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Pangan
Tulang Bawang	88,78
Mesuji	88,18
Pringsewu	87,35
Lampung Timur	85,22
Lampung Selatan	84,46
Lampung Tengah	84,93
Tulang Bawang Barat	83,74
Way Kanan	79,61
Pesawaran	80,85
Lampung Utara	76,82
Lampung Barat	76,18
Tanggamus	76,40
Kota Bandar Lampung	84,64

Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Pangan
Kota Metro	85,78
Pesisir Barat	75,77

Sumber : Satu Data Badan Pangan Nasional, 2025

Tabel 2. 22 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2023

Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	87,65	18	Sulawesi Tenggara	74,96
2	Jawa Tengah	84,80	19	Kalimantan Utara	74,59
3	DKI Jakarta	83,80	20	Sumatera Selatan	73,82
4	Sulawesi Selatan	83,36	21	Sulawesi Barat	73,03
5	Sumatera Barat	83,22	22	Aceh	72,96
6	DI Yogyakarta	83,17	23	Bengkulu	72,27
7	Jawa Timur	82,46	24	Kalimantan Barat	72,20
8	Jawa Barat	82,19	25	Jambi	72,17
9	Gorontalo	81,63	26	Nusa Tenggara Timur	71,25
10	Lampung	81,56	27	Kep. Bangka Belitung	71,14
11	Kalimantan Selatan	81,26	28	Kalimantan Tengah	68,90
12	Kalimantan Timur	79,29	29	Riau	68,68
13	Banten	78,71	30	Kep. Riau	65,10
14	Sulawesi Utara	77,32	31	Maluku	64,37
15	Nusa Tenggara Barat	76,51	32	Maluku Utara	62,34
16	Sumatera Utara	75,97	33	Papua Barat	47,95
17	Sulawesi Tengah	75,83	34	Papua	42,27

Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 oleh Badan Pangan Nasional

Komoditas unggulan untuk tanaman pangan di Provinsi Lampung terdiri dari 3 (tiga) komoditas yaitu Padi, Jagung, dan Ubikayu. Produksi Jagung dan Ubikayu selama kurun waktu 2018 sampai 2023 mengalami peningkatan. Produksi Jagung meningkat sebesar 422.691 ton. Peningkatan produksi Jagung tertinggi terdapat di tahun 2021 dan 2022 yakni mencapai 3 (tiga) juta ton, namun produksi tersebut menurun di tahun 2023, meskipun secara umum terjadi peningkatan produksi selama periode waktu 6 (enam) tahun. Pada produksi Ubi kayu ditahun 2023 mencapai 7,3 juta ton, dengan peningkatan sebesar 2.252.135 ton selama periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Produksi ubi kayu sempat mengalami penurunan di tahun 2019 dikarenakan adanya penurunan harga yang mengakibatkan petani tidak mendapatkan keuntungan, musim tanam yang tidak serentak dikarenakan

banyak petani yang menunggu membaiknya harga ubi kayu, dan kualitas ubi kayu yang tidak memenuhi standar pabrik.

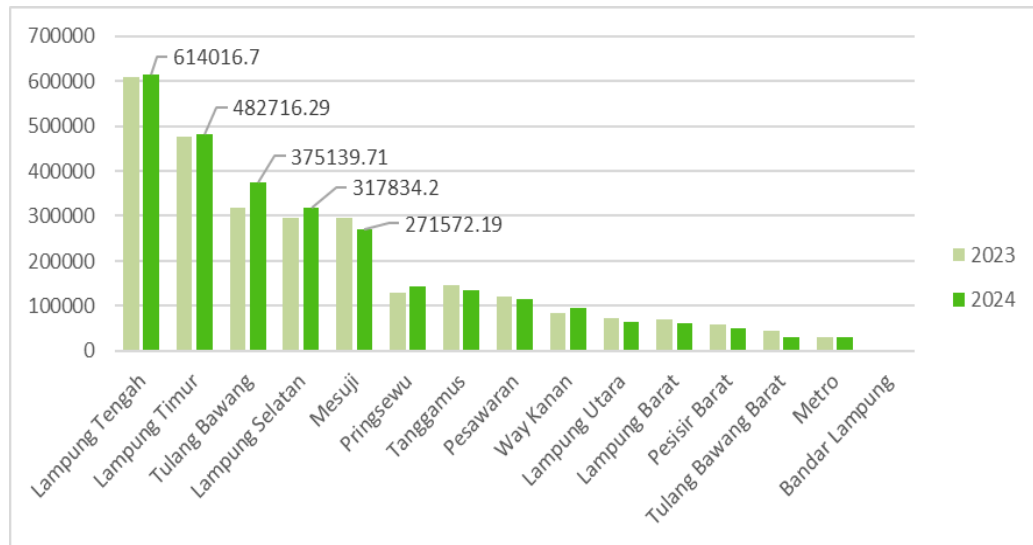
Tabel 2. 23 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Provinsi Lampung
Tahun 2018-2023

No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Padi (Ton GKG)	4.343.586	2.164.089	2.650.290	2.485.453	2.688.160	2.728.781
2	Produksi Jagung (Ton PK)	2.449.016	2.374.384	2.896.191	3.145.015	3.184.443	2.871.707
3	Produksi Ubikayu (Ton)	5.055.614	4.929.044	5.846.981	6.194.601	7.372.786	7.307.749

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, 2024

Produksi komoditas tanaman pangan di Provinsi Lampung selama periode 2018 sampai 2023 untuk produksi padi mengalami penurunan, dimana ditahun 2018 Produk padi mencapai 4,3 juta ton turun menjadi 2,7 juta ton di tahun 2023. Selama periode 6 (enam) tahun penurunan mencapai 1,614,805 ton. Produksi padi menurun secara signifikan di tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan perhitungan yaitu metode kerangka sampel area. Di sisi lain terdapat kabupaten yang mengalami kenaikan produksi padi di tahun 2023 yaitu kabupaten Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Penurunan produksi padi di tahun 2023 terjadi di beberapa wilayah potensial penghasil padi yaitu kabupaten Lampung Selatan, Way Kanan, dan Pesawaran.

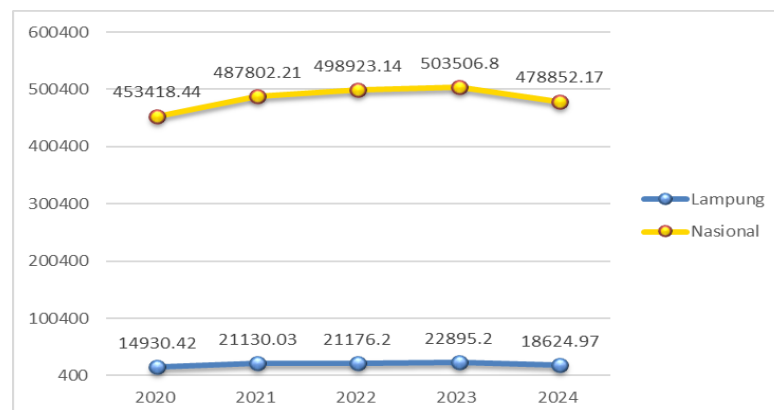
Grafik 2. 47 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2023 dan 2024



Sumber : BPS, 2025

Produksi daging sapi di Provinsi Lampung di tahun 2023 mencapai 22.895,20 ton meningkat dibandingkan tahun 2022. Dalam periode lima tahun produksi daging sapi meningkat sebesar 8.569,01 ton. Kontribusi produksi daging sapi Provinsi Lampung sebesar 4,55 persen terhadap produksi daging sapi Nasional. Kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kontribusi daging sapi Lampung terhadap nasional di tahun 2022 yang sebesar 4,24 persen.

Grafik 2. 48 Produksi Daging Sapi (ton) Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Secara regional Sumatera produksi daging sapi Provinsi Lampung di tahun 2023 berada pada peringkat ke 2 (dua) dengan capaian produksi daging sapi sebesar 22.895,20 ton, berada dibawah Provinsi Sumatera Barat dengan produksi daging sapi sebesar 31.194,40 ton. Capaian pada peringkat ke dua ini konsisten bertahan dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2. 24 Tabel Produksi Daging Sapi (ton) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024

Produksi Daging Sapi	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung	14930.42	21130.03	21176.2	22895.2	18624.97
Sumatera Utara	12986.16	13745.06	13859.09	15902.8	18245.02
Sumatera Barat	20980.53	21375.13	21514.66	31194.4	14901.14
Riau	8737.3	8948.7	9127.69	10974.8	13457.12
Sumatera Selatan	14358.28	13832.62	15458.87	12171.5	11810.74
Aceh	12927.76	11674.1	12014.96	15644.5	11006.35
Jambi	5543.42	4638.46	5760.1	4920.9	3571.72
Kep. Bangka Belitung	2986.1	3233.04	3395.04	3485.7	2490.58
Kep. Riau	2263.1	1453.07	1390.39	1820.9	2202.22
Bengkulu	3075.23	4348.01	3329.27	3355.5	1762.83

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Dalam hal produksi daging ayam ras pedaging, Provinsi Lampung merupakan produsen pada urusan ke 3 (tiga) di wilayah regional Sumatera dan konsisten dari sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Produksi daging ayam ras pedaging ini terus meningkat hingga mencapai 118.389,00 ton di tahun 2023, atau meningkat sebesar 18.615,61 ton selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 2. 25 Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (ton) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024

Produksi Ayam Ras Pedaging	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Utara	139,447,786	147,044,203	162,495,132	163,512,287	162,457,033
Sumatera Selatan	94,283,758	99,833,249	104,071,426	111,911,551	110,193,702

Lampung	83,762,079	84,286,013	103,657,519	89,057,394	86,895,157
Riau	84,743,269	81,658,751	87,783,728	90,334,840	85,950,783
Sumatera Barat	54,364,507	46,715,100	36,835,762	55,107,244	53,522,495
Jambi	40,371,268	44,027,911	42,429,895	50,197,162	47,225,872
Aceh	32,590,982	34,075,587	42,624,010	35,758,787	35,891,791
Kep. Bangka Belitung	18,689,049	21,159,172	26,586,647	22,322,966	22,668,162
Kep. Riau	0,588,392	16,395,273	20,341,590	17,545,479	17,945,495
Bengkulu	8,663,406	9,846,509	12,066,512	10,466,973	10,704,499

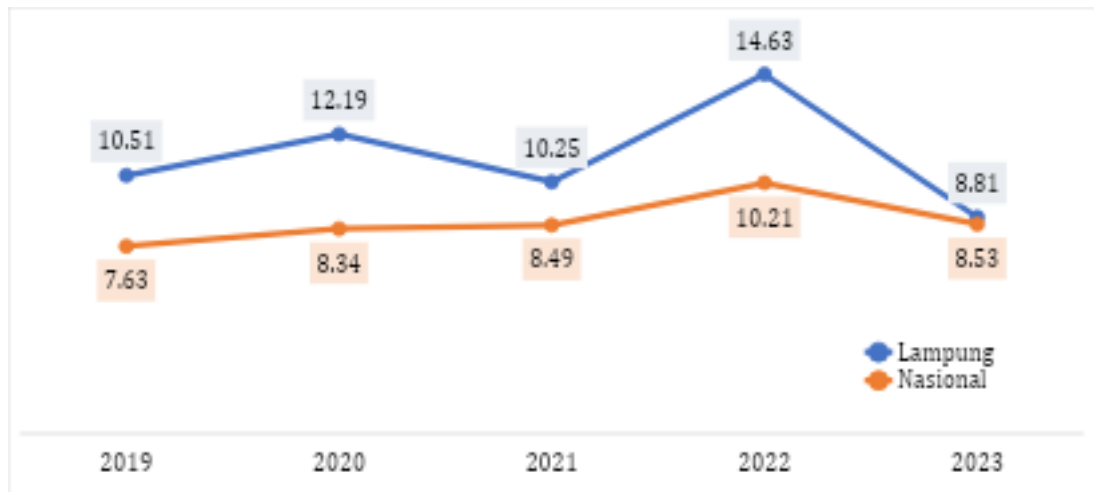
Sumber : BPS Indonesia, 2025

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment (PoU)* dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi. Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Penghitungan PoU ini merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional/*National Food Agency (NFA)* dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023 cenderung mengalami penurunan, yang dapat diartikan bahwa upaya Provinsi Lampung untuk memenuhi kecukupan pangan mengalami pertumbuhan yang tumbuh positif meskipun masih berada di bawah rata-rata capaian nasional. Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Provinsi Lampung Tahun 2019 sebesar 10,51 persen kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2022 menjadi 12,19 persen yang disebabkan oleh menurunnya kecukupan pangan akibat pembatasan kegiatan masyarakat saat pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 capaian tersebut kembali mengalami perbaikan menjadi 10,25 persen, namun mengalami kenaikan yang cukup drastis di Tahun 2022 menjadi 14,63 persen yang disebabkan oleh menurunnya produktivitas di sektor pertanian yang mampu mencukupi konsumsi pangan daerah.

Grafik 2. 49 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2019 – 2023

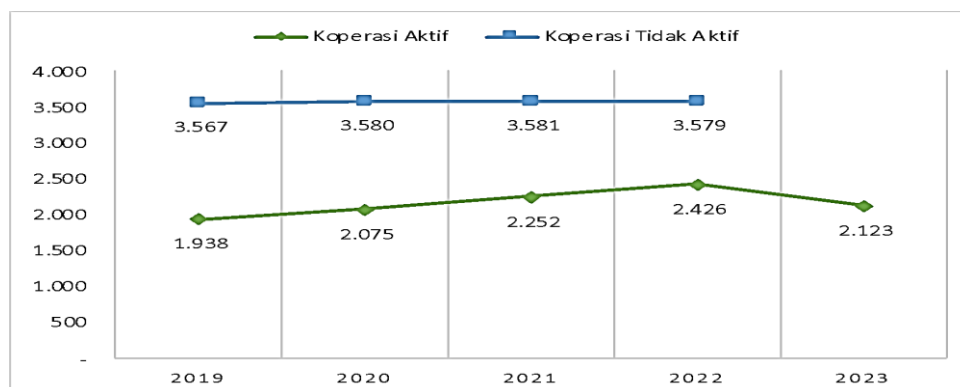


Sumber : BPS Indonesia, 2024

2.1.3.8 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Merujuk pada UU nomor 5 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Jumlah koperasi di Provinsi Lampung baik yang menjadi kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 2.123 koperasi, dengan jumlah koperasi kewenangan nasional sebanyak 74 koperasi, kewenangan provinsi sebanyak 302, dan kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1.720 koperasi. Secara nasional jumlah koperasi sebesar 131.164 koperasi.

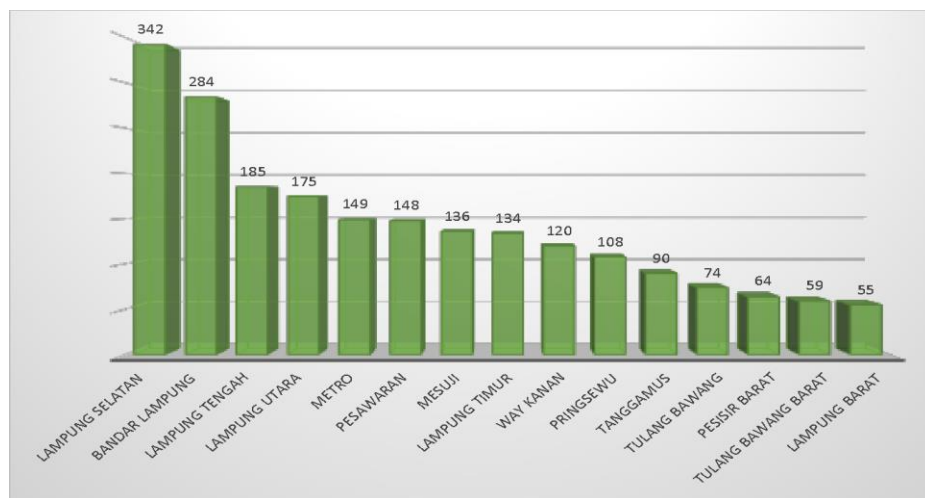
Grafik 2. 50 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2024

Jumlah koperasi aktif sejak tahun 2019 terus bertumbuh dari angka 1.938 menjadi 2.123, dengan penambahan jumlah koperasi sebesar 185 unit selama lima tahun. Meskipun di tahun 2022, jumlah koperasi aktif berkurang sebesar 303 unit dari 2022 sampai 2023. Jumlah koperasi yang tidak aktif masih cukup tinggi selama periode lima tahun pada angka tiga ribu unit koperasi.

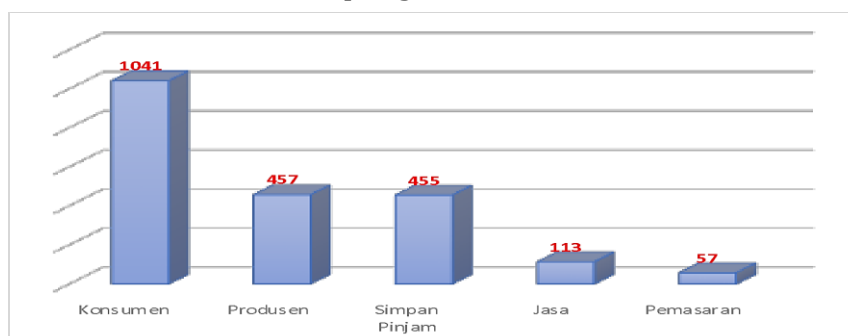
Grafik 2. 51 Rekapitulasi Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2024

Berdasarkan Grafik jumlah koperasi di Provinsi Lampung, 3 (tiga) besar kabupaten dengan jumlah koperasi tertinggi adalah Kabupaten Lampung Selatan (342 koperasi), Kota Bandar Lampung (284 koperasi), dan Kabupaten Lampung Tengah (185 koperasi). Untuk jumlah koperasi paling sedikit ada di Kabupaten Lampung Barat (55 koperasi).

Grafik 2. 52 Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan Jenis Koperasi di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2024

Jenis koperasi terbesar di Provinsi Lampung adalah jenis koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Jumlah koperasi yang hampir berimbang adalah jenis koperasi produsen dan simpan pinjam, yaitu jenis koperasi produsen sebanyak 457 dan jenis koperasi pemasaran sebanyak 455.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu menjadi tulang punggung perekonomian dan mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Khususnya UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dimana UMKM terbukti mampu bertahan dalam kondisi kritis, sebagai contoh ketika menghadapi krisis moneter tahun 1998 dan pandemic covid-19.

Tabel 2. 26 Jumlah UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

No	Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Total
1	2020	143.948	3.452	156	147.556
2	2021	147.926	2.917	156	150.999
3	2022	273.120	291	46	273.457
4	2023	472.544	18.448	1.994	492.986

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2024

Sektor UMKM di tahun 2023 tumbuh sangat tinggi, dengan pertumbuhan usaha mikro mencapai 328.596 unit dalam periode tahun 2020 sampai 2023. Selama periode tersebut usaha mikro tumbuh konsisten, berbeda dengan pertumbuhan usaha kecil dan usaha menengah dimana di tahun 2022 masing-masing mengalami penurunan dengan jumlah usaha kecil 291 unit dan usaha menengah sebanyak 46 unit. Secara umum di tahun 2023 pertumbuhan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sangat tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan aset maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta, Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria aset lebih dari 500 juta dengan omset lebih dari 300 juta sampai 2,5 milyar, dan usaha menengah merupakan usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau

usaha besar dengan asset lebih dari 500 juta sampai 10 milyar, dengan omset lebih dari minimal 2,5 milyar sampai 50 milyar.

Berdasarkan data tersebut, Lampung memiliki potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan cukup banyak menyerap tenaga. Di tahun 2020 jumlah UMKM di Provinsi Lampung sebanyak 147.556 unit, secara konsisten mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga berjumlah 492.986 unit di tahun 2023. Selama periode 2020 sampai 2023 pertumbuhan UMKM mencapai 345.430 unit.

Tabel 2. 27 Jumlah Data UMKM Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2023 Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha		
		2021	2022	2023
1	Lampung Barat	1.747	9.736	20.521
2	Tanggamus	186	4.214	27.801
3	Lampung Selatan	701	15.406	41.173
4	Lampung Timur	547	41.250	33.528
5	Lampung Tengah	796	60.841	60.848
6	Lampung Utara	457	27.407	28.656
7	Way Kanan	840	1.100	58.004
8	Tulang Bawang	23	35.612	32.428
9	Pesawaran	482	7.394	43.330
10	Pringsewu	1.933	24.779	45.683
11	Mesuji	292	8.676	16.433
12	Tulang Bawang Barat	179	7.547	23.750
13	Pesisir Barat	429	8.346	10.621
14	Bandar Lampung	118.533	4.460	30.940
15	Metro	23.854	16.689	19.270
Jumlah		150.999	273.457	492.986

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2024

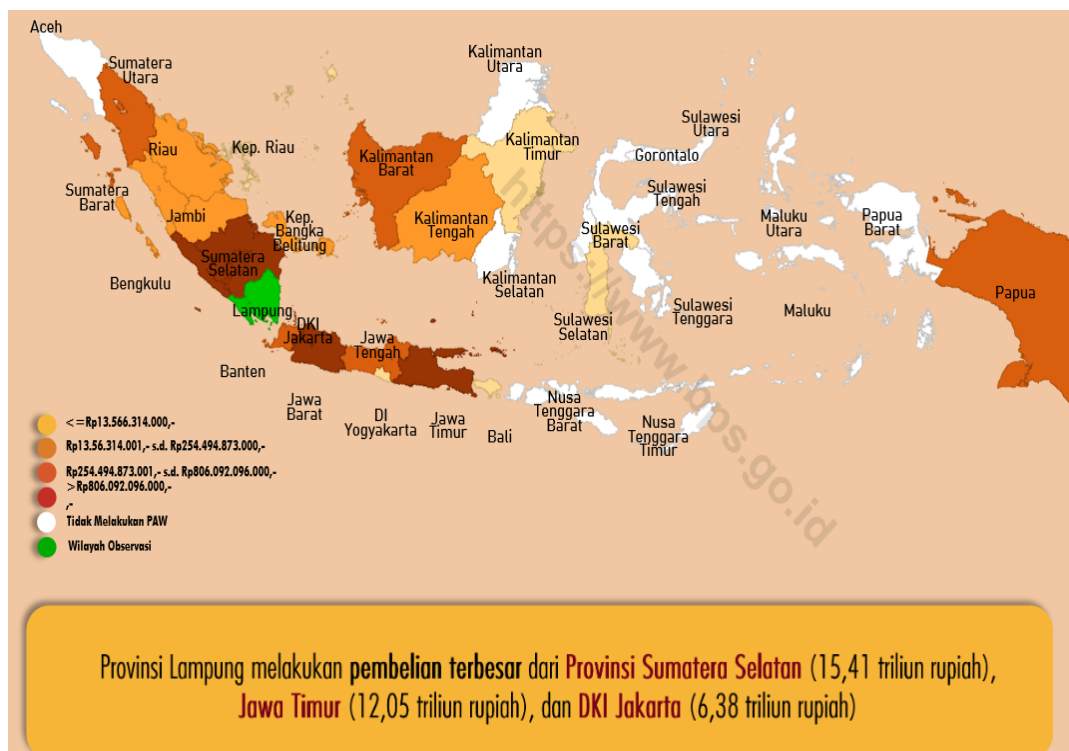
Begitu juga dengan jumlah UMKM yang tersebar di kabupaten/kota. Dalam periode tahun 2021 UMKM lebih banyak terkonsentrasi di Kota Bandar Lampung dengan jumlah UMKM sebesar 118.533, namun di tahun 2022 UMKM di Kota Bandar Lampung menurun secara drastis sampai di angka 4.460 UMKM, namun kembali meningkat di tahun 2023 dengan jumlah 30.940 unit. Sebaran UMKM kabupaten/kota di tahun 2023 cukup merata, dengan pertumbuhan UMKM tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan, dan Pringsewu.

2.1.3.9 Perdagangan

Perdagangan adalah salah satu komponen penting dalam perekonomian. Perdagangan adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara individu, perusahaan, atau negara. Perdagangan terbagi menjadi kedua kategori utama yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional.

Berdasarkan data rilis Perdagangan Antar Wilayah (PAW) Provinsi di Indonesia pada Tahun 2022 mengalami defisit 21,87 triliun rupiah, yang didominasi oleh penjualan minyak kelapa sawit mentah dengan nilai penjualan sebesar 5,11 triliun rupiah. Kelompok komoditas terbesar adalah: batubara (tidak diaglomerasi); cerutu, *cheroot*, cerutu kecil dan sigaret dari tembakau atau pengganti tembakau; minyak kelapa sawit mentah; minyak bahan bakar; dan alat transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor untuk penumpang.

Gambar 2. 53 Peta Pembelian Antar Wilayah (PAW) Provinsi Lampung



Sumber : Publikasi Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023, BPS RI

2.1.3.10 Perindustrian

Perindustrian mengacu pada proses produksi barang dan jasa yang melibatkan penggunaan teknologi, tenaga kerja, dan bahan baku untuk menciptakan produk yang siap untuk dipasarkan. Perindustrian sering kali berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Selain itu, industri juga memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga penting untuk mengelola proses industri dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Tabel 2. 28 Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	-5,22	4,69	0,38	1,43	9,09
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-6,61	-0,71	0,42	3,05	-41,91
2. Industri Makanan dan Minuman	-4,58	5,85	0,65	1,9	12,28
3. Industri Pengolahan Tembakau	-14,01	-11,77	-7,52	0,37	0,61
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-15,68	5,9	-12,2	2,32	2,63
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6. Industri Barang Galian bukan Logam	-22,95	-24,78	-51,4	-25,83	-28,65
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas;	-5,55	4,7	19,53	12,59	4,20
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-6,5	2,5	-1,95	-1,79	-5,19
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-4,34	-3,16	-0,75	-1,99	-7,82
10. Industri Barang Galian bukan Logam	-9,71	1,19	-4,39	2,43	-3,25
11. Industri Logam Dasar	4,45	-1,39	1,13	-6,81	2,33
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik	-12,4	-0,5	-9,22	-4,65	-3,96
13. Industri Mesin dan Perlengkapan	-13,82	16,73	12,01	2,20	-1,42
14. Industri Alat Angkutan	-8,93	7,88	10,56	1,46	-8,22
15. Industri Furnitur	-15,14	-10,42	-10,42	4,12	-2,65
16. Industri Pengolahan Lainnya;	-5,16	-0,08	4,41	9,67	2,23

Sumber : BPS 2025

2.1.3.11 Pariwisata

Dari sisi pariwisata, Provinsi Lampung memiliki potensi pengembangan pariwisata baik alam maupun buatan sebagai sektor pendukung perekonomian. Potensi sektor pariwisata yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki dampak yang besar bagi pembangunan daerah apabila didukung dengan pengelolaan yang tepat, diantaranya :

Tabel 2.29 Pariwisata di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Pariwisata
Kota Bandar Lampung	Taman wisata terdiri dari Taman Wisata Bumi Kedaton (Taman Satwa dan Wisata, Resort, Waterpark), Taman Wisata Wira Garden, Taman Wisata Lembah Hijau, Taman Kupu Kupu Gita Persada, Taman Wisata Alam Batu Putu dan Taman Dipangga. Objek wisata pantai terdiri dari Pantai Duta Wisata dan Pantai Puri Gading. Objek peninggalan sejarah yaitu Monumen Gunung Krakatau, Vihara Thay Hin Bio, dan Museum Negeri Lampung Ruwa Jurai.
Kabupaten Lampung Selatan	Objek wisata pantai yaitu Pantai Marina, Pantai Laguna, Pantai Pasir Putih, Pantai Bagus, Pantai Guci Batu Kapal, Pantai Kresna, Pantai Merak Belantung, Pantai Sapenan, Pantai Tanjung Beo, Pantai Way Urang, Tanjung Selaki, Pantai Tarahan, Pantai Mandiri, Pantai Belebuk, Teluk Mengkudu, Pantai Pancur Permai, Pantai Canti, Pantai Kahai, Pantai Kunjir, Pantai Wartawan, Pantai Way Muli, Pantai Suak, Teluk Nipah, dan Pulau Sebesi dan Sebuku. Objek wisata alam tirta yaitu Air Terjun Kembar, Air Terjun Curuk Layang, Air Terjun Way Kalam, Air Panas Ciperes, Sumber Air Panas Way Belerang, Way Panas Bumi Natar, Air Terjun Way Peros, dan Air Terjun Sarmun. Wisata gunung diantaranya Gunung Rajabasa, Gunung Batu, dan Gunung Anak Krakatau.
Kabupaten Pesawaran	Pantai Mutun dan Pulau Tangkil, Pantai Sari Ringgung dan Pulau Tegal, Pantai Klara, Pantai Klaura, Pulau Tembikil, Pulau Kelagian, Pulau Pahawang, Pulau Tanjung Putus, dan <i>Marines Eco Park</i> .
Kabupaten Tanggamus	Objek wisata bahari terdiri dari Pantai Mulang Sayang, Pantai Bahari, Pantai Mutiara, Pantai Batu Malang, Pantai Batu Kebo, Pantai Cukuh Pandan, Pantai Harapan, Pantai <i>Saw Mill</i> , Pantai Harapan, Pantai Digul, Pantai Karang Teritos, Pantai Terbaya, Pantai Teba, Pantai Pihabung, Pantai Kerta, Pantai Pasir Putih, Pantai Teluk Yengokh, Pantai Cumuk, Pantai Badak Indah, Pantai Karang Indah, Pantai Karang Bolong, Pantai Harapan Jaya, Pantai Batu Naga, Pantai Selancar, Pantai Pegadungan, Pantai Karang Mulya, Pantai Batu Suluh, dan Pantai Karang Bebay. Objek wisata alam terdiri dari K. Tampang Belimbing, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lembah Sanggi, Bukit Batu Keramat, Gua Walet Putih, Karang Bebay, Pulau Kelapa, Pulau Tabuan, Pulau

Kabupaten/Kota	Pariwisata
	Kiluan, dan Eko Wisata Cikal Negri. Objek wisata alam tirta diantaranya Air Terjun Jeram Semaka, Air Terjun Curup Way Kerap, Air Terjun Curup Karang Agung, Air Terjun Way Nyapuk, Air Terjun Way Tapisan, Air Terjun Talang Ogan, Air Terjun Curup, Air Terjun Cihandak, Air Terjun Tirta Rima, Air Terjun Curup, Air Terjun Kelahang, Air Terjun Way Lalaan, dan Way Bekhak. Objek wisata buatan diantaranya Waduk Batu Tegi, Bendungan Pajajaran, dan Bendungan Way Payung.
Kabupaten Lampung Barat	Situs Megalitik Kebon Tebu Sumber Jaya, Kawasan Batu Brak, Kawasan Perkebunan Kopi Hanakau, Desa Tradisional Kenali Danau Ranau, Gunung Seminung, Gunung Pesagi, Desa Wisata Hujung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Danau Ranau, Wisata Gunung Pesagi, dan Wisata Alam Kubu Perahu.
Kabupaten Pesisir Barat	Rhino Camp Sukaraja Atas, Way Pemerihan (Pos Patroli Gajah), Way Heni, Penangkaran Penyu Muara Tembulih, Surfing Spots (Way Jambu, Karang Nyimbor, Mandiri, Pantai Labuhan Jukung, Way Redak, Pugung Tampak), Pantai Tanjung Setia, Pantai Way Redak, Kawasan Wisata Alam dan Sejarah Way Manula, Pekon Pahmungan, dan Pulau Pisang.
Kabupaten Lampung Timur	Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Pusat Konservasi Gajah, Desa Tradisional Wana, Taman Purbakala Pugung Raharjo, Sentra Penjualan Bibit Buah-Buahan & Balai Benih Induk Hortikultura Pekalongan, Pantai Karang Mas, Pantai Mutiara, Pantai Baru, Pantai Cemara, Pantai Keruju dan Pesanggrahan Way Curup.
Kota Metro	Objek wisata Kota Metro yaitu Taman Merdeka, Lapangan Samber, Perpustakaan Daerah, Masjid Taqwa, Stadion Tejosari, dan Taman Palem Indah.
Kabupaten Lampung Tengah	Objek wisata alam yaitu Air Terjun Curup Tujuh, Danau Tirta Gangga, Air Terjun Bilik, Danau Telogo Rejo, dan Danau Bekri. Objek wisata religius yaitu Gua Maria. Objek wisata agro yaitu Perkebunan dan Pengalengan Nanas, Perkebunan Buah-buahan dan Pembibitan, serta Taman Pusat Tanaman Obat/Herbal.
Kabupaten Pringsewu	Beberapa Objek wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu di antaranya tempat wisata ziarah berupa Makam KH Ghalib dan wisata religi umat Katolik Goa Maria La Verna, bangunan bersejarah peninggalan Belanda berupa Talang, kawasan Bukit Bintang, Telaga Gupit, Pure Giri Sutra Mandala, Kampung Air Balong Kuring, Bukit Sarinongko, Bukit Silitonga, Bukit Pangonan, Kolam Renang Grojogan Sewu, Kolam Renang Tirto Asri, Cekdam Way Ngison, dan Air Karawang.
Kabupaten Lampung Utara	Objek wisata yang ada di kabupaten ini merupakan objek wisata alam dan objek wisata agro, serta objek wisata budaya yaitu Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Tebabeng, Bendungan Tirta Sinta, Curup Klawas, Curup Selampung, Danau Buatan Way Abung, Danau Way Tulung Mas, Air Terjun (Curup) Fajar, Air Terjun (Curup) Gadung, Air

Kabupaten/Kota	Pariwisata
	Terjun (Curup) Merai, Air Terjun (Curup) Sukemi, Paya Udang, Paya Burung, Arung Sungai Way Rarem, Perkebunan Lada, Perkebunan Tebu, Perkebunan Salak.
Kabupaten Tulang Bawang	Kota Tua Menggala, Rest Area & Water Boom, Desa Cakat Nyenyek, dan Rumah Terapung.
Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kampung Tradisional, Makam Pahlawan, Bawang Lambu, <i>Water Boom</i> , Pemancingan dan Lesehan
Kabupaten Way Kanan	Danau Randing, Air Terjun Curup Kembar Bukit Duduk, Sialang Badas, Wisata Bendungan Irigasi Way Umpu, Putri Malu, Air Terjun Bukit Duduk, Air Terjun Curup Putri Kembar, Panorama Indah Bukit Duduk, Potensi Wisata Sungai Way Umpu, Curup Binatan, Goa Macan, Curup Batu Api, Air Terjun Pinang Indah, Air Terjun Maria, Air Terjun Curup Susukan, Air Terjun Curup Ranggau, Air Terjun Curup Penyandingan, Air Terjun Way Kawat, Bendungan Way Mencar
Kabupaten Mesuji	Bendungan Simpang Pematang, Puncak Wiralaga, Wisata Bahari Wiralaga, Bendungan Embung Blibis, Bendungan Benil, Bendungan Tanjung Sari, Bendungan Tri Karya Mulya, Bendungan Embung Buko Poso, Bendungan Embungan Bumi Harapan, dan Bendungan Embung Hadi Mulyo.

Sumber: BPS Provinsi Lampung. 2024

Berdasarkan potensi-potensi yang ada, terdapat beberapa wilayah pengembangan pariwisata Provinsi Lampung berdasarkan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), Kawasan Strategik Pariwisata Daerah (KSPD), dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD).

Tabel 2. 51 Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung

No.	DPD	KSPD	KPPD
1	DPD I Teluk Lampung, Selat Sunda dan Sekitarnya	1. KSPD Gunung Anak Krakatau-Sebesi & Gunung Rajabasa dan sekitarnya 2. KSPD kota BandarLampung 3. KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung Pesawaran dan 4. KSPD Kiluan dan Kelumbayan	1. KPPD di Kabupaten Lampung Selatan 2. KPPD di Kota Bandar Lampung 3. KPPD di Kabupaten Pesawaran
2.	DPD II Pesisir, Pabtai Barat, TNBBS dan Sekitarnya	1. KSPD pesisir pantai barat Lampung di Barat 2. KSPD Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 3. KSPD Danau Ranau dan sekitar di Kab.Lampung Barat	1. KPPD Suoh dan sekitar di kabupaten Lampung Barat 2. KPPD pesisir pantai Kota Agung sekitarnya di Kab. Tanggamus
3.	DPD III Way Kambas dan Sekitarnya	1. KSPD Taman Nasional Way Kambas dan Sekitarnya	1. KPPD di Kota Metro 2. KPPD di Kabupaten Lampung Timur 3. KPPD di Kabupaten Lampung Tengah 4. KPPD di Kabupaten Way Kanan 5. KPPD di Kabupaten Tulang Bawang 6. KPPD di Kabupaten Mesuji 7. KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat 8. KPPD di Kabupaten Lampung Utara

Sumber : RIPPAP Provinsi Lampung 2010 – 2025

2.1.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih terbatasnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah.

Tabel 2. 30 Kondisi Ruas Jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023 (PIK)

TAHUN	Ruas Jalan Provinsi		Ruas Jalan Nasional	
	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
2020	76,045	23,955	92,070	7,930
2021	75,386	24,614	93,792	6,208
2022	76,850	23,150	94,817	5,183
2023	78,673	21,327	93,928	6,072
2023	78,08	21,92		

Sumber : data PIK-Bappeda, 2024

Data menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 kondisi Mantap berada pada kisaran 76.045% hingga 78,08%. Sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas, pada tahun 2024 kondisi tersebut akan terus ditingkatkan. Selanjutnya, jaringan jalan provinsi juga didukung dengan adanya jaringan jalan nasional yang relatif lebih mapan, dengan tingkat kemantapan jalan yang tinggi. Di tahun 2023, kondisi jaringan Jalan Nasional tercatat 93,93% dalam kondisi mantap.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar yang bertujuan untuk mendukung kelancaran, distribusi barang, maupun jaringan transportasi manusia serta fungsi sosial lainnya. Gambaran infrastruktur jalan yang merupakan penunjang transportasi darat di Provinsi Lampung sebagaimana grafik di bawah ini :

Grafik 2. 54 Komposisi jalan di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : data PIK-Bappeda, 2024 (**)

Tabel 2. 31 Panjang Infrastruktur Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2023

PANJANG INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI LAMPUNG	
Jalan Nasional	1.298,410 Km ⁽¹⁾
Jalan Provinsi	1695,479 Km ⁽²⁾
Jalan Kabupaten/Kota	17.774,160 Km ⁽³⁾
Jalan Tol	253,810 Km ⁽⁴⁾

Sumber: (1) 430/KPTS/M/2022 (2) G/434/V.03/HK/2023 (3) Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal Kemen PUPR Tahun 2019 (4) Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPJT Tahun 2019

Sampai dengan tahun 2023, panjang jalan nasional di Provinsi Lampung tercatat 93,93 persen dalam kondisi mantap. Sementara, panjang jalan yang merupakan kewenangan provinsi dengan kondisi 76,850 persen dalam kondisi mantap.

Tabel 2. 32 Kondisi jalan Mantap di Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 (PIK)

Kondisi	TA.2021		TA.2022		TA.2023		TA.2024	
	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi
Baik	431,580	882,798	402,540	832,659	261,390	979,767		1,044,754
Sedang	784,440	393,697	826,770	468,629	958,180	354,123		279,076
Rusak	56,930	164,725	52,440	126,510	71,530	75,180		71,210
Kritis	23,560	252,053	14,760	265,475	7,310	286,409		303,491
Jumlah (km)	1.296,510	1.693,273	1.296,510	1.693,273	1.298,410	1.695,479		1.695,479
Mantap	93,792%	75,386%	94,817%	76,850%	93,928%	78,673%		78,08%
Tdk Mantap	6,208%	24,614%	5,183%	23,150%	6,072%	21,327%		21,92%

Sumber : Bappeda Prov. Lampung

Daerah Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, pengelolaan daerah irigasi dibagi menjadi 3 yaitu menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Provinsi Lampung memiliki luas daerah irigasi total seluas 388.631 Ha yang terbagi menjadi 60,1% daerah irigasi kewenangan pemerintah, 6,1% daerah irigasi kewenangan provinsi, dan 33,8% daerah kewenangan irigasi kabupaten.

Tabel 2. 33 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Di Provinsi Lampung

No.	Kewenangan	Irigasi Air permukaan		Irigasi Air Tanah		Irigasi Pompa		Irigasi Rawa		Irigasi Tambak		Total	
		D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha
1.	Pemerintah	14	185.333	-	-	-	-	4	48.372	-	-	18	233.705
2.	Pemerintah Provinsi	19	21.045	-	-	-	-	1	2.578	-	-	20	23.623
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1.084	126.823	112	2.857	-	-	3	1.623	-	-	1.199	131.303
	JUMLAH	34.084	333.201	112	2.857	-	-	8	52.573	-	-	39.199	388.631

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2. 34 Persentase Status Kewenangan Daerah Irigasi di Provinsi Lampung

NO.	KEWENANGAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Pemerintah Pusat	233.705	60,1%
2	Pemerintah Provinsi Lampung	23.623	6,1%
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	131.303	33,8%
	JUMLAH	388.631	100%

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015

Peta pengairan daerah irigasi, rawa, dan lintas kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut :

daerah irigasi Way Rarem seluas 22.000 ha, di daerah Kecamatan Abung Timur, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Kotabumi. Bendungan Way Rarem mempunyai manfaat sebagai :

- Pengendali Banjir
- Pariwisata

Selain manfaat diatas bendungan ini digunakan untuk Keramba Jaringan Apung (KJA). Pertumbuhan KJA di Bendungan Way Rarem memang cukup signifikan tetapi mengakibatkan dampak negatif untuk Bendungan.

Gambar 2. 56 Foto Infrastruktur Bendungan di Provinsi Lampung





Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, 2024

2. Bendungan Way Jepara

Merupakan sebuah bendungan yang terletak di Jalan Simpang Danau, Sumberjo, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Bendungan ini pada awalnya hanya seluas 5 (lima) hektar namun pada tahun 1972 diperluas menjadi 200 hektar. Pelaksanaan konstruksi bendungan Way Jepara dimulai pada tahun 1975 dan selesai pada tahun 1978. Bendungan Way Jepara memiliki kedalaman kurang lebih 26 m dengan diameter berkisar 1,9 km. Air Bendungan Way Jepara berasal dari tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jejawai, dan Way Jepara, yang berhulu di Register 38 Gunung Balak. Bendungan ini berfungsi untuk melayani keperluan irigasi dalam rangka mendukung produksi pangan di daerah Lampung. Waduk ini direncanakan mampu

melayani daerah irigasi seluas 6.651 Ha. Perubahan tata guna lahan mengakibatkan ketersediaan air di waduk Jepara menurun. Rusaknya kawasan Register 38 menjadi penyebab utama terus merosotnya debit air Danau Jepara. Daerah tangkapan air banyak yang diubah menjadi lahan perkebunan, seperti jagung dan kakao. Register 38 Gunung Balak dan Gunung Mas yang menjadi daerah aliran sungai (DAS) Danau Jepara sudah rusak parah. Pada tahun 2008 waduk hanya mampu melayani daerah irigasi seluas 4.126 ha dengan cara menerapkan pola tanam bergilir. Seiring dengan merosotnya debit air, kini danau ini hanya mampu mengairi 1.800 hektar sawah.

3. Bendungan Batu Tegi

Merupakan salah satu bendungan terbesar se-Asia Tenggara dengan luas 3.560 hektar yang terletak di Pekon Batutegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bendungan yang dibangun sejak tahun 1994, diresmikan pada tahun 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Bendungan Batutegi dibangun dengan memanfaatkan sumber air dari dua sungai yaitu Way Sekampung dan Seputih, yang berjarak kurang lebih sekitar 65 km dari sebelah hulu bendung Argoguruh atau kurang lebih sekitar 90 km dari sebelah Barat Daya Kota Bandar Lampung.

Bendungan Batu Tegi didesain memiliki kapasitas tampung air sebesar 690 juta m³ yang saat ini dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi dari 43.585 ha menjadi 66.573 ha di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Kota Metro. Disamping itu, bendungan ini juga dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 2 x 14 Megawatt, penyediaan air baku air bersih untuk Kota Bandar Lampung, Branti (Kec. Natar) dan Kota Metro sebesar 2.250 l/d, pengendalian banjir, perikanan dan wisata.

Bendungan Batu Tegi merupakan bendungan alternatif bagi pengembangan irigasi Way Sekampung dan memenuhi kebutuhan air irigasi ke Bendung Argoguruh. Elevasi muka air waduk Batutegi sejak mulai beroperasi pada tahun 2004 belum pernah mencapai posisi elevasi normal (+274 m), diduga sebagai akibat semakin menurunnya debit *inflow* waduk Batutegi pada satu sisi dan di sisi lain terjadi peningkatan debit *outflow* untuk memenuhi permintaan (demand) air irigasi oleh Bendung Argoguruh. Meningkatnya permintaan air di Bendung Argoguruh akibat menurunnya debit Sungai Sekampung yang berasal dari daerah tangkapan hujan Bendung Argoguruh.

4. Bendungan Way Sekampung

Berlokasi di kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dengan tumpuan kanan Desa Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran dan tumpuan kiri Desa Banjarejo Kecamatan Banyumas. Bendungan Way Sekampung merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Lampung, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.03 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017. Proses konstruksi Bendungan Way Sekampung dimulai dari tahun 2016 dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021.

Bendungan Way Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta m³ yang akan dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi seluas 72.707 hektar dengan rincian 55.373 hektar untuk daerah irigasi (DI) Sekampung, dan 17.334 hektar untuk (DI) Rumbia Extension, sehingga meningkatkan intensitas tanam menjadi 270%. Bendungan multifungsi ini juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 2.482 l/det untuk kota Bandar Lampung, Branti dan Kota Metro, PDAM Way Sekampung Pringsewu 487 l/dt, Pembangkit listrik tenaga Mikrohidro (PLTM) dengan daya sebesar 5,4 MW (2 x 2,7 MW), menjadi objek wisata di Kabupaten Pringsewu, serta dengan luas genangan 800 hektar yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan banjir karena terintegrasi dengan Bendungan Batutegi dan Bendungan Margatiga.

Dengan dibangunnya bendungan Way Sekampung, diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan debit sungai Way Sekampung, meningkatkan fungsi waduk Batutegi serta adanya integrasi dengan bendung Argoguruh, Bendungan Marga Tiga dan Bendung Gerak Jabung dapat melayani kebutuhan air sampai ke hilir.

5. Bendungan Margatiga

Bendungan Margatiga membendung aliran Sungai Way Sekampung di daerah hilir untuk dimanfaatkan sebagai pengairan Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Lampung seluas 16.588 ha, yaitu DI Jabung kiri seluas 5.638 ha dan potensi DI Jabung kanan seluas 10.950 ha. Bendungan Margatiga memiliki kapasitas tampung 42,31 juta m³ dengan luas genangan 2.314 ha dan tinggi bendungan 22,5 m, juga dipersiapkan untuk memasok air baku sebesar 0,8 m³/detik untuk Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan Bendungan Margatiga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air Sungai Way Sekampung khususnya di bagian hilir, memiliki potensi sebagai konservasi air, penggelontoran air yang mencegah air asin, dan destinasi pariwisata baru di Lampung Timur. Bendungan dengan konstruksi tipe urugan yang memiliki tinggi panjang puncak 321,76 meter, dan lebar puncak 7 meter ini juga diproyeksikan dapat mereduksi banjir sebesar 83,10 m³/detik untuk sebagian wilayah di Bandar Lampung dan Lampung Timur.

6. Bendung Agroguruh

Bendung ini terletak di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang merupakan pembangunan bendungan hasil dari pelaksanaan kebijakan politik etis Belanda pada bidang irigasi. Bendungan ini dibangun pada 4 Agustus 1935 yang berupa bangunan bendung (*stuwdam*) yang membendung Sungai Way Sekampung. Bangunan utama bendung memiliki panjang 70 m dan tinggi 4 m, dan saluran air induk (primer) yang dibangun pada tahap awal sepanjang 9 km, dan saluran air sekunder sepanjang 75 km (Soerabaijasch_handelsblad, 1937a). Pada awal pembangunan, bendung air Argoguruh mencakup daerah resapan ± 2.150 km² dan laju alirannya diperkirakan 35 m³/detik, sebagai bangunan bendung yang modern di masanya, bendung ini memiliki blower dengan lebar 6 m dan dapat dikunci dengan seluncuran roller besi, dilengkapi dengan peredam di bagian atas dengan ketinggian angkat 7 m (De_Indische_courant, 1937; Soerabaijasch_handelsblad, 1937b). Fungsinya untuk menaikkan permukaan

air sehingga air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah di Kolonisasi Sukadana, Lampung, yang sekarang mengalir ladang dan persawahan untuk Kota Metro dan Kabupaten di sekitarnya.

7. EMBUNG

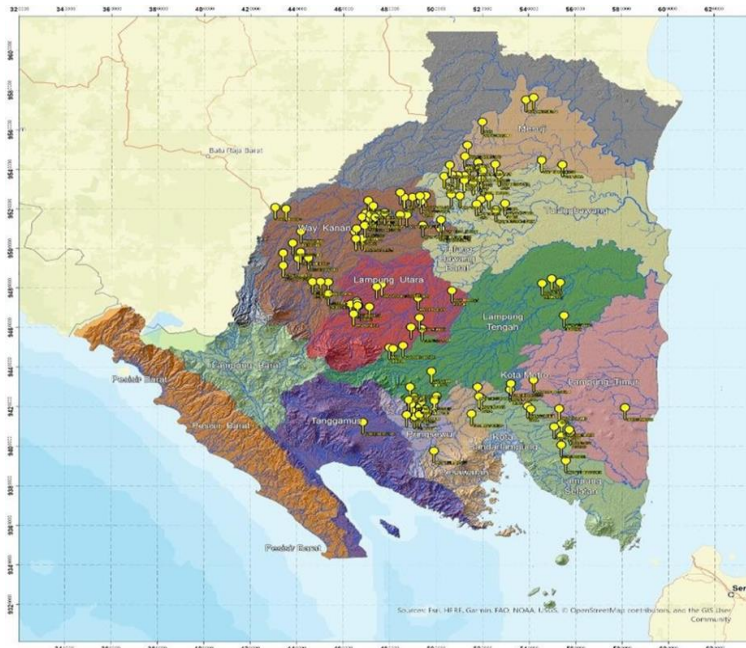
Provinsi Lampung memiliki beberapa embung/danau yang tersebar pada 11 kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan memiliki jumlah embung terbanyak di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 37 embung seluas 3.687.225 m³ dan paling sedikit terdapat pada Kabupaten Pesawaran sebanyak 2 (dua) embung dengan luas 223.38 m³. Untuk lebih lengkapnya mengenai persebaran embung/waduk dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. 35 Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Jumlah Embung/Waduk	Luas (m ³)
1	Lampung Utara	4	659.14
2	Lampung Tengah	12	2.160.064
3	Lampung Timur	3	291.2
4	Lampung Selatan	15	1.928.605,5
5	Pringsewu	11	458.924
6	Tanggamus	3	125.014.25
7	Way Kanan	37	3.687.225
8	Mesuji	7	1.354.794
9	Pesawaran	2	223.38
10	Tulang Bawang	5	678.139
11	Tulang Bawang Barat	18	2.521.837
Total		127	14.088.322,75

Sumber : BBWS Mesuji Sekampung 2024

Gambar 2. 57 Peta Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung



Sumber : BBWS Mesuji Sekampung 2024

Sanitasi (Air Bersih, Hunian Layak & Kawasan Kumuh). Catatan statistik (sumber: BPS- Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2022) bidang Perumahan, memberi gambaran capaian sebagai berikut:

- 1) Di tahun 2021 sebanyak 91,92% rumah tangga telah memiliki fasilitas MCK secara mandiri; 5,48% menggunakan fasilitas MCK Umum; 0,02% tidak menggunakan MCK; dan masih terdapat 2,57% rumah tangga belum memiliki fasilitas MCK.
- 2) Hingga Tahun 2021, sebanyak 88,14% rumah tangga menggunakan Gas LPG untuk memasak; 11,11% dengan Kayu Bakar; 0,38% dengan listrik; 0,08% dengan minyak tanah; dan 0,28% sisanya dengan alat/media lainnya.
- 3) Disisi kepemilikan rumah, data tahun 2021 menjelaskan bahwa sebanyak 89,40% rumah berstatus milik sendiri; 3,92% mendiami rumah dengan status kontrak/sewa; sisanya 6,68% dengan status kepemilikan lainnya.
- 4) Di tahun 2021 sebanyak 83,89% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Kondisi tersebut membaik bila dibanding tahun 2017 yang tercatat 52,78%.

- 5) Catatan tahun 2021 juga menunjukkan bahwa sebanyak 80,20% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Kondisi tersebut meningkat signifikan bila dibanding tahun 2017 yang sebesar 35,16%.
- 6) Data Kementerian PUPR (*sumber: Laporan Profil Perumahan di Indonesia, Kemen.PUPR-2021*), data sebaran rumah tangga menurut status kepemilikan rumah tangga di Provinsi Lampung tahun 2019-2021, menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 masih terdapat 227.138 rumah tangga belum memiliki rumah (status “backlog”).

Tabel 2. 36 Status kepemilikan Rumah tangga di Provinsi Lampung

Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024	
Belum memiliki rumah	Memiliki rumah	Belum memiliki rumah	Memiliki rumah	Belum memiliki rumah	Memiliki rumah
8.19%	91.81%	7.6%	92.4%	6.95%	93.05%

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

Selanjutnya, data BPS-Statistik Perumahan dan Permukiman Tahun 2019, memberi gambaran bahwa :

- Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, sebanyak 45,06% memiliki sertifikat SHM a.n. ART; 19,29% memiliki sertifikat SHM bukan a.n. ART; 1,34% memiliki bersertifikat Non-SHM; dan 26,49% dalam bentuk Surat Bukti Lainnya; serta masih terdapat sekitar 7,28% belum memiliki bukti kepemilikan.
- Dalam rangka memperbaiki kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang bertempat tinggal di Rumah yang Tidak Layak Huni (RTLH), Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil menangani Rehabilitasi RTLH sejumlah 20.573 Unit dari tahun 2020 hingga tahun 2022, dengan tingkat persentase capaian penanganan RTLH sebesar 97,01%.
- Peningkatan juga terjadi pada pemenuhan Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung, bahwa hingga tahun 2022, capaian Akses Air Minum Layak sebesar 85,74%
- Hingga tahun 2022 sebesar 84,52% penduduk Provinsi Lampung telah memiliki akses terhadap Sanitasi Layak sebesar 84,52%

- Diawal tahun 2020, capaian Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung sebesar 66,20%, dan di tahun 2022 capaian Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung meningkat sebesar 72,59%, merupakan pencapaian yang sangat baik.

Air Bersih/Air Minum Layak. Di tahun 2022, persentase penduduk Provinsi Lampung yang memiliki akses Air Minum Layak mengalami peningkatan menjadi 71,67% dari 84,55% di Tahun 2015.

Tabel 2. 37 Persentase Capaian Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung	Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%
2018	8.405.478	6.024.373	71,67
2019	8.850.763	6.300.230	74,05
2020	8.984,880	7.065.496	79,24
2021	9.096,520	7.077.721	79,47
2022	9.190,082	7.893.260	84,55

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP-CK) Provinsi Lampung, 2023

Sanitasi Layak. Untuk persentase penduduk yang memiliki akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2018 hanya 71,67% penduduk Provinsi Lampung memiliki Akses Sanitasi Layak menjadi 82,86% di Tahun 2022.

Tabel 2. 38 Persentase Capaian Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung	Capaian Akses Sanitasi	Persentase (%)
2018	8.405.478	6.024.373	71,67
2019	8.850.763	6.300.230	74,05
2020	8.984,880	6.307.313	74,84
2021	9.096,520	6.308.813	74,85

2022	9.190,082	7.722.257	82,86

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, 2023

2.1.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil proyeksi rumah dengan pembagian kategori luasan rumah, terdiri dari luasan Kavling Rumah Mewah seluas 600 m², luasan Kavling Rumah Sedang seluas 400 m², luasan Kavling Rumah Sederhana seluas 200 m², dan luasan Kavling Rumah Sangat Sederhana seluas 70 m². Dari hasil analisis dapat diketahui Proporsi kebutuhan rumah tahun 2045 adalah 198.984 Rumah Mewah (RM), 397.974 Rumah Sedang (RSd), 795.944 Rumah Sederhana (RS), dan 596.957 Rumah Sangat Sederhana (RSS). Jadi total rumah yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk di tahun 2045 yaitu 1.989.858 rumah. Untuk lebih jelasnya proyeksi pemenuhan kebutuhan rumah tahun 2025 hingga tahun 2045 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ;

Tabel 2. 39 Jumlah Kebutuhan Rumah Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	2023					2025					2030					2035					2040					2045				
		RSS	RS	RSA	RM	Total	RSS	RS	RSA	RM	Total	RSS	RS	RSA	RM	Total	RSS	RS	RSA	RM	Total	RSS	RS	RSA	RM	Total	RSS	RS	RSA	RM	Total
		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1	
1	Lampung Barat	18746	24994	12497	6249	62486	19158	25544	12772	6386	63860	20084	26779	13390	6695	66948	20882	27843	13922	6961	69608	21647	21647	14431	7216	64940	22248	29664	14832	7416	74160
2	~~Tangerang~~	39752	53003	26502	13251	132508	40681	54242	27121	13560	135604	42829	57106	28553	14276	142764	44732	59642	29821	14911	149106	46106	46106	30737	15369	138318	47387	63183	31591	15796	157956
3	Lampung Selatan	66300	88400	44200	22100	221000	68003	90671	45336	22668	226678	71972	95963	47982	23991	239908	75574	100765	50382	25191	251912	77258	77258	51506	25753	231775	79405	105873	52936	26468	264682
4	Lampung Timur	68555	91406	45703	22852	228516	69882	93176	46588	23294	232940	72907	97210	48605	24302	243024	75527	100702	50351	25176	251756	78875	78875	52583	26292	236625	81066	108088	54044	27022	270220
5	Lampung Tengah	90500	120666	60333	30167	301666	92486	123314	61657	30829	308286	96938	129250	64625	32313	323126	100658	134210	67105	33553	335526	104515	104515	69676	34838	313544	107418	143224	71612	35806	358060
6	Lampung Utara	39231	52308	26154	13077	130770	39946	53261	26630	13315	133152	41563	55417	27708	13854	138542	42965	57287	28644	14322	143218	45039	45039	30026	15013	135117	46290	61720	30860	15430	154301
7	Way Kanan	29467	39289	19644	9822	98222	30199	40265	20132	10066	100662	31906	42541	21270	10635	106352	33469	44625	22312	11156	111562	34289	34289	22859	11430	102866	35241	46988	23494	11747	117470
8	~~Tanjung Baku~~	26710	35614	17807	8903	89034	27324	36432	18216	9108	91080	28736	38315	19158	9579	95788	29997	39996	19998	9999	99990	30942	30942	20628	10314	92826	31802	42402	21201	10601	106006
9	~~Kampung~~	29657	39542	19771	9886	98856	30376	40501	20250	10125	101252	32102	42803	21402	10701	107008	33739	44986	22493	11246	112464	34547	34547	23031	11516	103642	35507	47343	23671	11836	118356
10	~~Priangan~~	25175	33567	16784	8392	83918	25784	34379	17190	8595	85948	27236	36314	18157	9079	90786	28558	38078	19039	9519	95194	29293	29293	19529	9764	87880	30107	40143	20071	10036	100357
11	Mesuji	14276	19035	9518	4759	47588	14713	19617	9808	4904	49042	15729	20972	10486	5243	52430	16640	22187	11094	5547	55468	16764	16764	11176	5588	50293	17230	22973	11487	5743	57434
12	~~Tanjung Baku~~ Barat	17729	23638	11819	5910	59096	18107	24143	12072	6036	60358	18936	25248	12624	6312	63120	19640	26187	13094	6547	65468	20434	20434	13623	6811	61302	21002	28002	14001	7001	70006
13	~~Kampung~~ Barat	10185	13580	6790	3395	33950	10492	13989	6994	3497	34972	11242	14989	7494	3747	37472	11978	15970	7985	3993	39926	12012	12012	8008	4004	36035	12345	16460	8230	4115	41151
14	Bandar Lampung	72124	96166	48083	24041	240414	73573	98097	49048	24524	245242	76688	102251	51126	25563	255628	79093	105457	52728	26364	263642	82868	82868	55245	27623	248604	85170	113560	56780	28390	283900
15	Metro	10432	13910	6955	3477	34774	10651	14202	7101	3550	35504	11159	14878	7439	3720	37196	11585	15447	7724	3862	38618	12028	12028	8018	4009	36083	12362	16482	8241	4121	41206
	~~Bandar Lampung~~	558839	745119	372560	186280	1862798	571375	761833	380916	190458	1904582	600028	800038	400019	200009	2000094	625037	833383	416692	208346	2083458	646649	646649	431099	215550	1939946	664613	886150	443075	221538	2215376

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPIPD, Data Diolah 2024

Tabel 2. 40 Luasan Lahan Permukiman 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	KONDISI SAAT INI 2022		KEBUTUHAN 2025		KEBUTUHAN 2030		KEBUTUHAN 2040		20245	
		Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)
1	Lampung Barat	60550	1459,255	61995,92	1494,102	63441,85	1528,948	64887,77	1563,795	66333,69	1598,642
2	Tanggamus	129162	3112,804	132246,4	3187,137	135330,7	3261,471	138415,1	3335,804	141499,5	3410,137
3	Lampung Selatan	214346	5165,739	219464,5	5289,096	224583,1	5412,452	229701,6	5535,809	234820,2	5659,166
4	Lampung Timur	223624	5389,338	228964,1	5518,035	234304,2	5646,731	239644,3	5775,428	244984,4	5904,124
5	Lampung Tengah	295480	7121,068	302536	7291,118	309592	7461,168	316648	7631,217	323704	7801,267
6	Lampung Utara	126824	3056,458	129852,5	3129,446	132881,1	3202,434	135909,6	3275,421	138938,1	3348,409
7	Way Kanan	95374	2298,513	97651,51	2353,401	99929,03	2408,29	102206,5	2463,178	104484,1	2518,066
8	Tulang Bawang	86126	2075,637	88182,67	2125,202	90239,35	2174,768	92296,02	2224,334	94352,69	2273,9
9	Pesawaran	96342	2321,842	98642,63	2377,287	100943,3	2432,733	103243,9	2488,178	105544,5	2543,623
10	Pringsewu	81364	1960,872	83306,96	2007,698	85249,92	2054,523	87192,87	2101,348	89135,83	2148,174
11	Mesuji	45954	1107,491	47051,37	1133,938	48148,75	1160,385	49246,12	1186,831	50343,49	1213,278
12	Tulang Bawang Barat	57542	1386,762	58916,09	1419,878	60290,19	1452,993	61664,28	1486,109	63038,37	1519,225
13	Pesisir Barat	32728	788,7448	33509,54	807,5799	34291,08	826,415	35072,62	845,2501	35854,15	864,0851
14	Bandar Lampung	236990	5711,459	242649,3	5847,848	248308,6	5984,236	253967,8	6120,625	259627,1	6257,013
15	Metro	33956	818,3396	34766,86	837,8814	35577,73	857,4232	36388,59	876,965	37199,45	896,5068
Provinsi Lampung		1816362	43774,322	1859736,4	44819,6473	1903110,9	45864,97	1946485,07	46910	1989859,57	47955,6

Sumber : Data Diolah 2023

2.1.3.14 Perhubungan

Transportasi sangat diperlukan sebagai suatu bentuk bantuan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Hal ini dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi sendiri dibagi menjadi tiga jenis: darat, laut, dan udara.

1) Terminal

Provinsi Lampung memiliki beberapa terminal penumpang di beberapa kabupaten / kota dengan rincian sebagai berikut :

- **Terminal Type A** : 2 (dua) buah, yaitu Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung dan Terminal Betan Subing Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VI Lampung-Bengkulu selaku perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.
- **Terminal Type B** : 3 (tiga) buah, yaitu Terminal Mulyojati Kota Metro, Terminal Simpang Propau Kotabumi dan Terminal Bakauheni yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- **Terminal Type C** : 26 buah, yaitu Terminal Rajabasa, Kemiling, Panjang, Bakauheni, Kota Agung, Bunut Padang Cermin, Pasar Bawah Tanjung Karang, Sukaraja Telukbetung, Kalianda, Metro, Bandar Jaya, Gaya Baru, Sub Terminal Kota, Sub Pasar Sentral, Unit II, Way Tenong, Mataram Baru, Daya Murni, Pringsewu, Gedong Tataan, Gadingrejo, Krui, Menggala, Liwa, Mesuji, Panaragan yang masing-masing dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten setempat.

2) Kereta Api

Perkembangan realisasi angkutan penumpang dan barang dari stasiun Tanjung karang – stasiun Kertapati dan angkutan batu bara dari Tanjung Enim – Tarahan dan pengapalan ke Surabaya Tahun 2018 – 2021, diuraikan sebagai berikut :

Perkembangan realisasi angkutan penumpang dan barang dari stasiun Tanjung karang – stasiun Kertapati dan angkutan batubara dari Tanjung Enim – Tarahan dan pengapalan ke Surabaya Tahun 2018 – 2021

NO .	URAIAN	TAHUN				KET.
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
I	ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG					
A	JUMLAH KA	8	8	8	8	
B	PENUMPANG					
1	Penumpang Naik					
	- Kapasitas Tersedia	1.184.790	1.184.790	536.388	678.800	
	- Kapasitas Terpakai	1.086.416	1.183.721	420.567	284.202	
	- Load Factor (%)	92	100	78	42	
2	Penumpang Turun					
	- Kapasitas Tersedia	1.184.790	1.184.790	536.388	678.800	
	- Kapasitas Terpakai	1.060.253	1.182.000	281.364	240.545	
	- Load Factor (%)	89	100	52	35	
II	ANGK. BATUBARA					
A	TG. ENIM-TARAHAN					
	a. Target	20.052.807	20.460.000	16.320.000	20.337.000	Tonase
	b. Realisasi	19.670.164	20.783.148	18.226.112	20.053.105	Tonase

Keterangan : Data Termutakhir, 2023

Infrastruktur Perhubungan Laut digunakan sebagai angkutan barang dan angkutan penumpang, terkhusus antar pulau dalam provinsi. Provinsi Lampung memiliki 25 pelabuhan yang meliputi pelabuhan umum, baik yang dikelola secara komersial oleh PT. Pelindo II Persero maupun yang dikelola untuk kepentingan swasta atau BUMN. Pelabuhan terbesar adalah Pelabuhan Panjang yang bertaraf internasional, yang melayani trayek dalam negeri (*inter island*), meliputi : Bengkulu, Sumatera Selatan, Jakarta, Surabaya dan Palembang. Sementara trayek dan diluar negeri (*ocean going*), meliputi : Timur Tengah, Singapura, Vietnam dan Malaysia. Pelabuhan Panjang akan dikembangkan untuk memenuhi persyaratan ISIMPANGS code dan menjadikan pelabuhan internasional dalam skala yang lebih besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 tahun 2002 tentang tatanan Kepelabuhanan Nasional Provinsi Lampung memiliki beberapa pelabuhan antara lain, Pelabuhan Panjang yang merupakan satu-satunya pelabuhan Internasional di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung juga mempunyai 5 (lima) pelabuhan regional antara lain, Pelabuhan Teluk Betung, Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Mesuji, Pelabuhan Menggala dan Pelabuhan Kota Agung yang memiliki Peran dan fungsi sebagai Pelabuhan

Nasional. Kelima pelabuhan tersebut dikelola oleh Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) dimasing-masing Pelabuhan. Untuk pelabuhan Lokal Provinsi Lampung memiliki 6 (enam) pelabuhan lokal yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung antara lain, Pelabuhan Canti Kalianda, Pelabuhan Legundi, Pelabuhan Sebesi, Pelabuhan Way Seputih, Pelabuhan Kuala Penat dan Pelabuhan Way Penat. Selain dari beberapa Pelabuhan tersebut Provinsi Lampung juga memiliki Pelabuhan Penyeberangan yang merupakan urat nadi Perekonomian Nasional yaitu Pelabuhan Bakauheni yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry.

1) Pelabuhan Yang Diusahakan

Satu-satunya Pelabuhan Laut yang diusahakan di Provinsi Lampung adalah Pelabuhan Panjang yang dikelola oleh BUMN, yaitu PT (Pesero) PELINDO II Cabang Panjang. BUMN pengelola pelabuhan tersebut bertugas memberikan pelayanan jasa kepelabuhan antara lain:

- Menyediakan perairan dan kolam pelabuhan.
- Menyediakan pelayanan jasa pandu/tunda dan kepil dalam kegiatan sandar lepas kapal di dermaga.
- Menyediakan fasilitas pergudangan, tempat penumpukan barang dan alat bongkar muat.
- Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan *roll on/roll off* (ro-ro)
- Menyediakan fasilitas umum seperti listrik, air minum, telpon baik untuk kapal maupun untuk kepentingan umum di areal pelabuhan.
- Menyediakan alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu navigasi pelayaran.
- Menyiapkan sarana transportasi darat.
- Menyiapkan keamanan dan ketertiban.

Tugas pemerintah di Pelabuhan ditangani oleh Instansi Pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelayaran serta Bea Cukai, Imigrasi serta Karantina (orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan) dimana Adpel (Administrator Pelabuhan) Panjang bertindak selaku koordinator, dan pada saat ini berubah nama menjadi kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Panjang merupakan Pelabuhan Alam yang cukup terlindungi dari gelombang laut, dan sesuai hirarkinya merupakan Pelabuhan Internasional karena terbuka untuk lalu-lintas barang perdagangan dengan luar negeri. Dewasa ini Pelabuhan Panjang hanya

digunakan untuk jasa angkutan barang (Kargo) karena tidak ada lagi kapal penumpang PT. PELNI yang singgah di pelabuhan ini.

Permasalahan yang masih dihadapi di Pelabuhan Panjang antara lain belum tersedianya sarana Bunker (Pengisian BBM) yang memadai untuk kapal-kapal besar sehingga bila kapal-kapal *first call* ke Panjang sekaligus untuk bunker terpaksa harus masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok lebih dulu sehingga mengakibatkan penambahan *cost*.

3) Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan

Pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini **Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP)**. Secara administrasi pemerintahan, pelabuhan-pelabuhan tersebut dikelompokkan menjadi 5 unit pelaksana, yaitu :

1. **Unit Pelaksana Pelabuhan Kota Agung** di Kabupaten Tanggamus merupakan pelabuhan nasional yang membawahi 4 (empat) pelabuhan kecil lainnya. Kegiatannya melayani Kapal Tangker Pertamina dan Kapal-kapal Rakyat/lokal.
2. **Unit Pelaksana Pelabuhan Teluk Betung** di Kota Bandar Lampung yang membawahi 9 (sembilan) pelabuhan kecil lainnya, terutama melayani kapal-kapal rakyat.
3. **Unit Pelaksana Pelabuhan Labuhan Maringgai** di Kabupaten Lampung Timur yang membawahi 5 (lima) Pelabuhan kecil lainnya terutama melayani kapal-kapal rakyat/ Nelayan.
4. **Unit Pelaksana Pelabuhan Menggala** di Kabupaten Tulang Bawang, yang membawahi 2 (dua) Pelabuhan kecil lainnya untuk melayani kapal-kapal rakyat/Nelayan.
5. **Unit Pelaksana Pelabuhan Mesuji** di Kabupaten Mesuji untuk melayani kapal –kapal Rakyat/Nelayan.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun 2002 pelabuhan Kota Agung merupakan pelabuhan nasional sedangkan pelabuhan Teluk Betung, Labuhan Maringgai, Mesuji dan Menggala merupakan pelabuhan regional dan sesuai kewenangannya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Infrastruktur Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Infrastruktur Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni adalah lintas penyeberangan antar provinsi yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan jaringan kereta api antar provinsi. Pelabuhan bakauheni masing dapat dikembangkan lebih lanjut karena saat ini fasilitas yang digunakan baru mencapai 25%. Operasi pelayanan angkutan penyeberangan Bakauheni – Merak berjalan 24 jam setiap hari dengan kemampuan rata – rata pelayaran kapal adalah 24 trip/hari. Jenis kapal yang melayani angkutan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni adalah kapal Roro dengan berat antara 3.000 – 5.000 GPT dan mempunyai daya angkut penumpang 379 – 1900 orang dan kendaraan 45 – 200 unit.

Sarana penyeberangan di Provinsi Lampung selain terdapat pelabuhan penyeberangan, terdapat pula dermaga – dermaga sungai yang khusus melayani masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung mempunyai sungai – sungai yang bisa dipergunakan sebagai alternatif dari moda transportasi darat. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Lampung mempunyai potensi yang cukup bagus. Maka dari itu pembangunan fasilitas – fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana untuk moda angkutan sungai ini dapat membantu pergerakan atau mobilitas masyarakat yang berada di daerah aliran sungai.

Angkutan Penyeberangan (Pelabuhan Bakauheni). Penyeberangan dari Pulau Jawa (Merak) dilayani melalui Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan), yang letaknya ± 97 Km dari Kota Bandar Lampung. Pelabuhan ini mulai dioperasikan pada 26 Mei 1985. Fasilitas Prasarana dan Sarana yang tersedia adalah sebagai berikut:

1) Prasarana Penyeberangan yang tersedia berupa dermaga sebanyak 7 (tujuh) unit yang dilengkapi dengan *moveable bridge* (MB). Dermaga I, II dan III memiliki gangway, khusus dermaga I dan III juga dilengkapi dengan *side ramp door*. Selain itu terdapat 2 (dua) dermaga eksekutif, untuk spesifikasi dermaga – dermaga yang ada di pelabuhan bakauheni adalah sebagai berikut:

A. Dermaga I

Dermaga I di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dibangun pada tahun 1981 dan mulai dioperasikan tahun 1987. Mempunyai panjang dermaga 172,8M dan kedalaman kolam sandar 10–12M. Dermaga I di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe *Quay Wall*. Dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 41 Spesifikasi dari Dermaga I.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	172,8 M
2.	Kolam	L = 50 M
		d = 10-12 M
3.	Dolphin	12 buah
4.	GangWay	L = 2 M
		P = 14 M
		Kapasitas = 1 T
5.	MoveableBridge	L = 11,6 M
		P = 16 M
		Kapasitas = 50 T
6.	SideRamp	L = 2,8 M
		P = 16 M
		Kapasitas = 20 T
7.	Kapasitas Dermaga	6000 GRT
8.	Luas Areal Parkir	11237 M ²

Sumber: *Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak, 2024*

B. Dermaga II

Dermaga II di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di bangun pada tahun 1981 dan mulai dioperasikan tahun 1991. Mempunyai panjang dermaga 134,66 M dan kedalaman kolam sandar 8 – 10 M Dermaga II di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe Quay Wall. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah spesifikasi dari Dermaga II.

Tabel 2.42 Spesifikasi dari Dermaga II.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	134,66 M
2.	Kolam	L = 20 M
		d = 8-10 M
3.	Dolphin	12 buah
4.	GangWay	L = 1,5 M
		P = 14 M
		Kapasitas = 1 T
5.	MoveableBridge	L = 9 M
		P = 16 M

		Kapasitas = 50 T
6.	SideRamp	L = 3 M
		P = 17 M
		Kapasitas = 20 T
7.	Kapasitas Dermaga	6000 GRT
8.	LuarAreal Parkir	9.594 M ²

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak, 2024

C. Dermaga III

Dermaga III ini di bangun pada tahun 2001 dan mulai dioperasikan tahun 2001. Mempunyai panjang dermaga 166,83 meter dan kedalaman kolam sandar 10 – 12 Meter.

Tabel 2. 43 Spesifikasi dari Dermaga III.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	166,83 M
2.	Kolam	L = 25 M
		d = 10-12 M
3.	Dolphin	12 buah
4.	GangWay	L = 1,8 M
		P = 16 M
		Kapasitas = 1,5 T
5.	MoveableBridge	L = 10 M
		P = 16 M
		Kapasitas = 45 T
6.	SideRamp	L = 2,8 M
		P = 21 M
		Kapasitas = 2 T
7.	Kapasitas Dermaga	12000 GRT
8.	LuarAreal Parkir	13.965 M ²

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak, 2024

D. Dermaga IV

Dermaga IV di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dibangun tahun 1998 dan mulai dioperasikan tahun 2001. Mempunyai panjang dermaga 57,69 M dan kedalaman kolam sandar 10 – 12 M Dermaga IV di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe Dolphin. Dermaga ini adalah dermaga milik swasta yaitu milik KSO. PT. Infinity Indosakti. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah spesifikasi dari Dermaga IV.

Tabel 2. 44 Spesifikasi dari Dermaga IV.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	57,69 M
2.	Kolam	L = 20 M

		d = 10-12 M
3.	Dolphin	3 buah
4.	MoveableBridge	L = 7,9 M
		P = 17,82 M
		Kapasitas = 60 T
5.	Kapasitas Dermaga	6000 GRT
6.	Luar Areal Parkir	10.519 M ²
7.	Mooring Dolphin	2 buah

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak, 2024

E. Dermaga V

Dermaga V di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di bangun pada tahun 2009 dan mulai dioperasikan tahun 2012. Mempunyai panjang dermaga 138 M dan kedalaman kolam sandar 10 Dermaga V di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe Dolphin dan Jetty.

Tabel 2. 45 Spesifikasi dari Dermaga V.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	138 M
2.	Kolam	L = 20 M
		d = 10-12 M
3.	Dolphin	5 buah
4.	MoveableBridge	L = 7,8 M
		P = 17,8 M
		Kapasitas = 80 T
5.	Kapasitas Dermaga	12000 GRT
6.	Luar Areal Parkir	13.464 M ²
7.	Mooring Dolphin	4 buah

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak, 2024

Untuk melayani permintaan jasa angkutan penyeberangan lintas Bakauheni – Merak PT ASDP Cabang Bakauheni menerapkan tiga pola pengoperasian yakni normal, padat dan sangat padat. Untuk pola normal PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni mengoperasikan 56 kapal dengan rata – rata kapasitas penumpang sebanyak 915 orang, kendaraan roda 2 sebanyak 200 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 103 unit. Untuk waktu berlayar atau Sailing Time selama 120 menit, sedangkan waktu berlabuh dan bongkar muat adalah selama 60 menit, apabila sangat padat dipercepat menjadi 40 menit. Sedangkan untuk produksi trip per hari adalah 60 trip, trip rata – rata penumpang per hari adalah 3.526 orang dan trip kendaraan per hari adalah 5.199 unit.

Bandara Radin Inten II dan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas merupakan Bandara umum yang melayani Penerbangan komersial di Provinsi Lampung. Bandara Radin Inten II terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak lebih kurang 28 Km dari Kota Bandar Lampung, sedangkan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas terletak di wilayah Kabupaten Pesisir Barat serta Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan yang melayani penerbangan komersil dan penerbangan Khusus Militer. Selain Bandara Umum di Provinsi Lampung juga terdapat 8 (delapan) lokasi Bandara Khusus yang dikelola oleh pihak swasta yaitu :

1. Bandara Khusus PT. Gula Putih Mataram (Lampung Tengah)
2. Bandara Khusus PT. Indo Lampung Perkasa (Tulang Bawang)
3. Bandara Khusus PT. Nusantara Tropical Fruit (TulangBawang)
4. Bandara Khusus Tambling (Suoh, Lampung Barat)
6. Bandara Khusus Sungai Buaya (Mesuji)
7. Bandara khusus Sumber Indah Perkasa (Lampung Tengah)
8. Bandara Khusus Way Kambas (Lampung Timur)
9. Bandara Khusus Sungai Merah (Mesuji)

Saat ini Fasilitas landasan Bandara Radin Inten II telah mampu untuk didarati oleh pesawat Boeing 737 kapasitas terbatas dengan fasilitas keselamatan penerbangan yang memadai untuk bandara yang berfungsi sebagai bandar udara dengan klasifikasi kelas II dan tingkat pelayanan lalu lintas udara ADC. Untuk letak Bandara Muhammad Taufiq Kiemas, posisi geografis Kabupaten Pesisir Barat yang mempunyai aksesibilitas transportasi terbatas, jangkauan dengan transportasi darat sering mendapat gangguan akibat tanah longsor dan jalan rusak, menjadikan Pesisir Barat kurang menarik untuk membangun investasi strategis.

Maka salah satu upaya membuka keterisolasian, menggali potensi, meningkatkan iklim usaha sekaligus menarik minat para investor, sebagai sarana mitigasi bencana, mengingat Kabupaten Pesisir Barat rawan longsor dan gempa. Pada tahun 2013 Bandara Muhammad Taufiq Kiemas tersebut telah diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Lampung. Bandara Muhammad Taufiq Kiemas telah melayani penerbangan rute dari Tanjung Karang ke Krui selama tahun 2016 rata-rata 2 kali per minggu dan penerbangan rute Krui ke Bengkulu rata-rata 2 kali per minggu. Pada tahun 2017 subsidi operasional penerbangan tidak diperpanjang oleh Ditjen

Perhubungan Udara hal ini menyebabkan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas tidak ada pelayanan penerbangan sipil reguler.

Adapun, jenis pesawat dan kapasitas kursi yang melayani penerbangan wilayah Lampung adalah sebagai berikut :

Garuda Ind. : B.737-800 (162 seat), ATR 72-600(70), dan CRJ-100 (96)

Sriwijaya Air : B. 737-300~400~500~800 NG = 120~189 seat

Lion Air : B. 737-800 NG (189), B. 737-900 ER (215)

Express Air : DORNIER 328 (32)

Wings Air : ATR 72-500 (70)

Batik Air : AIR BUS

Nam Air : B 737-500 (120)

2.1.3.15 Pertambangan

Provinsi Lampung memiliki keanekaragaman sumber daya yang diinventarisir merupakan bahan-bahan tambang yang meliputi Galian Industri, Mineral Logam, Galian Kontruksi dan Bahan Galian Energi. Untuk jenis dari sumber daya itu sendiri antara lain Andesit, Basalt, Batu Andesit, Batu Gamping, Batu Kapur, Batuan, Batuan (Andesit), Batu Bara, Bijih Besi, Emas, Feldspar, Gamping, Gamping/Kapur, Mangan, Marmer, Marmer dan Kapur, Pasir, Pasir (Batuan), Pasir Kuarsa, Pasir Laut, Pasir Pasang, Silika, Sirtu, Trass, Zeolit, dan Pertambangan Lain.

Tabel 2. 46 Kondisi Pertambangan Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota

No	Komoditas	Luas (Ha)	No	Komoditas	Luas (Ha)
1	Bandar Lampung	108,58	11	Pesisir Barat	660,50
	Andesit	72,96		Andesit	141,04
	Batuan	35,63		Batu Andesit	143,88
2	Bandar Lampung/ Lampung Selatan	102,36		Batuan Andesit	186,85
	Andesit	102,36		Pertambangan Lain	183,33
3	Lampung Selatan	2.939,62		Sirtu	5,40
	Andesit	833,70	12	Pringsewu	1.878,01
	Basalt	29,71		Andesit	46,59
	Batu Andesit	221,88		Batu Andesit	5,07
	Batu Kapur	9,94		Batuan	6,17
	Batuan (Andesit)	4,93		Mangan	837,73
	Batuan Andesit	30,03		Pertambangan Lain	211,32
	Bijih Besi	508,06		Silika	771,13
	Pasir Laut	994,47	13	Tanggamus	3.088,14

No	Komoditas	Luas (Ha)	No	Komoditas	Luas (Ha)
	Pertambangan Lain	286,02		Andesit	419,65
	Zeolit	20,88		Batu Gamping	13,51
	Panas Bumi	2 Titik		Emas	1.221,97
4	Lampung Tengah	2.256,16		Gamping/Kapur	5,07
	Andesit	311,19		Pasir	7,41
	Batubara	942,55		Pasir (Batuan)	25,61
	Feldspar	92,32		Pasir Kuarsa	368,80
	Pasir Kuarsa	546,21		Pasir Pasang	576,16
	Pertambangan Lain	350,73		Pertambangan Lain	449,98
	Silica	13,17		Panas Bumi	2 TITIK
5	Lampung Timur	2.147,58	14	Tanggamus-Pringsewu	65,58
	Andesit	8,43		Andesit	65,58
	Pasir Laut	990,70	15	Tulang Bawang	7.819,13
	Pertambangan Lain	1.148,46		Batubara	4.967,78
6	Lampung Timur-Tulang Bawang	185,57		Pasir	355,65
	Pasir	185,57		Pasir Kuarsa	389,27
7	Lampung Utara	449,10		Pasir Laut	1.984,74
	Andesit	298,41		Pertambangan Lain	121,69
	Batu Andesit	135,55	16	Tulang Bawang-Lampung Timur	197,50
	Batuan Andesit	15,14		Pasir	197,50
8	Lampung Utara/Way Kanan	57,09	17	Pesawaran	2.917,59
	Andesit	57,09		Andesit	281,00
9	Way Kanan	3.990,78		Batu Gamping	180,19
	Andesit	128,40		Bijih Besi	59,65
	Emas	3.623,99		Emas	1.970,45
	Marmer	1,33		Gamping	50,19
	Pertambangan Lain	205,15		Marmer Dan Kapur	190,71
	Trass	31,91		Pasir	2,16
	Panas Bumi	2 Titik		Pertambangan Lain	183,24
10	Lampung Barat	5 Titik		Panas Bumi	2 TITIK
	Panas Bumi	5 Titik	18	Mesuji	8.233,03
				Batubara	4.772,89
				Pasir	133,74
				Pertambangan Lain	3.326,40

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2021

Seluruh komoditas pertambangan tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan jumlah yang cukup banyak di setiap daerahnya kecuali hanya dua yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Metro yang tidak memiliki kawasan pertambangan, selain itu juga ada beberapa kawasan pertambangan yang berada di dalam dua wilayah

administrasi seperti contoh Kawasan Pertambangan Andesit yang berada di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan Pertambangan Andesit yang berada di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan juga Tanggamus-Pringsewu, dan yang terakhir Kawasan Pertambangan Pasir yang berada pada Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Timur.

Potensi panas bumi di Provinsi Lampung cukup melimpah, terdapat 13 lokasi potensi panas bumi yang tersebar di kabupaten/kota. Lokasi potensi panas meliputi Panas Bumi Way Umpu, Panas Bumi Danau Ranau, Panas Bumi Purunan, Panas Bumi Sekincau Barat-Gunung Sekincau, Panas Bumi Sekincau Timur-Becingut, Panas Bumi Suoh Kalibata- Suoh Antatai, Panas Bumi Pajar Bulan, Panas Bumi Natar, Panas Bumi Ulubelu, Panas Bumi Lempasing, Panas Bumi Lempasing, Panas Bumi Wai Ratai, Panas Bumi Kalianda dan Panas Bumi Pematang Belirang.

Kabupaten Lampung Timur, disekitar Pulau Segama dan Pulau Batang terdapat eksploitasi minyak bumi yang dilakukan kontraktor asing, yaitu China National Oil Offshore Company SES (CNOOC SES). Kabupaten Lampung Timur telah ditetapkan sebagai kabupaten Penghasil Minyak Bumi dengan SK Menteri ESDM Nomor 357.K/80/MEM/2001 tanggal 9 April 2001. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur bahwa realisasi lifting minyak bumi tahun 2011 sebesar 2.706,98 ribu barel dan tahun 201 sebanyak 2.724,22 ribu barel.

Selain itu juga terdapat penemuan ilmiah baru rencana pengembangan eksplorasi minyak dan gas yang berdampak pada berubahnya alokasi ruang dalam RZWP-3-K atau RZR. Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT0291/SKKMI2000/2020/S0 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permohonan Penyesuaian Tata Ruang Laut PT. Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES) di Wilayah Kerja Southeast Sumatra Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung. Penetapan lokasi keseluruhan PT. OSES hasil penetapan Nomor B-55 MEN-KPII2021.

2.1.3.16 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa (Dewi, Catur)

2.1.4 Aspek Sumber Daya Manusia

2.1.4.1 Indeks Modal Manusia (IMM)/ Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan sumber daya manusia merujuk pada usaha-usaha peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, akhlak, dan karakter untuk meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan bangsa.

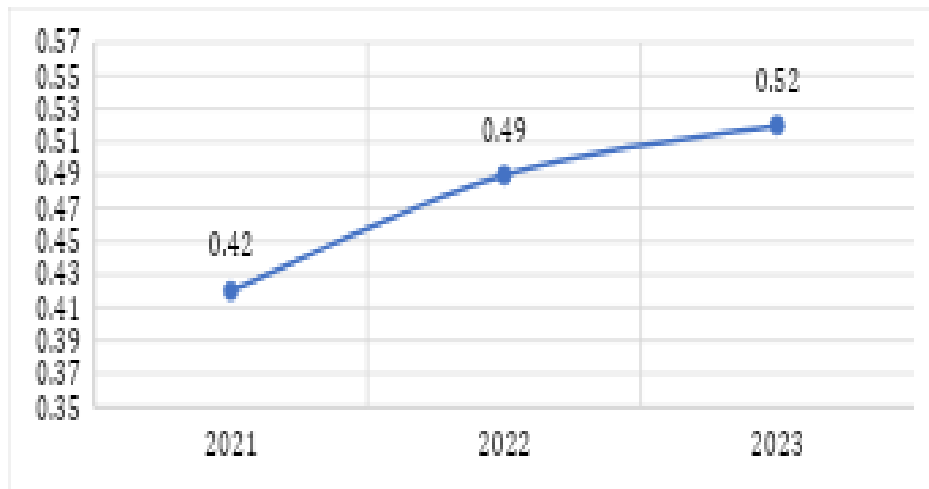
Indeks Modal Manusia atau *Human Capital Index* (HCI) merupakan indikator baru yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Tahun 2018 digunakan untuk menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan bagi produktivitas individu dan negara, dengan mengukur modal manusia yang bisa diakumulasi seorang anak yang lahir pada hari ini, saat dia berusia 18 tahun nanti, serta melihat risiko kondisi kesehatan dan pendidikan yang terjadi di negara tempat dia hidup.

Indikator-indikator yang digunakan mencakup *survival* (kemampuan bertahan hidup masyarakat sampai umur lima tahun), pendidikan (diukur dari harapan pencapaian lama bersekolah) dan kualitas pendidikan (skor tes), serta kesehatan (diukur dari kelangsungan hidup usia 15-60 tahun dan persentase balita tidak tengkes/*stunting*).

Berdasarkan penjelasan dari Bank Dunia, Indeks Modal Manusia ditampilkan dalam rentang nilai antara 0 dan 1, apabila nilai suatu negara mendekati angka 1, maka produktivitas pekerja generasi selanjutnya dipastikan sangat tinggi, didukung oleh lingkungan hidup yang sehat dan pendidikan yang mumpuni.

Tahun 2018 Indeks Modal Manusia Indonesia menempati peringkat ke-87 dari total 157 negara dengan nilai 0,53. Tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 0,54 dengan peringkat ke-96 dari 173 negara, artinya, produktivitas dari setiap anak yang lahir hanya mencapai 54 persen dari kapasitas idealnya. Pada level Asia Tenggara, Indonesia mencapai urutan ke enam setelah Singapura 0,88 poin, Vietnam 0,69 poin, Brunei Darussalam 0,63 poin, Malaysia 0,61 poin, dan Thailand 0,61 poin.

Grafik 2. 58 Indeks Modal Manusia Tahun 2021-2023



Sumber: Hasil Rakortek Perencanaan Pembangunan Tahun 2024

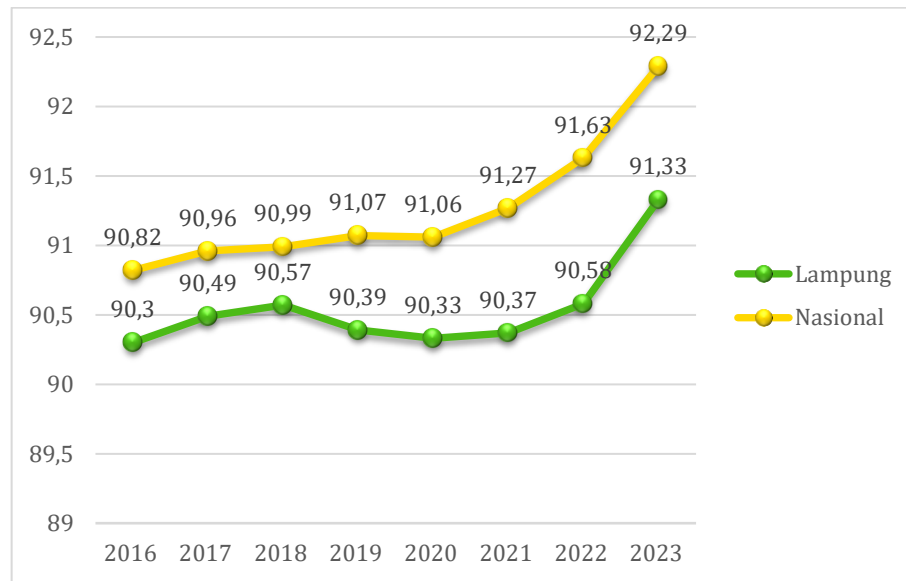
Dari Data IMM Tahun 2021 (0,42) hingga Tahun 2023 (0,52) terlihat peningkatan capaian di tiap tahunnya, ini menandakan bahwa potensi produktivitas sumberdaya manusia di Provinsi Lampung semakin baik, karena semakin mendekati angka satu.

2.1.4.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator yang dapat menggambarkan pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) menganalisis ketimpangan gender dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 IPG Provinsi Lampung sebesar 90,49 persen dan turun menjadi 90,37 persen di tahun 2021. Capaian ini lebih rendah dari IPG nasional tahun 2021 yang sebesar 91,27 persen.

Kualitas SDM juga terukur melalui perbandingan capaian IPM laki-laki dan perempuan yaitu melalui indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender). Peningkatan ini membawa IPG mendekati angka 100, yang artinya semakin baik karena ketimpangan IPM perempuan dan IPM laki-laki semakin hilang. Capaian IPG Provinsi Lampung pada periode tahun 2015-2022 mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 89,89 menjadi sebesar 90,58 di tahun 2022, akan tetapi capaian tersebut masih berada dibawah capaian nasional sebesar 91,63. Tren pertumbuhan IPG di Provinsi Lampung pada periode ini dapat dilihat pada :

Grafik 2. 59 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2023

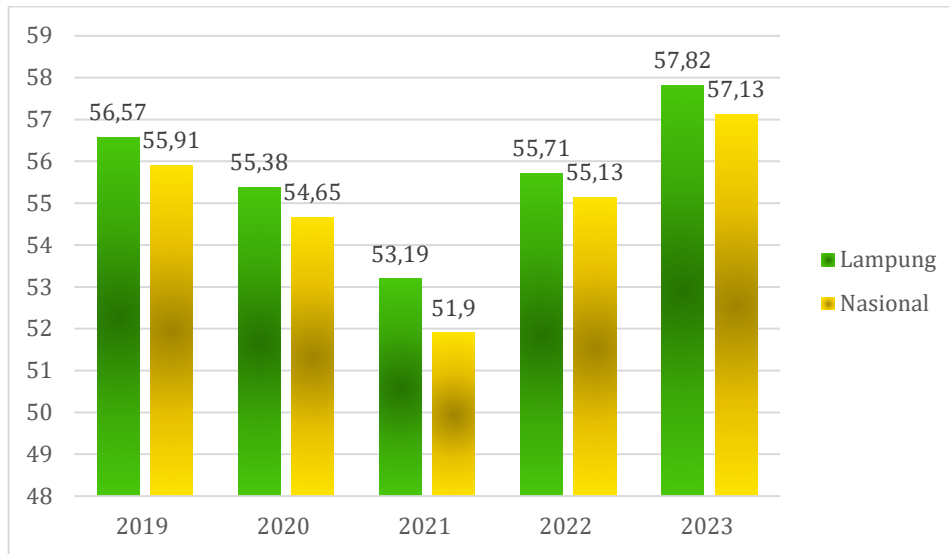


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan

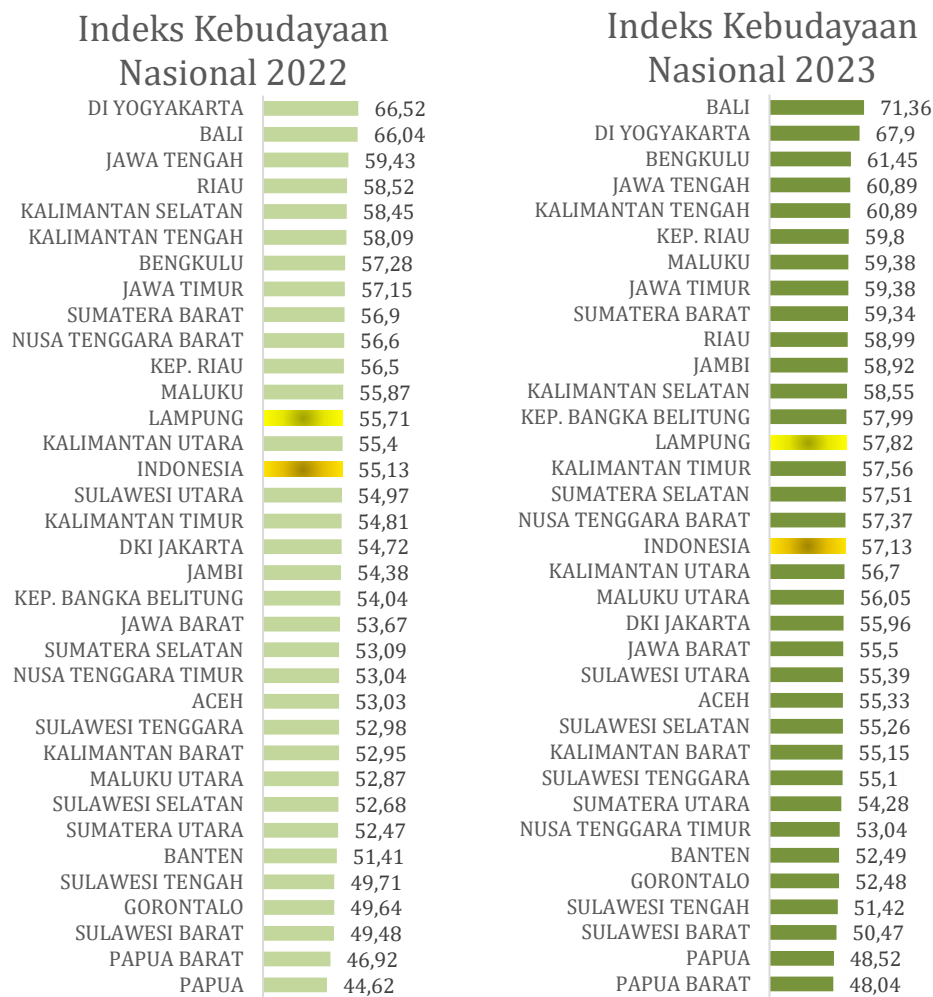
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Dimensi IPK adalah ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 55,71 persen, meningkat sebesar 2,52 persen dari tahun sebelum sebesar 53,19 persen. Jika melihat Angka capaian pembangunan kebudayaan secara Nasional sebesar 55,71 persen, maka capaian Provinsi Lampung saat ini lebih besar dari capaian nasional dan masuk dalam katagori SEDANG, namun seiring perkembangan pembangunan kebudayaan di provinsi-provinsi lain juga mengalami peningkatan sehingga Provinsi Lampung yang berada pada sepuluh besar IPK di tahun 2021, menurun menjadi peringkat 13 secara Nasional di tahun 2022.

Grafik 2. 60 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023



Sumber : Kementrian Kebudayaan, 2025

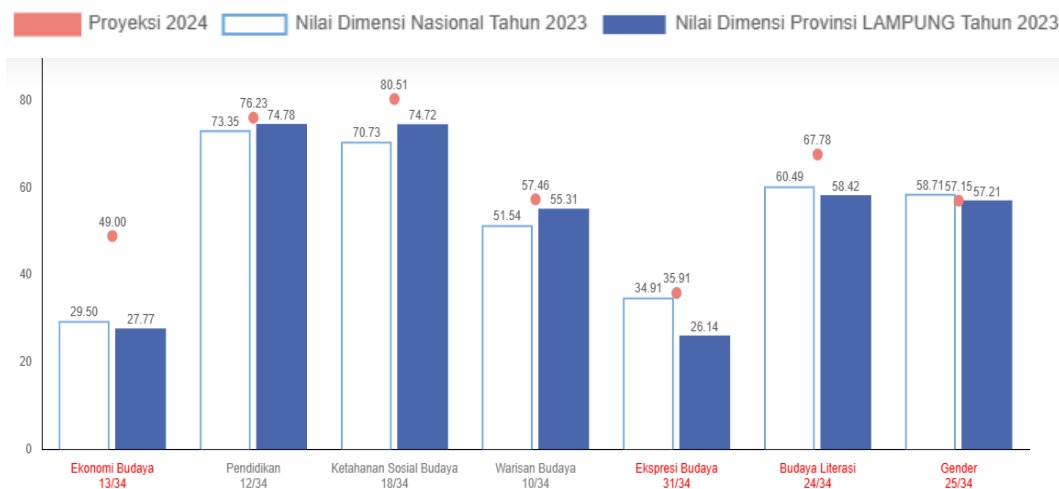
Grafik 2. 61 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional Tahun 2022 – 2023



Sumber : Kementerian Kebudayaan, 2025

Beberapa indikator dimensi IPK di Provinsi Lampung masih perlu menjadi perhatian, yaitu (1) Dimensi Ekonomi Budaya berada pada angka 18,61 persen, masih lebih rendah dibandingkan dengan skor di tahun 2018 dan angka nasional, (2) Dimensi Ekspresi Budaya masih berada di bawah angka nasional yaitu sebesar 25,41 persen serta (3) Dimensi Gender yang mencapai 57,61 persen, dimana angka ini dipengaruhi oleh keberadaan Perempuan Perlemen Perwakilan Lampung sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mewujudkan, mengoptimalkan keadilan dan kesetaraan gender melalui peran keterwakilan perempuan di parlemen.

Grafik 2. 62 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Berdasarkan Dimensi Tahun 2022 – 2023



Sumber : IPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.1.4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.

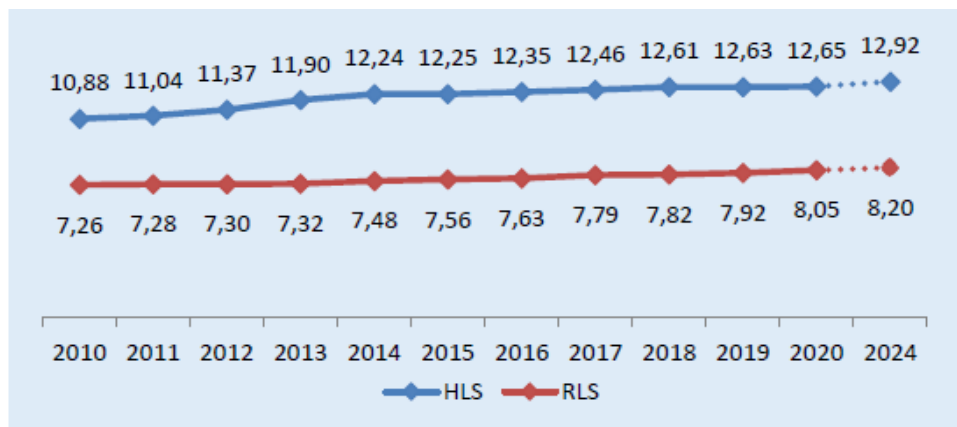
Pendidikan menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Komitmen Indonesia untuk memenuhi hak-hak anak atas pendidikan terlihat dengan menetapkan wajib belajar hingga 12 tahun dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Hal tersebut diperkuat dengan adanya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa anak yang telah berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah,

dapat digunakan indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu sedangkan RLS dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Grafik 2. 63 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Lampung, 2010-2024



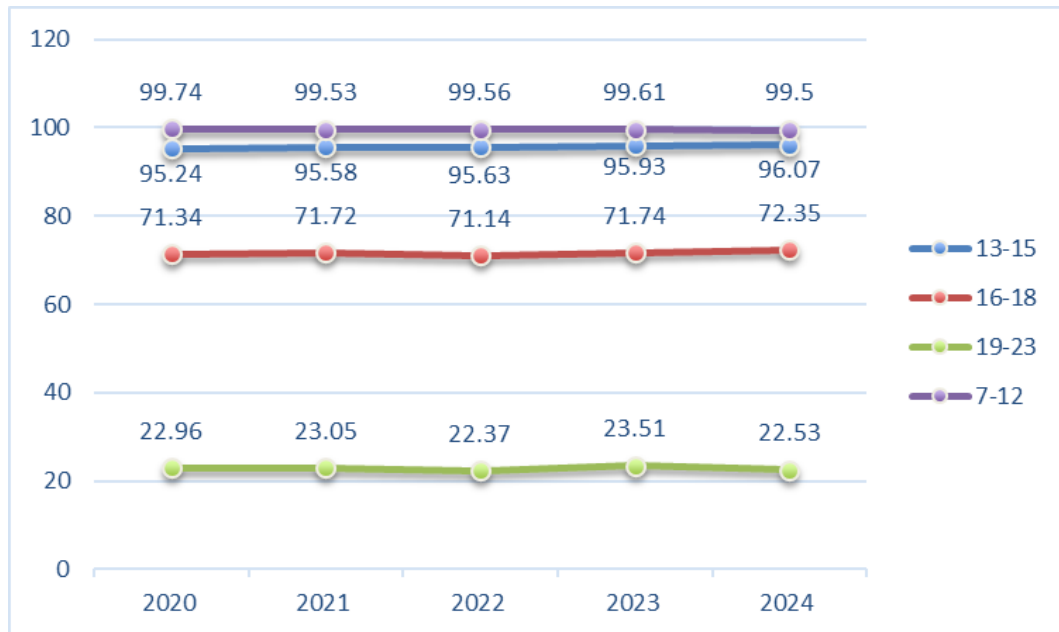
Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka, 2025

Perkembangan HLS dan RLS Provinsi Lampung meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024, HLS Provinsi Lampung mencapai 12,92 atau bisa dikatakan rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,92 tahun atau setara dengan Diploma I. Sedangkan RLS Lampung pada tahun 2024 telah mencapai 8,20 atau secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,20 tahun atau telah menamatkan kelas VIII/kelas 2 SMP.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah menunjukkan terbukanya peluang untuk mengakses pendidikan secara umum pada suatu wilayah tersebut. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Grafik 2. 64 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Umur di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Indonesia, 2025, diolah

Berkurangnya capaian Partisipasi Sekolah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan terlihat pada grafik diatas. Capaian partisipasi sekolah kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang Pendidikan dasar yaitu pada rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun telah mencapai diatas 95%, jenjang Pendidikan menengah yaitu 16-18 tahun masih mencapai 71,74 persen dan jenjang pendidikan tinggi baru mencapai 21,66 persen.

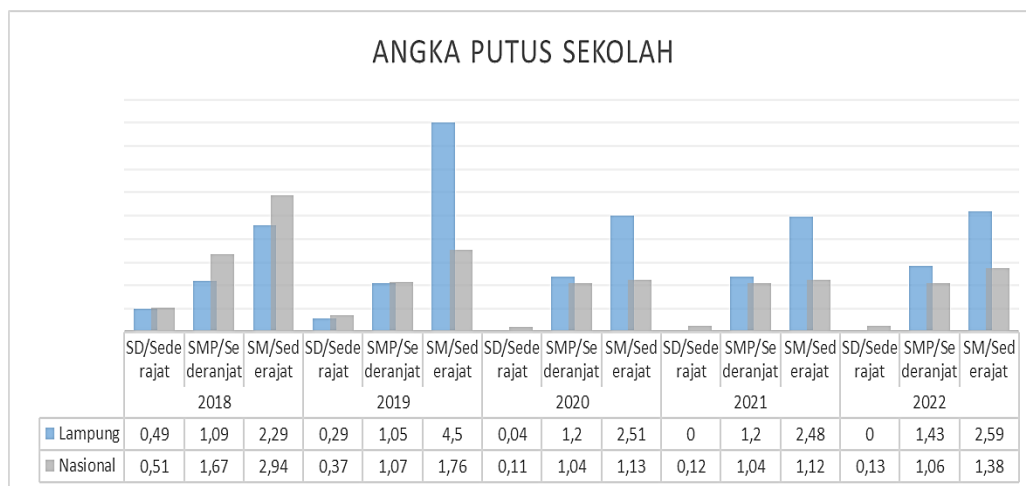
Selama periode 2019-2023, Perkembangan APS usia 16 – 18 tahun di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan, namun peningkatannya masih sangat lambat. Pada tahun 2019 capaiannya sebesar 71,05 persen dan meningkat menjadi 72.35 persen di tahun 2024.

Angka Putus Sekolah -SMA/MA/SMK

Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah permasalahan adanya anak sekolah yang mengalami putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alasan seperti tidak ada biaya, karena bekerja, ataupun alasan lain. Angka Putus Sekolah digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, serta keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Penilaian

berdasarkan proporsi anak kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan sekolah.

Grafik 2. 65 Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2020-2023, diolah

Berdasarkan grafik di atas, Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung pada jenjang SD di tahun 2021 dan 2022 berada di bawah angka Nasional, akan tetapi pada jenjang SMP dan SMA secara umum masih berada di atas angka Nasional. Angka Putus Sekolah jenjang SMP mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dari 1,20 persen menjadi 1,43 persen. Sementara itu Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai 2,48 persen di tahun 2021, namun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan angka putus sekolah sebesar 2,59 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen. Tingginya Angka Putus Sekolah di jenjang SMP dan SMA sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi, selain karena tidak ada biaya untuk bersekolah, anak-anak ini juga dituntut untuk mencari nafkah bagi keluarga. Sejalan dengan tingginya Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung di jenjang SMP dan SMA, maka Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA juga tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 tertinggi, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan pada jenjang SMP menjadi Provinsi yang Angka Putus Sekolahnya tertinggi di Sumatera seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 47 Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2022

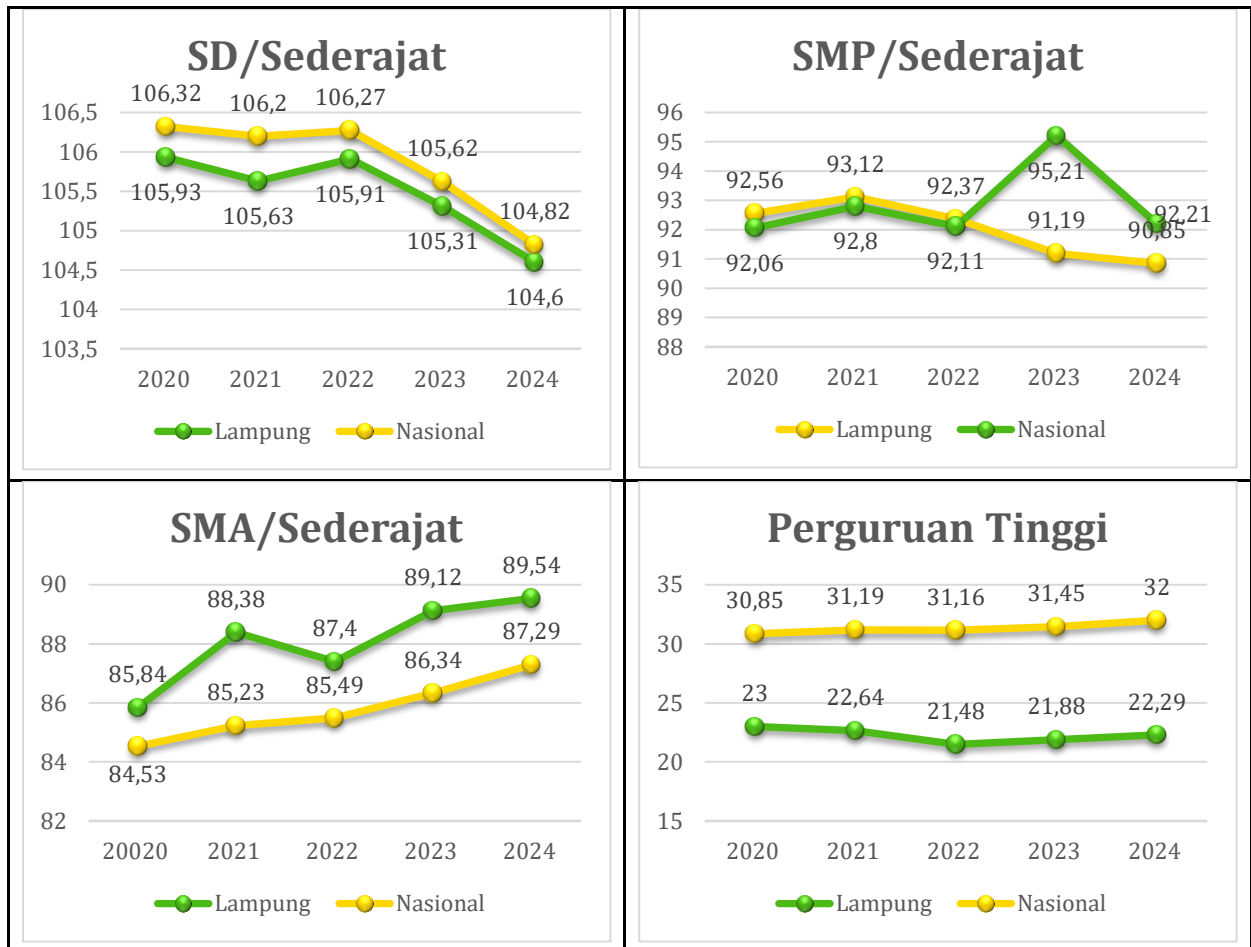
PROVINSI	SD/SEDERAJAT	SMP/SEDERAJAT	SMA/SEDERAJAT
Aceh	0,19	0,33	0,83
Sumatera Barat	0,10	0,60	1,28
Riau	0,11	1,08	1,25
Indonesia	0,13	1,06	1,38
Sumatera Selatan	n/a	1,34	1,36
Sumatera Utara	n/a	0,98	1,22
Jambi	n/a	0,65	1,25
Bengkulu	n/a	0,83	1,97
Lampung	n/a	1,43	2,59
Kep. Bangka Belitung	n/a	1,26	3,62
Kep. Riau	n/a	n/a	2,14

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2023, diolah

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik 2. 66 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Dari grafik terlihat bahwa peningkatan APK terjadi pada setiap jenjang pendidikan, meskipun angka capaian semakin rendah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Selain itu nilai APK yang melebihi 100 persen dapat juga merupakan indikasi adanya peserta didik di atas atau di bawah umur dari *official age* sebagai indikasi terlalu dini atau terlambat mendaftar sekolah dan adanya pengulangan kelas.. Berdasarkan Renstra Kemendikbud tahun 2020- 2024, pemerintah menargetkan capaian indikator APK pendidikan menengah dan sederajat untuk level provinsi dapat melebihi angka 95 persen. Untuk capaian APK Provinsi Lampung belum mencapai target tersebut, oleh karenanya Pemerintah Provinsi Lampung perlu berupaya untuk meningkatkan nilai APK pendidikan menengah dan sederajat, karena dengan tingginya nilai APK menunjukkan bahwa partisipasi penduduk yang bersekolah pada jenjang Pendidikan menengah telah cukup merata. Pada jenjang Pendidikan tinggi nilai APK Provinsi Lampung mengalami peningkatan

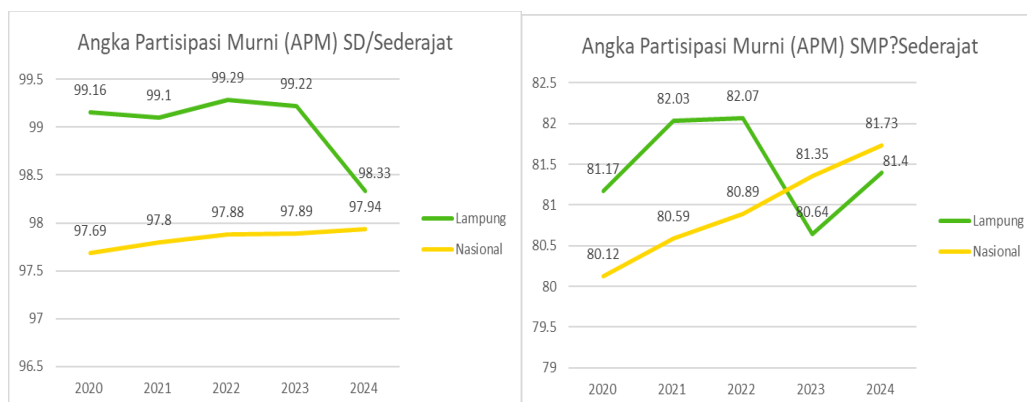
dari tahun 2019 sampai 2023. Capaian APK perguruan tinggi ini juga masih di bawah capaian APK Nasional yang sebesar 31,45 persen di tahun 2023.

Angka Partisipasi Murni

Selain Angka Partisipasi Sekolah (APS) indikator lain yang digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan Pendidikan, terkait dengan aspek kepastian mendapatkan layanan Pendidikan dan pemerataan layanan pada berbagai jenjang Pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM tidak hanya menggambarkan partisipasi penduduk tetapi juga mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi pada jenjang Pendidikan formal.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang Pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Indikator APM termasuk dalam jajaran indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk melihat ketidakmerataan partisipasi pendidikan, meskipun APM tidak termasuk dalam target RPJMN 2020-2024.

Grafik 2. 67Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

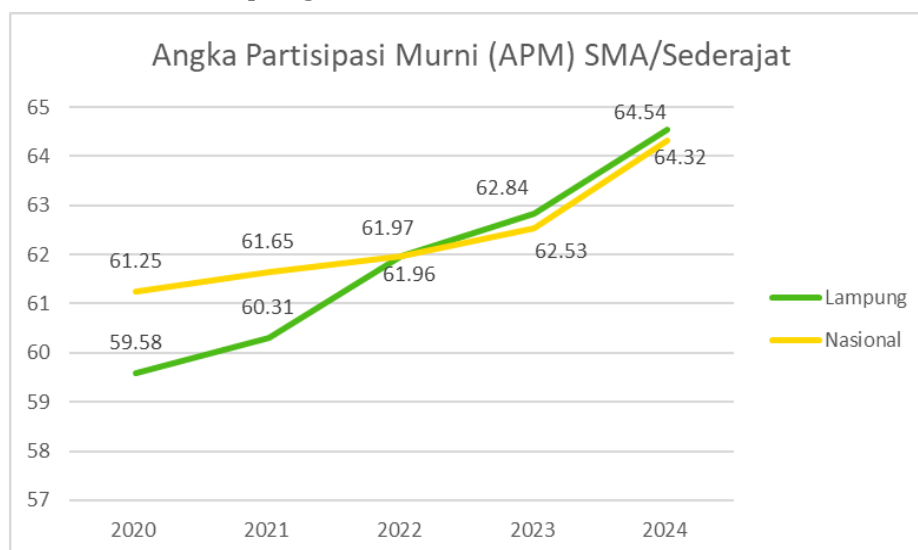


Sumber : BPS Indonesia, 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/Sederajat di Provinsi Lampung dari tahun 2019 sampai 2023 cukup berfluktuasi, dimana di tahun 2019 sebesar 99,24 persen menurun menjadi 99,22 persen di tahun 2023 dengan penurunan sebanyak 0,02 poin. Di tahun 2022 sempat meningkat menjadi 99,29 tetapi kembali turun di tahun 2023. Meskipun begitu, APM jenjang SD/Sederajat masih diatas APM nasional yang pada tahun 2023 mencapai angka 97,89 persen.

Berbeda halnya dengan APM pada jenjang SMP/Sederajat, yang dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar sampai berada di bawah angka nasional. Secara umum APM pada jenjang Pendidikan dasar ini mengalami penurunan di tahun 2023, meskipun pada jenjang Pendidikan SD/Sederajat masih tetap di atas angka nasional

Grafik 2. 68 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Indonesia, 2024

Pada APM jenjang SMA/Sederajat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus meningkat dengan peningkatan sebesar 3,43 poin, dari angka 59,41 persen di tahun 2019 menjadi 62,84 persen di tahun 2023. APM di Tahun 2023 meningkat hingga di atas angka APM nasional yang sebesar 62,53 persen. Jika dibandingkan dengan APM jenjang SD/Sederajat dan SMP/Sederajat, Angka Partisipasi Murni jenjang SMA lebih rendah. Hal ini

menunjukkan bahwa daya serap jenjang Pendidikan SMA/Sederajat perlu ditingkatkan kembali.

Tabel 2. 48 Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tahun 2023

Wilayah Tempat Tinggal	Angka Partisipasi Murni			
	SD /Sederajat	SMP /Sederajat	SMA /Sederajat	Perguruan Tinggi
Perkotaan				
Laki-Laki	99,24	81,65	66,17	21,45
Perempuan	99,59	76,63	62,09	27,34
Laki-Laki + Perempuan	99,42	78,98	64,02	24,39
Perdesaan				
Laki-Laki	99,35	79,99	58,82	7,03
Perempuan	98,86	82,91	65,84	13,90
Laki-Laki + Perempuan	99,12	81,45	62,17	10,34
Perkotaan + Perdesaan				
Laki-Laki	99,31	80,52	61,30	12,08
Perempuan	99,11	80,75	64,40	18,81
Laki-Laki + Perempuan	99,22	80,64	62,84	15,37

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Jika dibandingkan berdasarkan wilayah, APM tahun 2023 pada jenjang SD dan SMA lebih tinggi di wilayah perkotaan, sedangkan APM jenjang SMP lebih tinggi di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa telah cukup banyak penduduk perdesaan sesuai dengan usianya yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Dan berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan di perdesaan lebih banyak melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama dibandingkan penduduk perempuan perkotaan.

Tabel 2. 49 Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kabupaten/Kota	2022			2023		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Lampung Barat	99,02	81,90	55,18	98,51	81,99	51,96
Tanggamus	99,96	80,01	55,72	99,76	81,80	50,76
Lampung Selatan	99,04	80,73	59,04	99,07	82,58	63,89
Lampung Timur	98,25	89,19	60,53	98,34	86,31	62,59
Lampung Tengah	99,76	76,95	67,44	99,80	78,29	69,45
Lampung Utara	99,05	78,62	62,19	98,87	80,28	69,34

Kabupaten/Kota	2022			2023		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Way kanan	99,05	79,67	61,78	98,88	81,31	62,49
Tulang Bawang	99,89	81,17	44,47	99,78	81,39	56,37
Pesawaran	98,93	80,59	67,15	99,49	72,18	65,19
Pringsewu	99,99	87,62	62,11	99,72	79,26	60,93
Mesuji	99,01	84,15	59,53	98,58	80,07	52,84
Tulang Bawang Barat	99,46	84,18	57,24	99,55	85,36	63,48
Pesisir Barat	99,87	81,48	72,96	99,49	69,60	56,26
Bandar Lampung	99,35	83,77	69,86	99,14	81,06	65,51
Metro	99,93	95,29	82,85	99,33	72,89	62,91
Jenis Kelamin						
Laki-laki / <i>Male</i>	99,31	81,23	59,79	99,31	80,52	61,30
Perempuan / <i>Female</i>	00,27	82,91	64,35	99,11	80,75	64,40

Sumber : BPS Indonesia, 2023

Angka Partisipasi Murni berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukkan pada jenjang SD hampir mendekati 100 persen, dan pola yang sama dengan APS, dimana terjadi penurunan persentase seiring bertambahnya usia kelompok penduduk. APM jenjang Pendidikan SMP sebagian besar telah mencapai 80 persen, namun untuk Kabupaten Pesisir Barat pada angka 69,60 persen dan menurun dari tahun 2022. Sedangkan APM jenjang SMA di tahun 2023 masih pada kisaran 60-70 persen kecuali di Kabupaten Tanggamus yang masih cukup rendah sebesar 50,76 persen.

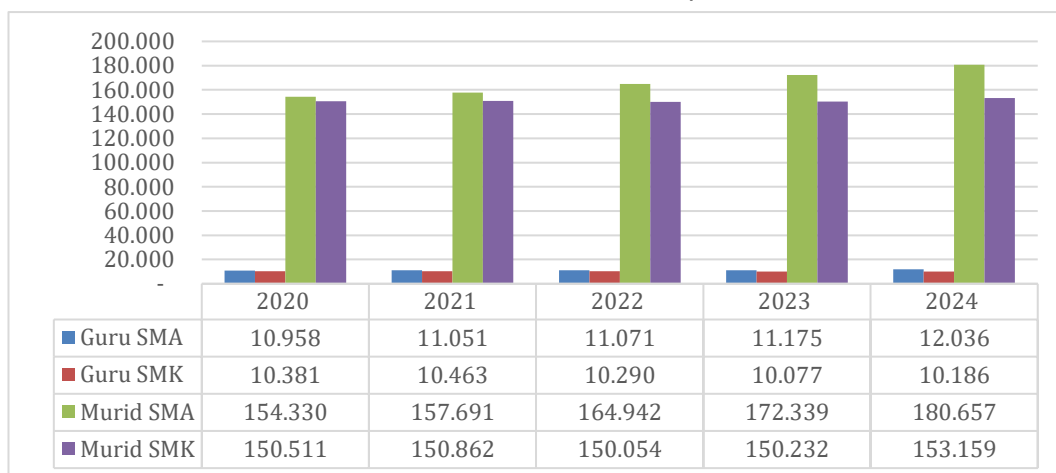
Jumlah Guru Dan Murid SMA dan SMK

Berdasarkan data jumlah murid SMA, terdapat peningkatan jumlah siswa dari tahun 2019 sampai 2023, dengan selisih jumlah siswa sebanyak 21.477 siswa. Jumlah siswa SMK juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021, namun pada tahun 2022 sampai 2023 terdapat penurunan jumlah siswa. Secara umum jumlah siswa SMK dalam periode 2019 sampai 2023 tetap meningkat, dengan peningkatan sebanyak 4.474 siswa.

Peningkatan Jumlah guru SMA dan SMK dari tahun 2019 sampai tahun 2023 cukup berfluktuasi. Jumlah guru SMA di tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat sampai di tahun 2023. Namun secara umum dalam periode tahun 2019 sampai 2023, terdapat peningkatan jumlah guru SMA sebesar 192 guru. Berbeda dengan jumlah guru SMK, dari tahun

2019 sampai 2023 menurun dari 10.168 guru SMK di tahun 2019 menjadi berjumlah 10.077 guru SMK di tahun 2023. Secara rinci jumlah guru dan murid dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 69 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2020-2024



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

Sarana Prasarana Sekolah

Kebutuhan ketersediaan sekolah di suatu wilayah menurut Permendikbud Ristek Nomor 47 tahun 2023, ditentukan berdasarkan rasio jumlah penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) terhadap jumlah rombongan belajar (rombel) di satuan pendidikan. Untuk setiap satuan pendidikan memiliki jumlah maksimal rombel sebanyak 36 rombel dengan masing-masing rombel terdiri dari 36 siswa. Berdasarkan hal tersebut, setiap dibangunnya 1 (satu) unit sekolah diperuntukan bagi 1.296 orang penduduk usia 16-18 tahun. Kondisi saat ini berdasarkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun di masing-masing kabupaten/kota dan jumlah sekolah yang tersedia, kebutuhan sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Lampung telah terpenuhi.

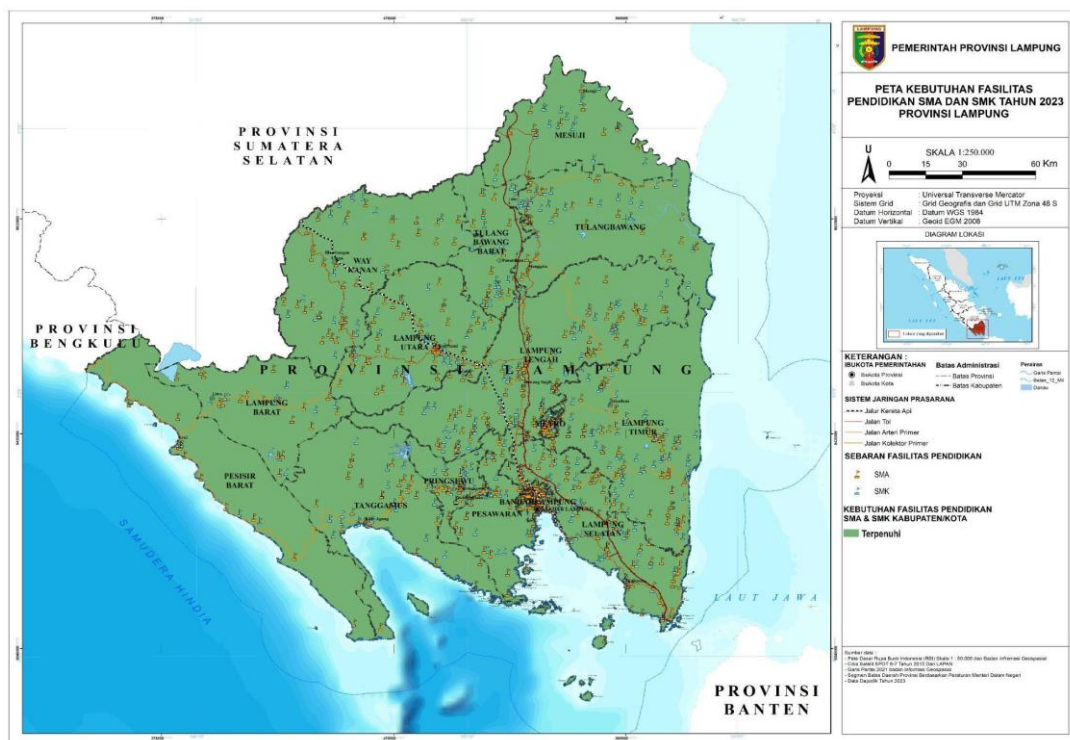
Tabel 2. 50 Ketersediaan Sekolah Menengah Per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Tahun 2023

No	Wilayah	Usia Penduduk 15-19 Tahun	Ketersedian Sekolah SMA /SMK /MA	Kebutuhan Sekolah	Keterangan
1	Lampung Tengah	111460	148	86	Terpenuhi
2	Lampung Timur	83333	124	65	Terpenuhi

No	Wilayah	Usia Penduduk 15-19 Tahun	Ketersediaan Sekolah SMA /SMK /MA	Kebutuhan Sekolah	Keterangan
3	Lampung Selatan	72672	117	56	Terpenuhi
4	Bandar Lampung	91439	128	71	Terpenuhi
5	Lampung Utara	46804	82	37	Terpenuhi
6	Tanggamus	51435	54	40	Terpenuhi
7	Way Kanan	37209	65	29	Terpenuhi
8	Pringsewu	31128	56	24	Terpenuhi
9	Pesawaran	40482	40	32	Terpenuhi
10	Tulang Bawang	36640	54	29	Terpenuhi
11	Lampung Barat	26134	30	21	Terpenuhi
12	Tulang Bawang Barat	19761	35	16	Terpenuhi
13	Kota Metro	13683	41	11	Terpenuhi
14	Mesuji	18384	33	15	Terpenuhi
15	Pesisir Barat	14450	16	12	Terpenuhi
	Provinsi	695014	1023	544	

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024, Data diolah

Gambar 2. 70 Ketersediaan Sekolah Menengah Per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Tahun 2023



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024, Data diolah

Sarana ruang kelas pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang dalam kondisi baik semakin meningkat setiap tahun pelajaran. Pada jenjang Pendidikan SMA meningkat dari 4096 di tahun ajaran 2019/2020 menjadi 9084 prasarana dengan kategori baik di tahun 2022/2023. Pada jenjang SMK juga terjadi peningkatan dari jumlah 4085 di tahun ajaran 2019/2020 menjadi 8655 prasarana dengan kategori baik di tahun 2022/2023. Begitu juga dengan jenjang Pendidikan SLB jumlah prasarana meningkat dari 268 di tahun 2019/2020 menjadi 582 di tahun 2022/2023. Meskipun tingkat kerusakan berat mencapai angka 0 (nol) namun kondisi prasarana rusak ringan masih cukup tinggi khususnya pada jenjang SMA dan SMK. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat. Kondisi prasarana yang rusak berat dan rusak total pada jenjang Pendidikan SMK dan SLB bernilai 0 (nol) menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMK dan SLB karena siswa dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik.

Tabel 2. 51 Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung
Tahun 2019-2023

Kategori	2019/2020			2021/2022			2022/2023		
	SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SLB
Rusak Berat + Rusak Total	12	1	7	6	0	0	4	0	0
Rusak Ringan	4432	3941	252	136	535	4	136	224	4
Baik	4096	4085	268	8770	7911	553	9084	8655	582

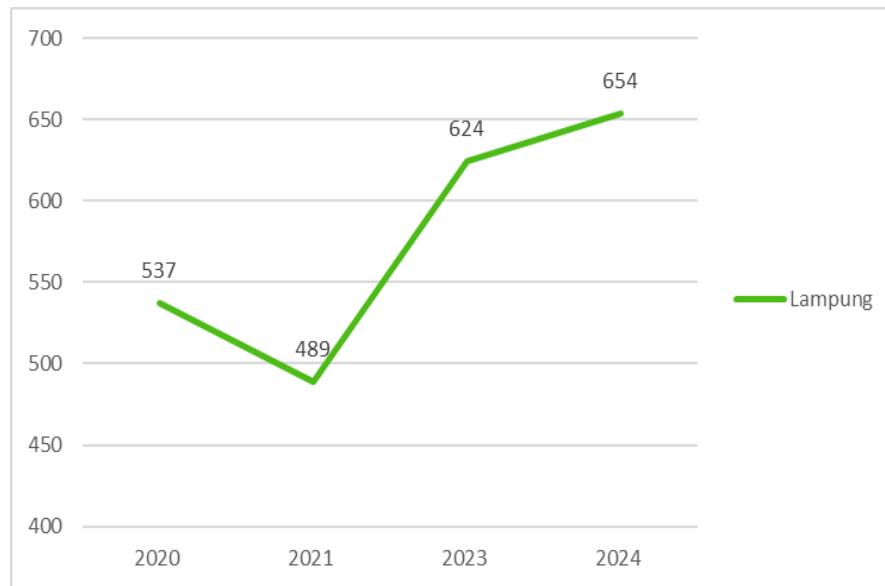
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2024, diolah

2.1.4.5 Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 100.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Kematian bayi terjadi pada masa bayi perinatal (0-6 hari), diikuti kematian pada masa bayi neonatal (7 – 28 hari) dan masa bayi (>28 hari - < 1 tahun). Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Lampung Tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 30 kasus, dimana 2023 sebanyak 624 kasus dan tahun 2024 sebanyak 654 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, trendnya kasus kematian bayi tahun 2020-2024 terlihat pada grafik berikut ini:

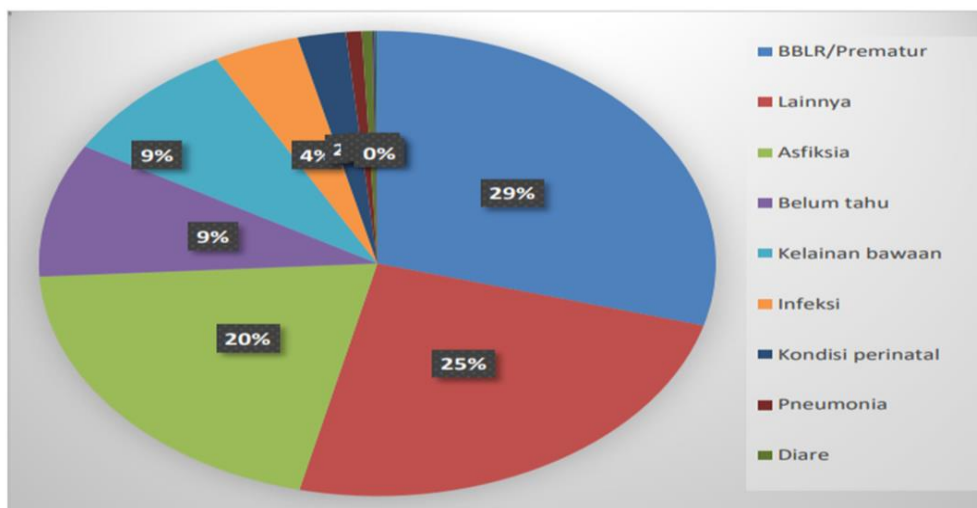
Grafik 2. 71 Trend Kasus Kematian Bayi Tahun 2020-2024



Sumber Laporan Tahun Bidang Kesmas, Dinkes 2023

Tingginya angka kematian bayi disebabkan karena berat badan bayi lahir yang rendah (dibawah 2.500 gram) sebanyak 29 persen , Asfiksia sebanyak 20 persen, Kelainan bawaan sebanyak 9 persen , infeksi besar sebanyak 4 persen, Pnemoni sebanyak 1 persen dan lain-lain sebanyak 25 persen.

Grafik 2. 72 Penyebab kematian bayi tahun 2019-2023



Sumber : Laporan Evaluasi Tahunan Bidang Kesmas, 2023

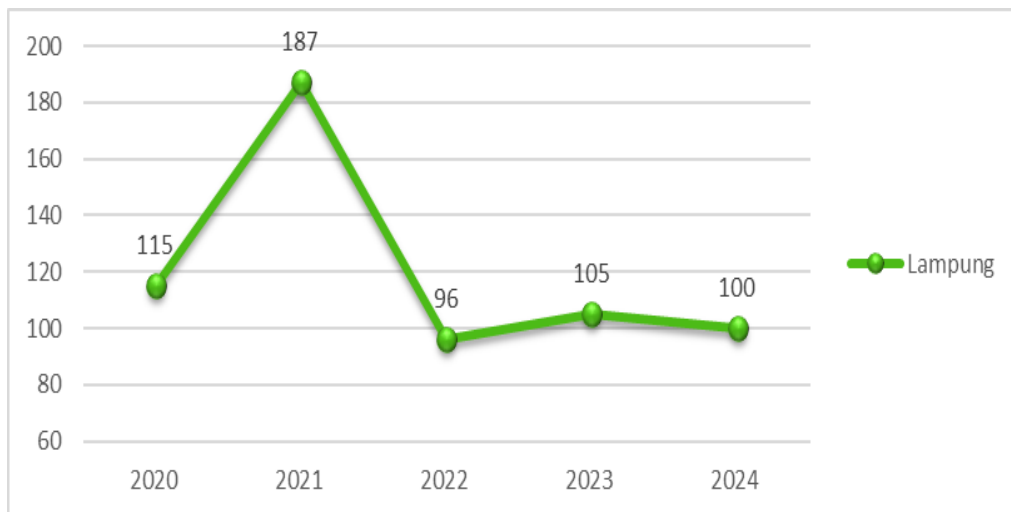
Kematian bayi sendiri tidak dapat diturunkan secara bermakna tanpa adanya dukungan terhadap upaya penurunan kematian ibu dan peningkatan kesehatan ibu. Perawatan antenatal berkualitas dan penolong persalinan

sesuai standar harus disertai dengan perawatan neonatal yang cukup dan upaya menurunkan kematian bayi akibat berat lahir rendah, infeksi pasca lahir (seperti tetanus neonatorum, sepsis), hipotermia dan asfiksia. Sebagian besar kematian neonatal pasca lahir disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dan diobati dengan biaya yang tidak mahal, mudah dilakukan, dan bisa dikerjakan efektif.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lainnya. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah kasus kematian ibu terus menunjukkan penurunan, hingga mencapai 100 kasus pada tahun 2024, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus kematian ibu yang cukup signifikan. Penurunan kasus ini juga disebabkan karena kasus Covid-19 sudah mereda sehingga ibu hamil dapat memeriksakan dirinya secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan.

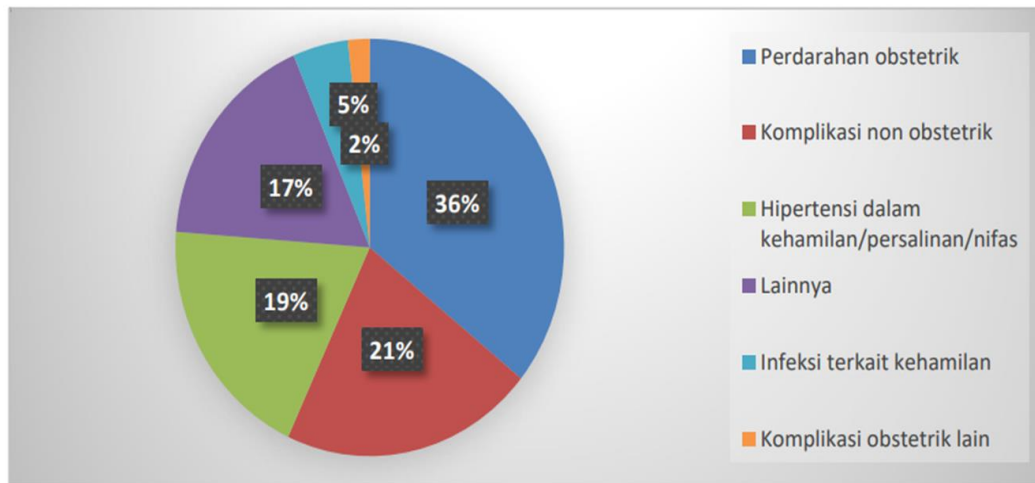
Grafik 2. 73 Trend kasus kematian Ibu tahun 2020-2024



Sumber Laporan Tahun Bidang Kesmas, Dinkes 2025

Penyebab kematian ibu di Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebagian besar disebabkan oleh perdarahan obstetrik 36 persen, komplikasi non obstetrik sebesar 21 persen, hipertensi dalam kehamilan 19 persen, lainnya 17 persen infeksi terkait kehamilan 5 persen dan komplikasi obstetrik lain 2 persen.

Grafik 2. 74 Penyebab kematian Ibu tahun 2019-2023



Sumber : Laporan Evaluasi Tahunan Bidang Kesmas, 2023

Dalam upaya menurunkan kematian ibu, diperlukan peningkatan layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil, nifas dan menyusui dengan meningkatkan akses ibu hamil untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, Perbiakan sisten rujukan maternal neonatal dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

3. Status Gizi Masyarakat

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kondisi status gizi masyarakat khususnya balita adalah dengan menggunakan indikator prevalensi stunting. Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Tabel 2. 52 Prevalensi Stunting 2013-2023

Prevalensi Stunting	Riskesda		SSGBI	SSGI		SKI
	2013	2018	2019	2021	2022	2023
Lampung	42,6	27,28	26,26	18,5	15,2	14,9
Nasional	37,2	30,8	27,7	24,4	21,6	21,5

Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, SSGBI 2019, SSGI 2022, dan SKI 2023

Prevalensi *stunting* berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan lima tahun sekali mengalami penurunan menjadi 27,28 persen pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 pengukuran stunting dilakukan melalui Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) bersamaan dengan Susenas. Berdasarkan survei tersebut prevalensi stunting pada tahun 2019 tercatat sebesar 26,26 persen, pada tahun 2020 SSGBI tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19, dilanjutkan dengan Survey status Gizi Indonesia (SSGI) ditahun 2021 dan 2022, capaian penurunan preavalensi stunting Provinsi Lampung terus menurun menjadi 18,5 persen ditahun 2021 dan 15,2 persen ditahun 2022. Ditahun 2023 berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia prevalensi stunting menurun kembali menjadi 14,9 persen. Beberapa hal yang menyebabkan kejadian stunting di antaranya:

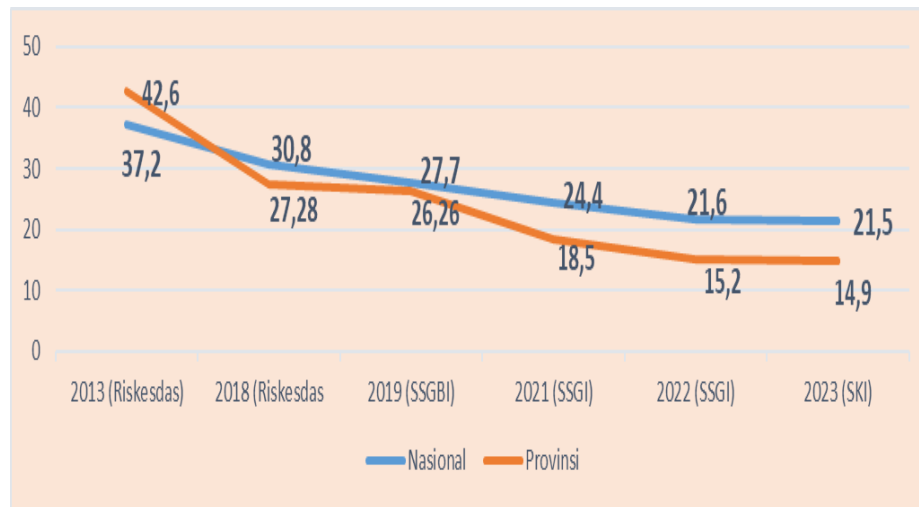
- a. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.
- b. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dan anak

belum mendapat akses memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi memadai serta masih terbatasnya akses layanan pembelajaran dini berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini).

- c. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.
- d. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih Buang Air Besar (BAB) di ruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih.

Prevalensi Stunting pada Balita. Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting Provinsi Lampung telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, berdasarkan data SKI 2023 prevalensi stunting Provinsi Lampung sebesar 14,9 persen, menurun sebesar 0,3 persen dari kondisi tahun 2022 sebesar 15,2 persen. Angka capaian ini menjadikan Provinsi Lampung menjadi 4 Provinsi terendah angka prevalensi stunting. Penurunan yang cukup signifikan ini diperoleh karena aksi konvergensi stunting penurunan stunting yang telah dilakukan di Provinsi Lampung sejak tahun 2018. Beberapa strategi juga terus diupayakan, untuk mencapai target prevalensi stunting Provinsi Lampung sebesar 13,2 persen ditahun 2025 dan 3,8 persen ditahun 2045 serta mencapai **Zero New Stunting**.

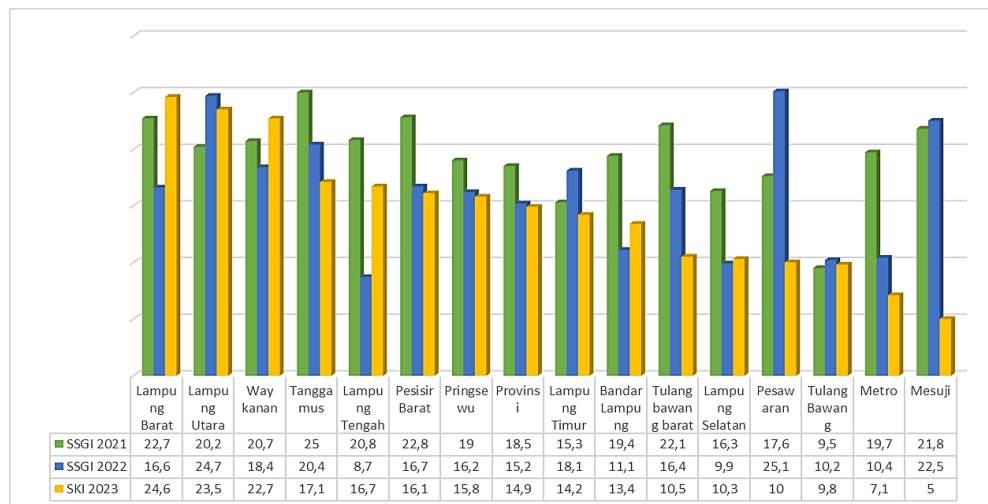
Grafik 2. 75 Trend Prevalensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2013-2023



Sumber : Riskesdas 2013 dan 2018, SSGBI 2019, SSGI 2022 dan SKI 2023

Berdasarkan data prevalensi stunting Kabupaten/Kota terdapat lima kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu : Lampung barat (24.6 persen), Lampung Tengah (16,7 persen), Way kanan (22,7 persen), Bandar Lampung (13,4 persen) dan Lampung Selatan (10,3 persen), namun untuk Kabupaten Lampung Utara walaupun Trendnya turun angka prevalensi stunting masih diatas 20 persen.

Grafik 2. 76 Trend Prevalensi Stunting Kab/Kota Tahun 2013-2023



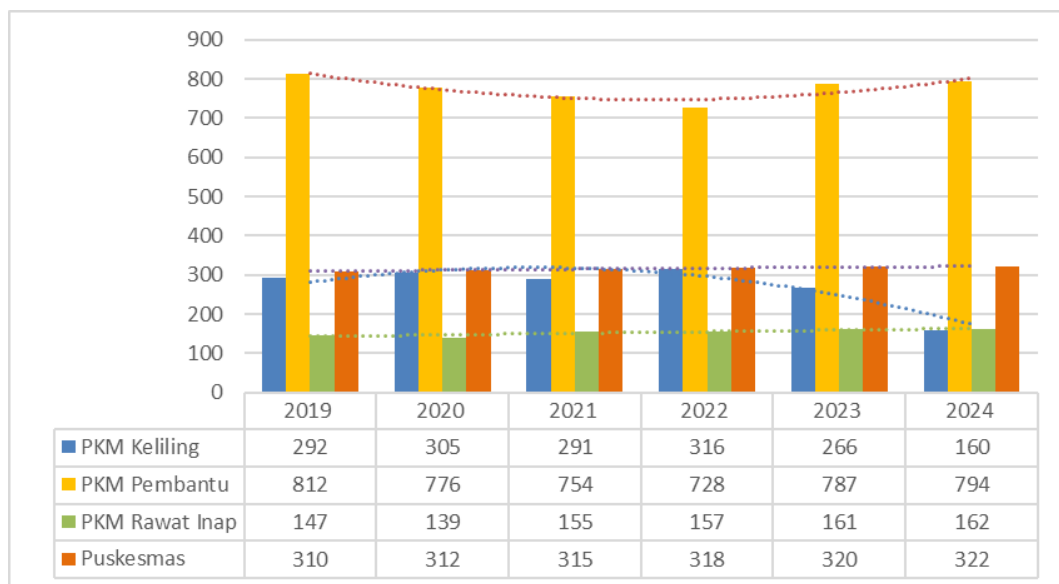
Sumber : Riskesdas 2013 dan 2018, SSGBI 2019, SSGI 2022 dan SKI 2023

4. Sarana Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas)

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja, puskesmas merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Puskesmas di Provinsi Lampung dari tahun ketahun meningkat jumlahnya, baik rawat inap, keliling atau pembantu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, diterangkan bahwa setiap wilayah Kecamatan harus memiliki minimal 1 (Satu) Puskesmas atau lebih berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas.

Grafik 2. 77 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Provinsi Lampung 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan data jumlah wilayah Kecamatan yang ada di Provinsi Lampung tahun 2024 sebanyak 299 kecamatan, seluruh kecamatan telah

Gambar 2. 78 Ketersediaan Puskesmas Di Provinsi Lampung Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2024



Rancangan Awal RKPD PROVINSI LAMPUNG Tahun 2026

Grafik 2. 79 Rasio Puskesmas Terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



Sumber : Bapeda Provinsi Lampung,2024, Data diolah

Tabel 2. 53 Ketersediaan Puskesmas Terhadap Penduduk.
di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

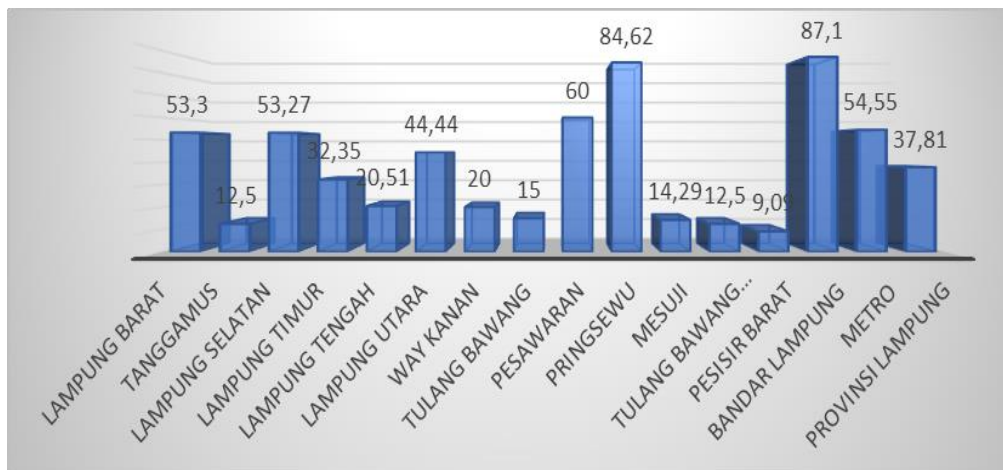
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2023	Jumlah Kecamatan	Ketersediaan Puskesmas	Kebutuhan Puskesmas Berdasarkan Jumlah Penduduk	Keterangan
Lampung Barat	303.931	15	15	15	Terpenuhi
Tanggamus	659.818	20	26	33	Belum Terpenuhi
Lampung Selatan	1.090.174	17	28	55	Belum Terpenuhi
Lampung Timur	1.137.434	24	34	57	Belum Terpenuhi
Lampung Tengah	1.522.426	28	39	76	Belum Terpenuhi
Lampung Utara	635.903	23	27	32	Belum Terpenuhi
Way Kanan	485.056	15	20	24	Belum Terpenuhi
Tulang Bawang	431.623	15	20	22	Belum Terpenuhi
Pesawaran	492.474	11	15	25	Belum Terpenuhi
Pringsewu	409.858	9	13	20	Belum Terpenuhi
Mesuji	235.546	7	14	12	Terpenuhi
Tulang Bawang Barat	291.437	9	16	15	Terpenuhi
Pesisir Barat	165.937	11	11	8	Terpenuhi
Bandar Lampung	1.234.988	20	31	62	Belum Terpenuhi
Metro	172.505	5	11	9	Terpenuhi
Provinsi Lampung	9.269.110	229	320	463	

Sumber : Bapeda Provinsi Lampung,2024, Data diolah

Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Strategis

Akreditasi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama/Puskesmas memiliki standar ketenagaan 9 jenis tenaga, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas. Jenis tenaga kesehatan yang menjadi standar terdiri dari Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Promosi Kesehatan (Kesehatan Masyarakat), Sanitasi, Nutrisi, tenaga apoteker dan ahli teknologi laboratorium medik. Saat ini di Provinsi Lampung dari 320 Puskesmas yang ada, hanya 121 Puskesmas (37,81%) yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dan 199 Puskesmas (62,19%) belum memiliki standar 9 tenaga kesehatan.

Grafik 2.80 Distribusi 9 Jenis Tenaga di Puskesmas Per- Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber : Laporan Evaluasi Subbag Kepegawaian dan SDM Dinkes Prov. Lampung, 2023

Akreditasi Puskesmas (FKTP)

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan mekanisme regulasi yang bertujuan mendorong dan memotivasi upaya peningkatan mutu serta kinerja dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Di Provinsi Trend capaian Akreditasi FKTP terus meningkat. Di tahun 2020 sebesar 61,55 persen meningkat menjadi 85 persen di tahun 2023. Berdasarkan data capaian FKTP Kabupaten/Kota, dari 15 Kabupaten/Kota, Capaian target FKTP terakreditasi di 5 Kabupaten sudah teralisasi, namun masih terdapat 10 Kabupaten/Kota yang FKTP nya belum mencapai target diantaranya Kabupaten tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Mesuji, Tulang bawang Barat, Pesisir Barat, Bandar Lampung.

Grafik 2. 81 Trend Capaian Akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

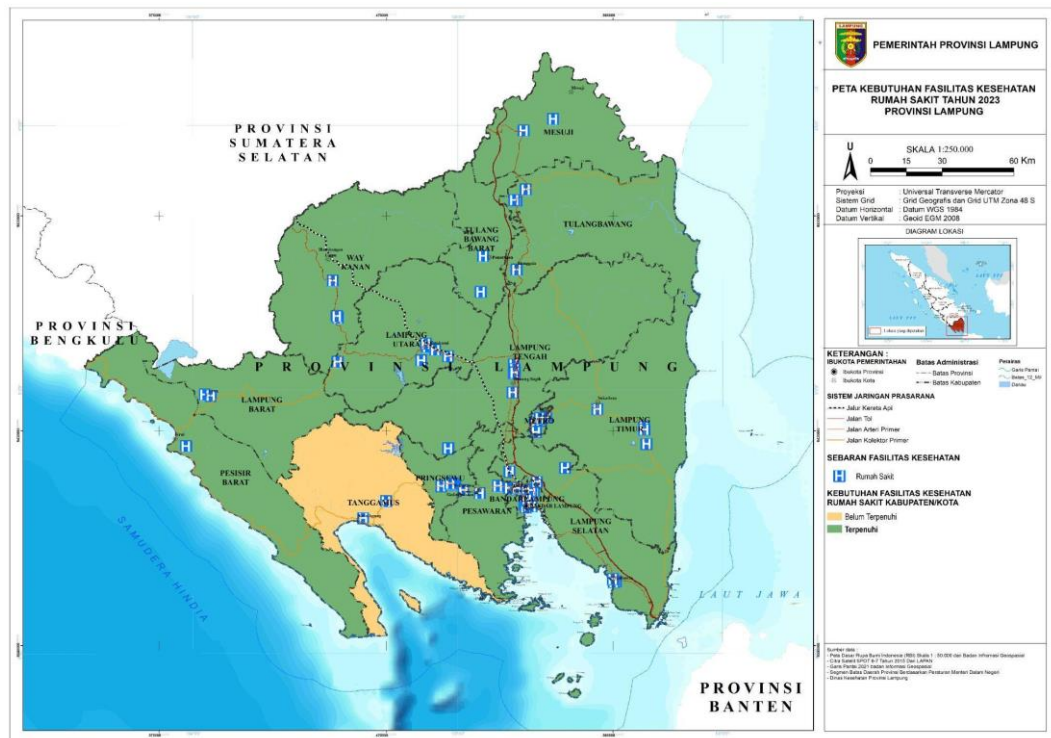


Sumber: Evaluasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, 2023

Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Saat ini Provinsi Lampung memiliki 81 Rumah sakit yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Menurut undang-undang Nomor 44 tahun 2019 tentang rumah sakit, Penyediaan Rumah Sakit didasarkan pada perhitungan rasio tempat tidur dan jumlah penduduk. didasari standar WHO, setiap RS minimal memilik 250 tempat tidur dan 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk, sehingga dengan kata lain 1 RS diperuntukan untuk 250.000 penduduk. Saat ini berdasarkan jumlah penduduk di 15 Kabupaten/Kota, ketersediaan RS sudah sebagian besar terpenuhi, hanya kabupaten Tanggamus yang belum terpenuhi.

Gambar 2. 82 Ketersediaan Rumah Sakit Berdasarkan Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023, Data Diolah

Tabel 2. 54 Ketersediaan Rumah Sakit Berdasar Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2023

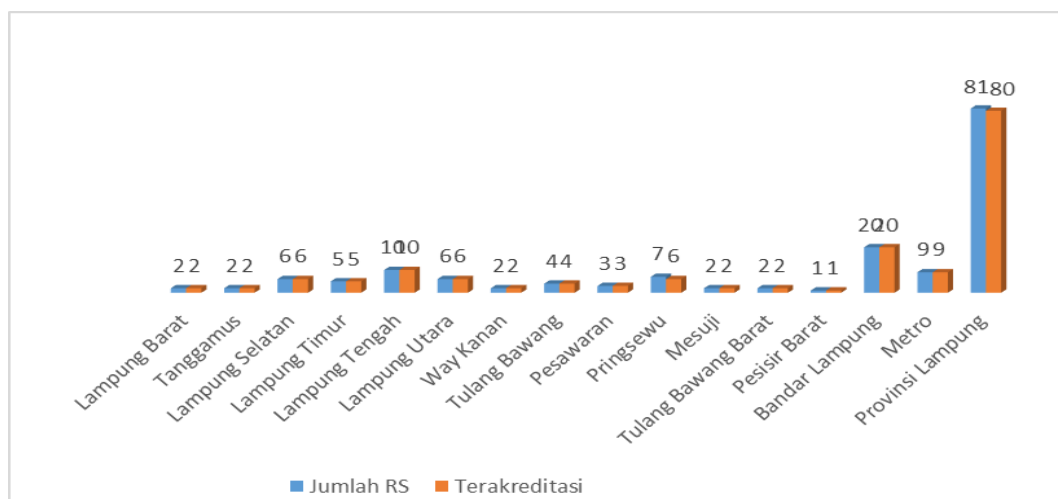
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2023	Ketersediaan Rumah Sakit	Kebutuhan Rumah Sakit	Keterangan
Lampung Barat	303.931	2	1	Terpenuhi
Tanggamus	659.818	2	3	Belum terpenuhi
Lampung Selatan	1.090.174	6	4	Terpenuhi
Lampung Timur	1.137.434	5	5	Terpenuhi
Lampung Tengah	1.522.426	10	6	Terpenuhi
Lampung Utara	635.903	6	3	Terpenuhi
Way Kanan	485.056	2	2	Terpenuhi
Tulang Bawang	431.623	4	2	Terpenuhi
Pesawaran	492.474	3	2	Terpenuhi
Pringsewu	409.858	7	2	Terpenuhi
Mesuji	235.546	2	1	Terpenuhi
Tulang Bawang Barat	291.437	2	1	Terpenuhi
Pesisir Barat	165.937	1	1	Terpenuhi
Bandar Lampung	1.234.988	20	5	Terpenuhi
Metro	172.505	9	1	Terpenuhi
Provinsi Lampung	9.269.110	81	37,08	

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023, Data diolah

Akreditasi Rumah Sakit

Berdasarkan data dari aplikasi RS ONLINE per tanggal Januari 2024 disebutkan bahwa jumlah rumah sakit telah terakreditasi pada tahun 2023 sebanyak 80 rumah sakit atau sebesar 98.77 % dengan rincian rumah sakit pemerintah sebanyak 21 RS atau sebesar 25.93% dan rumah sakit swasta sebanyak 59 RS atau sebesar 72.84%. Hanya 1 satu rumah sakit yang belum terakreditasi yaitu RSK Bedah Kurnia Centre di Kab. Pringsewu terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 83 Jumlah Rumah Sakit Yang Ter- Akreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

Untuk kelulusan akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Lampung sebesar 7 persen sudah mencapai status utama dan 93 persen perstatus Paripurna.

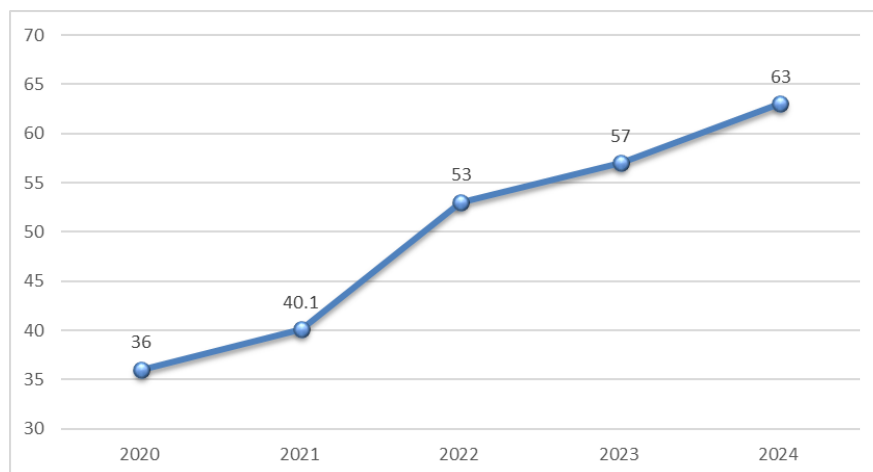
4. Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis merupakan penyebab kematian ke-9 di dunia dan penyebab utama agen infeksius tunggal dengan peringkat di atas HIV/AIDS. Menurut WHO dalam Global TB Report tahun 2020, saat ini Indonesia berada di urutan 2 negara terbesar di dunia sebagai penyumbang penderita TBC setelah India, dengan estimasi insiden sebesar 845.000 kasus atau 312 per 100.000 penduduk dan mortalitas 92.000 atau 34 per 100.000 penduduk (selain TB HIV).

Berdasarkan data angka penemuan kasus TBC (CDR) semua kasus TB di Provinsi Lampung terlihat bahwa penemuan kasus dari tahun 2020 sampai

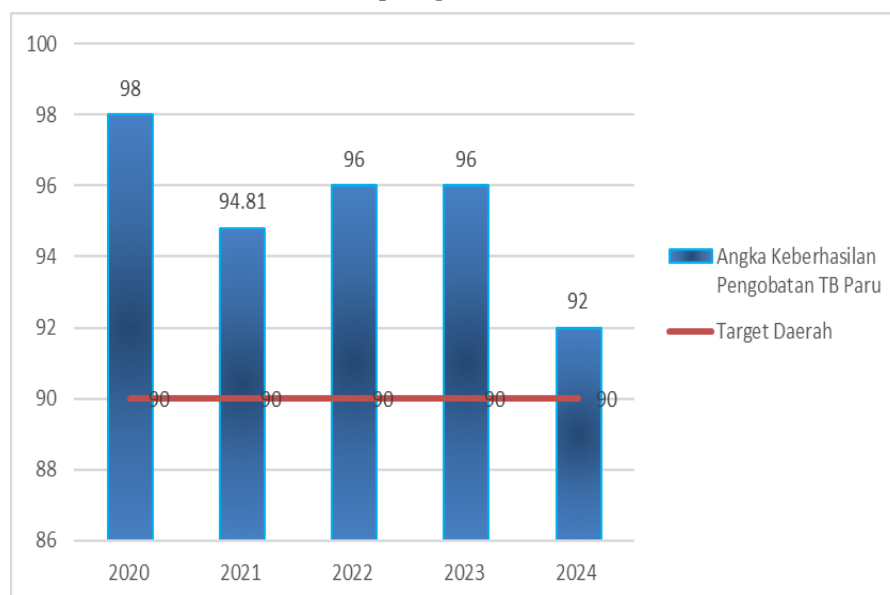
dengan tahun 2023 terus meningkat, namun angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Semakin tinggi CDR mengartikan semakin banyak kasus TBC yang ditemukan secara dini dan diobati, sehingga menurunkan angka penularan di masyarakat. CDR yang rendah mengartikan kasus TBC masih banyak yang belum ditemukan sehingga mengindikasikan penularan TBC yang tinggi di Kabupaten/Kota tersebut.

Grafik 2. 84 Cakupan Penemuan Kasus TBC (CDR)
Di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Grafik 2. 85 Angka Keberhasilan Pengobatan TB paru (*success rate*) Provinsi Lampung 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi prioritas di wilayah pulau Sumatera Indonesia yang memiliki daya ungkit besar dalam capaian

program Tuberkulosis nasional dengan jumlah penduduk yang dimilikinya. Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi prioritas di Indonesia untuk melaksanakan strategi *Public Private Mix* (PPM) dimana sebelumnya salah satu masalah di program tuberkulosis adalah rendahnya pencatatan dan pelaporan dari tingkat FKTP maupun FKRTL baik pemerintah dan swasta. Dengan penerapan strategi PPM, terjadi peningkatan capaian secara signifikan. Pada tahun 2021 sampai 2024 terjadi peningkatan keterlibatan fasyankes dalam program tuberkulosis, Rumah Sakit Pemerintah di angka 70% dan saat ini di tahun 2023 sudah 100%, Rumah Sakit Swasta dari 61% menjadi 95%, Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) dari 0% menjadi 28%, Klinik Pemerintah dari 0% menjadi 25% dan Klinik Swasta dari 3% menjadi 46%. Tidak hanya peningkatan jumlah fasyankes terjadi juga peningkatan dalam capaian angka kasus TBC. Capaian dari Rumah Sakit Pemerintah tahun 2021 berjumlah 1667 kasus sementara tahun 2023 sudah 2453 kasus ditemukan (masih bisa meningkat), dari rumah sakit swasta tahun 2021 berjumlah 2316 kasus pada tahun 2023 sudah ditemukan 4788 kasus (masih bisa meningkat), sementara dari TPMD, Klinik Swasta dan Pemerintah dari 47 kasus ditemukan tahun 2021 saat ini sudah ditemukan 815 kasus di tahun 2023 dan masih bisa mengalami peningkatan.

Komponen yang menyebabkan keberhasilan pengobatan TB paru (success rate) adalah sebagai berikut :

1. Berhasilnya petugas puskesmas dalam melakukan pendampingan pengawasan minum obat pasien yang ada di layanannya serta terjalin dengan baiknya komunitas atau mitra TBC yaitu ILS (inisiatif lampung sehat) yang kader-kadernya memiliki tupoksi sebagai PMO (Pengawasan Menelan Obat) serta petugas investigasi kontak.
2. Tingkat kepatuhan tinggi pasien pengobatan salah satunya dapat dipengaruhi oleh adanya motivasi. Motivasi dalam meningkatkan kesadaran dan keinginan berobat penderita.
3. Obat-obatan dan layanan diberikan secara gratis, pusat pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat serta adanya keinginan dari dalam diri untuk sembuh.
4. Dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk pengobatan TB, dimana keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggota keluarganya yang sakit.

Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk).

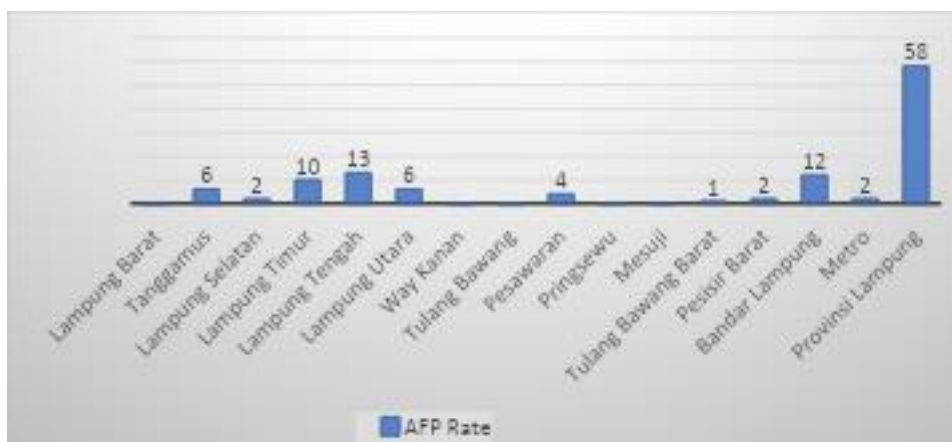
Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu 10 penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia dan penyebab utama kematian dari agen infeksius. Target global dan milestone untuk penurunan insiden TBC dan kematian TBC telah ditetapkan sebagai bagian dari SDGs dan End TBC Strategi TBC pada akhir tahun 2030; yaitu penurunan 90% kematian TBC dan 80% penurunan insiden TBC (kasus baru dan kambuh per 100.000 penduduk per tahun) antara 2015 dan 2030.

5. *Universal Child Immunization (UCI)*

Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana >80% dari umlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4dosis He p. B, 1 dosis campak), sedangkan indikator penilaian untuk desa UCI adalah BCG, DPT/Hb3, Polio4 dan Campak dimana ke 4 (empat) indikator tersebut angka cakupan desa harus diatas >90% secara Provinsi. Cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 98,9%. Persentase cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 68,9%. Saat ini secara nasional target capaian pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi terus ditingkatkan untuk mencapai target dalam eradikasi, eliminasi dan reduksi hingga mencapai tingkat *Population Immunity* (Kekebalan Masyarakat).

Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari polio, pemerintah melaksanakan program Eradikasi polio (ERAPO) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio secara rutin, pemberian imunisasi massal pada anak Balita melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan surveilans AFP (Acute Flaccid Paralysis). Angka AFP rate non polio per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 2,7 per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu dan sudah mencapai target yang ingin dicapai yaitu > 2 per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun. Kasus AFP rate tertinggi ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Grafik 2. 86 Distribusi Penemuan Kasus AFP Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : Seksi P2PM Dinkes Prov. Lampung, 2022

Penemuan kasus AFP merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan indikator non polio AFP rate > 2 pada anak berusia <15 tahun yang dilaporkan baik puskesmas/masyarakat maupun rumah sakit.

6. Cakupan Kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)

Untuk menjamin setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana amanat UUD 1945. Dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, Pemerintah memberikan bantuan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemberian bantuan ini didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta menggunakan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebelum tahun 2019, Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2019 melalui kontribusi penerimaan pajak rokok sebesar 37,5%, Pemerintah Provinsi Lampung ikut mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan. Pembiayaan JKN untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Lampung dialokasikan untuk PBI yang berasal dari narapidana, penghuni panti sosial, guru honor murni SMK/SMA dan membantu pembiayaan PBI masyarakat miskin di Kabupaten/Kota. Sehingga Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi

Lampung meningkat hingga mencapai 75,2 persen, yaitu dari 6.618.935 jiwa pada tahun 2019 menjadi 8.801.766 jiwa di tahun 2023.

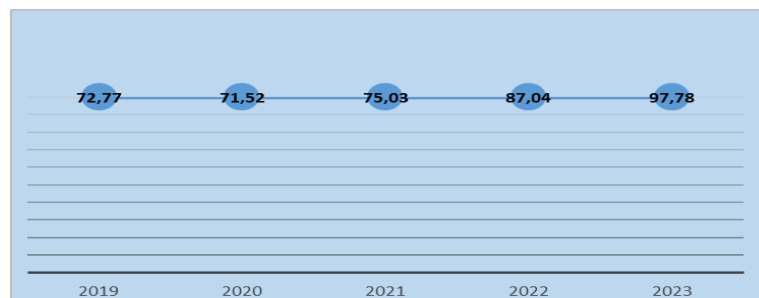
Grafik 2. 87 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, 2023

Dalam rangka mendukung kebijakan jaminan sosial secara nasional, khususnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Provinsi Lampung terus meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam program JKN. Dalam kurun waktu lima tahun jumlah penduduk Provinsi Lampung yang menjadi Peserta JKN terus mengalami peningkatan, ditahun 2019 sebesar 72,77 persen meningkat menjadi 97,78 persen ditahun 2023. Dengan capaian tersebut Provinsi Lampung menyandang predikat *Universal Health Coverage (UHC)*. Keberhasilan tersebut tidak terlepas partisipasi mandiri dari masyarakat dan dukungan pemerintah baik pusat, daerah dan Kabupaten/Kota.

Grafik 2. 88 Trend Persentase Penduduk Provinsi Lampung yang Menjadi Peserta JKN Tahun 2019-2023 perbaiki grafik nya range nya 70-100



Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, 2023

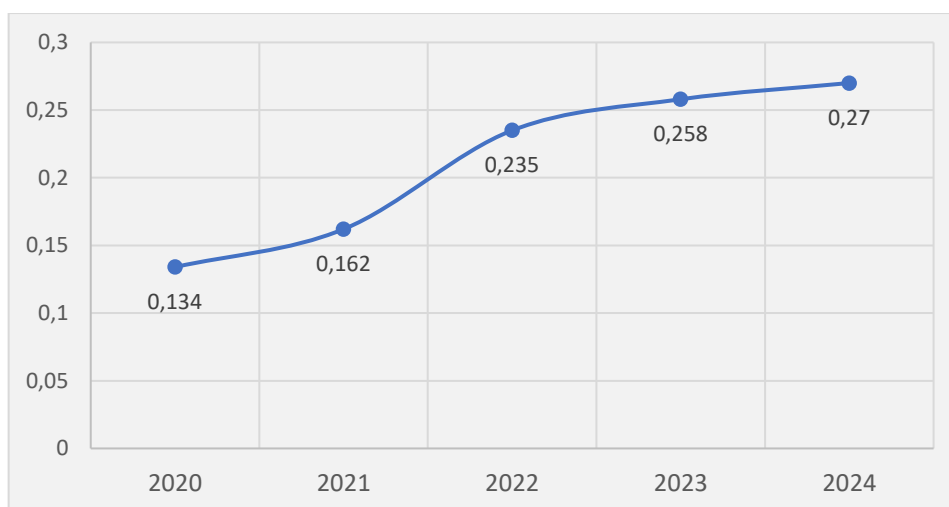
2.1.4.6 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

A. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebuah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat melalui kondisi kesehatan keluarga. Penilaian IKS dilakukan dengan memperhitungkan 12 indikator keluarga sehat, dan hasilnya berupa nilai yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, semakin baik kondisi kesehatan keluarga tersebut. Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016), suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat apabila memiliki nilai IKS lebih dari 0,8.

Grafik Trend Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Provinsi Lampung Tahun 2018-2024

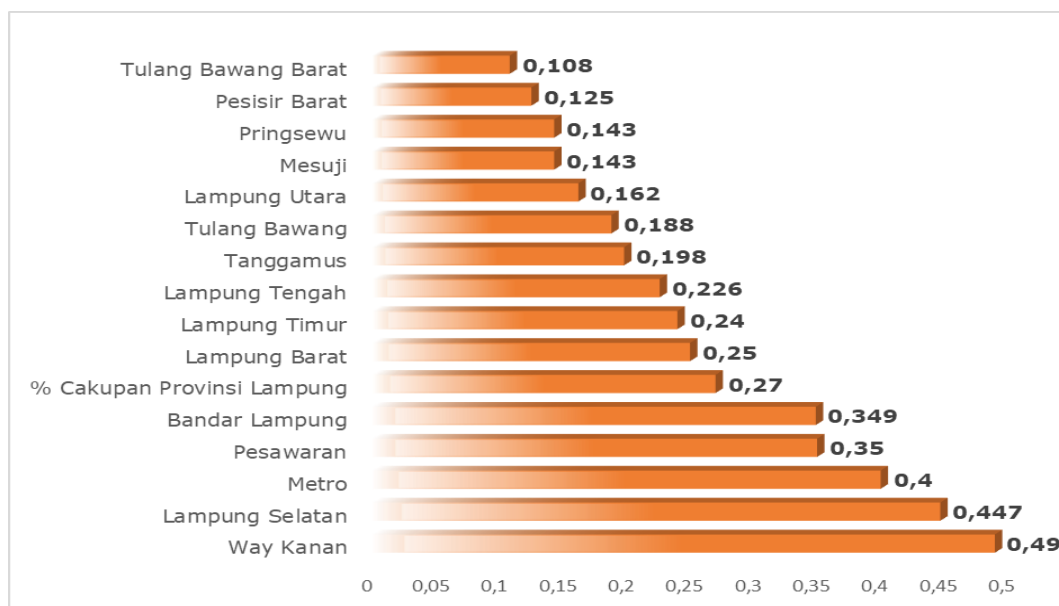


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan grafik terjadi peningkatan IKS secara bertahap dari tahun ke tahun. Kenaikan signifikan tercatat antara tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 0,073 poin, yang menunjukkan adanya percepatan dalam pencapaian indikator-indikator kesehatan keluarga pada periode tersebut. Hal ini dapat diasumsikan sebagai dampak dari intensifikasi program promotif dan preventif pascapandemi COVID-19, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.

Pada tahun 2023 dan 2024, peningkatan IKS relatif lebih moderat, masing-masing sebesar 0,023 dan 0,012 poin. Meskipun tren tetap menunjukkan perbaikan, perlambatan ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan strategis ke depan. Indikasi ini dapat mencerminkan tantangan dalam menjangkau kelompok keluarga yang rentan atau berada di wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.

Grafik Distribusi Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

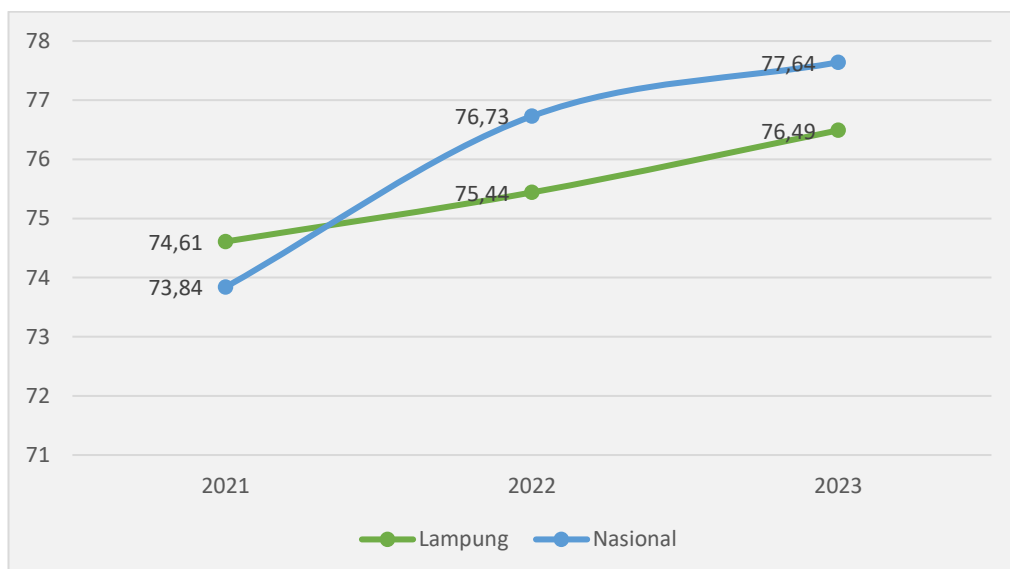
Nilai IKS Provinsi Lampung tahun 2024 tercatat sebesar 0,27, yang menunjukkan adanya kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pencapaian antarwilayah di dalam provinsi menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Kabupaten Way Kanan mencatatkan IKS tertinggi (0,49), hampir lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan Tulang Bawang Barat (0,108)

Kabupaten dengan IKS di bawah rata-rata provinsi (0,27) seperti Lampung Timur, Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Utara, Mesuji, Pringsewu, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang Barat perlu menjadi prioritas dalam perencanaan program kesehatan keluarga.

B. Indeks Kualitas Keluarga

Dalam upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, peningkatan kualitas keluarga menjadi fondasi yang sangat penting. Sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai ruang awal yang membentuk dan memengaruhi kualitas hidup setiap anggotanya. Di dalam lingkungan keluarga inilah nilai-nilai seperti kesetaraan gender mulai diperkenalkan dan ditanamkan, yang kemudian tercermin dalam perilaku anggota keluarga, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. Untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia melalui pendekatan berbasis keluarga, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) hadir sebagai alat ukur yang komprehensif. IKK mencakup berbagai dimensi dan indikator yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas kehidupan keluarga dalam rangka mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan.

**Grafik Trend Indeks Keluarga Sehat (IKK) (Metadata Baru)
Provinsi Lampung Tahun 2020-2024**



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Indeks Kualitas Keluarga, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun

2021, IKK Lampung tercatat sebesar 74,61, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 73,84. IKK Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023, yakni dari angka **75,44** menjadi **76,49**. Meskipun mengalami pertumbuhan positif, capaian IKK Provinsi Lampung tahun 2023 **masih berada di bawah rata-rata nasional**, yang berada pada angka **77,64**.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun Lampung mengalami perbaikan dalam kualitas keluarga dari tahun ke tahun, kecepatan peningkatannya masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dan strategis dalam memperkuat dimensi-dimensi yang membentuk kualitas keluarga di Lampung agar dapat sejajar, bahkan melampaui pencapaian nasional di masa mendatang.

Tabel Pencapaian Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

No	Dimensi	2022	2023	Nasional 2023
1	Kualitas Legalitas Struktur (KLS)	89,30	88,33	87,66
2	Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)	74,98	76,00	77,38
3	Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)	70,08	73,23	74,10
4	Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)	71,27	72,76	76,67
5	Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSBB)	65,74	66,22	66,23
	IKK	75,44	76,49	77,64

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Indeks Kualitas Keluarga, 2024

Secara umum, tren capaian IKK Provinsi Lampung menunjukkan arah positif, meskipun **masih terdapat beberapa dimensi yang perlu mendapat perhatian khusus**, terutama pada aspek **Ketahanan Sosial-Psikologis dan Sosial-Budaya**.

C. Perlindungan Sosial

Dalam rangka mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang inklusif dan merata, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah telah merancang dan melaksanakan kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan akses yang adil kepada seluruh

lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah secara bertahap melakukan pendaftaran terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya untuk menjadi peserta dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pendaftaran ini dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan.

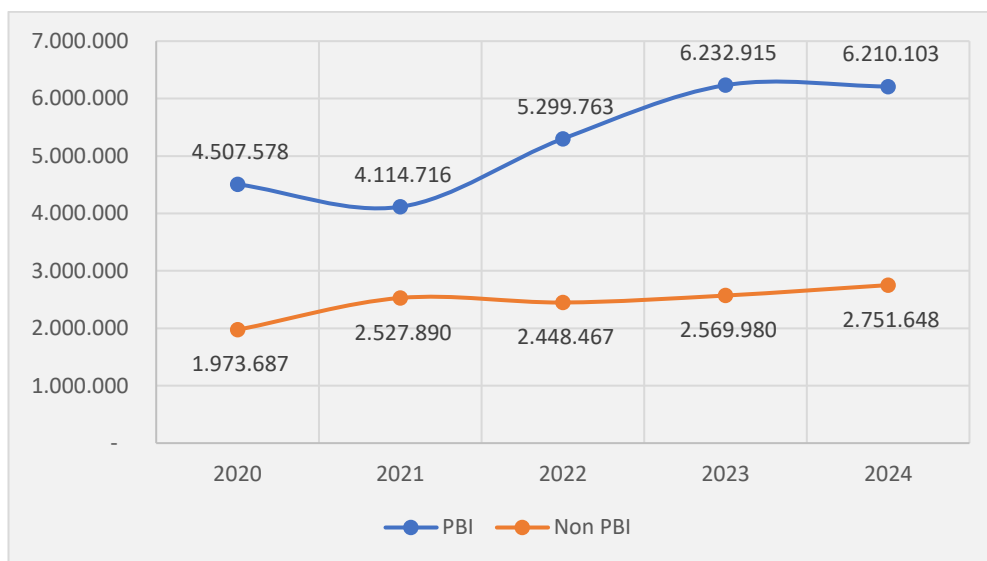
Dalam hal ini, perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dilakukan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program JKN ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang tergolong miskin dan tidak mampu, dapat mengakses layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani oleh biaya pengobatan yang tinggi. Pembiayaan ini diberikan oleh pemerintah melalui PBI, yang memastikan bahwa kelompok masyarakat ini tetap terlindungi dalam hal kesehatan meskipun tidak mampu membayar iuran secara mandiri.

Pemberian bantuan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh alokasi pendanaan yang memadai. Selain itu, proses pendaftaran dan verifikasi peserta menggunakan sistem yang mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas unik untuk setiap individu. Sebelum tahun 2019, pembiayaan untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dikelola bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, di mana masing-masing pihak turut serta dalam pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini.

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dialokasikan untuk sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan, antara lain narapidana, penghuni panti sosial, serta guru honor murni di tingkat SMK/SMA. Selain itu, alokasi pembiayaan ini juga digunakan untuk membantu pembiayaan PBI bagi masyarakat miskin yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, jumlah peserta PBI menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 4,5 juta jiwa pada 2020 menjadi 6,2 juta jiwa pada 2024, meskipun sempat mengalami fluktuasi akibat pemutakhiran data dan penyesuaian DTKS. Sementara itu, peserta Non-PBI juga mengalami pertumbuhan, dari 1,9 juta jiwa pada 2020 menjadi 2,7 juta jiwa pada 2024, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kesehatan mandiri.

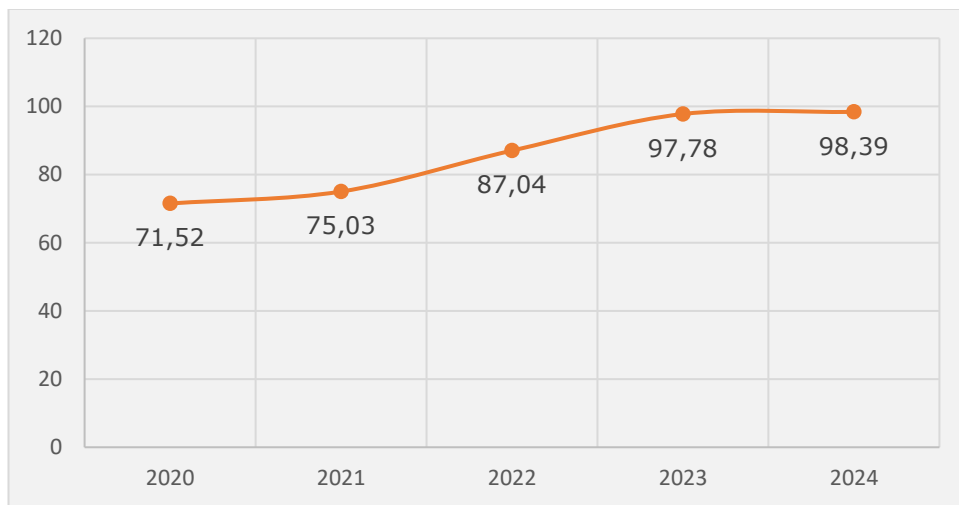
**Grafik Trend Jaminan Kesehatan PBI Dan Non PBI
Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024**



Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, 2025

Tren pertumbuhan peserta JKN di Provinsi Lampung pada periode 2020–2024 menunjukkan pencapaian yang sangat positif. Terjadi peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam persentase penduduk yang menjadi peserta JKN di Provinsi Lampung. Dimulai dari 71,52% pada tahun 2020, angka tersebut melonjak menjadi 98,39% pada tahun 2024. Lonjakan tertinggi tercatat antara tahun 2021 ke 2022, yaitu peningkatan sebesar 12,01 poin persentase, yang mencerminkan efektivitas berbagai program strategis perluasan kepesertaan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi bersama pemangku kepentingan terkait.

Grafik Trend Persentase Penduduk Provinsi Lampung yang Menjadi Peserta JKN Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Dengan pencapaian 98,39% pada tahun 2024, Provinsi Lampung mendekati target *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu seluruh penduduk terdaftar dalam program jaminan kesehatan. Meski target kuantitatif hampir tercapai, fokus perencanaan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan bagi peserta JKN. Ini mencakup upaya penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta penyederhanaan proses administrasi untuk memastikan bahwa kepesertaan yang tinggi sejalan dengan kepuasan dan manfaat yang diterima masyarakat.

Tabel Coverage Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan	% Coverage Kepesertaan Aktif			
			PU	BPU	Jakon	Total
1	Bandar Lampung	3.942	47,81	12.69	94.67	40.25
2	Metro	806	52,07	22.37	24.96	37.54
3	Tanggamus	474	152.62	6.20	56.68	36.38
4	Lampung Tengah	1.692	69.44	8.53	50.54	32.28
5	Lampung Selatan	1.292	80.52	8.60	12.74	31.24
6	Lampung Utara	589	94.87	5.33	35.80	31.17
7	Tulang Bawang	620	54.12	10.10	43.24	30.90
8	Mesuji	244	69.21	9.26	13.70	29.15
9	Tulang Bawang Barat	309	92.10	5.54	25.85	28.55
10	Pringsewu	464	58.37	6.06	24.76	27.40
11	Pesawaran	293	72.71	7.27	17.02	27.19
12	Lampung Barat	281	107.54	8.45	51.14	26.58
13	Way Kanan	536	56.67	6.30	28.06	24.59
14	Lampung Timur	286	64.23	5.45	12.09	22.57

15	Pesisir Barat	116	76.15	3.03	10.14	19.01
	Total	11.944	66.96	7.79	36.37	30.68

Sumber : BPS, data diolah, 2025

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 11.944 perusahaan tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dengan rata-rata tingkat coverage kepesertaan aktif sebesar 30,68%.

Cakupan ini terdiri atas tiga segmen utama, yakni Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi (Jakon). Masing-masing segmen memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam perluasan partisipasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kota Bandar Lampung mencatatkan capaian tertinggi dengan total coverage sebesar 40,25%, didukung oleh jumlah perusahaan yang dominan serta tingginya partisipasi pekerja di sektor jasa konstruksi (94,67%). Meskipun demikian, rendahnya coverage BPU (12,69%) menunjukkan perlunya peningkatan strategi penetrasi terhadap pekerja sektor informal.

Kota Metro menyusul dengan capaian 37,54%, dan dinilai cukup baik dalam menjangkau pekerja informal, ditandai dengan tingkat kepesertaan BPU sebesar 22,37%. Sementara itu, Kabupaten Tanggamus menempati posisi ketiga dengan coverage 36,38%, meskipun terdapat kejanggalan pada data PU yang mencapai 152,62%, yang mengindikasikan perlunya validasi data lebih lanjut.

Beberapa kabupaten masih menunjukkan capaian kepesertaan yang rendah diantaranya, Kabupaten Pesisir Barat dengan coverage hanya 19,01%, dan tingkat kepesertaan BPU serta Jakon yang sangat rendah; Kabupaten Lampung Timur dengan coverage 22,57%, serta angka BPU hanya 5,45%, menunjukkan terbatasnya penetrasi program pada pekerja informal; Kabupaten Way Kanan yang juga mencatat coverage 24,59%, dengan keterbatasan partisipasi di seluruh segmen.

**Tabel Realisasi dan Target Coverage Kepesertaan Jamsostek Tahun
2023-2025 Wilayah Sumatera**

No	Provinsi	Tahun					
		2023		2024		Target 2025	
		(%)	orang	(%)	orang	(%)	orang
1.	Aceh	29,54	460.159	32,44	555.985	43,54	820.761
2.	Sumatera Utara	41,31	1.964.263	46,80	2.447.853	51,08	3.021.682
3.	Sumatera Barat	37,09	643.738	42,16	804.901	48,81	1.024.975
4.	Riau	39,16	874.811	49,16	1.207.961	55	1.486.812
5.	Kepulauan Riau	48,87	407.698	79,47	729.265	80,63	813.890
6.	Jambi	26,83	515.172	53,06	661.112	55,36	857.224
7.	Sumatera Selatan	32,34	877.330	37,58	616.065	49,46	1.623.316
8.	Kep. Bangka Belitung	40,43	207.557	50,83	272.797	55,17	344.868
9.	Lampung	26,83	732.922	32,62	930.059	38,39	1.149.447
10.	Bengkulu	34,80	220.750	39,71	302.843	48,24	395.194

Sumber : Hasil pembahasan dalam Rakortekbang Tahun 2024, Bappeda Provinsi Lampung

Kondisi Lampung dalam pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan yang stabil. Meskipun kenaikan targetnya tidak setinggi provinsi lain di Sumatera, Lampung tetap memiliki kesempatan besar untuk memperluas cakupan program ini, terutama dengan fokus pada sektor informal dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial.

Realisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 Provinsi Lampung sebesar 26,83 persen dengan jumlah 732.922 orang. Di tahun 2024 Target kepesertaan meningkat menjadi 32,62 persen (930.059 orang), yang menunjukkan kenaikan sekitar 5,79 persen dalam jumlah orang yang terdaftar. Kemudian di tahun 2025 ditargetkan sebesar **38,39%** (1.149.447 orang) dengan peningkatan sebesar 5,77 persen.

2.1.4.7 Tenaga Kerja

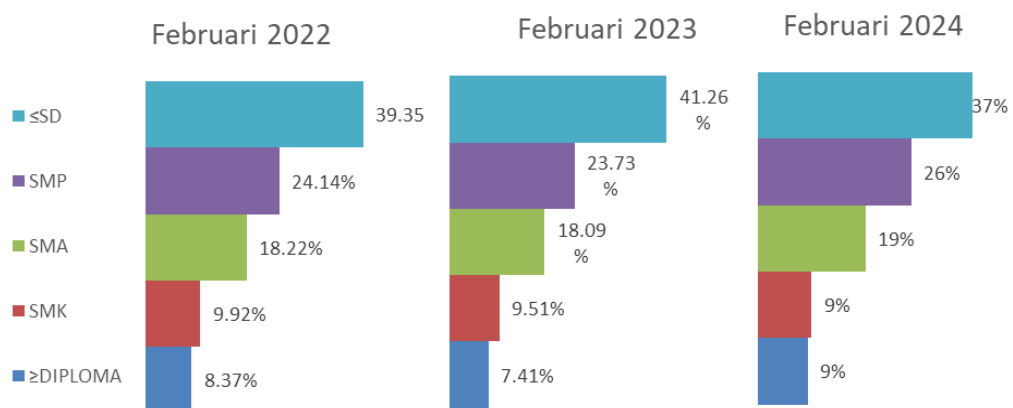
Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal.

Persentase tenaga kerja yang tidak pernah sekolah / tidak tamat sekolah di Provinsi Lampung, baik tenaga kerja perempuan maupun laki laki di perkotaan maupun pedesaan, pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019. Sedangkan persentase tenaga kerja yang lulus sekolah dasar, SMP, SMA dan sekolah tinggi di Provinsi Lampung Tahun 2020 mengalami peningkatan dari Tahun 2019.

Tingkat Pendidikan tenaga kerja.

Berdasarkan data Sakernas Februari 2024, Tingkat pendidikan tenaga kerja di Provinsi Lampung masih didominasi penduduk yang tamat SD dan SMP, yaitu mencapai 63,41 persen. Sekitar 8,67 persen pekerja yang pernah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Grafik 2. 89 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Lampung, Februari 2022-Februari 2024

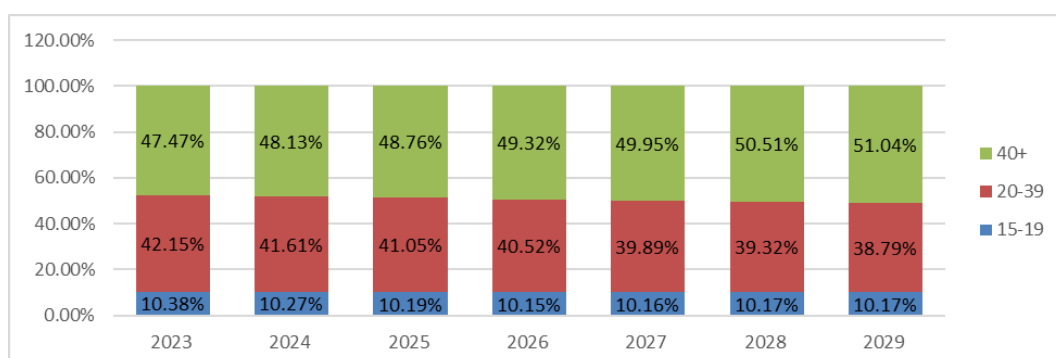


Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung, 2025

Setelah melalui masa bonus demografi, suatu negara akan memasuki era *aging population*, dimana terjadi peningkatan proporsi penduduk usia tua dari total penduduk suatu negara. Di Indonesia era bonus demografi diperkirakan hanya mencapai tahun 2035, hanya kurang dari 15 tahun lagi. Dimulainya penuaan populasi tercermin dari meningkatnya proporsi

angkatan kerja dengan usia diatas 40 tahun. Data tahun 2023-2025 menunjukkan bahwa penduduk Lampung sudah mulai memasuki *aging population*. Proporsi angkatan kerja usia 40 tahun keatas di Provinsi Lampung terjadi peningkatan selama kurun waktu 2020-2023 Pada tahun 2023, proporsi angkatan kerja usia 40 tahun keatas mencapai 47.47 persen. Setelah 2 (Dua) tahun berjalan, proporsi angkatan kerja tersebut meningkat menjadi 42.15 persen. Sedangkan proporsi angkatan kerja usia 20-39 tahun terjadi penurunan dari persen menjadi 41.05persen.

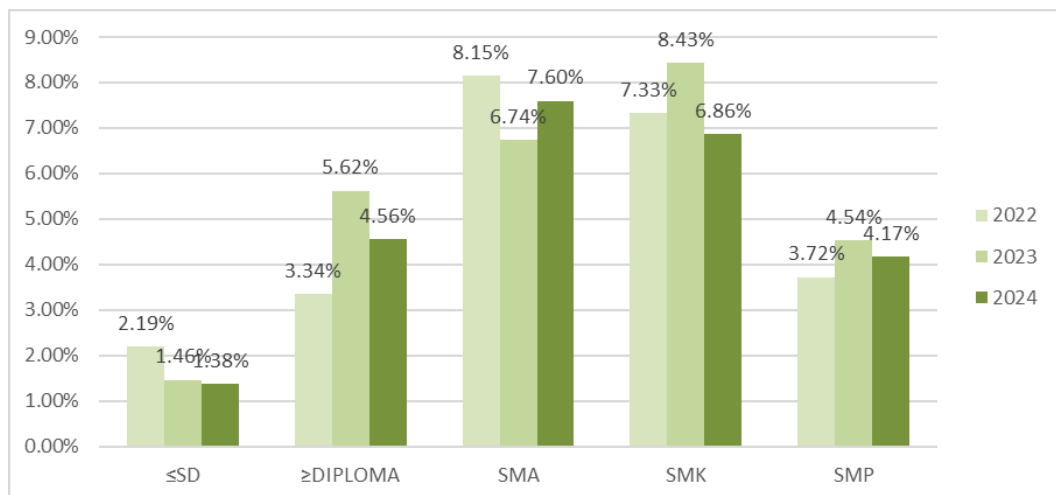
Grafik 2. 90 Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur 2023-2029



Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2035

Tingkat Pengangguran berdasarkan tingkat Pendidikan. Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi menganggur akibat tidak kompeten dalam dunia kerja yang di bidangnya. Tidak hanya teori yang dibutuhkan dalam dunia kerja, akan tetapi skill dan kemampuan teknologi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan karir. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020, tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Lampung menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan terdapat pada jenjang pendidikan SMK, yaitu mencapai 9,21 persen. Diikuti lulusan SMA dengan TPT sebesar 6,97 persen. Pengangguran yang cukup tinggi juga dialami oleh lulusan diploma dan perguruan tinggi, yaitu berkisar 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin besar persaingan dalam dunia kerja.

Grafik 2. 91 TPT Provinsi Lampung menurut Tingkat Pendidikan, 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung, 2024

Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Tingkat setengah penganggur di Provinsi Lampung berdasarkan Sakernas Agustus 2024, mencapai 9.63 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar sembilan orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2023, tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1,12 persen poin.

Jika dilihat menurut klasifikasi daerah tempat tinggal, pada Agustus 2024, jumlah setengah penganggur di perkotaan mencapai 5.33 persen, sementara di perdesaan sebanyak 3.54 persen. Pada periode Agustus 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah setengah penganggur, pada laki-laki yaitu sebanyak 0,28 persen, dan perempuan mengalami penurunan sebesar -0.66. Jumlah setengah penganggur di perkotaan mengalami penurunan sebesar -0,38 persen dan di perdesaan mengalami peningkatan yaitu 0,09 persen.

Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota

Setiap perusahaan dalam menetapkan perhitungan gaji karyawannya, harus berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan satu kali dalam setahun oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, dan sedangkan Pemerintah Provinsi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP Provinsi Lampung dan UMK di 15

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selalu meningkat tiap tahunnya. UMK tertinggi pada Tahun 2020 berada di Kota Bandar Lampung yaitu Rp. 2.653.222,-, sedangkan UMP Provinsi Lampung pada Tahun 2020 yaitu Rp. 2.432.001,- yang jumlahnya sama dengan UMK terendah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi

Penduduk yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Februari 2024 masih di dominasi oleh pekerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama sebesar 1.276.043 orang, disusul oleh kategori pekerja dengan Pendidikan terakhir Sekolah Dasar sebesar 1.233.377 orang. Pekerja dengan Pendidikan terakhir yang ditamatkan dari Universitas masih berkisar di angka 6,9 persen dari total jumlah pekerja di tahun 2024. Angka ini masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk bekerja yang sebesar 4,8 juta orang.

Tabel 2. 55 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Februari 2024)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	4.676
2	Tidak/Belum Tamat SD	552.681
3	Sekolah Dasar (SD)	1.233.377
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.276.043
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	901.327
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	448.957
7	Diploma (I/II/III)	85.043
8	Universitas	334.230
Jumlah		4.836.334

Sumber : BPS Indonesia, 2024

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, Sebagian besar penduduk bekerja adalah pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 46,19 persen dari jumlah keseluruhan penduduk yang bekerja, diikuti dengan jumlah penduduk yang bekerja pada perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 17,92 persen.

Tabel 2. 56 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Februari 2024)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah
A	Pertanian, kehutanan, perikanan	2.233.849
B	Pertambangan dan penggalian	15.572
C	Industri pengolahan	421.695
D	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara, steam dan air	2.703
E	Treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi	11.753
F	Konstruksi	228.518
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	866.799
H	Pengangkutan dan pergudangan	171.023
I	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	213.947
J	Informasi dan komunikasi	66.430
K	Aktivitas keuangan dan asuransi	22.511
L	Real estate	3.560
M,N	Aktivitas professional dan perusahaan	40.156
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	144.644
P	Pendidikan	230.507
Q	Aktivitas Kesehatan dan kegiatan sosial	51.651
R,S,T,U	Aktivitas jasa lainnya	111.016
Jumlah		4.836.334

Sumber : BPS Indonesia, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, jumlah penduduk umur 15 tahun yang termasuk angkatan kerja mencapai 4.904,90 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 543,05 ribu orang selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel 2. 57 Status Ketenagakerjaan

Status Ketenagakerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	4.489,68	4.494,95	4.595,93	4.904,90	4.996,75
TPAK	70,16	69,35	70,06	70,04	70,41
- TPAK Perempuan	54,13	52,36	53,54	52,01	54,58
- TPAK Laki-Laki	85,41	85,55	85,84	87,30	85,61

Sumber : BPS, 2024

Sementara itu, TPAK selama periode Agustus 2020 sampai Agustus 2024 mengalami penurunan dari 70.16 di Agustus 2020 menjadi 70,41 di Agustus 2024, penurunan tertinggi terdapat di tahun 2021 pada angka 69,35. Hal yang sebaliknya terjadi, jumlah penduduk usia kerja selama periode 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) jika dilihat menurut jenis kelamin, menunjukkan TPAK Laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK Perempuan. Di Agustus 2023 TPAK Laki-Laki mencapai 85.61 sementara TPAK perempuan hanya sebesar 54.58. Dalam periode Agustus 2020 sampai Agustus 2024, TPAK Perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen poin. Sedangkan TPAK Laki-laki mengalami peningkatan sedikit lebih tinggi yaitu 0.2 persen poin. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa pada Agustus 2024 untuk TPAK perempuan dari 100 penduduk usia kerja perempuan terdapat sekitar 54 orang yang termasuk angkatan kerja.

Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 penyandang disabilitas fisik dan mental adalah seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus, atau cacat ganda, seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran atau kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental dan tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara layak dan wajar.

Tabel 2. 58 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Ragam Disabilitas	Jumlah
Disabilitas Fisik	497
Disabilitas Ganda	8
Disabilitas Mental	13
Disabilitas Sensorik	418
Disabilitas Intelektual	8
Total	944

Sumber : Satu Data Kemnaker, 2025

Secara Nasional, Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa untuk penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, penempatan tertinggi

adalah pada disabilitas fisik tangan total 497 orang. Diikuti oleh tenaga kerja disabilitas sensorik dengan total 418 orang. Di tahun 2024 telah ditempatkan sebanyak 44 tenaga kerja penyandang disabilitas diantaranya 33 orang laki-laki dan 11 orang Perempuan.

Tabel 2. 59 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja Disabilitas		Total Tenaga Kerja Disabilitas
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Bandar Lampung	9.004	15	15	30
2	Lampung Selatan	2.940	-	-	-
3	Tanggamus	1.056	1	-	1
4	Metro	1.598	4	2	6
5	Lampung Tengah	2.865	4	1	5
6	Lampung Timur	2.558	-	-	-
7	Lampung Utara	1.550	17	5	22
8	Lampung Barat	635	-	-	-
9	Tulang Bawang	1.178	11	14	25
10	Way Kanan	1.163	-	-	-
11	Pesawaran	905	4	1	5
12	Tulang Bawang Barat	477	-	-	-
13	Mesuji	737	6	-	6
14	Pringsewu	1.562	-	-	-
15	Pesisir Barat	336	-	-	-
	Jumlah	28.564	62	38	100

Sumber : Disnaker Provinsi Lampung, 2023

Jumlah tenaga kerja disabilitas di tahun 2023 sebesar 100 orang yang tersebar di sejumlah perusahaan di Provinsi Lampung, dengan jumlah terbesar terdapat di kota Bandar Lampung. Tenaga kerja disabilitas yang telah tersebar di seluruh perusahaan di Provinsi Lampung sebagian besar tenaga kerja disabilitas laki-laki dengan jumlah sebesar 62 orang dan tenaga kerja disabilitas perempuan sebesar 38 orang.

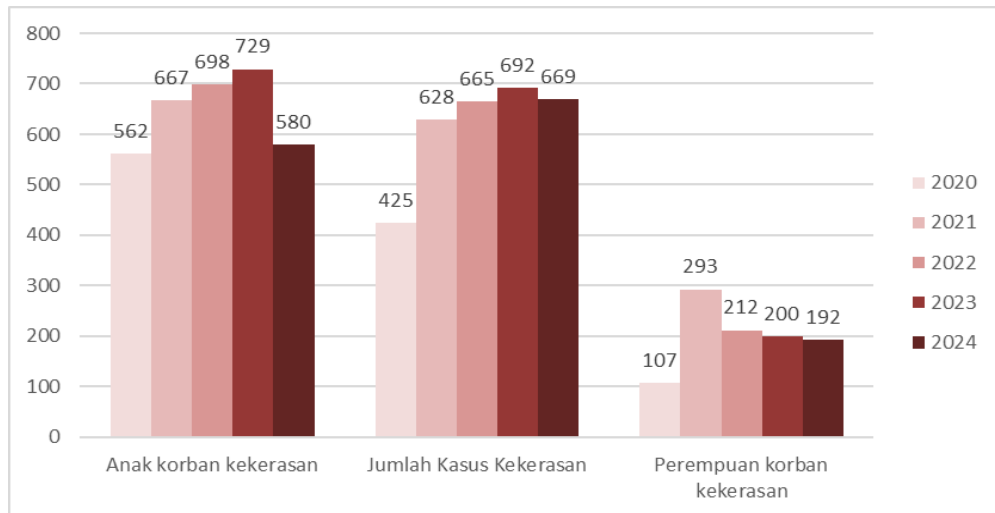
2.1.4.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dilakukan dengan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Berdasarkan data kekerasan yang ditangani pada UPTD PPA, maka jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan, dari tahun 2020 sebanyak 146 kasus dengan jumlah korban anak sebanyak 118 korban dan jumlah korban perempuan dewasa sebanyak 28

orang meningkat menjadi 171 kasus dengan jumlah korban anak sebanyak 127 korban dan jumlah korban perempuan dewasa sebanyak 44 kasus.

Grafik 2. 94 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

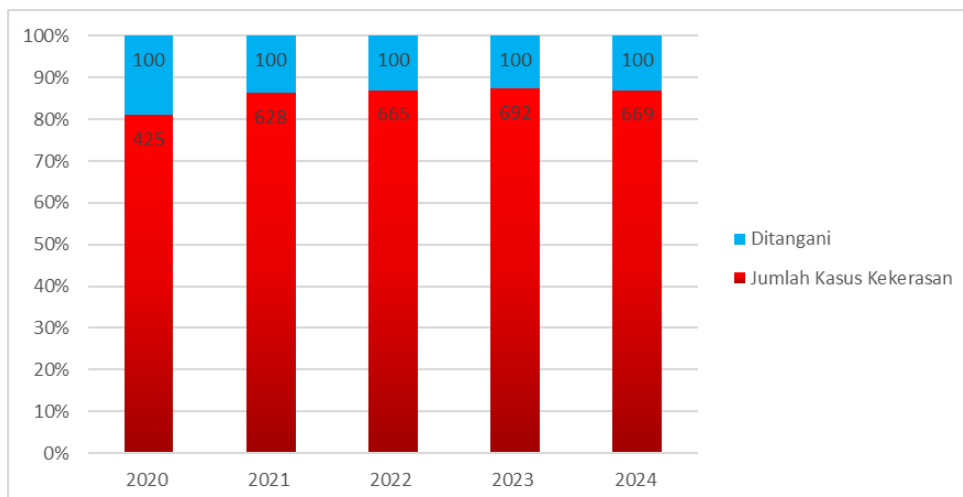


Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)

Dari data terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan pada perempuan dewasa pada tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami penurunan dan jumlah kasus kekerasan pada anak lebih banyak dari kasus kekerasan pada perempuan serta mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena posisi anak yang lemah sehingga mudah sekali menjadi korban kekerasan baik oleh pihak luar maupun oleh pihak keluarga terdekat.

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan target seluruh kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung tertangani (100 persen).

Grafik 2. 95 Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), 2025

2.1.4.9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar memiliki peran penting dalam pembangunan dengan cakupan aspek penduduk beserta dinamikanya. Situasi kependudukan yang terdiri dari kondisi jumlah penduduk, struktur, persebaran dan pertumbuhan penduduk sangat berdampak terhadap aspek pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik, keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya.

Gambaran perkembangan penduduk dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu: kuantitas, kualitas maupun mobilitas atau pertumbuhan yang terdiri dari kelahiran, kematian dan migrasi. Pada komposit kuantitas penduduk dapat dilihat komposisi penduduk berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk serta penduduk berdasarkan karakteristik demografi.

Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 9.176.546 jiwa (2022) menjadi 9.419.58 ribu jiwa. Adapun distribusi penduduk per kabupaten/kota terbanyak di tahun 2024 terdapat di Lampung Tengah (1.525.09 ribu jiwa), Bandar Lampung (1.214.33 ribu jiwa), Lampung Timur (1.153.77 ribu jiwa) dan Lampung Selatan (1.119.31 ribu jiwa), artinya 53 persen dari jumlah penduduk Provinsi Lampung bertempat di 4 (empat) wilayah tersebut.

Tabel 2.60 Data Kependudukan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Penduduk (persen)	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2)	Rasio Jenis Kelamin
Pesisir Barat	172.32	1.45	1.83	57.56	107.53
Metro	175.71	1.03	1.87	2400.08	100.83
Mesuji	241.6	1.51	2.56	109.79	105.62
Tulang Bawang Barat	298.7	1.08	3.17	233.1	103.69
Lampung Barat	315.92	1.12	3.35	149.3	106.94
Pringsewu	424.68	1.16	4.51	690.57	105.01
Tulang Bawang	450.34	1.16	4.78	144.92	106.13
Way Kanan	497.26	1.23	5.28	140.82	104.43
Pesawaran	500.3	1.17	5.31	390.98	105.43
Lampung Utara	659.89	1.04	7.01	248.42	103.24
Tanggamus	670.37	1.15	7.12	231	106.63
Lampung Selatan	1119.31	1.27	11.88	504.46	104.07
Lampung Timur	1153.77	0.96	12.25	298.33	103.04
Bandar Lampung	1214.33	1.02	12.89	6609.68	103.53
Lampung Tengah	1525.09	1.10	16.19	335.26	103.93
Provinsi Lampung	9419.58	1.12	100	280.55	104.33

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

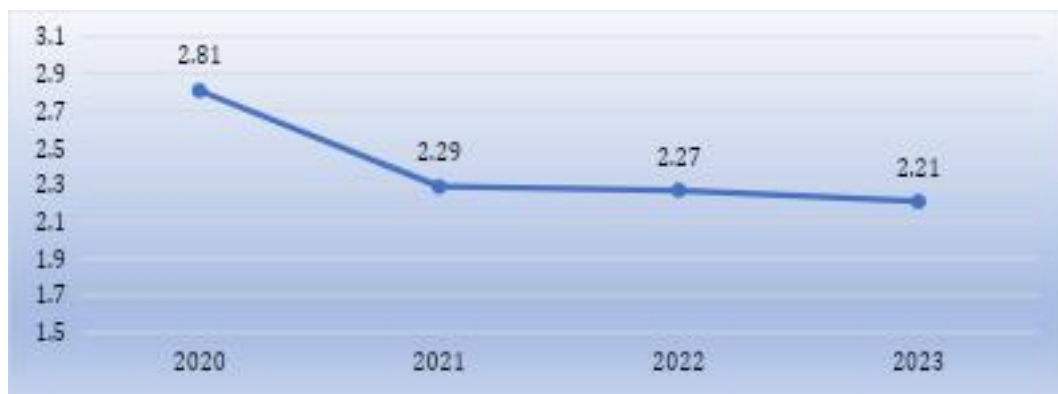
Laju pertumbuhan penduduk sebagai indikator utama dalam pengendalian penduduk, pada periode 2020-2024 sebesar 1,12 persen, dengan penduduk Lampung sebanyak 9,419.58 juta jiwa menunjukkan bahwa jumlah penduduk Lampung bertambah 105,59 ribu jiwa selama setahun terakhir. Melambatnya laju pertumbuhan penduduk ini karena saat ini Lampung memasuki struktur penduduk usia tua (Ageing Population).

Jumlah penduduk yang sangat besar juga perlu diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, hal ini akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya dengan kualitas penduduk yang rendah dapat menjadi beban dalam pembangunan. Komponen kualitas penduduk ini dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, SDA. Pelaksanaan pengendalian

kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui program keluarga berencana.

Kelahiran penduduk (Total Fertility Rate/angka kelahiran total) sebagai ringkasan ukuran dari tingkat fertilitas, menjadi salah satu faktor bertambahnya jumlah penduduk. Penghitungan TFR ini diukur berdasarkan jumlah kelahiran hidup bayi berbanding tiap 1.000 penduduk. Berdasarkan data hasil pemutakhiran pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN, bahwa pada kurun waktu 2020-2023 angka TFR terus menurun dari 2,81 (2020) menjadi 2,21 (2023), namun capaian 2023 ini masih di atas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,14. Dari Tabel berikut dapat dilihat bahwa rata-rata anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya masih sebanyak 2 anak.

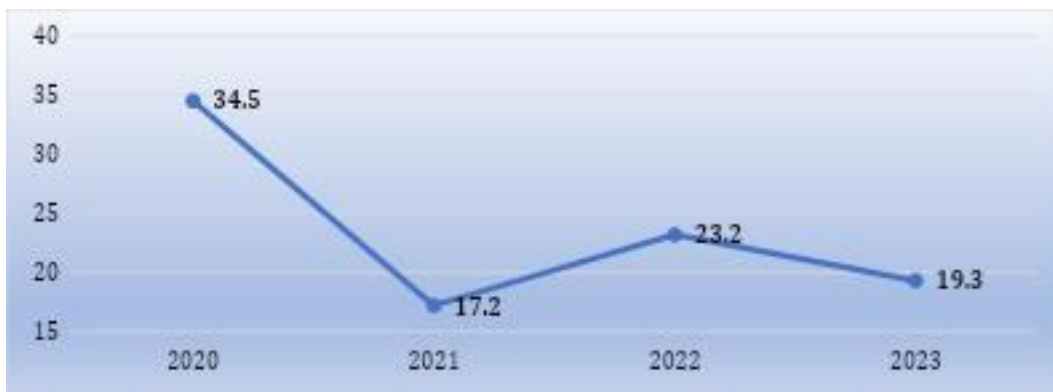
Grafik 2. 96 Perkembangan TFR Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber: BKKBN Provinsi Lampung, 2024

Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu (Age Specific Fertility Rate atau ASFR) menunjukkan banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur tertentu per 1000 perempuan. Tren angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 tahun (menikah di bawah umur) pada tahun 2019-2023 di Provinsi Lampung masih berfluktuasi, pada tahun 2023 sebesar 19,3 persen, menurun sebesar 3,9 persen dari tahun 2022.

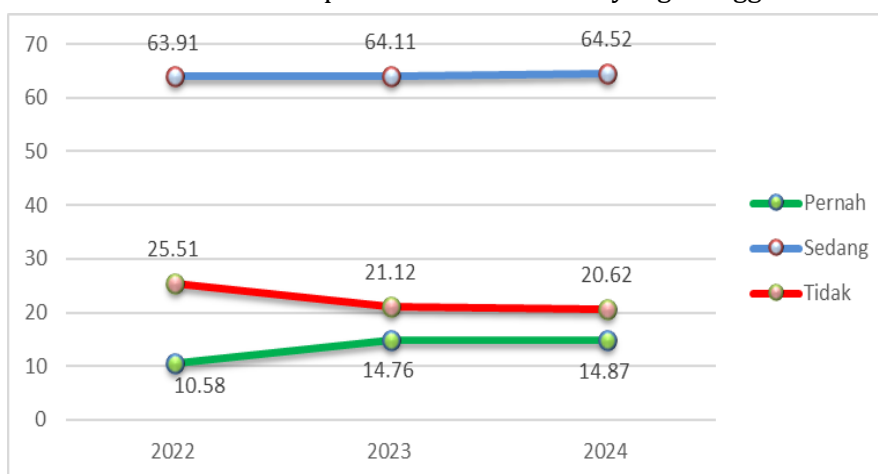
Grafik 2. 97 Jumlah Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Upaya pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana telah meningkatkan sebesar 0,2 persen. Persentase pengguna alat kontrasepsi dalam ber KB tahun 2023 sebesar 64,11 persen, dengan pemakaian kontrasepsi terbanyak adalah jenis suntik.

Grafik 2. 98 Persentase Perempuan usia 15-49 tahun yang Menggunakan Alat KB



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Unmet Need sebagai kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Dengan rendahnya angka unmet need maka capaiannya semakin bagus. Tahun 2023 capaian unmet need Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 9,64 lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 20,69, dan capaian ini telah memenuhi target sebesar 12,68.

2.1.4.10 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda Wirausaha Kerah Putih

Untuk menciptakan kewirausahaan inklusif untuk pemuda maka adanya gagasan pemuda wirausaha kerah putih yaitu pemuda bekerja dengan status berusaha sendiri yang dibantu buruh tidak tetap dan buruh tetap. Berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda di Provinsi Lampung mencapai 11,10 persen, artinya terdapat 11 orang pemuda dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja. Berdasarkan data IPP Indonesia, presentase pemuda wirausaha kerah putih di Provinsi Lampung tahun 2022 hanya sebesar 0,57 persen, meningkat hanya 0,43 persen dari 2021, sedangkan angka ideal pemuda wirausaha kerah putih sebesar 2 persen.

Grafik 2. 99 Trend capaian Pemuda Wirausaha Kerah Putih dan Tingkat Pengangguran Pemuda Provinsi Lampung Tahun 2019-2022



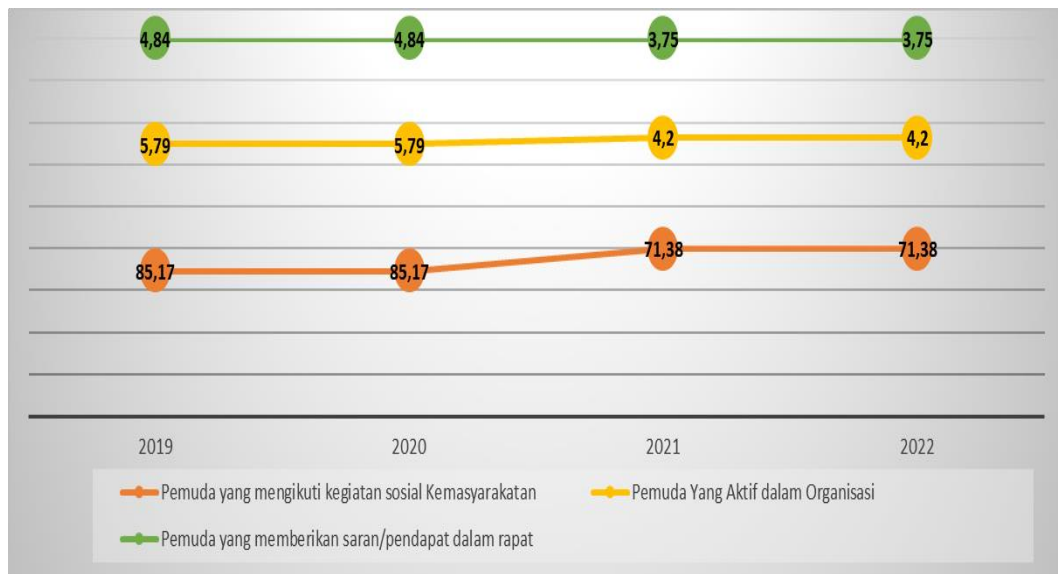
Sumber: Badan Pusat Statistik dan IPP Nasional, 2023

Pemuda aktif dalam organisasi dan Kemasyarakatan

Capaian pemuda Provinsi Lampung yang memberikan saran/pendapat mengalami penurunan, dimana tahun 2019 sebesar 4,84 persen menjadi 3,75 persen ditahun 2022. Rendahnya pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat/kegiatan dikarenakan pemuda belum dianggap sebagai sumber daya manusia yang potensial, akses dan mekanisme partisipasi yang belum memadai serta kurangnya kepedulian pemuda terhadap pembangunan. Pemuda yang aktif dalam organisasi di Provinsi Lampung masih sangat

kurang, pada tahun 2022 sebesar 4,2 persen, angka ini menurun dari capaian tahun 2019 sebesar 5,79. Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 85,17 persen menjadi 71,38 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 100 Trend Peran Aktif pemuda dalam organisasi dan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022

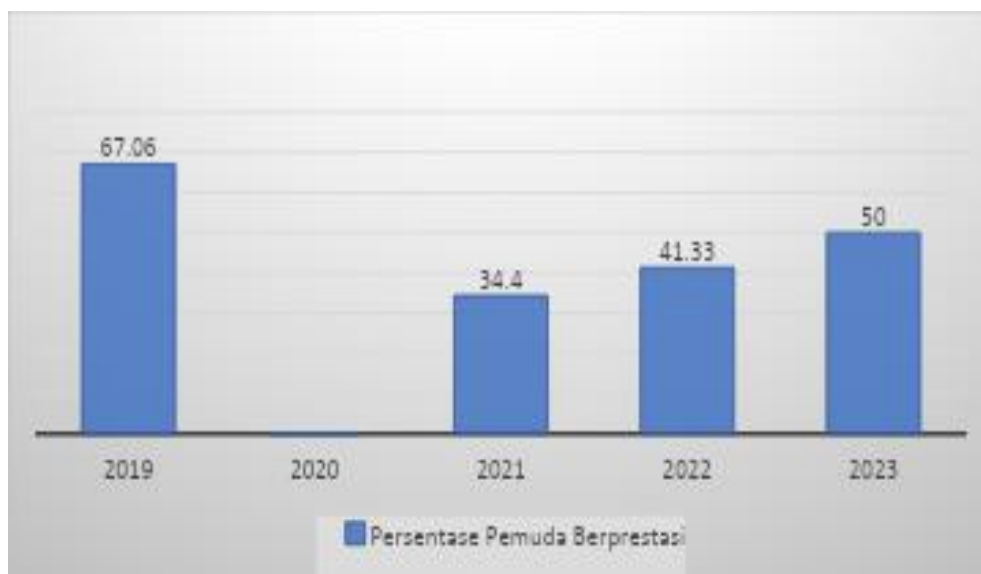


Sumber : IPP Indonesia, 2023

Pemuda Berprestasi

Pemuda berprestasi adalah pemuda yang berhasil mencapai suatu prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang ditekuni sehingga patut dibanggakan. Pemuda berprestasi di Provinsi Lampung dari tahun 2019 -2023 mengalami penurunan, dimana tahun 2019 sebesar 67,06 persen menurun sebesar 17,06 persen ditahun 2023. Penurunan prestasi tersebut dikarenakan penyesuaian dari pasca pandemi covid.

Grafik 2. 101 Trend Capaian Pemuda Berprestasi di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



Sumber: Laporan Dispora Provinsi Lampung, 2023

Atlet Pelajar yang berprestasi ajang Nasional

Pembibitan dan pembinaan olahraga pelajar yang harus dilaksanakan dengan konsisten. Melalui kegiatan pertandingan tingkat daerah diharapkan akan terjaring bibit-bibit potensial atlet pelajar berbakat yang akan dibina lebih lanjut, agar dapat berprestasi diajang nasional. Prestasi pelajar tingkat nasional Provinsi Lampung terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sebesar 42 persen, meningkat menjadi 55,87 persen ditahun 2023, namun ditahun 2020 tidak mengirimkan atlet pelajar dikarenakan pandemic covid.

Grafik 2. 102 Trend Atlet Pelajar Berprestasi tingkat Nasional di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

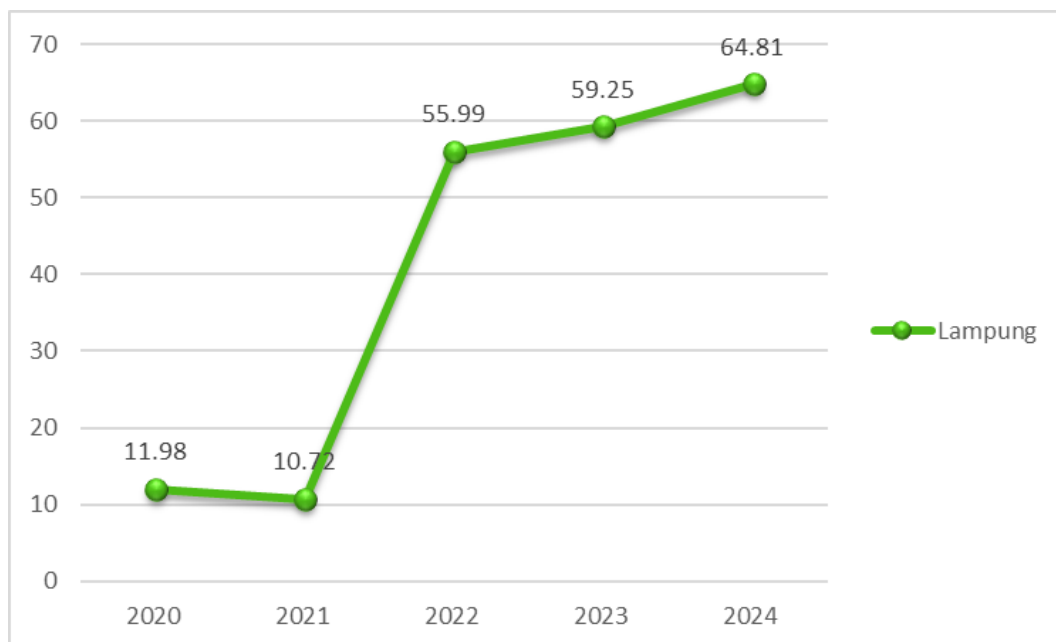


Sumber : Laporan Dispora, 2023

2.1.4.11 Perpustakaan

Dalam pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat digunakan indikator indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Lampung selama empat tahun terakhir sangat berfluktuatif, dengan capaian di tahun 2023 sebesar 55,35 persen dengan katagori sedang dan angka ini menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 55,99 persen. Indikator-indikator penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencakup pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kualitas sumber daya tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat, dan keterlibatan serta jumlah anggota perpustakaan. Perpustakaan berbasis SNP juga menjadi salah satu indikator yang dinilai dan belum banyak OPD yang punya perpustakaan, beberapa sekolah juga belum punya, termasuk perpustakaan di tingkat desa (belum seluruhnya memiliki).

Grafik 2. 103 Trend Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



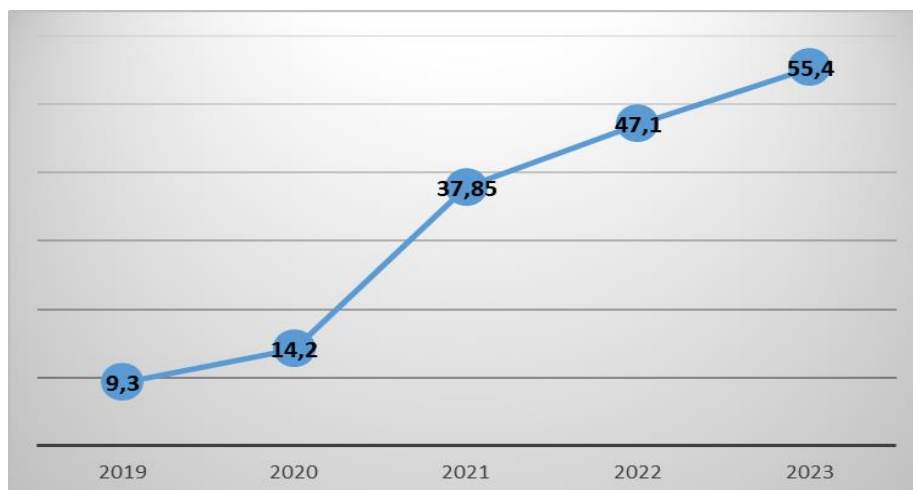
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, 2025

Provinsi Lampung terus mengupayakan strategi peningkatan literasi dilaksanakan melalui pembudayaan literasi keluarga, satuan pendidikan, dan pembudayaan literasi masyarakat. Sinergi lintas pemangku kepentingan

sangat diperlukan dalam peningkatan budaya literasi. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang daerah dengan melaksanakan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif.

Salah satu upaya meningkatkan literasi masyarakat adalah meningkatkan pengunjung perpustakaan yang telah mendaftar jadi anggota perpustakaan baik secara online maupun offline yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota perpustakaan. Capaian pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2019 sebesar 9,3 persen meningkat menjadi 77,4 persen dengan rata-rata peningkatan sebesar 11 persen setiap tahunnya,

Grafik 2. 104 Persentase Pengunjung Perpustakaan yang menjadi Anggota Perpustakaan Tahun 2019 - 2023



Sumber : Laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Lampung

2.1.4.12 Transmigrasi

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah telah menetapkan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang tersebar seluruh Indonesia (kecuali provinsi yang berada di wilayah Pulau Jawa). Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan program transmigrasi yang ditujukan ke daerah/lokasi sebagaimana telah ditetapkan pemerintah pusat dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. 61 Jumlah Transmigran yang Dikirim Ke Luar Provinsi Lampung
Tahun 2022-2023

DAERAH YANG DITUJU	JUMLAH	TAHUN
Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe)	5 KK (22 jiwa)	2022
Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamasa)	9 KK (33 jiwa)	2022
Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju Tengah)	9 KK (30 jiwa)	2022
Provinsi Sulawesi Selatan (Desa Mahalona, Kabupaten Luwu Timur)	14 KK (37 jiwa)	2022 dan 2023

Sumber: Dinas PMDT, 2023

Kebijakan transmigrasi sempat tersendat pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan dibatasinya mobilisasi penduduk sehingga pelaksanaan transmigrasi baru kembali terlaksana di tahun 2022 dan 2023. Adanya kebijakan transmigrasi ini diharapkan akan mendukung percepatan pertumbuhan multidimensi pada seluruh aspek pembangunan meliputi sosial, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan transmigrasi di Provinsi Lampung mengalami perkembangan yang baik, hal ini terlihat dari pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kabupaten Mesuji dan hasilnya akan dapat berdampak terhadap peningkatan indikator kesejahteraan desa pada jenjang Mandiri yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah sekitarnya.

2.1.5 Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan

2.1.5.1 Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya Dukung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat

dimodelkan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dan jasa ekosistem penyediaan air bersih.

Daya Dukung Air

Dilihat dari jumlah kebutuhan total air sebesar 19.017.149.319,12 m³/tahun, sedangkan jumlah ketersediaan sumber daya air sebesar 32.633.644.484,59 m³/tahun, dengan selisih 13.616.495.165,47 m³/tahun. Yang artinya kondisi DDDTLH air di Provinsi Lampung Belum Terlampaui dimana ketersediaan sumber daya air lebih besar dibandingkan kebutuhan.

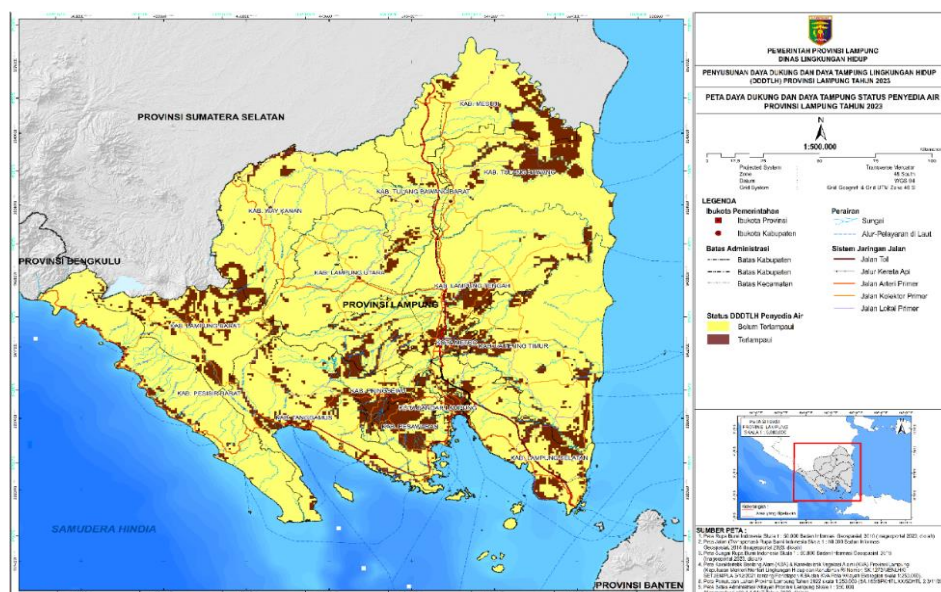
Tabel 2. 62 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Provinsi Lampung

Kabupaten / Kota	Ketersediaan	Kebutuhan Air Penggunaan Lahan	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Total	Selisih	Ambang Batas Populasi	Status DDDTLH (ha)		Jumlah (ha)
							m ³ /tahun		
Kota Bandar Lampung	102.803.980,7	45.918.784,4	100.750.608,0	146.669.392,4	43.865.411,7	102.803.980,7	1.945,7	16.418,4	18.364,1
Kota Metro	86.502.933,8	71.638.715,1	14.573.520,0	86.212.235,1	290.698,7	108.128,7	3.831,7	3.405,9	7.237,6
Lampung Barat	1.804.273.400,8	1.101.907.937,7	26.139.024,0	1.128.046.961,7	676.226.439,2	2.255.341,8	196.370,9	15.581,8	211.952,7
Lampung Selatan	1.657.747.426,6	1.398.648.426,2	91.934.438,4	1.490.582.864,6	167.164.562,0	2.072.184,3	136.476,2	85.761,1	222.237,3
Lampung Tengah	5.240.695.972,0	2.770.025.963,7	126.179.510,4	2.896.205.474,1	2.344.490.497,9	6.550.870,0	406.915,6	47.863,0	454.778,6
Lampung Timur	4.049.215.216,2	1.739.864.240,3	95.970.182,4	1.835.834.422,7	2.213.380.793,5	5.061.519,0	318.012,1	68.776,0	386.788,1
Lampung Utara	2.609.602.388,7	1.375.055.679,1	54.751.420,8	1.429.807.099,9	1.179.795.288,8	3.262.003,0	258.374,6	7.156,0	265.530,6
Mesuji	1.657.079.110,7	1.593.104.004,0	19.651.852,8	1.612.755.856,8	44.323.253,9	2.071.348,9	110.769,8	108.555,8	219.325,6
Pesawaran	960.279.706,4	776.473.942,9	41.247.360,0	817.721.302,9	142.558.403,5	1.200.349,6	82.870,3	45.141,4	128.011,7
Pesisir Barat	2.760.643.022,1	785.947.396,4	14.058.403,2	800.005.799,6	1.960.637.222,5	3.450.803,8	285.721,7	13.480,9	299.202,6
Pringsewu	484.604.943,1	515.392.401,2	35.035.027,2	550.427.428,4	65.822.485,2	605.756,2	32.177,6	29.363,4	61.541,0
Tanggamus	2.155.321.986,6	1.543.916.472,8	55.387.238,4	1.599.303.711,2	556.018.275,4	2.694.152,5	214.294,2	75.899,2	290.193,4
Tulang Bawang	3.355.710.830,7	2.196.144.327,0	37.168.156,8	2.233.312.483,8	1.122.398.346,9	4.194.638,5	251.420,7	58.699,1	310.119,8
Tulang Bawang Barat	1.322.846.444,4	733.352.930,7	24.731.481,6	758.084.412,3	564.762.032,0	1.653.558,1	118.641,8	9.545,6	128.187,4
Way Kanan	3.587.724.818,9	2.051.735.684,7	40.962.067,2	2.092.697.751,9	1.495.027.067,0	4.484.656,0	344.444,4	7.934,0	352.378,4

Kabupaten / Kota	Ketersediaan	Kebutuhan Air Penggunaan Lahan	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Total	Selisih	Ambang Batas Populasi	Status DDDTLH (ha)		Jumlah (ha)
	m ³ /tahun						Belum Terlampaui	Terlampaui	
Jumlah	31.835.052,18 2,0	18.699,1 26.906,3	778.540. 291,2	19.477.667 .197,5	12.357.384,9 84,4	39.793.815,2	2.762.267,3	593.581,6	3.355.848,9

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Gambar 2. 105 Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Daya Dukung Pangan

Daya Dukung Pangan di Provinsi Lampung berada pada status Belum terlampaui. Ambang batas penduduk untuk pangan yang tersedia dapat memenuhi 25.728.639 jiwa sementara itu jumlah penduduk tahun 2022 berjumlah 9.176.546 jiwa. Sehingga ketersediaan pangan di Provinsi Lampung sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan.

Tabel 2. 63 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung

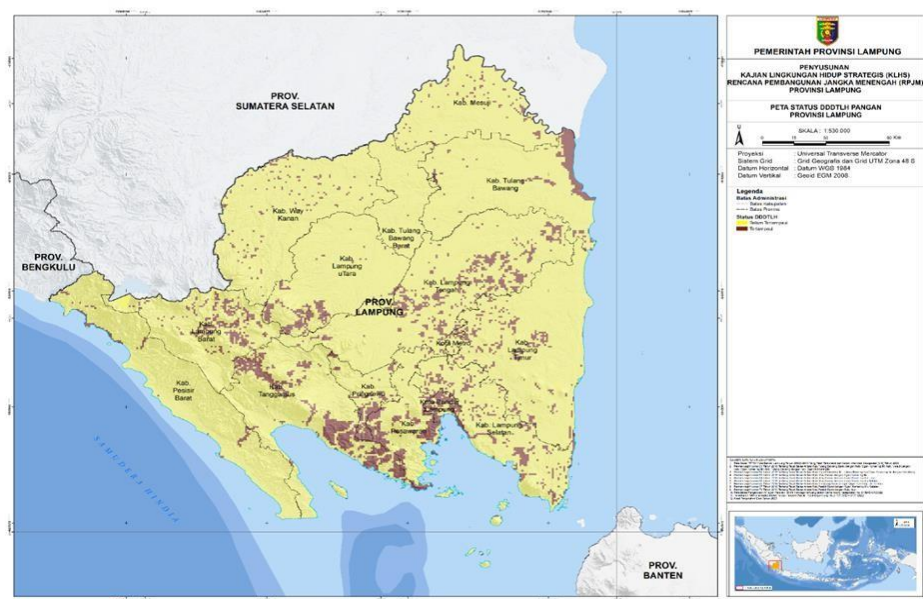
Kabupaten / Kota	kkal/tahun		Ambang Batas (jiwa)	Seslsih (kkal/tahun)	Status (ha)		Jumlah (ha)
	Ketersediaan	Kebutuhan			Belum Terlam paui	Terlam paui	
Lampung Barat	592.073.081,9 43,3	238.090.795. 750,0	754.473, 5	353.982.286,1 93,0	190.077, 5	26.527,4	216,60 5,0
Lampung Selatan	1.505.806.707. 045,9	848.404.996. 249,6	1.918,83 6,2	657.401.710,7 97,5	197.702, 2	33.389,9	231,09 2,1

Kabupaten /Kota	kkal/tahun		Ambang Batas (jiwa)	Seslsh (kkal/tahun)	Status (ha)		Jumlah (ha)
	Ketersediaan	Kebutuhan			Belum Terlam paui	Terlam paui	
Lampung Tengah	3.440.883.774.482,0	1.177.142.264.500,9	4.384.687,8	2.263.741.509.979,6	390.339,0	53.298,0	443.637,0
Lampung Timur	3.213.863.366.975,1	885.155.623.500,1	4.095.397,7	2.328.707.743.474,8	358.258,0	26.131,4	384.389,4
Lampung Utara	1.923.146.483.087,5	498.417.482.750,1	2.450.648,6	1.424.729.000.338,7	258.957,0	20.898,0	279.855,0
Mesuji	1.258.417.564.830,5	182.599.553.750,2	1.603.590,4	1.075.818.011.080,8	204.319,8	9.621,9	213.941,7
Pesawaran	500.481.992.055,3	382.293.316.750,1	637.759,8	118.188.675.305,4	95.834,6	29.601,1	125.435,6
Pesisir Barat	776.839.545.016,5	129.339.356.000,0	989.919,8	647.500.189.016,8	275.340,4	7.302,5	282.642,9
Pringsewu	379.361.990.517,3	320.503.671.250,2	483.417,6	58.858.319.267,0	53.622,0	18.387,0	72.009,0
Tanggamus	689.418.949.173,5	512.361.705.501,3	878.520,5	177.057.243.672,4	240.531,5	58.746,2	299.277,7
Tulang Bawang	2.181.527.280.857,4	338.390.477.999,5	2.779.901,0	1.843.136.802.856,7	278.399,3	23.891,2	302.290,5
Tulang Bawang Barat	996.035.860.764,9	227.279.295.000,1	1.269.239,7	768.756.565.764,6	122.448,3	2.364,2	124.812,5
Way Kanan	2.533.321.000.172,5	377.493.001.000,2	3.228.188,6	2.155.827.999.171,8	336.324,1	12.186,5	348.510,6
Kota Bandar Lampung	113.138.242.079,8	949.498.060.750,8	144.171,1	- 836.359.818.671,1	6.406,2	15.785,4	22.191,7
Kota Metro	86.233.280.997,6	134.324.872.749,9	109.886,3	- 48.091.591.752,2	8.181,0	2.592,0	10.773,0
Jumlah	20.190.549.119.999,0	7.201.294.473.502,9	25.728.638,6	12.989.254.646.495,9	3.016.740,8	340.722,7	3.357.463,5

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Daya Dukung Pangan yang berada pada status Terlampaui hanya di Kota Bandar Lampung karena nilai kebutuhan lebih besar dari pada ketersediaan yang ada, sehingga dihasilkan selisih sebesar - 836.359.818.671 kkal/tahun. Daya dukung pangan berdasarkan luasan berada pada Daya Dukung Pangan Belum Terlampaui seluas 3.016.741 ha dan Terlampaui seluas 340.723 ha.

Gambar 2. 106 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan)
di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Daya Dukung Lahan

Provinsi Lampung berada pada daya dukung lahan potensial, kendala dan limit dimana berada pada lahan potensial dengan luas 2.101.957,0 ha, sedangkan daya dukung lahan limit sebesar 739.623,2 ha, lahan limitasi (lindung) merupakan lahan yang memiliki keterbatasan atau pembatasan dalam penggunaannya atau kawasan yang mutlak tidak diperkenankan adanya kegiatan permukiman. Lahan potensial terbesar berada di Lampung Tengah seluas 396.644,7 ha. Daya dukung lahan dengan kategori kendala hanya tersebar di beberapa wilayah dengan luas 515.883,3 ha, lahan kendala merupakan area yang memiliki pembatasan dalam penggunaannya untuk kegiatan tertentu atau memiliki kemampuan lahan sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

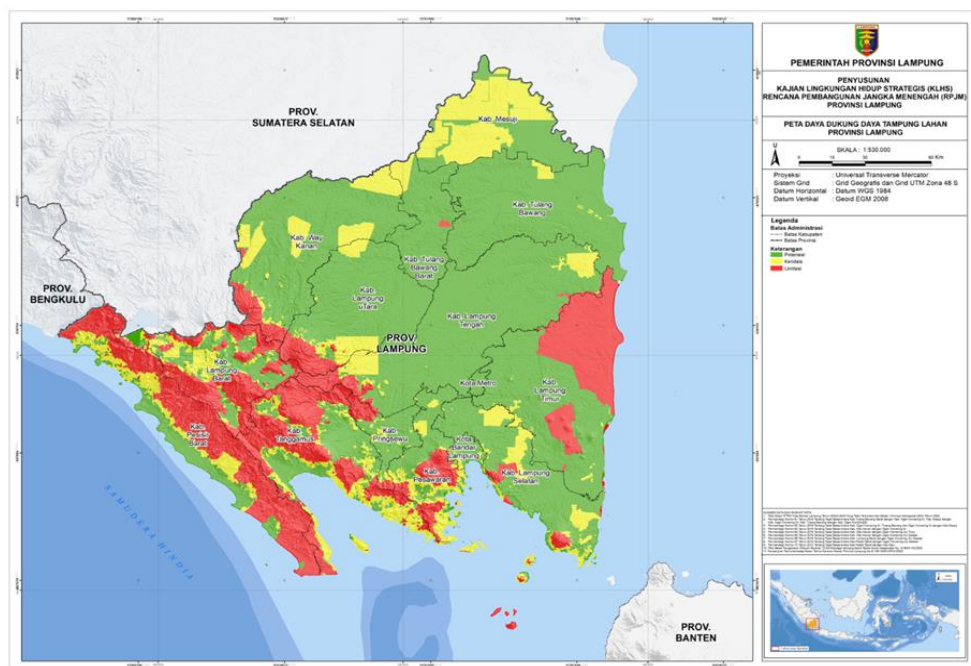
Tabel 2. 64 Luas Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan (ha)			Jumlah (ha)
		Limit	Kendala	Potensial	
1	Lampung Barat	106.927,20	36.644,00	67.228,10	210.799,30
2	Lampung Selatan	16.891,30	45.895,90	159.945,80	222.733,00
3	Lampung Tengah	26.088,60	33.223,70	396.644,70	455.957,00
4	Lampung Timur	152.324,10	5.475,30	228.577,50	386.376,90

No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan (ha)			Jumlah (ha)
		Limit	Kendala	Potensial	
5	Lampung Utara	28.008,70	30.496,00	208.425,70	266.930,40
6	Mesuji		130.440,10	89.601,30	220.041,40
7	Pesawaran	34.341,60	35.032,20	59.437,80	128.811,70
8	Pesisir Barat	192.064,50	44.655,20	57.304,20	294.023,90
9	Pringsewu	13.039,30	5.301,80	43.378,20	61.719,20
10	Tanggamus	142.295,40	65.295,40	87.253,70	294.844,60
11	Tulang Bawang		5.754,70	305.855,00	311.609,60
12	Tulang Bawang Barat	1.374,60	10.431,40	113.902,80	125.708,80
13	Way Kanan	25.779,30	64.264,60	262.167,40	352.211,40
14	Kota Bandar Lampung	488,5	2.973,00	14.913,40	18.374,90
15	Kota Metro			7.321,40	7.321,40
	Jumlah	739.623,20	515.883,30	2.101.957,00	3.357.463,50

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Gambar 2. 107 Peta Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

2.1.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Data IKLH Tahun 2023 merupakan kompilasi hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>). Namun pelaksanaannya terdapat permasalahan pada data yang disampaikan oleh kabupaten/kota yang tidak semuanya (memenuhi) standar sesuai dengan ketentuan. Selain itu, tidak lengkapnya data dalam pengulangan sampel menyebabkan kurangnya varian data. Dari data IKLH yang ada, terlihat bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup perlu diselaraskan dan disinkronisasikan serta terus ditingkatkan agar nilai IKLH mengalami peningkatan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

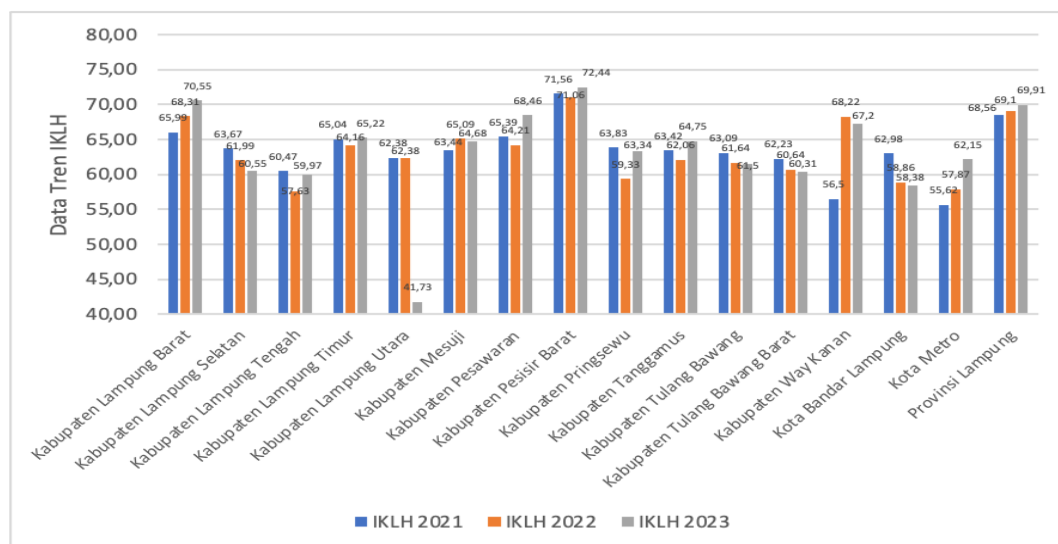
Kabupaten/Kota	Capaian IKA			Capaian IKU			Capaian IKL			Capaian IKAL			Capaian IKLH			Target IKLH (SE No.4 RPJMD)			Kriteria/ Status IKLH 2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kabupaten Lampung Barat	60,00	63,08	66,06	84,73	88,03	90,52	41,63	40,81	41,33	-	-	-	65,99	68,31	70,55	64,74	65,36	65,99	Baik
Kabupaten Lampung Selatan	60,00	55,00	50,51	87,37	87,89	84,7	26,13	26,10	33,12	-	-	-	63,67	61,99	60,55	60,89	61,41	61,93	Sedang
Kabupaten Lampung Tengah	56,67	50,00	53,33	83,46	82,55	84,09	24,48	24,64	26,75	-	-	-	60,47	57,63	59,97	61,83	62,41	63,00	Sedang
Kabupaten Lampung Timur	53,53	49,46	50,54	86,15	87,73	87,74	45,75	45,79	48,80	-	-	-	65,04	64,16	65,22	62,97	63,38	63,79	Sedang
Kabupaten Lampung Utara	57,50	55,93		86,75	88,2	86,98	25,7	25,7	29,72	-	-	-	62,38	62,38	41,73	63,19	63,88	64,58	Kurang
Kabupaten Mesuji	58,57	61,43	59,00	87,05	88,46	89,5	28,13	28,14	28,54	-	-	-	63,44	65,09	64,68	61,20	61,72	62,24	Sedang
Kabupaten Pesawaran	60,00	57,78	63,33	91,83	91,00	89,37	25,73	25,71	38,59	-	-	-	65,39	64,21	68,46	61,83	62,48	63,13	Sedang
Kabupaten Pesisir Barat	52,86	50,00	50,00	87,63	89,06	89,9	73,93	73,93	78,67	-	-	-	71,56	71,06	72,44	73,21	73,54	73,87	Baik
Kabupaten Pringsewu	63,33	50,65	52,22	86,03	86,76	88,98	23,63	23,5	35,00	-	-	-	63,83	59,33	63,34	62,16	62,71	63,26	Sedang
Kabupaten Tanggamus	57,92	51,54	53,75	84,22	86,78	86,97	34,42	34,42	42,57	-	-	-	63,42	62,06	64,75	64,27	64,92	65,57	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang	56,67	50,00	50,00	90,15	92,74	92,03	24,09	24,11	24,79	-	-	-	63,09	61,64	61,5	62,01	62,64	61,12	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang Barat	60,00	52,22	50,00	85,18	88,49	88,15	23,61	23,61	26,51	-	-	-	62,23	60,64	60,31	63,27	63,87	64,48	Sedang

Kabupaten/Kota	Capaian IKA			Capaian IKU			Capaian IKL			Capaian IKAL			Capaian IKLH			Target IKLH (SE No.4 RPJMD)			Kriteria/ Status IKLH 2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kabupaten Way Kanan	50,00	67,33	63,33	80,39	84,75	91,94	23,47	39,19	28,10	-	-	-	56,5	68,22	67,2	67,22	67,83	68,43	Sedang
Kota Bandar Lampung	63,75	50,95	50,00	82,31	83,73	82,54	25,89	26,43	28,08	-	-	-	62,98	58,86	58,38	60,94	61,39	61,84	Sedang
Kota Metro	50,00	50,69	50,00	78,69	83,62	87,2	22,59	22,59	36,71	-	-	-	55,62	57,87	62,15	60,45	60,65	60,84	Sedang
Provinsi Lampung	57,77	54,72	55,36	85,46	87,32	88,04	33,54	34,29	38,42	79,56	86,48	83,87	68,56	69,1	69,91	68,23	68,66	69,09	Sedang
Nasional	55,20	55,30	54,55	87,36	88,05	88,65	62,5	63,5	61,75	59,00	59,50	78,58	71,45	72,42	72,48	68,96	69,22	69,48	Baik
Sumber : KLHK, 2023 (https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login)																			

Tabel 2. 65 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023

Dari Tabel diatas terlihat bahwa IKLH Provinsi Lampung tahun 2023 telah mencapai target dan berada pada status “**sedang**” yaitu 69,91. IKLH kabupaten/kota tahun 2023 didominasi kriteria “**sedang**” dengan dua kabupaten yang memiliki kriteria “**baik**” yaitu Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai IKLH 71,06 dan Kabupaten Lampung Barat dengan nilai IKLH 70,55. Berdasarkan capaian indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 terdapat 8 kabupaten/kota yang belum mencapai target yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara; Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.

Grafik 2. 108 Perubahan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2024

Dari Indeks Kualitas Air (IKA) terlihat bahwa dari 8 (delapan) parameter kualitas air yang dianalisa parameter COD, DO, BOD, dan Total Phospat sebagian besar memiliki indeks pencemar lebih dari batas ambang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah tercemar limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat atau masyarakat menjadikan sungai sebagai MCK dan kualitas air mengalami penurunan yang disebabkan oleh limbah domestik maupun limbah industri.

Untuk kualitas udara yang mengalami penurunan (Lampung Selatan) dan belum mencapai target (Lampung Tengah) hal ini disebabkan karena adanya penurunan kualitas udara disebabkan peningkatan polutan SO₂ dan

NO₂ sehingga terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Selain itu, pada parameter IKU data yang ada belum dapat mencerminkan kualitas udara yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan pola kecenderungan kualitas udara seharusnya. Lokasi perkotaan kualitas udaranya kurang bila dibandingkan dengan kabupaten yang kepadatannya masih rendah, begitu juga untuk kawasan transportasi dan industri seharusnya kualitas udaranya lebih rendah bila dibandingkan dengan kawasan pemukiman dan perkantoran.

Indeks kualitas lahan Provinsi Lampung masih dibawah target. Hal ini menunjukkan bahwa ada alih fungsi lahan dari hutan menjadi penggunaan lain. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (agroforestri) yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik.

Karena keterbatasan data tutupan lahan yang ada dalam perhitungan ini menggunakan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui metode interpretasi citra sehingga data tutupan hutan dengan luasan yang kecil tidak terhitung serta tanaman yang masih muda hasil dari rehabilitasi tutupan lahan tidak terdeteksi sebagai tutupan hutan sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi tutupan hutan di Provinsi Lampung yang sebenarnya.

2.1.5.3 Perubahan Iklim

2.1.5.4 Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Robi, Rio Catur)

2.1.5.5 Kualitas Lahan

2.1.5.6 Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan Berkelanjutan (Robi, Rio Catur)

2.1.5.7 Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung khususnya program listrik pedesaan yang merupakan program dari pemerintah maupun PT.PLN untuk mengalirkan listrik kepada masyarakat di pedesaan terus diupayakan dengan menjalankan strategi pengembangan jaringan distribusi listrik yang tersedia saat ini. Namun demikian untuk daerah-daerah yang masih terisolasi dan tidak mungkin melakukan pengembangan jaringan secara grid (jaringan listrik utama), maka dikembangkan dengan pembangkit yang diutamakan dari energi baru terbarukan. Selain desa terisolasi, program listrik juga dikembangkan untuk menjangkau desa 3T yaitu Terdepan, Terluar dan Tertinggal, bagi daerah tersebut jika pemanfaatan EBT belum terwujud maka dimungkinkan adanya pengembangan pembangkit berbahan bakar fosil. Selain melistriki desa juga dilakukan program pra-elektrifikasi dengan menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi daerah dan desa-desa yang sulit teraliri listrik.

Rasio Elektrifikasi

Realisasi rasio elektrifikasi rumah tangga di provinsi Lampung pada Tahun 2023 telah mencapai sebesar 99,99% dan capaian rasio desa berlistrik pada Tahun 2023 adalah sebesar 99,73%.

Tabel 2. 67 Capaian Cakupan Pelayanan & Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Di Provinsi Lampung

No.	Indikator	2023	2024		
			Target	Realisasi	%

					Realisasi
1.	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	99,99	99	99.99	101

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024

Berikut adalah kondisi kebutuhan daya listrik di Provinsi Lampung Tahun 2023-2045, dengan ketentuan bahwa satu jiwa penduduk dengan kebutuhan pemenuhan daya listriknya adalah 450 VA.

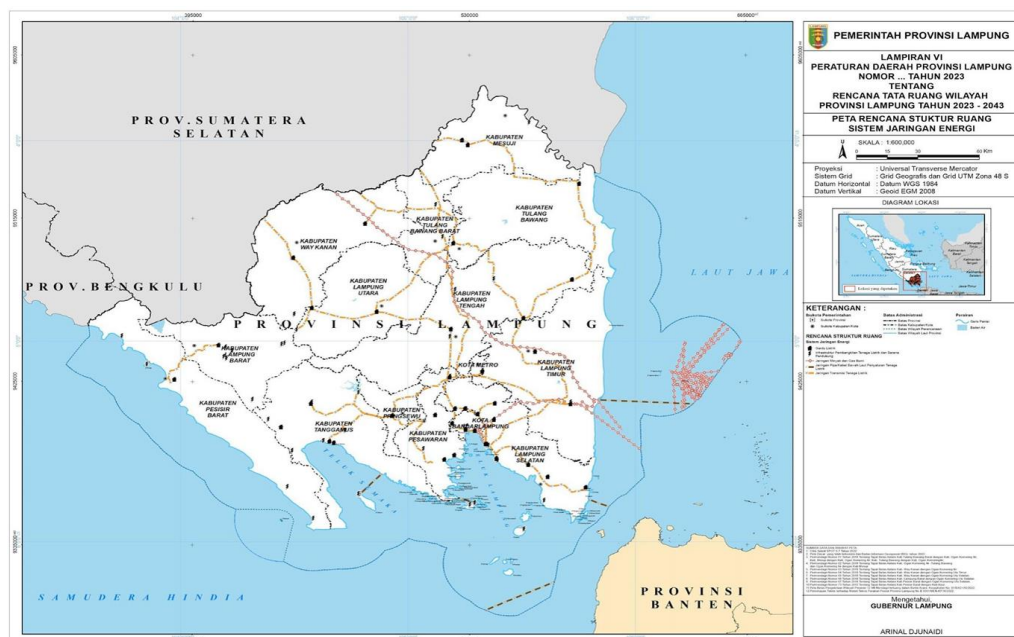
Tabel 2. 68 Kebutuhan Daya Listrik Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL KEBUTUHAN DAYA LISTRIK (KVA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Lampung Barat	143,685	150,633	156,618	162,349	166,859
2	Tanggamus	305,109	321,219	335,489	345,795	355,402
3	Lampung Selatan	510,026	539,793	566,802	579,438	595,535
4	Lampung Timur	524,115	546,804	566,451	591,562	607,996
5	Lampung Tengah	693,644	727,03 4	754,934	783,860	805,635
6	Lampung Utara	299,592	311,720	322,241	337,793	347,177
7	Way Kanan	226,490	239,292	251,015	257,164	264,308
8	Tulang Bawang	204,930	215,523	224,978	232,066	238,513
9	Pesawaran	227,817	240,768	253,044	259,104	266,302
10	Pringsewu	193,383	204,269	214,187	219,699	225,802
11	Mesuji	110,345	117,968	124,803	125,733	129,226
12	Tulang Bawang Barat	135,806	142,020	147,303	153,256	157,513
13	Pesisir Barat	78,687	84,312	89,834	90,086	92,589
14	Bandar Lampung	551,795	575,163	593,195	621,510	638,776

15	Metro	79,884	83,691	86,891	90,208	92,713
PROVINSI LAMPUNG		4.285,310	4.500,212	4.687,781	4.849,866	4.984,596

Sumber : Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2024

Gambar 2. 110 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi



Sumber : Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2023

Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional

Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi. Porsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,30 persen tahun 2022. Namun, ini menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Di samping itu, tingkat elektrifikasi di pedesaan Indonesia pada akhir 2020 mencapai sekitar 98,67 persen. Akan tetapi, secara umum kualitas akses listrik tersebut masih harus ditingkatkan. Selanjutnya, masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersentuh listrik serta memerlukan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan akses listrik.

Konsumsi Listrik per Kapita

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, konsumsi listrik Tahun 2024 di Provinsi Lampung menunjukkan sebesar 14% dibanding tahun 2020. Seiring dengan **pertumbuhan jumlah penduduk** tahun 2020, konsumsi listrik per kapita adalah **556,04 kWh**, meningkat menjadi **567,99 kWh** pada 2021, **586,55 kWh** pada 2022, dan **618,63 kWh** pada 2023. Di tahun 2024, konsumsi listrik per kapita akan mencapai **637,09 kWh**. Peningkatan ini mencerminkan **bertambahnya kebutuhan energi** akibat pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang terus berkembang, yang memerlukan perencanaan energi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel.....Konsumsi Listrik per kapita tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Konsumsi Listrik (kwh)	Konsumsi listrik/kapita (kwh)
2020	9.007.850	5.008.763.180,00	556,04
2021	9.081.790	5.158.404.690,00	567,99
2022	9.176.550	5.382.475.876,00	586,55
2023	9.313.990	5.761.907.084,00	618,63
2024	9.419.580	6.001.147.920,00	637,09

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.5.8 Penanggulangan Bencana

Indeks Resiko Bencana saat ini dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh beberapa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, ini menunjukkan bahwa sektor bencana menjadi salah satu fokus dalam pembangunan wilayah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka pembangunan di Provinsi Lampung didasari oleh 3 (tiga) hal, yaitu **pertama**, kondisi risiko bencana, **kedua**, kemampuan daerah untuk menjawab kondisi risiko bencana, dan **terakhir**, peluang atau potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penanggulangan bencana di Provinsi Lampung;

Perkembangan IRB Provinsi Lampung dari tahun 2015-2018 menunjukkan Bahwa 7 (tujuh) Kabupaten/Kota memiliki risiko **TINGGI** (Merah), dan 8 (delapan) Kabupaten/Kota lainnya berkategori **SEDANG** (Kuning). TIDAK ADA Kabupaten/Kota dengan Risiko bencana RENDAH (Hijau); **7 (tujuh) Kabupaten/Kota memiliki risiko Tinggi (Merah)**, yaitu: Kab. Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung; **8 (delapan)**

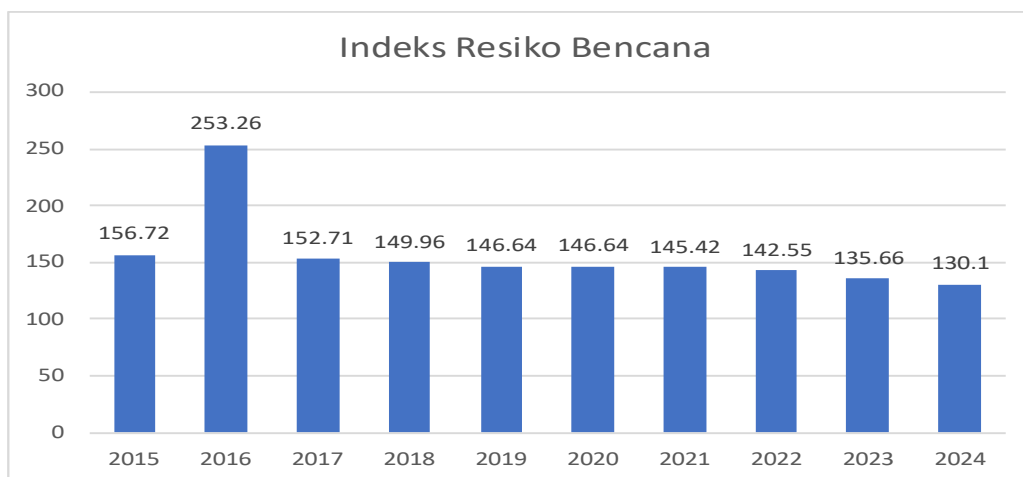
Kabupaten/Kota lainnya berkategori Sedang (Kuning), yaitu: Kab. Tanggamus, Pringsewu, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Kota Metro.

Kajian Risiko Bencana (KRB) Lampung Tahun 2019 memetakan Kab/Kota berdasarkan jenis ancaman bencana alam sebagai berikut:

- Risiko Tinggi **Banjir** yaitu: Kab. Way Kanan dan Tulang Bawang Barat;
- Risiko Tinggi **Longsor** TIDAK ADA, namun dapat terjadi di wilayah sisi barat Lampung, a.l Kab. Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Way Kana, Lampung Tengah, dan Lampung Utara;
- Risiko Tinggi Cuaca Ekstrem **Puting Beliung** yaitu: Kab. Pesawaran dan Lampung Timur;
- Risiko Tinggi **Tsunami** yaitu: Kab. Tanggamus, Pesisir Barat, Pesawaran dan Lampung Selatan;
- Risiko Tinggi **Kekeringan** yaitu Kab. Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Lampung Tengah
- Risiko Tinggi **Gempa** yaitu: Kab. Pesawaran (Keterpaparan TINGGI);
- Risiko Tinggi **Gelombang Tinggi dan Abrasi** yaitu: Kab. Pesisir Barat;
- Risiko Tinggi **Kebakaran Hutan dan Lahan** yaitu: Kab. Way Kanan, Pesisir Barat, dan Lampung Timur.
- Risiko Tinggi **Letusan Gunung Api** yaitu: Kab. Lampung Selatan;
- Risiko Tinggi **Likuefaksi atau Pencairan Tanah** yaitu: Kab. Tulang Bawang (DAS Mesuji-Tulang Bawang)

Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung setiap tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Provinsi Lampung telah masuk dalam tingkat risiko bencana Menengah dari sebelumnya tahun 2021 dalam kategori Tinggi. Ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan ketangguhan terhadap bencana di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Grafik 2. 112 Capaian Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung
Tahun 2015-2024



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, 2025

Tabel 2.69 Capaian Indeks Resiko Bencana Tingkat Kabupaten / Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2024

No	Kabupaten / Kota	IRB 2023	Kelas IRB 2023	IRB 2024	Kelas IRB 2024
1	Lampung Barat	180.34	Tinggi	176.28	Tinggi
2	Tanggamus	132.54	Tinggi	120.21	Sedang
3	Lampung Selatan	167.23	Tinggi	151.15	Tinggi
4	Lampung Timur	183.2	Tinggi	166.4	Tinggi
5	Lampung Tengah	113.24	Sedang	106.14	Sedang
6	Lampung Utara	131.2	Sedang	131.2	Sedang
7	Way Kanan	108	Sedang	94.92	Sedang
8	Tulang Bawang	122.66	Sedang	114.44	Sedang
9	Pesawaran	162.28	Tinggi	152.79	Tinggi
10	Pringsewu	95.2	Sedang	88.82	Sedang
11	Mesuji	116.7	Sedang	113.03	Sedang
12	Tulang Bawang Barat	120.28	Sedang	112.66	Sedang
13	Pesisir Barat	189.7	Tinggi	188.85	Tinggi
14	Kota Bandar Lampung	119.79	Sedang	130.61	Sedang
15	Kota Metro	96.29	Sedang	104.07	Sedang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, 2025

Pada Tahun 2024, Capaian mengacu kepada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2025, Provinsi Lampung memiliki Indeks Risiko sebesar 130,1 (SEDANG), mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2023 sebesar 135,66.

Dengan melihat ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat luas, dari aspek *Penguatan Kebijakan* hingga

Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, mengindikasikan bahwa Pelaksanaan pilar-pilar penanggulangan bencana harus dibangun diatas pondasi kelembagaan bencana daerah yang kuat, yang terbentuk melalui pemahaman yang sama tentang bencana disemua pihak (*pentahelix*) di daerah, yang akan bermuara pada kesepakatan untuk menjadikan bencana sebagai isu bersama dan menjadi peluang bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana daerah dalam membangun ketangguhan di tingkat lokal secara sinergis, antara lain menjadi sarana mobilitas dan realokasi *resources* (sumber daya manusia, dan sarana prasarana), keterpaduan kegiatan dan anggaran, serta berbagi pengetahuan dan pemahaman (*sharing knowledge*) bencana.

2.1.6 Tata Kelola Pemerintahan

2.1.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintahan (Indeks Reformasi Birokrasi). Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah pusat melaksanakan dan menyusun peta jalan “Reformasi Birokrasi” di seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang selanjutnya dijabarkan melalui pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2010-14, Tahun 2015-2019, dan Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap unsur pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah pula menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015-2020 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pemberian penilaian Opini WTP diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-Undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. 70 **Nilai Reformasi Birokrasi, Sakip dan Pengelolaan Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2016-2022**

Tahun	Reformasi Birokrasi	SAKIP	Pengelolaan Keuangan
2016	CC (56,13)*	B (60,33)	WTP
2017	CC (57,63)*	B (61,36)	WTP
2018	CC (58,49)*	B (62,31)	WTP
2019	B (60,05)*	B (63,80)	WTP
2020	CC (52,03)**	B (66,04)	WTP
2021	CC (58,38)**	B (66,88)	WTP
2022	CC (58,92)**	B (67,11)	WTP

Keterangan : Data Awal

2.1.6.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Aspek daya saing memiliki 1 (satu) indikator, yaitu; Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan angka capaian pada tahun 2023 sangat tinggi. Selama kurun waktu periode RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024, rata-rata capaian kinerja indikator tersebut terhadap target kondisi akhir juga sangat tinggi, yaitu; 98,86%.

Tingginya nilai kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan disebabkan karena terjadi perubahan dalam sistem perizinan

sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan perizinan usaha. Kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat adalah:

1. Adanya OSS-RBA (Perizinan Berusaha Berisiko), sehingga perizinan menjadi lebih mudah, karena perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha, memangkas birokrasi yang panjang dan prosedur yang rumit, karena saat ini telah berubah ke-era digital sehingga mempercepat perizinan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Telah dilaksanakannya Sosialisasi Kebijakan Penerapan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Se-Provinsi, sehingga menjadi tindak lanjut terhadap perubahan sistem Layanan Perizinan Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang tentu saja menambah pengetahuan serta kompetensi bagi para pelaku usaha terhadap OSS-RBA dan pelaporan LKPM;
3. Adanya pengaduan pelayanan publik sebagai alat ukur pelayanan yang ada dan mengatasi permasalahan pada pelayanan tersebut. Pengaduan Pelayanan Publik adalah salah satu prasarana yang memudahkan setiap penerima pelayanan dan merupakan usaha peningkatan potensi terhadap kemudahan pelayanan yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.
4. Terbitnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, menjadi rujukan yang pasti bagi para pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin usaha.

2.1.6.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

merupakan salah satu indikator capaian transformasi tata kelola dalam RPJPN 2025 – 2045. Indikator ini digunakan untuk mewujudkan arah (tujuan) pembangunan yaitu regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif. Untuk wilayah Sumatera, transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan percepatan digitalisasi layanan publik

dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pada SPBE Summit 2024, KemenPAN-RB memberikan apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik dimana Pemerintah Provinsi Lampung meraih urutan ketujuh Indeks SPBE tertinggi untuk Kategori Pemerintah Provinsi. Sesuai Keputusan Menpan RB No. 13 Tahun 2024, Indeks SPBE Provinsi Lampung tahun 2023 yaitu 3,81 dengan predikat Sangat Baik. Adapun Indeks SPBE Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 71 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks 2021*	Predikat	Indeks 2022**	Predikat	Indeks 2023***	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Lampung	2,76	Baik	3,37	Baik	3,81	Sangat Baik
2.	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	1,67	Kurang	2,10	Cukup	2,68	Baik
3.	Pemerintah Kab. Lampung Utara	1,86	Cukup	2,43	Cukup	2,70	Baik
4.	Pemerintah Kab. Lampung Barat	1,91	Cukup	2,26	Cukup	2,76	Baik
5.	Pemerintah Kab. Tanggamus	1	Kurang	1,60	Kurang	2,60	Baik
6.	Pemerintah Kab. Way Kanan	2,10	Cukup	2,24	Cukup	3,08	Baik
7.	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	1,97	Cukup	2,07	Cukup	2,27	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Pringsewu	2,03	Kurang	2,00	Cukup	2,97	Baik
9.	Pemerintah Kab. Mesuji	1,69	Kurang	2,59	Cukup	3,57	Sangat Baik
10.	Pemerintah Kota Metro	2,14	Cukup	2,49	Cukup	3,04	Baik
11.	Pemerintah Kota Bandar Lampung	1,2	Kurang	1,50	Kurang	2,15	Cukup
12.	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	-		1,70	Kurang	2,74	Baik
13.	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	-		2,09	Cukup	2,55	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks 2021*	Predikat	Indeks 2022**	Predikat	Indeks 2023***	Predikat
14.	Pemerintah Kab. Lampung Timur	-		1,90	Cukup	2,27	Cukup
15.	Pemerintah Kab. Pesawaran	-		1,95	Cukup	2,91	Baik
16.	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	-		1,94	Cukup	2,32	Cukup

Sumber :

* Keputusan Menpan RB No 1503 Tahun 2021

** Keputusan Menpan RB No. 108 Tahun 2023

*** Keputusan Menpan RB No. 13 Tahun 2024

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 utamanya melalui transformasi ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui super platform percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. Arah kebijakan transformasi digital mencakup:

1. **Pengembangan sisi permintaan meliputi percepatan digitalisasi sektor** utamanya melalui dorongan dan dukungan insentif dan subsidi untuk terjadinya digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri dan *e-commerce*; penguatan pemerintah digital melalui penyiapan infrastruktur pendukung dan SDM SPBE yang dibutuhkan serta pembangunan *smart city* di berbagai kota dan digitalisasi pedesaan (*smart village*) secara bertahap; digitalisasi sistem pembayaran yang inklusif; peningkatan peran UMKM dalam *e-commerce* domestik dan global; dan percepatan literasi digital masyarakat.
2. **Pengembangan keterpaduan data (*data enablement*)** antara lain melalui pengembangan berbagai pusat data nasional baik pemerintah dan swasta, serta penguatan Satu Data Indonesia (SDI).

Arah kebijakan transformasi digital pemerintahan difokuskan pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional, percepatan penerapan satu data Indonesia, dan peningkatan keamanan siber.

2.1.6.4 Penelitian dan Pengembangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk penjabaran dan perundangan tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menggunakan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang diberikan mandat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri di Tahun 2024. Bentuk inovasi daerah terdiri dari Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi bentuk lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jenis inovasinya antara lain Inovasi Digital dan Inovasi Nondigital.

Pemerintah daerah didorong untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi dengan melaksanakan penilaian inovasi daerah melalui rangkaian pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Awards (IGA). IID dan IGA yang dilaksanakan setiap tahun, dimana Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib untuk berpartisipasi. Kedua kegiatan tersebut merupakan tahapan wajib penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja daerah dalam melaksanakan inovasi, dimana IID adalah tahapan penjangkaran dan penilaian inovasi yang telah dilakukan daerah, sedangkan IGA adalah tahapan pemaparan inovasi unggulan oleh Kepala Daerah dan pengapresiasian atas daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam pelaksanaan birokrasi. Skor Indeks Inovasi Daerah diukur dan ditetapkan oleh Kementerian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan kategori yang diberikan kepada daerah yang mengikuti IID yaitu daerah terinovatif, sangat inovatif dan inovatif. Pemerintah Pusat akan memberi apresiasi dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) kepada daerah yang meraih kategori daerah terinovatif.

Pada Tahun 2022 Provinsi Lampung masuk dalam sepuluh besar Provinsi dengan Predikat Sangat Inovatif di peringkat 8 (delapan) dengan skor indeks 60,90, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

400.10.11-6301.A Tahun 2022.. Namun capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Lampung mengalami penurunan di Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, yang berada pada peringkat 10 dengan predikat Inovatif dan capaian skor indeks 58,70.

Tabel 2.72 Capaian Indikator Kinerja IID Balitbangda Provinsi Lampung Th. 2019-2023

No.	Tahun	Inovasi daerah	Skor	Predikat
1.	2020	319	14,599	Sangat inovatif
2.	2021	179	50,18	Inovatif
3.	2022	130	60,90	Sangat inovatif
4.	2023	88	58,70	inovatif

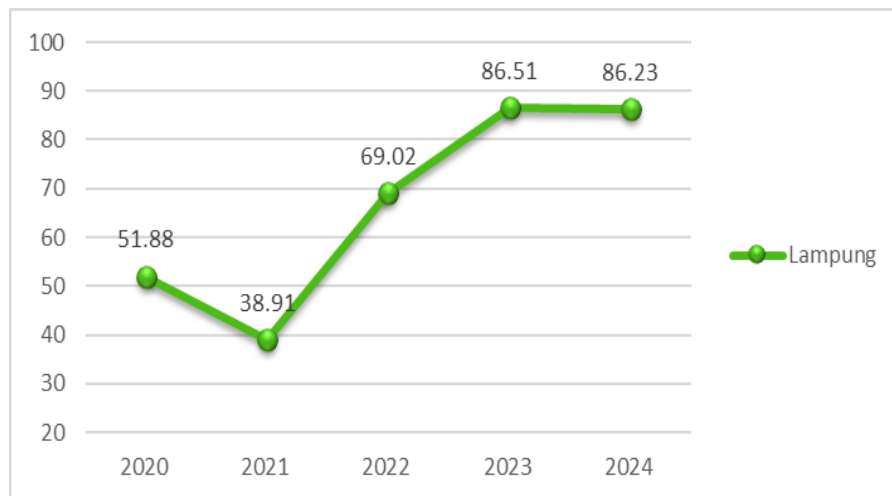
Sumber : Balitbangda, 2024

2.1.6.5 Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan mudah diakses dan bisa memberikan perlindungan kepentingan negara dan menjamin hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut dituntut adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, agar arsip bisa menjadi bukti akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, maka adanya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan. Strategi percepatan untuk mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan baik yang dilakukan pihak eksternal (ANRI) maupun internal pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap seluruh Perangkat Daerah merupakan trigger yang perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, yang pada saatnya menjadi memori daerah dan akan membentuk memori bangsa. Pengawasan kearsipan dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap Perangkat Daerah baik di Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam mengukur tingkat pengawasan penyelenggaraan kearsipan digunakan Indeks Pengawasan Kearsipan dilingkup Pemerintah Daerah yang dirilis oleh Pusat

Akreditasi Kearsipan ANRI. Capaian indeks Pengawasan Kearsipan dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 51,88 persen dengan katagori CUKUP, dan menurun ditahun 2021 sebesar 38,91 dengan katagori KURANG, namun naik kembali pada tahun 2022 sebesar 69,02 dengan katagori BAIK dan terus naik ditahun 2023 menjadi 86,51 persen dengan katagori MEMUASKAN.

Grafik 2. 119 Trend Indeks Pengawasan Kearsipan dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah, 2025

2.1.6.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang kurang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh nilai 68,36 dalam evaluasi SAKIP atau berada pada kategori B. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai nilai 68,10 namun masih belum signifikan dan masih pada kategori B. Evaluasi SAKIP mencakup 5 (lima) komponen utama : **Perencanaan Kinerja**, menilai sejauh mana perencanaan program dan kegiatan telah disusun secara sistematis dan terukur. **Pengukuran Kinerja**, mengukur efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. **Pelaporan Kinerja**, menilai kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kinerja kepada publik dan pihak terkait. **Evaluasi Internal**, mengevaluasi sejauh mana instansi melakukan penilaian terhadap kinerja internal untuk perbaikan berkelanjutan. **Capaian Kinerja**, menilai hasil akhir dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah perkembangan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai oleh Kemen PAN RB.

Tabel.....Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2020 - 2024

Tahun	Nilai SAKIP	KATEGORI
2020	63,80	B
2021	66,04	B
2022	67,11	B
2023	68,10	B
2024	68,36	B

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian PAN RB.

2.1.6.7 Manajemen ASN

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dijelaskan terkait Sistem Merit yang memuat kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Tabel 2. 73 Data Kepegawaian Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH PNS BERDASARKAN						
JENIS KELAMIN						
-Laki-laki	orang	7673	7356	7057	6812	6782
-Perempuan	orang	7951	7922	7845	7884	7867
JABATAN						
-Fungsional Umum	orang	5317	4593	4286	3889	3849
-Fungsional Tertentu	orang	9054	9358	9824	10021	9958
-Struktural Esselon IV	orang	894	946	441	440	467
-Struktural Esselon III	orang	311	332	303	296	321
-Struktural Esselon II	orang	47	48	47	49	53
-Struktural Esselon I	orang	1	1	1	1	1
TINGKAT PENDIDIKAN						

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
-SD/MI/Sederajat	orang	141	117	81	61	48
-SMP/MTS/Sederajat	orang	167	149	100	85	79
-SMA/MA/Sederajat	orang	2343	2112	1873	1652	1601
-D-I dan D-II	orang	87	77	57	51	50
-D-III	orang	898	974	947	910	874
-Strata-1/D-IV	orang	9614	9524	9367	9148	9064
-Strata-2	orang	2359	2309	2459	2764	2906
-Strata-3	orang	15	16	18	25	27
KEPANGKATAN						
-Juru Muda	orang	1	1	1	1	1
-Juru Muda Tingkat I	orang	13	10	3	2	2
-Juru	orang	19	12	14	7	7
-Juru Tingkat I	orang	62	57	46	32	32
-Pengatur Muda	orang	134	95	77	62	60
-Pengatur Muda Tingkat I	orang	363	362	228	140	141
-Pengatur	orang	500	455	519	605	590
-Pengatur Tingkat I	orang	844	908	875	592	584
-Penata Muda	orang	1179	1220	1399	1939	1955
-Penata Muda Tingkat I	orang	1992	1853	1736	1646	1645
-Penata	orang	2628	2106	1752	1427	1412
-Penata Tingkat I	orang	3247	3402	3373	3558	3565
-Pembina	orang	2313	2385	2446	2235	2199
-Pembina Tingkat I	orang	2115	2184	2143	2120	2114
-Pembina Utama Muda	orang	156	179	246	290	301
-Pembina Utama Madya	orang	47	36	32	28	29
-Pembina Utama	orang	11	13	12	12	12

Sumber BKD Provinsi Lampung, 2024 data diolah

Ketersediaan potensi sumber daya aparatur Provinsi Lampung dengan jumlah 14.649 orang yang bervariasi dan kompleks maka diperlukan manajemen penataan ASN melalui sistem Merit. Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 07/KEP.KASN/C/IV/2024 tanggal 29 April 2024 bahwa Indeks Merit Sistem Provinsi Lampung tahun 2023 adalah 298,5 atau berada dalam Kategori III (Baik). Meskipun sudah cukup baik, masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti diantaranya:

1. Melakukan assesment pemetaan kompetensi pada seluruh ASN Provinsi Lampung berdasarkan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan;

2. Membangun manajemen talenta untuk pengembangan karir juga penyusunan rencana suksesi ASN;
3. Menyelesaikan penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi ASN.

Manajemen ASN tidak hanya berkisar pada manajemen karier, pengembangan dan pola karier, mutasi dan promosi namun juga pengembangan kompetensi aparatur. Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur saat ini semakin penting dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan publik, selain itu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berdinamika, perubahan kebijakan dan paradigma pemerintahan, serta globalisasi, menuntut sumber daya manusia yang profesional dalam mewujudkan terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur dengan capaian periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74 Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Diklat Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Capaian Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	12,50	20,28	25,34	32,39	38,30	12,50	18,28	23,49	32,39	38,40
2.	Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B

Sumber: BPSDM Provinsi Lampung, 2024

Persentase ASN yang mengikuti diklat dan memiliki sertifikat dari Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan, namun realisasi yang tercapai di atas target dengan rasio 100 persen baru terlihat di periode 2022-2023.

Demikian pula untuk nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat belum tercapai secara optimal dengan capaian pada nilai B. Akreditasi ini sangatlah penting karena bermanfaat untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi ASN serta saran perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan.

2.1.6.8 Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data kependudukan dilaksanakan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Data Administrasi Kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi sekaligus bermanfaat bagi kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum atau pencegahan tindak kriminal.

Dalam proses Pengadministrasian Data Kependudukan, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki Database Kependudukan Berskala Provinsi berisi data *by name by address by NIK* untuk meminimalisir data penduduk ganda. Adapun bila dilihat capaian sampai dengan tahun 2023, persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Lampung menunjukkan angka yang cukup signifikan sebagaimana tabel di bawah ini. Hal ini terlihat bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan Administrasi Kependudukan melalui pendataan penduduk sebagai data dasar dalam pemberian pelayanan secara merata.

Tabel 2. 75 Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

No	Kepemilikan Dokumen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Akta Kelahiran	96,80	98,51	100,00	97,00	96,00
2	Perekaman KTP Elektronik	97,00	95,30	101,14	97,31	98,69
3	Kartu Identitas Anak	11,37	35,13	39,58	59,75	71,06
4	Akta Kematian	100,00	100,00	93,09	88,00	91,00
5	Kartu Keluarga	90,00	94,00	96,00	99,00	99,00
6	Akta Perkawinan	6,00	23,00	32,00	35,00	39,00
7	Akta Perceraian	79,00	24,00	13,00	43,00	12,00
8	Identitas Kependudukan Digital (IKD)	-	-	-	-	3,82

Sumber: Disdukcapil, 2024 (data diolah)

Data tersebut merupakan Data Kependudukan Bersih (DKB) yang telah disinkronisasikan dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI. Data Kependudukan Bersih adalah data yang telah

dikonsolidasikan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan melakukan filter terhadap data yang bersifat anomali dan data ganda. Adapun data yang bersifat anomali adalah data yang dalam proses rekam dan penginputan datanya tidak memenuhi standar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah juga yang menyebabkan naik turunnya persentase perekaman data kependudukan setelah melalui proses filter dari data pelayanan kependudukan di disdukcapil Kabupaten/Kota. Adapun Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah Program inovasi KTP dalam Digital yang mulai dijalankan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI dari tahun 2023 dan diperkuat dengan instruksi dari Presiden RI pada awal tahun 2024.

1. Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan seperti Kartu Keluarg, KTP dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Pencapaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Provinsi Lampung dari tahun 2020 terus menunjukkan peningkatan, dimana tahun 2020 sebesar 83,44 persen, saat ini tahun 2023 seluruh penduduk Provinsi Lampung telah memiliki dokumen kependudukan (100 persen).

Grafik 2. 113 Trend Kepemilikan Dokumen Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

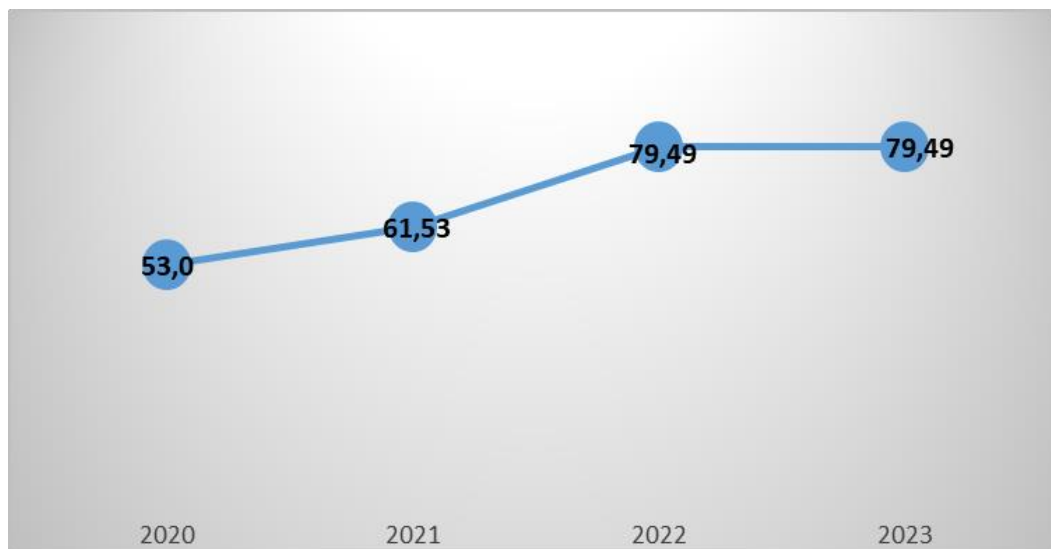


Sumber : Laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung, 2023

2. Pemanfaatan Data Kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Pemberian Hak Akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara. Pengguna sebagaimana dimaksud diatas meliputi lembaga negara, Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Badan hukum Indonesia dan/atau Organisasi perangkat daerah. Pemanfaatan data Kependudukan di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2020 pemanfaatan data kependudukan sebesar 53 persen dan meningkat sebesar 26,49 persen ditahun 2023 yaitu sebesar 79,49 persen. Hal ini menunjukan bahwa sudah terjalin kerja Sama disertai pemberian hak akses Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga yang berbadan hukum.

Grafik 2. 114 Trend Pemanfaatan Data Kependudukan di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber : Laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung, 2023

2.1.6.9 Perencanaan

Berdasarkan hasil penilaian Indek Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) tahun 2024, Provinsi Lampung mendapatkan nilai “Sangat Baik” dengan Skor 93,94. Tujuan dilakukannya pengukuran IPPN adalah mengukur kualitas perencanaan yang dihasilkan oleh daerah berbasis dampak (outcome) dan memastikan kebermanfaatan program pembangunan untuk masyarakat. Hasil penilaian IPPN Provinsi Lampung mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 81,01.

Namun demikian, perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan di Provinsi Lampung masih menunjukkan tingkat keselarasan yang belum optimal terutama dengan perencanaan kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari kurangnya integrasi antara kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Selanjutnya, Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah juga menjadi tantangan di Provinsi Lampung. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, terbuka, dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak, pada kenyataannya, data yang disediakan masih belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Data yang tersedia belum sepenuhnya akurat, terbuka, dan interoperabel, atau mudah dibagikan dan digunakan antar pengguna data. Hal ini menghambat efektivitas pengambilan keputusan berbasis data yang valid, yang seharusnya dapat mempercepat dan menyempurnakan perencanaan serta pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

Selain itu, Perencanaan berbasis kinerja yang harus didukung dengan adanya instrumen perencanaan seperti penjabaran kinerja (cascading, crosscutting, dan pohon kinerja) di tingkat perangkat daerah juga masih belum optimal. Instrumen ini seharusnya dapat digunakan untuk menghubungkan tujuan dan sasaran pembangunan di tingkat provinsi dengan pelaksanaan di tingkat perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap perangkat daerah memahami dan bekerja menuju pencapaian tujuan tersebut. Namun, implementasi instrumen ini di lapangan sering kali kurang maksimal, yang berdampak pada ketidakmampuan dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

2.1.6.10 Pengawasan

Hasil Survei Penilaian Integritas Provinsi Lampung pada Tahun 2024 menunjukkan skor sebesar 65,83, yang masuk dalam kategori rentan. Skor ini mengalami penurunan sebanyak 2,61 poin dibandingkan dengan hasil Survei Penilaian Integritas pada Tahun 2023 yang mencatatkan skor sebesar 68,44.

Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam beberapa aspek tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung, terutama terkait dengan belum optimalnya tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern. Hal ini berdampak pada kurangnya keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang semuanya merupakan faktor penting dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan daerah.

Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterbatasan ini mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terhadap pemerintahan daerah, sehingga menghambat tercapainya tata kelola yang lebih baik dan lebih efisien.

2.1.6.11 Pertanahan

Urusan pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memiliki peran dalam perencanaan tata ruang, pengawasan, pembinaan, dan penyusunan peraturan daerah terkait pertanahan.

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam melaksanakan kewenangan di bidang pertanahan, antara lain:

- Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun

2023–2043. Perda ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang di tingkat provinsi, serta sebagai dasar bagi kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selaras dan terintegrasi.

- Pemerintah Provinsi Lampung melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam hal perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. DPKPCK juga bertugas menyusun kebijakan teknis, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memastikan sinkronisasi antara kebijakan provinsi dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota.
- Pemerintah Provinsi Lampung secara rutin menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) sektor pertanahan untuk menjaring isu-isu strategis dan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Sebagai bagian dari upaya penataan ruang yang lebih spesifik, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penyusunan RDTR Kawasan Industri Katibung dan sekitarnya. Konsultasi publik pertama telah dilaksanakan pada 18 Juli 2024 untuk mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
- Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan aset tanah pemerintah daerah melalui penandatanganan komitmen bersama dalam Rakor Program Tematik Sektor Pertanahan pada 14 Agustus 2023. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat sertifikasi aset dan memastikan kepastian hukum atas tanah milik pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024 Provinsi Lampung

2.2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 (Dewi, Dian, Radius)

2.2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah (Dewi, Dian, Radius)

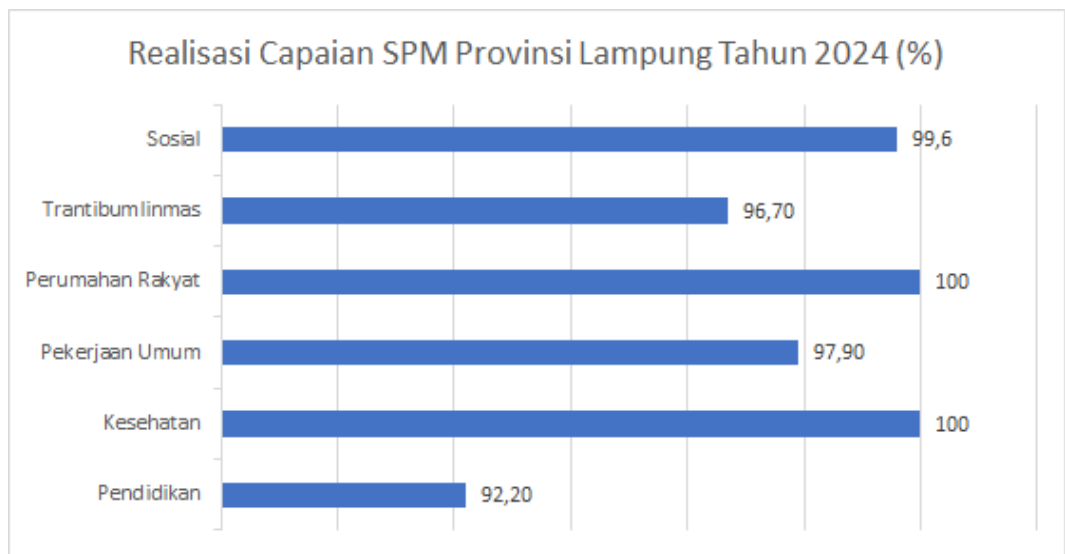
2.2.1.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung

Provinsi Lampung menunjukkan capaian SPM yang sangat baik di berbagai sektor, dengan perumahan rakyat dan kesehatan mencapai 100%. Namun, sektor pendidikan masih memiliki tantangan untuk mencapai target

yang lebih tinggi, dan sektor ketertiban juga masih memerlukan perhatian untuk pencapaian yang lebih optimal.

Tabel menunjukkan realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung pada tahun 2024. Sektor Sosial mencapai 99,6%, Trantibumlinmas 96,7%, Perumahan Rakyat 100%, Pekerjaan Umum 97,9%, Kesehatan 100%, dan Pendidikan 92,2%.

Tabel.....Realisasi Capaian SPM Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

Selanjutnya kalo dilihat capaian SPM per urusan SPM pada Kabupaten/Kota Tahun 2024, terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota berada pada kategori "Tuntas Utama" dalam Indeks Pencapaian (IP) SPM, dengan capaian rata-rata di atas 90%. Kota Metro menempati posisi tertinggi dengan IP SPM 99,82%, menunjukkan konsistensi luar biasa di seluruh sektor. Di sisi lain, Pesisir Barat dan Lampung Timur menunjukkan capaian paling rendah, masing-masing masuk dalam kategori "Tuntas Pratama" dan "Tuntas Madya", dengan rata-rata hanya 77,11% dan 88,69%. Sektor Pendidikan masih menjadi tantangan di beberapa daerah seperti Lampung Selatan (66,25%) dan Pesisir Barat (61,03%). Sementara itu, sektor Perumahan Rakyat umumnya menunjukkan capaian maksimal (100%) di hampir seluruh daerah. Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Lampung menunjukkan capaian SPM yang sangat baik secara agregat, masih terdapat disparitas antar daerah yang perlu menjadi perhatian untuk pemerataan pelayanan publik.

Tabel ...Capaian SPM per Urusan Kab/Kota Tahun 2024

No	Pemerintah Daerah	Capaian SPM Tahun 2024 (%)						Rata-rata	IP (Indeks Pencapaian) SPM
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	Provinsi Lampung	92,2	100	97,9	100	96,67	99,64	97,74	Tuntas Utama
2	Lampung Selatan	66,25	97,78	100	95	98,96	100	93,00	Tuntas Utama
3	Lampung Tengah	100	97,45	100	100	100	100	99,58	Tuntas Utama
4	Lampung Utara	87,42	86,75	97,39	100	100	97,55	94,85	Tuntas Utama
5	Lampung Barat	70,77	93,11	91,49	50	96,24	92,25	82,31	Tuntas Madya
6	Tulang Bawang	87,71	92,81	100	76,92	83,36	97,76	89,76	Tuntas Madya
7	Tanggamus	86,15	93,43	81,78	95	97,77	100	92,36	Tuntas Utama
8	Lampung Timur	66,58	83,61	90,33	95	97,07	99,56	88,69	Tuntas Madya
9	Way Kanan	90,32	93,18	100	100	99,56	94,36	96,24	Tuntas Utama
10	Pesawaran	99,92	87,6	100	100	91,67	100	96,53	Tuntas Utama
11	Pringsewu	82,1	86,64	100	100	95,67	94,5	93,15	Tuntas Utama
12	Mesuji	94,87	86,74	100	100	98,16	99,4	96,53	Tuntas Utama
13	Tulang Bawang Barat	94,99	93,71	91,23	100	100	99,07	96,50	Tuntas Utama
14	Pesisir Barat	61,03	87,4	100	100	67,33	46,92	77,11	Tuntas Pratama
15	Bandar Lampung	100	100	96,84	100	86,8	85,6	94,87	Tuntas Utama
16	Metro	100	100	100	100	98,89	100	99,82	Tuntas Utama

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

2.2.1.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung

2.3. Pemasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Permasalahan pembangunan per-urusan di Provinsi Lampung antara lain berikut:

1. Pendidikan

- Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai 8,36 tahun atau setara dengan kelas 2 sekolah menengah pertama. Data

tersebut menunjukkan bahwa Penduduk Provinsi Lampung belum dapat mencapai wajib belajar 13 tahun;

- Masih kurangnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, hal ini terlihat pada angka partisipasi sekolah jenjang menengah yang baru mencapai 72,35 persen dan di bawah rata-rata nasional sebesar 74,64 persen serta angka putus sekolah jenjang menengah/ sederajat melebihi target Nasional sebesar 1 persen (2,59 persen);
- Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan rasio antara guru dan siswa baik SMA (1:20) maupun SMK (1:15) sudah memenuhi standar yang ditetapkan, namun bila melihat penyebaran guru untuk daerah perkotaan dan pedesaan serta status PNS dan Non PNS masih belum terpenuhi;
- Kualitas mutu pendidikan (kompetensi minimum pendidikan dan pendidikan karakter) yang masih perlu ditingkatkan, yang dilihat berdasarkan asesmen Nasional kemampuan literasi, numerasi, iklim kebhinekaan, iklim keamanan dan iklim inklusivitas. Saat ini capaian literasi untuk semua jenjang dalam kategori “sedang” dan capaian Numerasi dalam kategori “sedang” pada jenjang SMA, SMPLB dan SDLB. Untuk SMK dan SMALB masuk dalam kategori “kurang”. Capaian Iklim kebhinekaan, inklusivitas dan keamanan di Provinsi Lampung untuk semua jenjang kewenangan provinsi mencapai kategori “sedang” dan kurangnya pengembangan kurikulum pendidikan menengah;
- Masih kurangnya pendidikan inklusif (Partisipasi sekolah anak disabilitas baru mencapai 51,52%, Kategori “rendah”), hal ini dikarenakan belum semua sekolah menengah umum/kejuruan mampu menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), kurangnya edukasi kepada orang tua dan juga kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran ABK serta kompetensi guru ;
- Masih rendahnya tingkat melanjutkan sekolah menengah kejuruan ke perguruan tinggi (14,15%), lulusan yang bekerja (46,25%), lulusan yang berwirausaha (25,98%) dan nilai capaian kualitas/kompetensi lulusan sekolah menengah khususnya sekolah menengah kejuruan sebesar 67,34/ kategori sedang dan persentase kepuasan DUDI

terhadap lulusan SMK sebesar 76,5 persen/kategori sedang, hal ini yang menyebabkan lulusan SMK sulit bersaing di pasar kerja ;

- Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran, hanya 63,71 % sekolah kejuruan yang memiliki fasilitas TIK

2. Kesehatan

- Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, dapat dilihat dari peningkatan kasus kematian ibu sebanyak 96 kasus (tahun 2021), meningkat menjadi 105 kasus (tahun 2023). Begitu juga kasus kematian bayi yang meningkat dari 511 kasus di tahun 2019 menjadi 624 kasus di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas pelayanan, kondisi bumil yang kurang baik dan faktor lainnya;
- Status gizi masyarakat yang masih kurang ditandai dengan masih tingginya prevalensi stunting yaitu 14,9 persen (SKI, 2023), bumil KEK (10,7 persen), remaja putri dengan anemia (13,3 persen) dan obesitas pada balita (0,6 persen);
- Belum optimalnya akses dan mutu layanan kesehatan yang ditandai masih rendahnya rasio Puskesmas dan Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (3,43), masih rendahnya puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (37,8%) dan masih rendahnya Puskesmas dan Rumah sakit yang akreditasi
- Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan (DBD, TB, Malaria dll) dan masih tingginya angka kejadian penyakit tidak menular terutama hipertensi, diabetes, jantung dan paru serta meningkatnya gangguan kesehatan mental;
- Kurang optimalnya capaian pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi guna mencapai ***Population Immunity*** (Kekebalan Masyarakat).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih belum optimalnya kondisi jalan mantap provinsi, pada tahun 2024 capaian Provinsi Lampung sebesar 78,08% di bawah capaian Nasional sebesar 93,75%;
- Jalan Nasional/Kab/Kota (belum terintegrasi kelas jalannya hingga ke sentra produksi)
- Belum tercapainya target Nasional (100%) dan Provinsi Lampung (87,19%) terkait Air Minum layak 2024;
- Kondisi jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Lampung memiliki rata-rata kerusakan sebesar 37% (mulai 30% sampai dengan 70%) dengan luas areal layanan 17.440 Ha. Kerusakan ini mengakibatkan usia pakai jaringan irigasi semakin pendek dan mengganggu pengairan pertanian.
- Belum tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional dan pendataan septic tank ke BPBA serta belum optimalnya pengoperasian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kabupaten/kota.
- Terbatasnya kapasitas prasarana pengendali banjir serta menurunnya kapasitas tampung sungai berkontribusi pada bertambahnya daerah rawan banjir.

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

- Masih minimnya kualitas rumah dan Pelayanan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) pada kawasan kumuh di Provinsi Lampung seluas 465,85 Ha atau 23,66% dari total kawasan kumuh di Provinsi Lampung;
- Masih belum optimalnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang perumahan terkait lahan untuk perumahan bagi korban bencana 35,3% (TW 2 2024);
- Kurangnya dukungan atensi pemerintah pusat terhadap Provinsi Lampung, atensi pemerintah pusat terfokuskan terhadap PSN (Program Strategis Nasional);

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Tingkat radikalisme yang semakin tinggi berasal dari konten digital dan marak terjadi pada kelompok rentan (ibu-ibu, remaja, dan pelajar);

- Kasus konflik sosial di masyarakat pada tahun 2019-2023 terjadi 10 kasus) dan tingginya rasio kriminalitas (sebesar 121,59% di tahun 2023 dengan total kejadian kriminal sebanyak 11.194 kejadian);
- Belum optimalnya penegakan peraturan daerah terutama yang terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Perubahan iklim menyebabkan bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, longsor) yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam kehidupan masyarakat, serta menyebabkan erosi pantai/abrasi yang dapat merusak lingkungan pesisir.

6. Sosial

- Belum optimalnya penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena tidak sebanding dengan populasi PPKS dan sasaran penanganan;
- Kurangnya sinergi, kolaborasi, dan inovasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung Penanganan PPKS;
- Masih minimnya afirmasi dari dunia usaha kepada tenaga kerja PPKS yang telah diberdayakan;
- Belum maksimalnya upaya pemulihan kegiatan ekonomi yang berdampak pada perbaikan kualitas hidup keluarga miskin khususnya daerah rawan pangan, rawan bencana dan daerah Afirmasi 3TP;
- Kurangnya kesejahteraan terutama keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas; serta keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan disabilitas;
- Masih minimnya akses peningkatan kapasitas *care giver* lansia maupun keluarga lansia dalam mendampingi lansia terutama bagi lansia non potensial di komunitas maupun panti sosial, serta belum terintegrasinya upaya pemberdayaan dan pengembangan lansia dengan kegiatan ekonomi produktif.

7. Tenaga Kerja

- Tenaga kerja Provinsi Lampung Per Februari 2024 masih didominasi sektor informal sebesar 72,5%, sementara tenaga kerja sektor informal di Nasional sebesar 59,17% dan Sumatera sebesar 58,40%.

Selain itu, tenaga kerja disabilitas yang bekerja di sektor formal juga masih terbatas;

- Sektor pertanian masih menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Provinsi Lampung Per Februari 2024 sebesar 46,19%, sementara di Nasional sebesar 28,64% dan rata-rata Sumatera sebesar 34,02%;
- Mayoritas penduduk bekerja di Provinsi Lampung memiliki tingkat pendidikan rendah (SD ke bawah) Per Februari 2024 sebesar 37,03%, sementara Nasional sebesar 36,54% dan rata-rata Sumatera sebesar 32,23%;
- Kurangnya *link and match* kebutuhan pasar kerja lokal serta keterbatasan jenis pelatihan (tidak *update*) yang ada di BLK (hanya ada 4 BLK di Provinsi Lampung dengan *output* 320 orang per tahun). Selain itu, lulusan pelatihan di BLK masih kurang diminati pasar kerja karena tidak adanya sertifikasi kompetensi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih rendahnya perlindungan bagi perempuan dan anak, terlihat dari peningkatan jumlah kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD P2TP2A dalam kurun waktu 3 tahun dari 146 kasus (2020) menjadi 171 kasus (2023) yang didominasi kekerasan terhadap anak kemudian diikuti kekerasan terhadap perempuan;
- Ketimpangan gender di Provinsi Lampung tahun 2023 mencapai 0,43, meski lebih baik 0,01 point dari angka Nasional namun pada komposit keterlibatan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan menikmati hasil pembangunan belum mendapatkan porsi yang seimbang dengan laki-laki.

9. Pangan

- Turunnya laju pertumbuhan sub sektor tanaman pangan dari 2,31% (2022) menjadi -2,97% (2023); hortikultura dari 3,38% (2022) menjadi 1,66% (2023); dan peternakan dari 7,79% (2022) menjadi 7,01% (2023);
- Prevalensi ketidakcukupan pangan Provinsi Lampung cenderung fluktuatif (Tahun 2021 sebesar 10,25%, Tahun 2022 sebesar 14,63%,

dan Tahun 2023 sebesar 8,81%) dan lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,53% (Tahun 2023) namun lebih baik dari rata-rata Sumatera sebesar 9,86% (Tahun 2023);

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 92,4%, masih berada di bawah skor PPH Nasional sebesar 94,1% meskipun berada di atas rata-rata skor PPH Sumatera sebesar 90,14%.

10. Lingkungan Hidup

- Kualitas lingkungan hidup di Lampung masih perlu ditingkatkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung pada tahun 2024 berada pada kategori "BAIK" dengan nilai 73,11. Capaian IKLH Provinsi Lampung Tahun 2024 masih berada di bawah capaian IKLH Nasional Tahun 2024 yaitu sebesar 73,57 poin;
- Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 62,97 (kategori SEDANG) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu 38,49 (kategori KURANG) yang masih di bawah target.;
- Belum tersedianya TPST Regional dan minimnya lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) baik kuantitas maupun kualitas.

11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masih banyaknya masyarakat penduduk rentan administrasi kependudukan yang menempati wilayah tempat tinggal tidak sesuai dengan domisili sebagaimana data kependudukan;
- Minimnya pemanfaatan data kependudukan dalam pembangunan.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih rendahnya capaian desa mandiri yaitu sebesar 7,4 persen pada tahun 2023 dan berada di posisi terendah ke-5 se Sumatera;
- Revitalisasi BUMDes salah satu upaya untuk mengembalikan BUMDes sebagai badan usaha yang menghimpun, mewadahi dan mengembangkan potensi lokal desa. Dari total 2.446 BUMDes, sebanyak 1.000 BUMDes telah termasuk dalam kategori **maju** dan 500 BUMDes termasuk dalam kategori **mandiri** serta sisanya masih

perlu ditingkatkan kembali agar mampu mendukung pengembangan desa dan masyarakat desa;

- Masih tingginya persentase kemiskinan di pedesaan dibandingkan perkotaan (kemiskinan perdesaan sebesar 12,65% berbanding 8,02% untuk kemiskinan perkotaan tahun 2023);
- Migrasi penduduk dari desa ke kota yang berdampak negatif bagi desa, yaitu minimnya sumber daya manusia produktif dalam mengolah potensi lokal dan mengembangkan pembangunan desa.

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih tingginya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 tahun atau menikah di bawah umur (*Age Spesific Fertility Rate/ASFR*) sebesar 19,3 persen yang berakibat kurangnya kualitas bayi yang dilahirkan.

14. Perhubungan

- Konektivitas jaringan transportasi yang masih rendah untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dan kegiatan antar wilayah;
- Kondisi fasilitas dan simpul transportasi yang belum memadai seperti terminal, pelabuhan, dan bandara;
- Masih tingginya tingkat *Over Dimension Over Loaded* (ODOL);
- Belum ada transportasi massal perkotaan di Wilayah Aglomerasi Metropolitan Bandar Lampung;
- Belum terintegrasi pelabuhan panjang sebagai pelabuhan logistik dengan jalur kereta api.

15. Komunikasi dan Informatika

- Masih terbatasnya akses dan infrastruktur telekomunikasi dalam pengembangan SPBE;
- Kurangnya keamanan data dan privasi dalam adopsi SPBE.

16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Koperasi Simpan Pinjam masih mendominasi jumlah koperasi dan lebih diminati anggotanya. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas dan berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.

- Masih belum optimalnya pemasaran dan promosi produk UKM melalui media digital dan terkendalanya akses pasar.
- Terkendalanya akses pembiayaan dan permodalan bagi UKM.
- Hasil produksi UKM masih belum optimal (desain produk belum berbasis inovasi dan bahan baku belum sesuai standar) serta masih bergantung pada pekerja yang belum profesional.

17. Penanaman Modal

- ICOR Provinsi Lampung yang masih tinggi sebesar 7,46 (Tahun 2023) dibandingkan ICOR Nasional sebesar 6,33 (Tahun 2023);
- Kontribusi PMTB yang cenderung melambat (33,48% Tahun 2019 menjadi 32,33% Tahun 2023);
- Realisasi PMA dan PMDN cenderung melambat (Realisasi Investasi Tahun 2023 sebesar 10,8 atau tercapai sekitar 99% dari target);
- Terbatasnya proyek investasi yang *ready to offer* untuk ditawarkan pada investor

18. Kepemudaan dan Olahraga

- Masih rendahnya keikutsertaan pemuda dalam pembangunan atau kegiatan masyarakat (69,17%) serta masih banyaknya pemuda yang terlibat dalam masalah sosial;
- Masih rendahnya pemuda yang berwirausaha (0,4 %);
- Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, hal ini terlihat dari masih rendahnya persentase Atlet Pelajar Berprestasi ajang nasional (58,31%)
- Masih rendahnya budaya dan partisipasi masyarakat pada kegiatan olahraga, hal ini terlihat pada capaian persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir yang masih rendah (39,41%) .

19. Statistik

- Kurangnya keterbukaan informasi publik;
- Pemahaman terkait pengumpulan data sektoral melalui kegiatan statistik dan metadata statistik masih minim;
- Sebaran data sektoral masih belum sesuai prinsip satu data.

20. Kebudayaan

- Masih rendahnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan yang berada pada kategori “sedang” terutama dimensi ekonomi budaya yang masih rendah (27,77%) dan ekspresi budaya (26,14%);
- Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal yang menyebabkan terjadinya degradasi budaya lokal dalam lingkungan masyarakat.

21. Perpustakaan

- Masih rendahnya minat, gemar dan budaya membaca masyarakat, dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Lampung sebesar 55,9 persen atau kategori sedang;
- Masih rendahnya implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Digital dan Inklusi Sosial.

22. Kearsipan

- Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dinamis pada perangkat daerah serta masih terbatasnya SDM fungsional pengelola arsip.

23. Pariwisata

- Masih rendahnya kontribusi sektor penyediaan makan minum dalam PDRB Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 1,61% dibanding Nasional sebesar 2,52%;
- Masih rendahnya daya saing pariwisata Lampung di tingkat Nasional (Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan Tahun 2023 sebesar 13,4 Juta orang atau hanya 1,6% dari total wisatawan Nasional sebesar 825,8 juta orang);
- Kurangnya daya Tarik wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara (Rata-rata lama menginap tamu asing dan mancanegara Tahun 2023 adalah 1,46 hari, sementara di Nasional adalah 1,62 hari);
- Menurunnya tingkat penghunian kamar hotel berbintang dari 55,67% (Tahun 2022) menjadi 53,52% (Tahun 2023).

24. Pertanian

- Laju pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas) cenderung fluktuatif selama 5 tahun terakhir (Laju Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2023 sebesar 0,55 persen, menurun dibandingkan capaian 2019 sebesar 1,36 persen);
- Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung selama 10 tahun terakhir (Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 27,29 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 33,16 persen);
- Masih rendahnya Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung jika dibandingkan Sumatera dan Nasional (Tahun 2023 NTP Lampung 109,36; Sumatera 122,52; dan Nasional 112,46);
- Masih rendahnya nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dibanding Sumatera dan Nasional (Tahun 2023 sebesar Rp.61.626.262,3, Nasional Rp. 66.352.036,91 dan rata-rata Sumatera sebesar Rp. 96.897.736,88 per tenaga kerja);
- Sumber daya manusia pertanian didominasi oleh pendidikan dasar sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas hasil pertanian
- Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dan masih terdapat lahan yang tidak mendapatkan irigasi akibat supply air dari bendungan yang kurang ketika musim kemarau;
- Masih terbatasnya hilirisasi produk hasil pertanian dan masih rendahnya harga di tingkat petani;
- Terbatasnya akses permodalan di tingkat petani dan dukungan sarana prasarana pertanian (dalam arti luas);
- Mayoritas petani didominasi oleh petani gurem/lahan kurang dari 0,35 ha dan penggunaan teknologi pertanian yang masih terbatas;

25. Peternakan

- Produk peternakan belum dilengkapi sertifikasi agar bisa bersaing di nasional maupun global serta keterbatasan pengolahan peternakan;
- Harga pakan ternak yang cenderung tinggi mengakibatkan tingginya harga produksi;
- Keterbatasan permodalan karena mayoritas peternak masih didominasi peternak kecil;
- Investasi sektor peternakan masih sangat minim, hanya 0,24% di Tahun 2023 padahal potensi Lampung sangat besar;

- Laju pertumbuhan sektor peternakan menurun dari 7,51% (Tahun 2019) menjadi 7,01% (Tahun 2023).

26. Perkebunan

- Produktivitas sektor perkebunan masih rendah, khususnya kopi Lampung (0,7 ton/hektar) masih di bawah Sumatera Selatan (0,8 ton/hektar) bahkan Negara Brazil bisa mencapai 7-8 ton/hektar;
- Laju pertumbuhan sektor perkebunan menurun dari 2,79% (Tahun 2019) menjadi -3,14% (Tahun 2023);
- Masih terbatasnya SDM dan penggunaan teknologi perkebunan.

27. Kehutanan

- Degradasi hutan yang semakin tinggi, dengan banyaknya alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies flora dan fauna.
- Makin banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Kewenangan Provinsi yang dapat menyebabkan persoalan pengelolaan hutan diantaranya: deforestasi, konflik tenurial, tindak pidana kehutanan, dan pemicu kebakaran hutan dan lahan.
- Masih tingginya jumlah luasan lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman lingkungan.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Provinsi Lampung.

28. Energi dan Sumber Daya Mineral

- Lampung mengalami defisit kapasitas pembangkitan listrik, yang mengakibatkan ketidakstabilan pasokan listrik, dan ketergantungan pada interkoneksi wilayah Sumbagsel. Pasokan Pembangkit Listrik pada Januari 2024 sebesar 673,2 MW dengan beban puncak 1280,2 MW sehingga defisit sebesar 606,7 MW. kekurangan ini dipasok oleh Transfer P3BS Sumatera Selatan;
- Potensi energi listrik yang berasal dari panas bumi masih belum termanfaatkan secara maksimal dari 13 WK panas bumi baru 1 lokasi yang dapat dimanfaatkan di Ulu Belu;

- Masih rendahnya pembangunan jaringan gas sementara kebutuhan energi gas di Lampung mencapai sekitar 5% sampai Tahun 2023 pemasangan SR sebesar 17.156 dari target 100.000 (Tahun 2025 dalam Perda RUED).

29. Perdagangan

- Masih kurangnya kemitraan antar industri kecil menengah dengan perusahaan besar dan BUMN/BUMD;
- Meningkatnya andil inflasi bahan makanan terhadap capaian Inflasi Provinsi Lampung (andil inflasi bahan makanan tahun 2023 sebesar 2,74 persen, meningkat dibandingkan capaian 2022 sebesar 0,9 persen);
- Kerjasama antar daerah masih terbatas pada perdagangan komoditas pertanian yang bernilai tambah rendah.

30. Perindustrian

- Masih rendahnya nilai tambah sektor industri manufaktur dibanding Sumatera dan Nasional (Tahun 2023 Lampung sebesar Rp.5070 per kapita, Sumatera sebesar Rp.10.221 per kapita, dan Nasional sebesar Rp. 9.000 per kapita);
- Kinerja sektor perindustrian masih didominasi oleh industri makanan dan minuman (Tahun 2024 sebesar 16,14%), dengan kontribusi yang cenderung menurun selama 5 tahun terakhir dari 20% (Tahun 2019) menjadi 18,01% (Tahun 2023), berada di bawah capaian kontribusi industri pengolahan Nasional sebesar 18,67%;
- Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Tahun 2023 sebesar 1,40% sementara sebesar Nasional sebesar 4,64%;
- Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam penerapan standar mutu/kualitas produk (PIRT, BPOM, HALAL, HACCP), penggunaan teknologi, inovasi, diversifikasi produk dan pengemasan produk;
- Terbatasnya jumlah industri besar dan sedang.

31. Transmigrasi

- Perpindahan penduduk mengakibatkan pergeseran budaya dan sosial antara pendatang dan penduduk lokal bahkan berpotensi

menimbulkan konflik budaya, perbedaan adat istiadat, dan penolakan dari masyarakat setempat;

- Belum meratanya ketersediaan dan akses sarana prasarana dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah) di daerah transmigrasi yang berdampak pada kesulitan beradaptasi.

32. Kelautan dan Perikanan

- Kontribusi sub sektor perikanan cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir (kontribusi sub sektor perikanan tahun 2023 sebesar 5,26 persen, meningkat dari capaian tahun 2019 sebesar 2,40 persen);
- Laju pertumbuhan sub sektor perikanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir (laju pertumbuhan sub sektor perikanan tahun 2021 sebesar 0,91 persen, Tahun 2022 sebesar -5,34 persen dan Tahun 2023 sebesar 5,52 persen);
- Masih belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penggunaan alat tangkap ikan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan;
- Penggunaan lahan perikanan yang tidak sesuai menyebabkan kontaminasi sumber penyakit;
- Produksi kebutuhan pakan belum tercukupi meski sudah dilakukan kerjasama dengan universitas namun masih kekurangan bahan baku pembuatan pakan yang masih impor.

33. Perencanaan Pembangunan

- Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan yang masih belum optimal;
- Implementasi kebijakan satu data indonesia sebagai acuan perencanaan pembangunan di daerah masih belum memenuhi kriteria data yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data;
- Instrumen perencanaan seperti penjabaran kinerja (cascading, crosscutting, dan pohon kinerja) di tingkat perangkat daerah masih belum optimal digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

34. Keuangan

- Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah;
- Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dioptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat;
- Belum optimalnya sistem pengelolaan aset daerah.

35. Kepegawaian Serta Pendidikan Pelatihan

- Belum efektifnya layanan digitalisasi kepegawaian secara terpadu sebagai dasar peningkatan kompetensi ASN;
- Belum terintegrasinya sistem pembelajaran yang memadukan antara pekerjaan dengan pembelajaran ASN secara efisien dan efektif.

36. Penelitian dan Pengembangan

- Kurangnya kolaborasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang inovatif dan relevan, antara lembaga penelitian, universitas, dan instansi/lembaga swasta;
- Belum optimalnya peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Pengembangan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- Belum adanya penjamin kualitas riset dan inovasi dikarenakan belum optimalnya tim pengendali mutu.

37. Pengawasan

- Hasil Survei Penilaian Integritas Provinsi Lampung pada Tahun 2024 sebesar 65,83 masuk dalam kategori rentan, menurun sebanyak 2,61 poin dari hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 sebesar 68,44.
- Belum optimalnya tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern di Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Keterbatasan SDM APIP dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Lampung tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kondisi tahun 2024 serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional (global), nasional maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan Provinsi Lampung. Beberapa Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dirumuskan sebagai berikut:

Gambar Kerangka Berpikir Perumusan Isu Strategis Daerah



Tabel 2. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026

Tantangan/Isu Global	Tantangan Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029	Tantangan Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPJMD 2025 -2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2025
1. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan 2. Krisis Energi 3. Pemulihan Ekonomi pasca Covid-19 4. Perang dan Ketegangan Geopolitik 5. Isu Kesehatan Mental dan Kesejahteraan 6. Krisis Pengungsi dan Migrasi 7. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi 8. Transformasi Digital dan Keamanan Siber 9. Krisis Pangan Global	1. Rendahnya Produktivitas 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat 4. Kebutuhan Hidup Tingai pada Usia Produktif 5. Krisis Lingkungan 6. Dinamika Geopotitik dan Geoekonomi 7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Stagnasi Kinerja Sektor Industri 2. Penguatan Blue dan Green Economy untuk Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi 3. Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Pertanian berbasis Teknologi untuk Mencapai Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional 4. Potensi Ekosistem Ekonomi Desa 5. Pariwisata dan UMKM sebagai sektor pendorong perekonomian daerah 6. Ketahanan dan Kemandirian Energi 7. Penguatan Infrastruktur Transportasi untuk Konektivitas Wilayah yang Handal 8. Tingginya Proporsi Penduduk Usia Produktif Provinsi Lampung 9. Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi 10. Pelestarian Nilai Religi, Budaya	1. Aspek Pembangunan Ekonomi dan SDA • Masih rendahnya produktivitas dan hilirisasi pertanian berbasis teknologi • Stagnasi sektor industry (kontribusi PDRB sektor sekitar 18%) • Sektor Pariwisata dan UMKM belum signifikan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah • Rendahnya Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (5 tahun terakhir kontribusi PMTB cenderung turun) • Blue dan Green Economy belum optimal • Economy digital belum dimanfaatkan secara optimal	1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Kurang efektifnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi wilayah. 3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung 4. Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung 5. Belum optimalnya tata Kelola Pemerintahan untuk pelayanan publik. 6. Semakin menurunnya daya dukung dan daya tamping lingkungan untuk mendukung bpembangunan berkelanjutan.

Tantangan/Isu Global	Tantangan Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029	Tantangan Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPJMD 2025 -2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2025
		dan Nasionalisme sebagai Modal Sosial Pembangunan 11. Pengentasan Kemiskinan 12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 13. Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengembangan Wilayah Berkelanjutan 14. Masih Relatif tingginya Kerentanan dan Potensi Bencana di Provinsi Lampung 15. Mewujudkan Birokrasi yang Berintegritas 16. Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 17. Pembangunan Kota Baru “Bandar Negara” yang perlu dilanjutkan Berbasis Eco-City 18. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Terlantar	• Angka kemiskinan masih tinggi (maret 2024 sebesar 10,69%) 2. ASPEK PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL BUDAYA • Kurangnya Akses dan mutu Pendidikan serta Derajat Kesehatan Masyarakat • Belum maksimalnya perlindungan Sosial untuk kelompok rentan • Masih rendahnya jumlah pekerja formal (30,86% pada Agt 2024) • Masih terjadi konflik antar masyarakat akibat permasalahan ekonomi dan sosial 3. Aspek Tata Kelola Pemerintahan • Belum optimalnya Pelayanan Publik • Kompetensi dan integritas Aparatur	7. Tantangan untuk mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya.

Tantangan/Isu Global	Tantangan Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029	Tantangan Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPJMD 2025 -2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2025
			perlu ditingkatkan • Digitalisasi pemerintahan belum optimal 4. Aspek Pembangunan Infrastruktur Dan Kewilayahan • Kemantapan infrastruktur jalan belum merata • Jaringan Irigasi belum sepenuhnya mendukung swasembada pangan • Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan • Masalah persampahan	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, pembangunan daerah harus membuka kesempatan dan memperluas pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri, sehingga tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan aman; beriring dengan terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan dukungan perencanaan pembangunan wilayah yang memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional.

Memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui kebijakan yang bersifat inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju “Indonesia Emas 2045” serta sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029.

Kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan, transformasi digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, dengan

fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas, dan hilirisasi produk pertanian. Kebijakan ini dipadukan dengan pengembangan kawasan pesisir melalui pendekatan ekonomi biru guna mendorong Lampung sebagai pusat pertumbuhan pangan akuatik di kawasan barat Indonesia.

Dalam bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi mengalokasikan prioritas pada pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, irigasi pertanian, serta penyediaan energi terbarukan guna mendukung konektivitas antarwilayah dan efisiensi rantai pasok. Kebijakan ini didukung oleh peningkatan iklim investasi dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, sebagai bagian dari strategi untuk memperluas basis ekonomi lokal.

Selaras dengan prinsip pembangunan berkeadilan, kebijakan ekonomi tahun 2026 juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan menjadi kunci penguatan daya saing daerah, dengan dukungan sistem informasi pembangunan berbasis data statistik yang akurat dan real-time.

Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan partisipasi publik sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, arah kebijakan ekonomi Lampung tahun 2026 diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, mempersempit ketimpangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menyadari bahwa perekonomian Provinsi Lampung merupakan bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian dunia yang terbuka (globalisasi ekonomi), perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan keadaan perekonomian Nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam.

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Provinsi Lampung.

3.1.1 Dinamika Perekonomian Global

Ketidakpastian global diperkirakan masih tinggi dalam beberapa tahun ke depan, dipicu oleh fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, dan meningkatnya proteksionisme. Polarisasi ekonomi dunia, terutama akibat ketegangan perdagangan dan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, berpotensi menghambat perdagangan internasional dan investasi global. Risiko eskalasi perang dagang, seperti kenaikan tarif AS terhadap Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, pengenaan tarif atas produk baja dan aluminium yang masuk pasar AS, serta tarif resiprokal pada mitra dagang AS, juga dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan potensi inflasi dan menekan kinerja perdagangan internasional. Dampaknya eskalasi perang dagang juga dirasakan Indonesia, khususnya pada ekspor komoditas yang berpotensi menekan penerimaan negara dan menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Strategi *de-risking* dan *friendshoring* oleh Amerika Serikat dan mitra dagangnya turut mengubah pola perdagangan global, yang pada gilirannya juga memicu pergeseran aliran investasi dan perdagangan global. Percepatan inovasi digital dan adopsi teknologi baru juga mengubah lanskap industri, yang menuntut negara berkembang untuk beradaptasi guna mempertahankan daya saing. Tanpa penguatan industri berbasis teknologi dan peningkatan efisiensi produksi, Indonesia berisiko kehilangan daya saing di pasar global.

Tingkat suku bunga global yang masih relatif tinggi serta kembalinya sentimen *high for longer* di AS dapat memicu aliran modal keluar dan depresiasi nilai tukar di negara berkembang. Selanjutnya, hal tersebut dapat meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah dalam valuta asing dan menekan kondisi fiskal. Di sisi lain, kebutuhan menjaga imbal hasil yang kompetitif untuk menarik arus modal masuk dapat mengancam keberlanjutan fiskal akibat tingginya *cost of fund* pemerintah.

Konflik berkepanjangan di Ukraina dan Timur Tengah menambah ketidakpastian dengan meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan perdagangan. Gangguan pada rantai pasok energi dan pangan global

berpotensi memicu lonjakan inflasi, yang berdampak pada fluktuasi harga ekspor-impor dan tekanan nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sentimen negatif dari ketidakstabilan geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian dalam arus investasi global.

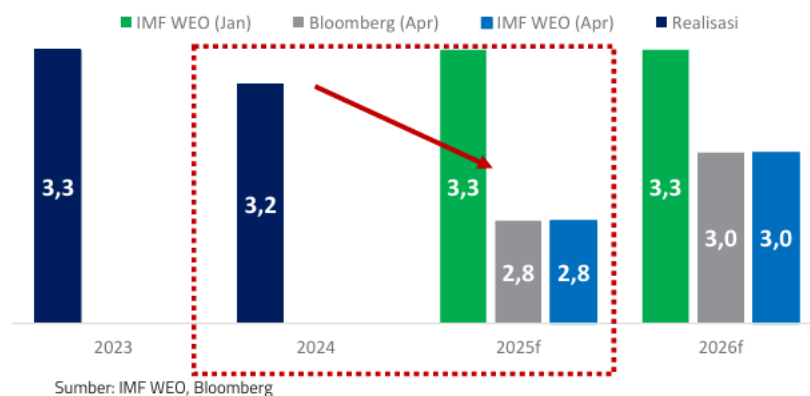
Pada saat yang sama, dunia saat ini sedang mengalami pergeseran geopolitik yang melemahkan sistem multilateral, sebagaimana tecermin dari kebijakan tarif impor agresif dari AS dan tindakan balasan dari Tiongkok. Dinamika ini mendorong bangkitnya proteksionisme serta intervensi negara yang lebih aktif dalam perekonomian. Institusi multilateral semakin kehilangan pengaruh, sementara kerja sama ekonomi global terus mengalami kemunduran. Pola kebijakan negara yang semakin inward looking, didorong oleh kepentingan geostrategis dan kebijakan proteksionis, memberikan tekanan besar terhadap rules based trade system yang selama ini menjadi landasan stabilitas ekonomi global.

Perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi ancaman serius bagi ekonomi global, dan terutama negara-negara yang secara geografis dekat dengan Tiongkok termasuk Indonesia. Sebagai salah satu kontributor signifikan manufaktur dan perdagangan dunia, moderasi pertumbuhan Tiongkok dapat menurunkan permintaan global dan berdampak signifikan pada ekspor negara mitranya. Bagi Indonesia, perlambatan ekonomi Tiongkok berisiko mengurangi permintaan ekspor khususnya komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Penurunan ekspor ini pada gilirannya akan menurunkan kinerja neraca perdagangan, menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dan dapat berdampak negatif pada penerimaan negara.

Sementara itu, perubahan iklim yang semakin ekstrem juga meningkatkan risiko ketahanan pangan dan energi global. Bencana alam akibat faktor iklim yang lebih sering terjadi dapat mengganggu produksi pertanian dan memicu volatilitas harga pangan internasional. Di sisi lain, transisi menuju energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon mengubah struktur permintaan energi dan komoditas mineral, sehingga menuntut negara-negara untuk mampu menyesuaikan diri dengan tren ini, apabila tidak ingin kehilangan daya saing di sektor ekspor energi dan bahan baku industri hijau.

Perekonomian global tahun 2026 diproyeksikan masih akan lemah. Dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,2 persen pada 2024 ke 2,8 persen di 2025 dan 3,0 persen di 2026. Angka ini turun cukup jauh dari proyeksi sebelumnya, masing-masing sebesar 0,5 poin persentase dan 0,3 poin persentase. Angka proyeksi pertumbuhan ini tetap di bawah rata-rata pertumbuhan global tahunan pada periode 2000–2019 sebesar 3,7 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi global ini dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen.

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global, 2023 - 2026 (% , yoy)



3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Gejolak perekonomian global yang bergerak sangat dinamis berdampak pada kinerja perekonomian domestik yang terefleksi pada perlambatan kinerja ekspor-impor, terganggunya investasi, tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Indonesia saat ini juga masih menghadapi tantangan struktural yang membutuhkan respons secara tepat, terukur dan konsisten yaitu: (1) Bonus demografi yang semakin terbatas; (2) Pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital (artificial intelligence/AI) dan perkembangan teknologi yang sangat cepat; (3) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang masih perlu ditingkatkan; serta (4) Perubahan iklim yang semakin ekstrem sehingga perlu diantisipasi dan dimitigasi.

Hal ini tentunya harus diantisipasi dan dimitigasi baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dengan strategi yang tepat. Dalam jangka

pendek difokuskan untuk meredam gejolak melalui upaya stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga agar APBN tetap sehat dan kredibel. Sementara, strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi reformasi struktural untuk memperkuat daya saing dan daya tahan ekonomi menuju Indonesia yang berdaulat, tangguh, mandiri, dan sejahtera. Eskalasi perang dagang yang tengah terjadi juga menjadi momentum untuk berbenah, untuk penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi. Upaya tersebut antara lain dengan membangun kerja sama dan kolaborasi antarnegara yang lebih solid di bidang perdagangan, investasi, dan ketenagakerjaan, sehingga terbangun pola kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan dalam koridor kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa tetap menjadi yang utama.

Kerja sama dengan LKI selama ini telah memberikan dukungan yang signifikan bagi Indonesia. Diantaranya dengan World Bank Group (WBG) yang memberikan dukungan finansial untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia serta peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah juga telah melakukan kerja sama dengan mitra strategis lainnya seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). ADB mendukung pembangunan di Indonesia melalui pinjaman dan hibah aktif untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. IsDB bekerja sama dengan Indonesia berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang krusial seperti pertanian, keamanan pangan, dan pembangunan pedesaan, yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial di daerah-daerah terpencil. AIIB memberikan dukungan finansial pada proyek proyek infrastruktur, kesehatan, dan respons krisis yang membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan lokal.

Pemerintah menyadari bahwa dalam menangani isu-isu global yang semakin kompleks, dibutuhkan penguatan kerja sama untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan beberapa negara dan organisasi internasional. Hal ini juga yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota BRICS pada awal 2025. Indonesia saat ini sedang dalam proses akses menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). OECD merupakan forum internasional yang terdiri dari negara negara maju dengan komitmen untuk mendorong

kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

Mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, tema RKP Tahun 2026 adalah "***Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif***". Dalam rangka mendukung pencapaian tema *tersebut*, pemerintah menetapkan **5 Direktif Presiden** sebagai panduan strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan program prioritas nasional tahun 2026 dan Pengarusutamaan Pembangunan dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2026. Kelima direktif tersebut mencerminkan fokus pemerintah terhadap penguatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut :

1. **Penguatan Ekonomi Lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.**

Pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis desa dan kelurahan. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperluas lapangan kerja berbasis potensi lokal.

2. **Penerapan Digitalisasi Pendidikan**

Digitalisasi sektor pendidikan menjadi prioritas strategis dalam rangka peningkatan mutu dan akses pendidikan nasional. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat proses belajar-mengajar, pemerataan layanan pendidikan, serta percepatan transformasi sistem pendidikan nasional.

3. **Pengentasan Kemiskinan melalui Perlindungan Sosial**

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui penguatan program perlindungan sosial berbasis **Kartu Kesejahteraan** dan **Kartu Usaha Afirmatif**. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, serta mendorong mobilitas sosial yang inklusif.

4. **Pengelolaan Sampah Terpadu**

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan terpadu dalam pengelolaan sampah mencakup pengurangan, pemilahan, daur ulang, serta pengolahan sampah yang ramah lingkungan guna mendukung kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

5. Sekolah Rakyat

Dalam upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu, pemerintah merancang program “Sekolah Rakyat” sebagai wadah pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu. Fasilitas pendidikan ini ditujukan untuk memperkecil kesenjangan akses dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pendidikan.

Pengarusutamaan Pembangunan dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2026 yang menjadi bagian integral dari kerangka perencanaan nasional, sebagai berikut:

1. Gender dan Inklusi Sosial

Pemerintah menargetkan peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup, serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Selain itu, inklusivitas bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas menjadi perhatian utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan setara.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pelaksanaan agenda SDGs diperkuat melalui integrasi ke dalam proses perencanaan, pelaporan, dan penganggaran pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan, guna menjamin pencapaian target pembangunan global secara sistematis dan terukur.

3. Transformasi Digital

Transformasi digital diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur TIK, memperluas pelayanan publik berbasis digital, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi prioritas dalam mendukung komitmen nasional terhadap perubahan iklim. Kebijakan pembangunan rendah karbon akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan sektoral dan wilayah.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pemerintah berupaya meminimalkan dampak ekonomi dari perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan pada empat sektor utama: kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta melindungi masyarakat dari risiko iklim yang meningkat.

Untuk mendukung pencapaian tema pembangunan nasional tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah target makro yang menjadi ukuran capaian pembangunan nasional, yang dikelompokkan ke dalam tiga sasaran utama:

Tabel 3. 1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

No.	Sasaran Pembangunan Nasional	Target 2026
1.	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3
	<i>GNI per capita (USD)</i>	5.870
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14
	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	76,67
2.	Penurunan Kemiskinan	
	Kemiskinan Ekstrem (%)	0
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
	Rasio Gini (Nilai)	0,377 – 0,380
3.	Sumber Daya Manusia Berkualitas	
	Indek Modal Manusia (Nilai)	0,57

Sumber : Ranwal RKP 2026, Kementerian PPN/Bappenas- Maret 2025.

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan sejumlah **asumsi dasar makro ekonomi** yang merepresentasikan kondisi ekonomi nasional dan global yang diproyeksikan akan memengaruhi pelaksanaan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional.

Asumsi-asumsi tersebut disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian domestik, ketidakpastian global, serta arah kebijakan transformasi struktural yang tengah berjalan. Berikut adalah rincian asumsi makroekonomi Tahun 2026:

Tabel 3. 2 Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

No.	Indikator	Sasaran 2026 (KEM-PPKF)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8
2.	Inflasi (%)	1,5 – 3,5
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500 – 16.900
4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6 – 7,2
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) (USD/barel)	60 – 80
6.	Lifting Minyak Mentah (rbph)	600 – 605
7.	Lifting Gas Bumi (mmscfd)	953 – 1.017

*) KEM-PPKF : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Sumber : Kementerian Keuangan, 2025

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Kinerja ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,57 persen (ctc), menunjukkan sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,55 persen (ctc). Pertumbuhan ini mencerminkan konsistensi positif dalam pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2024 masih berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen (ctc). Ketimpangan ini menandakan perlunya optimalisasi sektor-sektor strategis di daerah, termasuk peningkatan nilai tambah produk unggulan, penguatan iklim investasi, serta akselerasi transformasi digital dan infrastruktur.

Secara struktural, perekonomian Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 26,21 persen terhadap PDRB. Namun, sektor ini mengalami kontraksi sebesar -2,09 persen, menandakan tekanan produksi yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem dan gangguan iklim.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan justru menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2024. Dengan kontribusi sebesar 18,93 persen, sektor ini mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 9,09 persen

dan menyumbang sekitar 1,60 poin pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi komoditas pertanian dan perkebunan mulai menunjukkan hasil signifikan dalam meningkatkan nilai tambah daerah.

Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, turut memberikan kontribusi yang kuat dengan porsi 14,25 persen terhadap PDRB dan kontribusi pertumbuhan sekitar 1,03 poin. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 10,04 persen, sejalan dengan peningkatan aktivitas distribusi dan konektivitas wilayah.

Tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (yoy), mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada level 2,61 persen. Penurunan inflasi ini menunjukkan efektivitas koordinasi pengendalian harga di tingkat daerah, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan dan musim panen raya. Inflasi Lampung pada tahun 2024 sejajar dengan inflasi nasional yang juga berada pada level 1,57 persen (yoy). Ini merupakan capaian yang relatif stabil dalam konteks tekanan harga pangan global dan fluktuasi nilai tukar. Sebagai provinsi lumbung pangan, pengendalian distribusi dan pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, dan telur ayam ras menjadi kunci keberhasilan stabilitas harga.

Dalam aspek Pembangunan Manusia, Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2024, IPM Lampung mencapai 73,13, naik dari 72,48 di tahun 2023. Pertumbuhan sebesar 0,65 poin ini memperkuat posisi Lampung dalam kategori IPM “tinggi”, sebagaimana telah dicapai sejak tahun 2022. Meskipun demikian, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional maupun regional Sumatera. Hal ini menjadi catatan penting untuk terus memperkuat program-program yang menysasar kelompok rentan, memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan layanan kesehatan primer, dan membuka peluang ekonomi yang lebih merata hingga ke desa-desa.

Angka kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase

penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,62 persen di tahun 2019 menjadi 10,69 persen di Tahun 2024, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,03 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif selama enam tahun terakhir, mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani secara gradual. Pada tahun 2024, NTP Lampung tercatat sebesar 124,98, melampaui NTP nasional yang berada di angka 119,62. Capaian ini mengindikasikan bahwa petani di Lampung mengalami perbaikan daya beli dan pendapatan riil yang lebih tinggi dibandingkan rerata petani secara nasional. Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung se Sumatera berada pada posisi ke 6 (enam) dengan nilai 124,98, NTP tertinggi ada di Provinsi Bengkulu dengan nilai 181,9. Riau 173,22 , Jambi 156,34, Sumatera Utara 136,23 dan Kep Bangka Belitung 134,8. NTP terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 1104,81 . Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada tahun 2023 berada pada posisi ke 8 sebesar 109,36, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada NTP Provinsi Lampung yakni sebesar 15,62 poin .

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Lampung Tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,2 - 5,7 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 - 3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Lampung. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,9 – 8,9 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,05 - 3,51 persen. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,290 - 0,274 di Tahun 2026.

Tabel 3. 1 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Daerah Lampung Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Proyeksi 2026*)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20 – 5,70
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,05 - 3,51

3.	Persentase Penduduk Miskin	%	9,9 – 8,9
4.	Rasio Gini	Rasio	0,290 – 0,274
5.	Intensitas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	64,03

**) Target sesuai dengan hasil pembahasan pada Rakortek dengan Bappenas RI*

Pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 diarahkan dengan tema Pembangunan : **“Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Arah kebijakan perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2026 merupakan bagian dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif
- b. Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan produktif
- c. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas

Upaya memperkuat perekonomian Lampung dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai sehubungan dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Membangun Ekosistem ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.**

Provinsi Lampung memegang keyakinan bahwa kekuatan pembangunan ekonomi daerah terletak di akar rumput—di desa-desa yang menjadi tulang punggung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan lebih dari 70 persen wilayahnya merupakan kawasan pedesaan, Lampung menjadikan desa sebagai episentrum pertumbuhan yang harus diberdayakan, disambungkan, dan dinaikkan kelasnya. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Lampung tahun 2025–2026 dan ke depan diarahkan untuk membentuk **ekosistem desa yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing dalam jaringan ekonomi yang lebih luas.**

2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah.

Upaya meningkatkan fundamental ekonomi masih menghadapi tantangan. Kapasitas perkonomian yang diharapkan tumbuh tinggi mengalami kendala output potensialnya. Sumber-sumber potensial perekonomian Provinsi Lampung belum didukung ketersediaan dan pemerataan infrastruktur maupun kualitas SDM. Untuk mencapai kapasitas ekonomi yang optimal, struktur perekonomian perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan berusaha dan akses sumber-sumber pendanaan serta infrastruktur kewilayahan yang baik dan penguasaan teknologi.

3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat

Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Namun satu hal yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran.

4) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan.

Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki kompleksitas yang tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya

daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik *full employment*. Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan, akan semakin banyak penduduk yang memiliki penghasilan; pada keadaan tersebut secara kuantitatif diharapkan dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Lebih lanjut, produktifitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan, yang diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah pekerja formal dan keseimbangan demand dan supply di pasar kerja.

5) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil

Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja serta ketersediaan barang dengan tingkat harga yang wajar. Kestabilan ekonomi yang diharapkan adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat *booming* namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.

6) Pemerataan distribusi pendapatan

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (*equality of income*).

Berbagai dinamika global dan nasional saat ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir masih memerlukan upaya-upaya percepatan menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi daerah yang tersedia, Untuk mewujudkan target pembangunan daerah, diperlukan kerja keras disertai pilihan-pilihan **kebijakan strategis** dalam mengatasi tantangan yang tengah berlangsung, diantaranya :

1. Menjaga permintaan domestik di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan tingginya harga akibat kenaikan laju inflasi.
2. Progress hilirisasi SDA unggulan Lampung (kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan aneka ikan) perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.

3. Mendorong investasi swasta dengan memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan, meningkatkan jaringan investasi global/domestik, monitoring dan evaluasi PSN secara berkala, penyelesaian debottlenecking kendala proyek agar dapat berubah status menjadi proyek *clean and clear*, serta sinergi *calender of event* promosi investasi dan perdagangan antar instansi dan mendorong penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS).
4. Inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peran fiskal daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi Lampung. Inovasi melalui digitalisasi dan pendekatan baru (a.l melalui *behaviorally informed policy intervention*) guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap menjaga iklim investasi.
5. Penguatan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa, di antaranya melalui peningkatan frekuensi belanja di E-Katalog lokal dan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di E-Katalog (1000 UMK/Pemda).
6. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan mengoptimalkan fasilitasi pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
7. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dan diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara serta

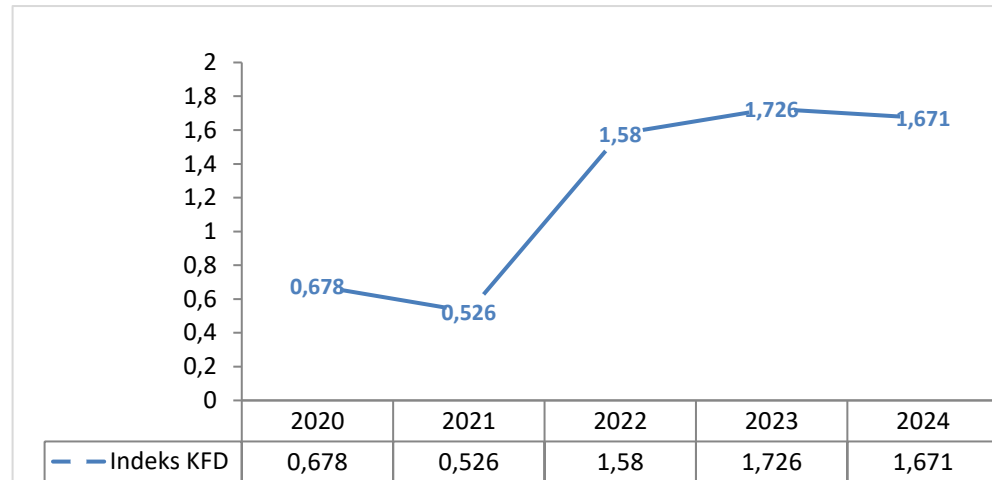
merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi dan saling terkait secara hukum. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan daerah, kebijakan keuangan daerah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Lampung 2025–2029, yaitu: **“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”**. Visi ini diterjemahkan ke dalam kebijakan keuangan yang berpihak pada rakyat, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah yang disebut Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Grafik 3.2 Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung
Tahun 2020-2024



Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020-2024

Pada tahun 2020, rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung sebesar 0,678 dalam Kategori Sedang. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan kapasitas fiskal menjadi 0,526, yang masih berada dalam kategori sangat rendah. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan drastis dalam kapasitas fiskal daerah menjadi 1,58 yang menempatkan Lampung dalam kategori rendah. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penerimaan daerah, baik dari PAD maupun dana transfer. Tren peningkatan berlanjut sampai tahun 2023 sebesar 1,726 dalam Kategori Sedang, walaupun pada tahun 2024 Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) mengalami sedikit penurunan menjadi 1,671, tetapi masih dalam Kategori Sedang. Meskipun terjadi sedikit penurunan, angka ini tetap menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan mampu membiayai kebutuhan pembangunan dengan tingkat kemandirian yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tren Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama setelah tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Ke depan, diperlukan

strategi yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan.

Kebijakan keuangan daerah 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan; memastikan belanja daerah digunakan secara efisien dan efektif untuk pelayanan publik yang berkualitas; dan mendorong pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan antardaerah.

Dengan demikian, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Provinsi Lampung tahun 2026 akan difokuskan pada:

1. Mobilisasi pendapatan daerah yang terukur dan realistis dengan tetap menjaga daya beli masyarakat;
2. Belanja daerah yang berkualitas dan berorientasi pada hasil (outcome based budgeting), terutama dalam pemulihan ekonomi pasca-COVID-19, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
3. Pengelolaan pembiayaan daerah yang cermat, produktif, dan berkelanjutan;
4. Sinkronisasi antara kebijakan perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (R-APBD) guna memastikan efisiensi kebijakan publik dan pencapaian sasaran pembangunan prioritas daerah maupun nasional

Dengan arah kebijakan tersebut, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi alat untuk pengendalian fiskal, tetapi juga sebagai pendorong utama tercapainya kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari tiga

komponen utama, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan kapasitas pendapatan daerah, khususnya dari sektor PAD dan pendapatan transfer, dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendapatan daerah harus dirancang secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dan dilandasi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta mendukung pencapaian visi Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak dan penerapan teknologi informasi (e-tax system). Penyesuaian regulasi daerah terkait tarif dan jenis retribusi agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal dan potensi yang dimiliki. Mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif dan legal untuk menghasilkan pendapatan tambahan, termasuk melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Peningkatan peran BUMD sebagai penyumbang pendapatan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan model bisnis.

2. Peningkatan Kualitas Pendapatan Transfer

Mengoptimalkan penerimaan dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui pemenuhan indikator kinerja dan kelengkapan dokumen perencanaan. Memperkuat sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan fiskal nasional memberikan nilai tambah langsung bagi pendapatan daerah. Mendorong kinerja fiskal daerah agar memenuhi syarat penerimaan Dana Insentif Fiskal dan dana tambahan lainnya.

3. Pengembangan Sumber Pendapatan Alternatif

Meningkatkan kapasitas penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti pendapatan dari hibah, bantuan keuangan, kerja sama pemerintah-swasta, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Mendorong pelibatan CSR dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor sosial, pendidikan, dan lingkungan.

4. Peningkatan Ketahanan Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Pajak Daerah

Melanjutkan implementasi kebijakan opsen pajak provinsi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sinkronisasi sistem pemungutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah duplikasi dan menurunkan biaya kepatuhan masyarakat.

Momentum pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang mulai terasa sejak tahun 2022, dan diperkirakan terus membaik hingga tahun 2026, menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Lampung pada periode 2021–2023 menunjukkan tren positif, meskipun sempat mengalami tekanan pada tahun 2022 akibat pandemi dan perubahan kebijakan penyaluran dana BOS yang mengalihkan sebagian besar dana ke kabupaten/kota.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta reformasi fiskal nasional yang mendukung desentralisasi fiskal, maka pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 diharapkan dapat tumbuh secara sehat, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kinerja pelaksanaan APBD 2024 dari sisi Pendapatan. **Pendapatan Daerah**, realisasi pendapatan daerah selama periode 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan persentase pencapaian berkisar antara 86,33% hingga 98,87% dari target yang ditetapkan. Tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan mengingat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup tinggi. Efektivitas penggalan sumber pendapatan daerah terlihat dari capaian realisasi yang relatif tinggi, meskipun

pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan dalam persentase realisasi (86,33%). Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan fiskal, perlambatan ekonomi, atau tantangan dalam optimalisasi PAD (Tabel XXX).

**Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2022-2024**

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	6.958.447.624.498,40	7.097.803.289.872,31	7.451.586.834.830,78
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.678.122.084.867,40	3.779.539.366.740,31	4.039.218.171.476,78
4.1.01	Pajak Daerah	3.126.137.885.658,00	3.232.821.385.715,00	3.301.063.910.591,76
4.1.02	Retribusi Daerah	6.602.045.154,00	7.066.246.737,00	485.949.536.889,25
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.568.658.794,74	51.110.035.229,39	193.520.241.461,01
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	499.813.495.260,66	488.541.699.058,92	58.684.482.534,76
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.240.611.684.323,00	3.307.347.162.132,00	3.401.546.333.354,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.225.777.269.427,00	3.307.347.162.132,00	3.375.379.510.190,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.834.414.896,00	-	26.166.823.164,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.713.855.308,00	10.916.761.000,00	10.822.330.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	39.713.855.308,00	3.962.951.000,00	10.822.330.000,00

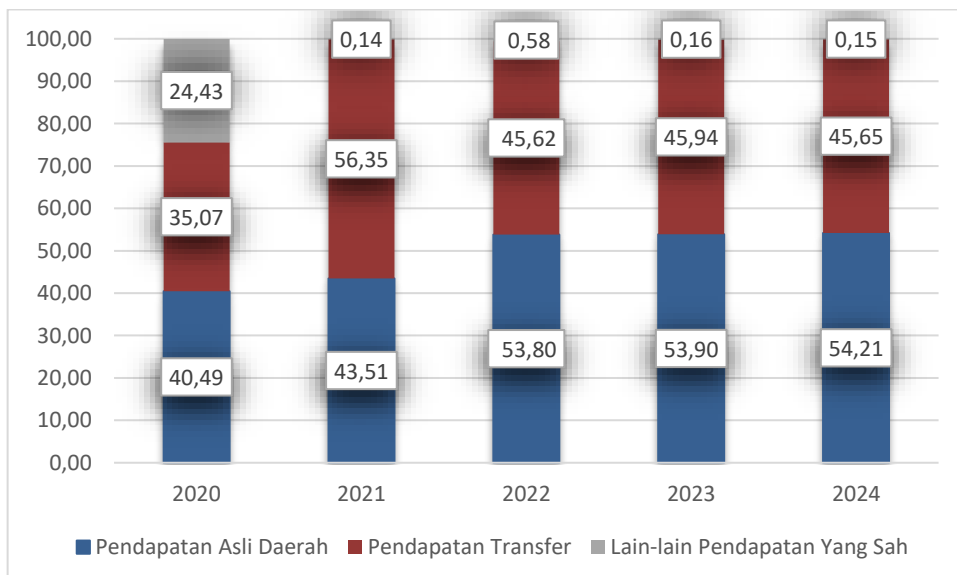
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2022-2024(Audited)

Tren persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Gambar xxxx), dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dengan tetap menjadimayoritas komponen pembentuk pendapatan daerah. Hal tersebutmenunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Lampung sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

Perkembangan proporsi pendapatan daerah Provinsi Lampung selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya perubahan dalam komposisi sumber pendapatan, khususnya antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari 40,49% pada Tahun 2020 menjadi 54,21% di Tahun 2024, menunjukkan upaya optimalisasi penerimaan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal.Pendapatan Transfer menurun dari 56,35% pada tahun 2021 menjadi 45,65% di tahun 2024, menandakan berkurangnya ketergantungan terhadap dana pusat seiring dengan peningkatan PAD.Lain-lain Pendapatan yang Sah tetap kecil (0,14%-0,58%) dan belum menjadi sumber signifikan bagi keuangan daerah.

Gambar 3.3 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 (Audited)

Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan perbaikan dalam kemandirian fiskal daerah Provinsi Lampung, meskipun perlu terus didorong inovasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar pendapatan daerah lebih stabil dan berkelanjutan.

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,2 – 5,7 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2022-2024, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 diproyeksikan sebesar 6,804 Triliun rupiah.

Tabel 3. 5 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)	APBD 2025	Proyeksi RKPD 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	6.958.447.624.498,40	7.097.803.289.872,31	7.451.586.834.830,78	7.557.909.717.848,21	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.678.122.084.867,40	3.779.539.366.740,31	4.039.218.171.476,78	4.020.052.532.113,21	
4.1.01	Pajak Daerah	3.126.137.885.658,00	3.232.821.385.715,00	3.301.063.910.591,76	2.921.136.897.166,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	6.602.045.154,00	7.066.246.737,00	485.949.536.889,25	450.121.878.920,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.568.658.794,74	51.110.035.229,39	193.520.241.461,01	316.148.941.374,21	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	499.813.495.260,66	488.541.699.058,92	58.684.482.534,76	332.644.814.653,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.240.611.684.323,00	3.307.347.162.132,00	3.401.546.333.354,00	3.524.066.287.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.225.777.269.427,00	3.307.347.162.132,00	3.375.379.510.190,00	3.489.381.614.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.834.414.896,00	-	26.166.823.164,00	34.684.673.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.713.855.308,00	10.916.761.000,00	10.822.330.000,00	13.790.898.735,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	39.713.855.308,00	3.962.951.000,00	10.822.330.000,00	13.790.898.735,00	

Sumber : Bapenda Provinsi Lampung, 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pencapaian prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan data realisasi belanja daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan total belanja daerah yang cukup konsisten. Total belanja daerah tercatat sebesar Rp6,78 triliun pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp7,05 triliun pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi Rp7,51 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperluas cakupan layanan publik dan memperkuat pemulihan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, struktur belanja daerah Provinsi Lampung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan pada belanja yang bersifat operasional dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan belanja ke depan perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan, guna memastikan efektivitas APBD dalam mendorong pencapaian visi pembangunan daerah yaitu **"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"**, serta mendukung prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2026.

**Tabel 3. 6 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2022 - 2024**

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)
5	BELANJA DAERAH	6.911.597.640.054,94	7.048.993.246.382	7.506.810.403.825
5.1	BELANJA OPERASI	4.533.082.558.484,61	4.628.237.542.976	5.164.775.276.916
5.1.01	Belanja Pegawai	1.970.972.929.853,00	2.066.144.093.644	2.386.292.035.527
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.816.562.339.989,79	1.972.392.255.140	1.978.510.550.970
5.1.03	Belanja Bunga	12.829.045.899,00	3.112.977.135	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	2.800.000.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	712.329.197.992,82	570.388.618.057	797.803.865.119
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.389.044.750,00	13.399.599.000	2.168.825.300
5.2	BELANJA MODAL	1.025.176.634.169,33	1.207.289.357.587	797.024.095.018
5.2.01	Belanja Modal Tanah		1.209.400.000	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.633.889.873,25	152.608.643.054	119.206.756.912
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	284.350.079.189,95	280.952.181.006	219.628.388.605
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	481.854.158.305,13	743.100.436.419	435.067.370.012
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.338.506.801,00	29.418.697.108	22.806.679.489
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	314.900.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	223.500.000,00	2.794.882.500	1.077.864.999
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	223.500.000,00	2.794.882.500	1.077.864.999
5.4	BELANJA TRANSFER	1.353.114.947.401,00	1.210.671.463.319	1.543.933.166.892
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.353.014.947.401,00	1.210.671.463.319	1.543.933.166.892
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.000.000,00	-	-

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2025

Dalam rangka menghadapi adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah; Pemerintah daerah juga konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas (*money follow program*) dengan pendekatan berbasis kinerja; yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian proritas daerah dan nasional.

Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 adalah **“Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 7 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi; 2) Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi; 3) Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif; 4) Pengentasan Kemiskinan; 5) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas; 6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan; 7) Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya.

Selanjutnya, teknis pembahasan dan penyusunan proyeksi Belanja Daerah tahun 2026 dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

- Proyeksi Belanja Daerah didasari dari perhitungan proyeksi pendapatan daerah, terdiri dari : belanja pegawai diproyeksi berdasarkan perhitungan gaji pegawai beserta tunjangan pegawai ; belanja bunga diproyeksi berdasarkan perhitungan bunga pinjaman terhadap pokok utang Provinsi Lampung; Belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diproyeksikan berdasarkan perhitungan pendapatan asli daerah; Belanja tidak terduga diperhitungkan untuk mengampu belanja standar pelayanan minimal.

- Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan.
- Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
- Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.

Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah juga dipaduserasikan dengan hasil pembahasan usulan Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)	APBD 2025	Proyeksi RKPD 2026
5	BELANJA DAERAH	6.911.597.640.055	7.048.993.246.382	7.506.810.403.825	7.632.909.517.648,21	
5.1	BELANJA OPERASI	4.533.082.558.485	4.628.237.542.976	5.164.775.276.916	5.203.967.155.913,75	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.970.972.929.853	2.066.144.093.644	2.386.292.035.527	2.916.687.302.416,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.816.562.339.990	1.972.392.255.140	1.978.510.550.970	1.897.854.129.785,63	
5.1.03	Belanja Bunga	12.829.045.899	3.112.977.135	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	2.800.000.000	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	712.329.197.993	570.388.618.057	797.803.865.119	385.958.861.512,62	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.389.044.750	13.399.599.000	2.168.825.300	3.466.862.199,50	
5.2	BELANJA MODAL	1.025.176.634.169	1.207.289.357.587	797.024.095.018	980.196.729.933,19	
5.2.01	Belanja Modal Tanah		1.209.400.000	-		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.633.889.873	152.608.643.054	119.206.756.912	166.534.644.600,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	284.350.079.190	280.952.181.006	219.628.388.605	122.340.756.701,75	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	481.854.158.305	743.100.436.419	435.067.370.012	666.545.451.791,44	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.338.506.801	29.418.697.108	22.806.679.489	23.932.604.640,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	-	314.900.000	843.272.200,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	223.500.000	2.794.882.500	1.077.864.999	42.472.500.000,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	223.500.000	2.794.882.500	1.077.864.999	42.472.500.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	1.353.114.947.401	1.210.671.463.319	1.543.933.166.892	1.406.273.131.801,27	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.353.014.947.401	1.210.671.463.319	1.543.933.166.892	1.405.273.131.801,27	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.000.000	-	-	1.000.000.000,00	

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berdampak pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Oleh karenanya, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada dukungan terciptanya anggaran yang berimbang (*zero deficit*),

Tabel 3. 2 Realisasi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2022-2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	383,279,770,163.01	292,676,358,793.37	125.120.850.614,70
6.1.01	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	141,176,332,704.00	105,882,243,536.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	242,103,437,459.01	186,794,115,257.37	125.120.850.614,70

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2025

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022-2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, akan dimanfaatkan secara efisien bagi kegiatan yang lebih bernilai ekonomis serta melakukan rencana pinjaman daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan

modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah, Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Lampung adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaan modal investor daerah;
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan, Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya;

Secara rinci, data historis realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Proyeksi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Proyeksi RKPD 2026 (Rp)
6	Pembiayaan Daerah					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	383.279.770.163,01	292.676.358.793	125.120.850.614,70	75.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	383.279.770.163,01	292.676.358.793	125.120.850.614,70	75.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	141.176.332.704,00	105.882.243.536			
6.2.02	Penyertaan Modal	0,00				
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	141.176.332.704,00	105.882.243.536			
	PEMBIAYAAN NETTO	242.103.437.459,01	186.794.115.257,00	125.120.850.614,70	75.000.000.000,00	

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2025

3.2.2 Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Lampung, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel XXX Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Lampung Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	DK/TP	PAGU
1	Bappeda Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	1.400.615.000,00
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	85.000.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	3.019.961.000,00
4	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	3.376.000.000,00
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	517.261.000,00
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	359.628.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	2.667.240.000,00
8	Inspektorat Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	148.316.000,00
9	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	1.720.675.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	369.040.000,00
Total Dekonsentrasi			13.663.736.000,00
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	1.264.393.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	283.173.331.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	145.111.000,00
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	181.297.000,00
5	Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	1.063.430.000,00
6	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	2.023.765.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	21.940.743.000,00
8	Dinas Cipta Karya Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	29.518.616.000,00
Total Tugas Pembantuan			339.310.686.000,00
Total APBN			352.974.422.000,00

Sumber : Bappeda, 2025

Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera memiliki potensi besar dalam pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal daerah sering kali menjadi tantangan utama dalam merealisasikan proyek infrastruktur berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan alternatif selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan skema pembiayaan kreatif di luar APBD dalam pembangunan infrastruktur melalui kemitraan Publik-Swasta (KPS) dan pembiayaan/ hibah dari lembaga-lembaga Internasional ((World Bank, dll). antara lain:

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi perkotaan. Pemanfaatan skema KPBU memungkinkan proyek dibiayai oleh swasta, sementara pemerintah daerah tetap mengawasi keberlangsungan dan manfaat sosialnya.
2. Penerbitan Obligasi Daerah, Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti jalan tol dan kawasan industri.
3. Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Filantropi, Meningkatkan sinergi dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk mendukung proyek infrastruktur berbasis kepentingan sosial dan ekonomi.
4. Pinjaman Daerah dengan Mekanisme yang Terkelola dengan Baik, Mengakses pinjaman dari Lembaga Keuangan seperti PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) atau Lembaga Keuangan Lainnya dan Bank Pembangunan Daerah dengan skema yang berkelanjutan.
5. Sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meningkatkan peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur energi, air bersih, dan transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Skema LVC (Land Value Capture) Pendekatan pembiayaan pembangunan yang menangkap kenaikan nilai lahan akibat pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Contohnya, pemerintah mengenakan kontribusi pada pengembang properti yang diuntungkan oleh pembangunan jalan atau transportasi publik.
7. Pembiayaan hijau (green finance). Pendanaan yang diarahkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan melalui Carbon trade: Mekanisme jual-beli kredit karbon antara pihak yang menghasilkan emisi lebih rendah dan yang menghasilkan emisi lebih tinggi

Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur harus selaras dengan visi dan misi Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung serta strategi kebijakan pembangunan nasional, termasuk mendukung agenda peningkatan konektivitas, pembangunan ekonomi daerah, serta percepatan investasi. Dengan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan alternatif, diharapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung dapat lebih cepat terealisasi tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan, sekaligus menciptakan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani kapasitas fiskal daerah.

Provinsi Lampung telah menyiapkan beberapa proyek infrastruktur yang pembiayaannya dilakukan melalui skema pembiayaan pinjaman daerah antara lain :

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KABUPATEN	PANJANG RUAS (Km)
1	042	Lempasing - Padang Cermin	Pesawaran	29,157
2	022	Bandar Jaya - Sp. Mandala	Lampung Tengah	37,016
3	032	Padang Ratu - Kali Rejo	Lampung Tengah	22,603
4	025	Kali Rejo - Bangunrejo	Lampung Tengah	14,086
5	030	Padang Ratu - Pekurun Udik	Lampung Tengah	24,796
6	006	Jabung - Sp. Labuhan Maringgai	Lampung Timur	22,962
7	075	Kasui - Ai Ringkih (Bts Sumatera Selatan)	Way Kanan	26,295
8	045	Sp. Umbar - Putih Doh	Tanggamus	23,830
9	092	Sp. Unit VIII - Gedong Aji	Tulang Bawang	22,050
10	088	Tegal Mukti - Tajab	Way Kanan	36,000
11	016	Sp. Korpri - Purwotani	Lampung Selatan	14,551
12	043	Padang Cermin - Sp Teluk Kiluan	Pesawaran	31,732
13	049	Suoh - Sp. Blok 9	Lampung Barat	30,447
14	095	Brabasan - Wiralaga	Mesuji	29,443

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Tahun 2026 menjadi langkah awal dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah pertama guna menggapai target besar Visi Indonesia Emas 2045. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun sebagai dokumen operasional awal yang menguraikan arah pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025–2029. Mengusung **visi Lampung 2045** yaitu : **“SEJAHTERA, MAJU, MERATA, DAN BERKELANJUTAN”**, pembangunan ke depan memerlukan landasan transformasi yang kuat dan kokoh. Periode 2025–2029 menjadi fase krusial untuk membangun fondasi transformasi tersebut, sekaligus menentukan laju pertumbuhan pada tahap-tahap selanjutnya.

Pembangunan daerah Provinsi Lampung pada tahun 2026 difokuskan untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan berbagai tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk memastikan tercapainya target pembangunan secara terukur. Keberhasilan pencapaian tersebut akan dilihat melalui indikator kinerja makro serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tolok ukur efektivitas dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Lampung.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun nasional maka diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan. Perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi

Lampung Tahun 2026 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2026 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun 2026 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan landasan strategis yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Penyusunan sasaran pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan dan keterpaduan dengan sasaran pembangunan nasional, guna memastikan sinergi antara prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional.

4.1.1 Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi RPJMN 2025-2029 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”** Visi ini menegaskan pentingnya kerja sama seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Dengan fondasi yang kokoh yang telah dibangun selama kepemimpinan sebelumnya, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan visi tersebut. Pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang maju dan sejahtera.



Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), dan 320 program kerja.

Visi adalah gambaran besar dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Dalam RPJMN ini, visi tersebut terwujud dalam Indonesia Emas 2045, yang menggambarkan Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur pada abad ke-21. Visi ini mencakup segala aspek pembangunan, dari ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan hidup, dengan harapan agar Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki daya saing tinggi dan mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya.

Asta Cita, yang terdiri dari delapan prioritas nasional, merupakan langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mewujudkan visi tersebut dalam jangka menengah, yaitu dari tahun 2025 hingga 2029. Asta Cita ini mencakup berbagai sektor penting yang harus dikuatkan, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, sistem pertahanan negara, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga reformasi hukum dan pemerintahan.

Gambar 4. 1 Prioritas Nasional



Sumber: Perpres No.12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing nasional, terdapat 17 Program Prioritas Presiden yang akan menjadi fokus utama dalam pembangunan Indonesia ke depan, sebagai berikut:

1. **Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air:** Program ini bertujuan untuk memastikan ketahanan nasional dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan air yang cukup dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia.
2. **Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara:** Fokus pada penyempurnaan administrasi negara agar lebih efisien dan transparan, sehingga layanan publik dapat lebih optimal dan dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang.
3. **Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi:** Meningkatkan kualitas sistem politik dan hukum, serta reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. **Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:** Memperkuat upaya pemberantasan korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5. **Pemberantasan Kemiskinan:** Menanggulangi kemiskinan dengan berbagai kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta mempercepat pemerataan pembangunan.
6. **Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba:** Mengurangi dampak buruk narkoba di masyarakat dengan penegakan hukum yang lebih tegas serta program rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba.
7. **Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Menjamin akses kesehatan yang merata melalui penguatan sistem jaminan kesehatan nasional dan memperbaiki infrastruktur kesehatan di seluruh Indonesia.
8. **Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi, serta Digitalisasi:** Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan integrasi teknologi dan sains, serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan digital.
9. **Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara:** Meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan keamanan domestik serta memperkuat diplomasi luar negeri untuk menjaga stabilitas nasional dan regional.
10. **Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas:** Memastikan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan.
11. **Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup:** Mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup dengan fokus pada pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk masa depan yang lebih hijau.
12. **Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida untuk Petani:** Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menjamin ketersediaan sarana produksi yang tepat bagi petani.

13. **Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas:** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
14. **Melanjutkan Pemetaan Ekonomi dan Penguatan UMKM:** Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dengan memperkuat sektor UMKM, termasuk memberikan kemudahan akses ke pembiayaan dan pasar.
15. **Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam:** Meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia melalui hilirisasi industri, yang akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada impor.
16. **Memastikan Kerukunan Antaragama, Kebebasan Beribadah, Pendidikan, dan Perawatan Rumah Ibadah:** Memastikan kerukunan antarumat beragama serta memberikan kebebasan beribadah dengan aman, tanpa adanya diskriminasi.
17. **Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga:** Melestarikan warisan budaya Indonesia serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan meningkatkan prestasi olahraga untuk mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.

Selain Program prioritas, **8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins)** yang dirancang untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam waktu singkat. Program-program ini fokus pada aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut :

1. **Memberi Makanan Bergizi Sehat di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil:** Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan mereka, dengan fokus pada sekolah dan pesantren.

2. **Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten:** Program ini memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui pemeriksaan gratis dan pembangunan rumah sakit dengan fasilitas yang memadai di berbagai kabupaten.
3. **Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional:** Fokus pada pengembangan sektor pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian melalui pembentukan lumbung pangan yang dapat mendukung ketahanan pangan baik di tingkat desa maupun nasional.
4. **Membangun Sekolah-sekolah Unggul Terintegrasi di Setiap Kabupaten, dan Memperbaiki Sekolah-sekolah yang Perlu Renovasi:** Program ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia, dengan membangun sekolah-sekolah berkualitas dan memperbarui fasilitas sekolah yang membutuhkan perbaikan.
5. **Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut:** Program ini memberikan dukungan langsung kepada masyarakat miskin melalui kartu-kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk mendukung pengurangan kemiskinan secara cepat.
6. **Meningkatkan Gaji ASN (terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh), TNI/POLRI, dan Pejabat Negara:** Fokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil, tenaga kesehatan, pendidik, serta aparat negara lainnya agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
7. **Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersubsidi Baik untuk Masyarakat Umum, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR):** Program ini bertujuan untuk meratakan pembangunan infrastruktur desa serta meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah yang terjangkau melalui bantuan subsidi.

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%:

Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem penerimaan negara dan meningkatkan kontribusi sektor formal terhadap perekonomian nasional dengan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB.

4.1.2 Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Lampung

Provinsi Lampung menetapkan Rencana Pembangunan Tahun 2025-2029 dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan yaitu : **“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”** dengan **3 (tiga) Misi / 3 (tiga) Cita Pembangunan** yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat.

CITA KE-1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif

Fokus pembangunan ekonomi Lampung akan dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif sehingga semua kelompok dan golongan secara bersama-sama melakukan upaya pertumbuhan ekonomi. Upaya pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sumber daya melalui penerapan ekonomi hijau di sektor pertanian, ekonomi biru di sektor kelautan, serta mendorong kewirausahaan, industri kreatif, pariwisata, dan UMKM maupun koperasi. Mengutamakan swasembada pangan, air, dan energi, serta investasi dalam hilirisasi dan industrialisasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Pembangunan ekonomi akan dimulai dari desa, menjadi salah satu tulang punggung dalam mendorong perekonomian daerah. Selain itu perlu didorong inisiatif menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan memperluas lapangan pekerjaan. Program kerja yang diusulkan meliputi pembangunan pusat ekonomi baru dengan cara bekerjasama dengan BUMN, serta

investor dalam negeri dan luar negeri. Pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, dan pengintegrasian desa dalam ekonomi digital melalui konsep desa cerdas. Selain itu, ditekankan juga penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui teknologi digital dan IoT serta hilirisasi untuk meningkatkan output dan diversifikasi ekonomi lokal. Pemerataan infrastruktur untuk mendorong perekonomian, peningkatan akses ke modal untuk usaha kecil, dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat mendukung semua inisiatif ini untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Lampung. Strategi ini membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan Lampung yang maju dan berkelanjutan. Melanjutkan revitalisasi pasar dan memperkuat peran bank daerah khususnya bank rural guna mendukung pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa. Inisiatif seperti hilirisasi dan industrialisasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi produk unggulan untuk memperluas pasar baik domestik maupun ekspor. Misi ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat desa, perempuan, generasi muda, dan kaum disabilitas melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan diharapkan juga akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial di Provinsi Lampung.

CITA KE-2 Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif

Fokus misi ini adalah memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui komitmen dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan inovatif, meningkatkan layanan kesehatan yang komprehensif, mendukung kegiatan olahraga, mendorong kemajuan dalam sains dan teknologi serta penguatan peran perempuan, generasi muda dan penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, misi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang berkualitas, sehat dan produktif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkontribusi dan ikut serta merasakan hasil pembangunan daerah.

Dalam misi memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah Provinsi Lampung, di bawah kepemimpinan Mirza-Jihan berkomitmen untuk meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas individu di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan berkualitas dijamin melalui inisiatif seperti meningkatkan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya pengajar di sekolah tingkat atas dan perguruan tinggi, serta mengintegrasikan kurikulum yang mengakomodir kebutuhan industri modern dan penguatan karakter termasuk kearifan lokal. Layanan kesehatan diperkuat dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta kampanye kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit. Khusus untuk generasi muda, pemerintah fokus pada pembinaan keterampilan melalui pusat pelatihan dan inkubator bisnis yang mendukung kewirausahaan dan inovasi. Program ini melibatkan kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Selain itu, pemerintah mendukung pemberdayaan perempuan melalui program yang menargetkan peningkatan peran wanita dalam semua sektor ekonomi dan sosial. Pengembangan olahraga juga menjadi salah satu prioritas, dengan tujuan menjadikan Lampung sebagai pusat atlet berprestasi, mendukung pembangunan fasilitas olahraga modern, dan melaksanakan program-program yang dapat mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat muda di berbagai cabang olahraga. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi olahraga tetapi juga mendorong gaya hidup aktif dan sehat di kalangan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan SDM yang unggul dan produktif.

CITA KE-3 Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas

Untuk menciptakan masyarakat Provinsi Lampung yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, strategi yang diusulkan berfokus pada harmonisasi antara lingkungan alam, budaya, dan layanan publik. Pendekatan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang merangkul keberagaman seni dan budaya melalui penyelenggaraan festival dan workshop, serta revitalisasi lembaga kebudayaan untuk memperkuat identitas Lampung. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, lansia, disabilitas, serta kelompok terlintar juga menjadi prioritas. Upaya peningkatan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif dan regulasi yang mendukung kesetaraan di tempat kerja juga diintegrasikan.

Komitmen untuk memperkuat keberagaman dan inklusivitas di Provinsi Lampung melalui peningkatan kualitas kehidupan masyarakat terus diintegrasikan dalam berbagai aspek pembangunan. Selain itu, peningkatan layanan publik yang berbasis digital bertujuan untuk menyederhanakan proses administratif dan mempercepat penyampaian layanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan birokrasi. Dalam upaya menciptakan tatanan sosial yang harmonis, program kerja dan strategi implementasi yang telah dirancang mencakup pembaruan kebijakan dan praktik yang mendukung interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini antara lain meliputi pelatihan dan pendampingan bagi lembaga kebudayaan dan komunitas seni, peningkatan fasilitas publik yang mendukung aktivitas sosial dan budaya, serta inisiatif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial dalam setiap aspek pembangunan. Penekanan pada penggunaan teknologi modern dalam layanan publik dan pengelolaan sumber daya alam juga direncanakan untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Misi ini juga mengarah pada proses pembangunan Kota Baru “Bandar Negara” dengan konsep Eco City yang berwawasan hijau, smart, dan didukung oleh kawasan komersial sebagai penyangga kota. Tujuan lain dari pembangunan kota ini adalah sebagai pusat kebudayaan dan peradaban masyarakat lampung. Selain itu, Provinsi Lampung sebagai daerah yang rawan bencana memerlukan mitigasi bencana yang terencana serta efektif dalam penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Berikut adalah misi, tujuan, dan indikator tujuan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029. Misi berfungsi sebagai arah umum, tujuan sebagai sasaran konkret yang ingin dicapai dalam lima tahun, dan indikator tujuan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut. Dengan menyusun misi, tujuan, dan indikator tujuan yang jelas, RPJMD dapat memastikan pembangunan yang terarah dan terukur.

CITA KE-1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif

1.1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif						
	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,3	6,5	6,8	7	7,2	7,2
1.1.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,0-3,86	4,05-3,51	3,8-3,3	3,6-3,1	3,4-2,9	3,1-2,7
1.1.3.	Gini Rasio	0,300 - 0,301	0,297 - 0,298	0,295 - 0,296	0,293 - 0,294	0,290 - 0,291	0,289 - 0,290
1.1.4.	Indeks Daya Saing Daerah	3,31-3,34	3,26-3,32	3,20-3,29	3,15-3,27	3,1-3,25	3,05-3,23
1.1.5.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	60,16	61,13	62,09	63,06	63,83
1.1.6.	Indeks Ekonomi Biru	23,71622	24,80712	25,89802	26,98893	28,07983	29,17073

CITA KE-2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan produktif

2.1.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia						
	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.1.	Indeks modal manusia	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55
2.1.2.	Indeks Pembangunan Manusia	73,40-73,80	73,80-74,4	74,4-74,82	74,82-75,38	75,38-75,80	75,80-76,30

CITA KE-3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas

3.1.	Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan						
	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.1.	Tingkat kemiskinan (%)	10,00-9,5	9,9-8,9	9,5-8,5	9,2-8,8	9-8,6	8,8-8,4
3.2.	Tujuan : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas						
	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	83,00-84,00	84,01-85,00	85,01-86,00	86,01-87,00	87,01-88,00	88,01-89,00
3.3.	Tujuan : Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana						
	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3.1.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)	9,52	9,95	10,47	11,07	11,66	12,3
3.4.	Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.						
	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.4.1.	Indeks pembangunan Kebudayaan	58,5	59,6	60,8	61,9	63	63,5
3.4.2.	Indeks Demokrasi Indonesia	79-80	80-81	80-81	81-82	81-82	82-83

Tujuan adalah pernyataan umum yang menggambarkan hasil besar yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam periode lima tahun. Tujuan ini memberikan arah yang jelas untuk pembangunan daerah, namun masih bersifat luas dan tidak terperinci. Untuk mencapai tujuan maka diperlukan Langkah-langkah yang lebih spesifik yang digambarkan ke dalam sasaran – sasaran. Sasaran ini merupakan hasil yang lebih terukur dan dapat dicapai dalam waktu yang lebih pendek, biasanya dalam kurun waktu tahunan. Setiap sasaran yang dirumuskan harus dapat dievaluasi dan menjadi indikator keberhasilan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan kata lain, sasaran merupakan bentuk operasionalisasi dari tujuan, memberikan rincian lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Berikut adalah sasaran dan indikator sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

CITA KE 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif

Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif							
1.1.1.	Sasaran : Mendorong investasi dan hilirisasi industri						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.1.	Pertumbuhan PMTB (%)	2,9 - 4,9	3 - 5	3,1 - 5,1	3,2 - 5,2	3,3 - 5,3	3,4 - 5,4
1.1.1.2.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif							
1.1.2	Sasaran : Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.1	Nilai Tukar Petani	125 - 130	126 - 131	127 - 132	128 - 133	129 - 134	130-135
1.1.2.2	Indeks Ketahanan Pangan	83,07	83,58	84,09	84,6	85,11	85,62
1.1.2.3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	8,5	7,56	6,63	5,69	4,75	3,8
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif							
1.1.3	Sasaran : Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.1	Persentase Desa Maju dan Mandiri (%)	64,55	66,6	68,64	70,09	72,73	74,77
1.1.3.2	Persentase BUMDES berkembang dan maju	35,47	37,94	40,4	42,87	45,33	47,8
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif							
1.1.4	Sasaran : Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Daya Ungkit Ekonomi Daerah						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.4.1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan & Minum (%)	1,60%	1,65%	1,70%	1,75%	1,80%	1,85%
1.1.4.2	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu Orang)	85000	90000	95000	100000	105000	110000
1.1.4.3	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (ribu Orang)	19.000.000	20.500.000	22.000.000	23.500.000	25.000.000	26.500.000
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif							
1.1.5	Sasaran : Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.5.1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36%	36,60%	37%	37,40%	37,80%	38,2

Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif							
1.1.6	Sasaran : Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Berkelanjutan						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.6.1.	Kemantapan Jalan (%)	76,60%	81,50%	82,50%	83,50%	84,50%	85,50%
1.1.6.2	Rasio Konektivitas simpul transportasi Provinsi (%)	0.35	0,47	0.67	0.77	0.88	1
1.1.6.3	Tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar PKP(%)(Kawasan kumuh yang tertangani, rumah tidak layak huni yang tertangani, akses air minum aman, akses sanitasi aman)	19,45	20,17	20,88	21,6	22,31	23,03
1.1.6.4	Peningkatan fungsi infrastruktur sumber daya air (%)	35	39	40	41	42	43
CITA KE 2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif							
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia							
2.1.1	Sasaran : Generasi Cerdas dan Berakhlak						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.1.1	Rata rata lama sekolah	8,46	8,55	8,64	8,74	8,82	8,93
2.1.1.2	Harapan Lama sekolah	12,82	12,83	12,86	12,88	12,91	12,95
2.1.1.3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,77	69,03	72,79	75,55	78,81	82,07
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia							
2.1.2	Sasaran : Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.2.1	Persentase Pemuda Wirausaha (16-30 Tahun) *Komposit IPP	0,69	0,99	1,39	1,49	1,59	1,69
2.1.2.2	Jumlah Usaha Menurut Umur Pengusaha (17-40 tahun)	193.047	194.978	196.928	198.897	200.886	202.500
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia							
2.1.3	Sasaran : Mendukung Prestasi Pemuda dan Olahraga						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.3.1	Indeks Pembangunan Pemuda	53,51	53,68	53,85	54,02	54,19	54,36

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia							
2.1.4	Sasaran : Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.4.1	Prevalensi Stunting (%)	13,2	12,8	12,5	12	11,32	10,85
2.1.4.2	Umur Harapan Hidup	74,55	74,74	74,93	75,12	75,31	75,62
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia							
2.1.5	Sasaran : Lampung Pusat Teknologi Terpadu						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.5.1	Indeks Inovasi Daerah	59	59,5	60	60,5	61	61,5
2.1.5.2	Indeks Pembangunan TIK	5,85	5,9	6	6,05	6,18	6,23
CITA KE 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas							
Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan							
3.1.1	Sasaran : Pengentasan Kemiskinan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.1.1	Kemiskinan Ekstrem (%)	0,45	0,36	0,24	0,17	0,09	0,01
3.1.1.2	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan							
3.1.2	Sasaran : Penguatan ketahanan keluarga						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.2.1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	64,21	64,71	65,21	66,21	66,71	67,71
Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan							
3.1.3	Sasaran : Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Terlantar						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.3.1	Indeks Perlindungan Anak	66,22	66,94	67,66	68,38	69,1	69,82
3.1.3.2	Indeks Ketimpangan Gender	0,422	0,42	0,418	0,405	0,395	0,385
3.1.3.3	Persentase Disabilitas Tertangani	16	18	20	22	24	25
3.1.3.4	Indeks Lansia Tangguh	58,5	59	59,5	60	60,5	60,75
Tujuan : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas							
3.2.1	Sasaran : Mewujudkan Birokrasi berintegritas						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030

3.2.1.1	Indeks Pelayanan Publik	4,3	4,4	4,45	4,5	4,6	4,6
3.2.1.2	Indeks Keterbukaan Informasi	95,3	95,33	95,35	95,37	95,37	
3.2.1.3	Nilai Survei Penilaian Integritas	67,33	68,83	69,33	70,83	71,33	73,33
3.2.1.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	
3.2.1.5	Indeks Reformasi Birokrasi	83,00-84,00	84,01-85,00	85,01-86,00	86,01-87,00	87,01-88,00	88,01-89,00
Tujuan : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas							
3.2.2	Sasaran : Melanjutkan Pembangunan Kota Baru 'Bandar Negara' berbasis Eco-City						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.2.1	Tingkat ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kawasan (%)	10	15	20	25	30	35
Tujuan : Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana							
3.3.1.	Sasaran : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3.1.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	9,52	9,95	10,47	11,07	11,66	12,30
3.3.1.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,99	71,2	71,41	71,63	71,84	72,05
3.3.1.3	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,537	0,537	0,537	0,537	0,537	0,537
3.3.1.4	Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	4.719,02	4.765,79	4.812,67	4.812,57	4.906,12	4.952,89
3.3.1.5	Indeks Risiko Bencana	129,97	129,01	128,5	127,99	127,99	127,48
Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.							
3.4.1	Sasaran : Membangun Semangat Lampung Bersama						
	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.4.1.1	Ekspresi Budaya (%)	37,31	38,71	40,11	41,51	42,91	44,31
3.4.1.2	Ketahanan Sosial Budaya (%)	81,81	83,81	84,41	85,71	87,01	88,31
3.4.1.3	Indeks Demokrasi Indonesia	79-80	80-81	80-81	81-82	82-83	83-84

4.1.3 Strategi dan Arah Pembangunan Provinsi Lampung

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Tahun 2025 – 2045 yaitu **“Lampung Sejahtera, Maju, Merata dan**

Berkelanjutan”, strategi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang lima tahun ke depan. Strategi ini bertumpu pada penguatan keunggulan daerah, pemantapan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi sinergi pusat-daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
Visi: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas				
Misi 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif				
1.	Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusi	1.1	Mendorong investasi dan hilirisasi industri	1. Mengembangkan potensi dan peluang investasi 2. Memberikan kemudahan berinvestasi di Provinsi Lampung 3. Meningkatkan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan 4. Meningkatkan Promosi dan Branding Investasi Daerah 5. Mengelola dan mengawasi investasi secara berkelanjutan 6. Mempermudah proses Perizinan dan Non-Perizinan 7. Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan 8. Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi
		1.2	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	1. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi 2. Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian 3. Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian 4. Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga supply air ketika musim kemarau; 5. Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara; 6. Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat 7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal; 8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan
		1.3	Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	1. Meningkatkan jumlah Bumdes berkembang dan maju untuk mendukung penciptaan ekosistem ekonomi berbasis desa
		1.4	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Daya Ungkit Ekonomi Daerah	1. Penguatan Infrastruktur Destinasi Wisata • Peningkatan aksesibilitas jalan menuju destinasi utama (pantai, taman nasional, dll). • Penyediaan fasilitas umum yang ramah wisatawan. 2. Pengembangan Destinasi Unggulan • Pengembangan kawasan wisata prioritas seperti Teluk Kiluan, Pahawang, dan Way Kambas. • Promosi dan penataan desa wisata berbasis potensi lokal. 3. Digitalisasi Promosi Wisata • Pemanfaatan media sosial, website resmi, dan platform digital untuk pemasaran destinasi. • Kolaborasi dengan influencer dan content creator lokal. 4. Penguatan SDM Pariwisata • Pelatihan pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku industri wisata. • Sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata. 5. Inkubasi dan Pendampingan UMKM Kreatif • Pelatihan desain produk, manajemen usaha, dan branding. • Fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan lembaga keuangan daerah.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
		1.5	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	1. Menyusun roadmap energi terbarukan Provinsi Lampung 2. Mendorong Penyelesaian kendala regulasi dan harga jual listrik panas bumi 3. Melakukan riset per jenis EBT 4. Mendorong Mengembangkan pilot project TPST berbasis ekonomi sirkular yang menghasilkan listrik 5. Meningkatkan pemanfaatan potensi energi lokal sebagai sumber energi alternatif 6. Pemanfaatan EBT skala kecil untuk rumah tangga
		1.6	Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Berkelanjutan	1. Penguatan konektivitas jaringan jalan pendukung sentra produksi komoditas utama Provinsi Lampung, akses bagi pengembangan investasi, hilirisasi industri dan sektor pariwisata. 2. Penguatan peran transportasi laut sebagai moda pendukung distribusi logistik antar pulau. 3. Pengembangan transportasi massal perkotaan khususnya dalam mendukung pertumbuhan kawasan Metropolitan Lampung Raya. 4. Mendorong pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api rute Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti, serta jalur lingkaran luar (Shortcut/ Longcut) Tegineneng – Pelabuhan Panjang – Tarahan. 5. Mendorong peran transportasi udara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta konektivitas wilayah. 6. Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Misi 2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif				
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	2.1	Generasi Cerdas dan Berakhlak	1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK) 2. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) 3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan 4. Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital 5. Penguatan sistem pembiayaan pendidikan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				6. Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM
		2.2	Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	1. Program Pelatihan kerja yang relevan dengan kesempatan kerja 2. Kolaborasi Industri, Institusi Pendidikan, Perusahaan Teknologi, Pemerintah dan Organisasi non Profit. 3. Meningkatkan semangat kewirausaha muda dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda
		2.3	Mendukung Prestasi Pemuda dan Olahraga	1. Memperkuat sistem pembinaan organisasi pemuda dan meningkatkan prestasi pemuda secara terpadu 2. Meningkatkan prestasi olahraga pemuda dan olahraga masyarakat
		2.4	Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat	1. Meningkatkan status gizi masyarakat 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		2.5	Lampung Pusat Teknologi Terpadu	1. Meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri melalui intervensi dan rekomendasi tindak lanjut program pembangunan dan pemberdayaan desa
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas				
3.	Menurunkan angka kemiskinan	3.1	Pengentasan Kemiskinan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran	1. Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) • Pemutakhiran data rutin berbasis desa/kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. • Penggunaan teknologi digital untuk menyinkronkan data antarinstansi. 2. Penguatan Program Bantuan Sosial yang Responsif • Penyaluran bansos tunai dan non-tunai dengan target prioritas rumah tangga miskin ekstrem. • Intervensi darurat saat terjadi bencana, inflasi, atau krisis ekonomi lokal. 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. • Fasilitasi akses modal melalui KUR, koperasi, dan UMKM berbasis desa.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				- Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. 4. Aksesibilitas Layanan Dasar - Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. - Penghapusan hambatan administratif seperti kepemilikan identitas atau BPJS. 5. Kolaborasi Multipihak (Pentahelix) - Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. - Program CSR perusahaan lokal diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan. 6. Pemantauan dan Evaluasi Tepat Waktu - Monitoring berkala efektivitas program berbasis indikator kemiskinan multidimensi. - Tindak lanjut cepat atas ketidaksesuaian implementasi di lapangan.
		3.2	Penguatan ketahanan keluarga	1. Memperkuat ketahanan keluarga dari segi ekonomi ,sosial, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan melalui partisipasi masyarakat
		3.3	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Terlantar	1. Memastikan peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif dalam perlindungan hak-hak anak 2. Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak anak, perlindungan dan pencegahan kekerasan 3. Mendirikan dan memperkuat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai sarana pendidikan dan pencegahan dalam perlindungan anak
4	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	4.1	Mewujudkan Birokrasi berintegritas	1. Meningkatkan Implementasi dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah melalui Pembinaan dan Monitoring Capaian Kinerja 2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik
5	Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	5.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	4. 1. Menerapkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon - Integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam RPJMD dan RTRW. - Penguatan sistem inventarisasi gas rumah kaca (GRK) di tingkat daerah.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				- Insentif bagi sektor swasta yang menerapkan prinsip efisiensi energi dan energi terbarukan. 2. Meningkatkan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim - Penguatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk cuaca ekstrem dan bencana iklim. - Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami (hutan, mangrove, rawa, DAS). - Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. - Pelatihan adaptasi iklim berbasis komunitas, terutama untuk petani dan nelayan. 5. 3. Mengurangi Risiko Bencana dan Penguatan Ketangguhan Daerah - Penguatan kelembagaan BPBD dan relawan desa tangguh bencana (Destana). - Sosialisasi dan edukasi publik mengenai mitigasi risiko bencana. - Audit kerentanan bencana untuk infrastruktur publik dan fasilitas vital. - Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, embung, atau sistem drainase terpadu.
6	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.	6.1	Membangun Semangat Lampung Bersama	1. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah dan TNI Polri 2. Mempersiapkan pendidikan karakter dan muatan lokal untuk pendidikan dasar hingga menengah 3. Melestarikan warisan budaya Lampung

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025–2030 difokuskan pada penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan dan hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan antarwilayah secara berkelanjutan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong transformasi digital di sektor publik dan swasta, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi perhatian utama dengan mengarusutamakan perlindungan lingkungan

hidup, ketahanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan, guna memastikan terwujudnya Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Misi ke-1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif			
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif			
Sasaran		Arah Kebijakan	
1. Mendorong investasi dan hilirisasi industri	(1)	Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri.	
	(2)	Lampung sebagai magnet investasi PMA dan PMDN.	
	(3)	Mendorong kebijakan strategis bagi investor untuk menanamkan investasi di industri-industri strategis.	
	(4)	Mendukung kegiatan Ekonomi Hijau untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.	
	(5)	Mendukung kegiatan Ekonomi Biru dalam meningkatkan pemanfaatan sektor maritim.	
	(6)	Memfasilitasi akses pembiayaan skema KUR (kredit usaha rakyat) dan keuangan syariah yang mudah dan terjangkau bagi UMKM melalui bank dan lembaga keuangan lainnya.	
	(7)	Menyederhanakan perizinan usaha untuk mempercepat proses izin investasi	
	(8)	Menggiatkan promosi potensi investasi daerah skala nasional dan global.	
	(9)	Optimalisasi BUMD Provinsi Lampung ke dalam sektor yang strategis dan menyangkut hajat masyarakat Lampung dan ketahanan ekonomi Provinsi Lampung.	
	(10)	Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung.	
	(11)	Mendorong industri dalam penciptaan nilai tambah komoditas unggulan Lampung.	
	(12)	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.	
	(13)	Peningkatan peran koperasi dan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.	
	(14)	Diversifikasi produk daerah berorientasi ekspor.	
	(15)	Melanjutkan Pembangunan Kota Bandar Negara sebagai pusat pemerintahan, kebudayaan, dan peradaban dengan dengan konsep Eco City yang Hijau, Cerdas, dan Ramah	
	(16)	Menerapkan konsep pelayanan ramah publik dan terpadu kepada masyarakat dengan berbasis pada TI dan Teknologi Smart City.	
	(17)	Menyiapkan kawasan komersial sebagai penunjang utama Kota Baru 'Bandar Negara'.	

Misi ke-1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif			
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif			
Sasaran		Arah Kebijakan	
2	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	(1)	Mendukung ketersediaan pupuk, benih, pestisida dan sarana produksi perikanan.
		(2)	Menjamin distribusi pupuk, benih, dan pestisida.
		(3)	Memberikan subsidi yang ditujukan khusus untuk nelayan, petani, dan peternak.
		(4)	Melakukan penyempurnaan regulasi dan mekanisme penyaluran/distribusi pupuk pertanian.
		(5)	Menjamin dan mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat waktu.
		(6)	Menyediakan pupuk organik melalui pembangunan unit produksi mikro pupuk organik yang dikelola oleh BUMDes.
		(7)	Mendukung keberlangsungan swasembada pangan.
		(8)	Mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan supply produk lokal.
		(9)	Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan Lampung menuju lumbung pangan nasional.
		(10)	Melakukan penguatan literasi digital sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
		(11)	Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, peternakan, dan pertanian (off farm).
		(12)	Budidaya ikan endemik Lampung berkelanjutan.
		(13)	Mendorong inovasi pemanfaatan teknologi digital dan IoT (Internet of Things) dalam pengembangan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan (on farm).
		(14)	Melakukan perbaikan sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk meningkatkan kualitas produk ekspor.
		(15)	Memaksimalkan peran BUMD bidang pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk pangan.
		(16)	Mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian dan perkebunan Lampung.
		(17)	Menerapkan program asuransi pertanian dan perikanan untuk melindungi petani dan nelayan.
3	Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	(1)	Revitalisasi atau pembenahan tata niaga komoditas unggulan Lampung.
		(2)	Peningkatan nilai tambah komoditas Provinsi Lampung yang dilakukan dari desa.
		(3)	Mendorong penyempurnaan kelembagaan ekonomi profesional (koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lampung Hub, Pelabuhan Komoditi).

Misi ke-1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif			
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif			
Sasaran		Arah Kebijakan	
		(4)	Mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan daerah serta mendorong pembangunan dari desa dan dari bawah dengan peningkatan kapasitas BUMDes.
		(5)	Mendirikan Lampung Hub sebagai ruang kolaborasi hexahelix (pemerintah, regulasi, swasta, pengusaha, masyarakat, media, dan komunitas kreatif).
		(6)	Inisiasi pembangunan Pelabuhan Komoditi Sebalang dan Labuhan Maringgai sebagai Pilot Project Pelabuhan Nasional di Lampung. (Pembangunan Pelabuhan Logistik Sebalang sebagai simpul penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung)* <i>FGD Tematik Infrastruktur</i>
		(7)	Menciptakan iklim investasi dan pembangunan ekonomi partisipatif berbasis kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, UMKM, dan swasta.
		(8)	Meningkatkan peran bank daerah dalam pembangunan di daerah dan desa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan UMKM.
		(9)	Penguatan permodalan bank daerah untuk memenuhi standar kebutuhan pelayanan bank daerah dengan menggandeng partner strategis atau melalui kelompok usaha bank (KUB).
		(10)	Meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan dan perbankan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha desa dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.
		(11)	Mengembangkan layanan digital bank daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan keuangan.
		(12)	Mengembangkan dan mempromosikan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan lokal.
4	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Daya Ungkit Ekonomi Daerah	(1)	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis UMKM, komunitas, dan investasi.
		(2)	Penguatan konektivitas menuju dan dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
		(3)	Menciptakan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan (green/ eco tourism).
		(4)	Meningkatkan kualitas pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif dari tingkat UMKM.
		(5)	Memperkuat peran Pokdarwis sebagai kekuatan lokal pariwisata.
		(6)	Membangun ekosistem digital pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung pelayanan prima.
		(7)	Menyediakan identitas digital yang kuat dalam mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung secara nasional dan global.

Misi ke-1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif			
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif			
Sasaran		Arah Kebijakan	
		(8)	Memperkuat peran Badan Promosi dan Pengelola Pariwisata Lampung dalam rangka peningkatan indeks kinerja pariwisata (IKP).
5	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	(1)	Pengembangan Roadmap industri energi terbarukan berbasis biomassa (Pengembangan Roadmap industri berbasis energi terbarukan)* <i>FGD Tematik Infrastruktur</i>
		(2)	Menyediakan skema pembiayaan dan kredit yang memudahkan masyarakat dan perusahaan kecil mengadopsi teknologi energi terbarukan.
		(3)	Inisiasi pengembangan potensi energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya.
		(4)	Memasyarakatkan pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan.
		(5)	Mendorong kerjasama energi terbarukan antara industri dan masyarakat penyedia bahan biomassa (...berbagai sumber energi terbarukan)* <i>FGD Tematik Infrastruktur</i>
		(6)	Melakukan optimalisasi BUMD dalam pengelolaan transaksi energi di interkoneksi Lampung untuk peningkatan PAD (Optimalisasi BUMD dalam Pengelolaan Transaksi energi daerah secara mandiri dan strategis untuk peningkatan PAD)* <i>FGD Tematik Infrastruktur</i>
6	Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Berkelanjutan	(1)	Mendorong interkonektivitas jalan dan moda transportasi antar wilayah.
		(2)	Mewujudkan keadilan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
		(3)	Pembangunan infrastruktur dengan kearifan lokal.
		(4)	Aksesibilitas transportasi publik dengan konsep smart, modern, terjangkau, aman, nyaman, ramah lingkungan, dan ramah terhadap lansia, anak, dan kaum disabilitas.
		(5)	Memelihara infrastruktur jalan untuk kelancaran mobilitas publik, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya logistik.
		(6)	Pemerataan pembangunan infrastruktur digital yang menunjang pelayanan publik serta produktivitas ekonomi dan sosial.

Misi ke-2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif			
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia			
Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Generasi Cerdas dan Berakhlak	(1)	Memfasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai pusat aktivitas pendidikan akhlak dan karakter.
		(2)	Menyelenggarakan sertifikasi pada tingkat Pendidikan Sekolah Menengah vokasi.
		(3)	Pemerataan dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan tenaga kerja terampil di daerah.
		(4)	Memfasilitasi sertifikasi profesi tenaga kerja Lampung.
		(5)	Meningkatkan kompetensi santri dalam penguatan peran di masyarakat.
		(6)	Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri.
		(7)	Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
		(8)	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan pesantren.
		(9)	Menciptakan tata kelola teknologi informasi sekolah dan pesantren demi mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis digital yang optimal.
		(10)	Menjamin anggaran pendidikan tepat guna dan tepat sasaran.
		(11)	Memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
		(12)	Sinergi tridharma perguruan tinggi dalam pembentukan generasi cerdas dan berakhlak
2	Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	(1)	Mendukung pengembangan UMKM dan pengusaha pemula.
		(2)	Mengakses potensi pemuda melalui peningkatan kompetensi untuk berwirausaha.
		(3)	Meningkatkan kemudahan dan kesempatan yang sama untuk berusaha bagi generasi muda.
		(4)	Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis dan penyediaan fasilitas pelatihan bisnis yang komprehensif untuk umum, generasi muda, perempuan, dan kaum disabilitas.
		(5)	Meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap manfaat dan risiko keuangan.
		(6)	Mendorong pemuda desa untuk berwirausaha.
		(7)	Memfasilitasi kegiatan business matching antar stakeholders terkait untuk meningkatkan angka aktivasi dan sustainability usaha bisnis pemuda.
		(8)	Mengadakan kompetisi atau program akselerator bidang inovasi dan kewirausahaan untuk mendorong generasi muda mengembangkan ideide inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi ke-2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif			
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia			
Sasaran		Arah Kebijakan	
3	Mendukung Prestasi Pemuda dan Olahraga	(1)	Membangun sinergitas para pemuda, atlit, dan organisasi olahraga (PSSI, KONI, KORMI, dan lainnya) untuk penciptaan prestasi olahraga dan kebugaran masyarakat.
		(2)	Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan secara profesional dalam keterlibatan pembangunan daerah dan Pengembangan daya saing Kepemudaan .
		(3)	Memberikan apresiasi terhadap prestasi pemuda bidang akademik, seni, lingkungan, dan olahraga.
		(4)	Mengangkat silat sebagai budaya olahraga daerah.
		(5)	Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga untuk meraih prestasi.
		(6)	Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat mulai dari desa, sekolah, dan instansi untuk meningkatkan kesehatan, kekeluargaan, dan produktivitas masyarakat.
		(7)	Mencanangkan dan mempersiapkan Lampung sebagai tuan rumah PON tahun 2032.
		(8)	Membangun pusat olahraga berstandar internasional (Lampung Sport Center).
4	Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat	(1)	Mendukung program nasional pemberian makanan gratis untuk peningkatan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting secara tepat sasaran dan tepat waktu
		(2)	Menyediakan pusat layanan kesehatan yang berstandar layanan minimal di tingkat provinsi.
		(3)	Mendukung peningkatan kualitas dan pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Lampung.
		(4)	Mendukung pendirian dan peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C dan B di kabupaten dan kota.
		(5)	Melakukan kampanye pencegahan penyakit menular dan penanganan penyakit tidak menular
		(6)	Melakukan kampanye imunisasi bagi anak usia dini, remaja, dan perempuan.
		(7)	Berkolaborasi dengan organisasi dan komunitas- komunitas lokal untuk menyebarkan informasi kesehatan dan menyelenggarakan kampanye gaya hidup sehat
		(8)	Memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran dan tepat waktu.
		(9)	Melakukan pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis
		(10)	Menyelenggarakan bantuan medis darurat bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti transportasi medis, penanganan

Misi ke-2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif			
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia			
Sasaran		Arah Kebijakan	
			pertolongan pertama, dan bantuan medis lainnya dalam keadaan darurat.
5	Lampung Pusat Teknologi Terpadu	(1)	Memfasilitasi perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk melakukan penelitian bersama dalam rangka penciptaan inovasi-inovasi baru.
		(2)	Mengembangkan potensi Ekonomi Kreatif dengan Menyiapkan Pusat Kreativitas dan Inovasi Daerah (Lampung Creative and Innovation Center) melalui kemitraan bersama perguruan tinggi.
		(3)	Mendorong pemasangan sistem monitoring berbasis digital untuk melacak dan merespons semua tindak kejahatan dan musibah di area publik.
		(4)	Melakukan implementasi desa cerdas sebagai peningkatan indeks desa membangun (IDM).
		(5)	Melakukan penelitian terapan yang berfokus pada solusi pembangunan di tingkat lokal, regional, dan nasional.
		(6)	Implementasi teknologi dalam peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Lampung yang dilakukan dari desa.
		(7)	Meningkatkan penerapan ekonomi sirkular yang mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dengan meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan.
		(8)	Melibatkan dan mendukung perguruan tinggi swasta dan negeri dalam program-program pembangunan Lampung.

Misi ke-3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas			
Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan			
Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Pengentasan Kemiskinan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran	(1)	Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.
		(2)	Memetakan dengan tepat menggunakan big data bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan
		(3)	Menyalurkan program bantuan kepada masyarakat miskin secara tepat waktu dan tepat sasaran.
		(4)	Memantau kondisi masyarakat miskin dan yang membutuhkan dan melakukan mitigasi sesuai kebutuhan.
		(5)	Optimalisasi peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah (PKH, Tagana, Pendamping Desa, TKSK, Pekerja Sosial, atau sejenisnya).
2		(1)	Melanjutkan Program Keluarga Harapan

Misi ke-3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas			
Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan			
	Penguatan ketahanan keluarga	(2)	Mensosialisasikan fungsi keluarga sebagai jaring pengaman sosial
		(3)	Membudayakan keluarga inti harmonis
		(4)	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan pranata sosial budaya yang tangguh.
3	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Terlantar.	(1)	Lampung ramah anak dan perempuan.
		(2)	Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi kaum rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlantar.
		(3)	Memberikan akses dan meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial.
		(4)	Mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memberikan perlindungan kepada ibu dan anak terdampak.
		(5)	Standarisasi infrastruktur publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
		(6)	Menyelenggarakan pembinaan bagi kaum difabel guna menciptakan kemandirian kaum disabilitas.
Misi ke-3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas			
Tujuan : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas			
Sasaran		Arah Kebijakan	
4	Mewujudkan Birokrasi berintegritas	(1)	Menjunjung tinggi pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan berdasarkan hukum
		(2)	Memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan
		(3)	Menguatkan jejaring kerjasama antar kota-kabupaten
		(4)	Terbentuknya ekosistem sumber pendanaan pembangunan alternatif dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.
		(5)	Memperkuat instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif
		(6)	Upaya lanjutan percepatan peran pemerintah daerah dalam intermediasi sektor keuangan pada sektor prioritas
		(7)	Mewujudkan pengelolaan APBD secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan
		(8)	Memperkuat sinergitas pertahanan dan keamanan daerah bersama TNI, Polisi, dan lembaga lainnya.

Misi ke-3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas			
Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan			
		(9)	Mengembangkan MPP (Mal Pelayanan Publik) yang memungkinkan masyarakat lebih mudah dalam pengajuan perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, retribusi, dan layanan lainnya dilakukan secara online melalui portal resmi pemerintah daerah.
		(10)	Mengoptimalkan fungsi hotline atau aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital
		(11)	Melakukan pemutakhiran website resmi yang berisi informasi terkait pembangunan daerah, termasuk rencana pembangunan, progres proyek, dan anggaran yang digunakan.
		(12)	Mengadakan forum dialog publik secara rutin untuk membahas perkembangan pembangunan daerah dan mendengarkan masukan dari masyarakat.
		(13)	Menjamin pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang transparan dan akuntabel
		(14)	Membangun Data Recovery Center (DRC) untuk mendukung SPBE yang aman dan handal.
		(15)	Mengintegrasikan sistem digital pada semua tingkat dalam satu pengelolaan terpusat di Command Center secara realtime yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.
Misi ke-3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas			
Tujuan : Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca			
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	(1)	Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan.
(2)		Mewujudkan desa tangguh bencana.	
(3)		Peningkatan capaian akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak.	
(4)		Pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan.	
(5)		Mengelola kawasan pesisir Lampung dengan program berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	
(6)		Mencanangkan dan mempersiapkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah zero waste.	
(7)		Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).	
(8)		Mengintegrasikan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.	
(9)		Memitigasi dampak perubahan iklim global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	
Misi ke-3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas			

Misi ke-3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas			
Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan			
Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.			
6	Membangun Semangat Lampung Bersama	(1)	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila dengan merevitalisasi prinsip hidup orang Lampung “Piil Pesenggiri”
		(2)	Membangun semangat persatuan masyarakat Lampung melalui pendekatan budaya “Sakai Sambayan
		(3)	Sinergitas TNI, Polri, Tokoh masyarakat, stakeholder dengan pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
		(4)	Menyelenggarakan Festival Seni dan Budaya (festival yang meliputi seni, musik, tari, dan kuliner dari berbagai suku di Provinsi Lampung).
		(5)	Melakukan pendampingan, revitalisasi dan supervisi bagi lembaga kebudayaan dan atau kelompok masyarakat
		(6)	Penguatan keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan pembinaan, kolaborasi, dukungan kegiatan keagamaan, penyediaan sarana & prasarana ibadah, dan pemberian bantuan/insentif kepada umat dan pemuka agama
		(7)	Revitalisasi sarana dan lembaga kebudayaan (sanggar, balai desa, perguruan silat, lembaga adat).
		(8)	Optimalisasi masyarakat desa sebagai penggerak aktivitas kebudayaan.
		(9)	Menyelenggarakan workshop, seminar, dan diskusi publik tentang berbagai budaya dan tradisi yang ada di Provinsi Lampung
		(10)	Penggunaan simbol, aksara dan bahasa Lampung di ruang publik.
		(11)	Mendorong kreasi seni dan budaya karya seniman dan budayawan lokal.
		(12)	Penguatan muatan pendidikan berbasis budaya Lampung.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026.

4.2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan sejalan dengan RKP Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun

2026 : “Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;

Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Faktor investasi dan hilirisasi industri, menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, mengembangkan ekonomi berbasis desa, memanfaatkan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inisiasi lumbung energi terbarukan—saling terkait dan dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

2. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi;

Dari sisi ekonomi, infrastruktur yang memadai seperti jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memperlancar distribusi barang, mengurangi biaya logistik, dan mempermudah akses ke pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperkuat sektor industri serta jasa.

Di sisi sosial, infrastruktur yang berkualitas seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang sangat penting. Infrastruktur juga memainkan peran kunci dalam mengurangi ketimpangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan menyediakan akses yang merata, menciptakan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang baik seperti rumah sakit, sekolah, dan ruang publik meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

3. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga budaya. Untuk itu, pengembangan SDM harus difokuskan pada peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi.

Penguatan SDM yang unggul dimulai dengan pendidikan yang berkualitas, di mana akses pendidikan yang merata dan fasilitas yang memadai menjadi fondasi yang sangat penting. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga untuk membentuk karakter dan pola pikir yang kritis serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, inovasi menjadi faktor yang tak kalah penting. SDM yang inovatif tidak hanya mampu menguasai pengetahuan yang ada, tetapi juga mampu menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada di masyarakat dan dunia industri. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan teknis, penguatan kreativitas, dan kemampuan berpikir out-of-the-box harus menjadi bagian integral dalam pengembangan SDM.

4. Pengentasan Kemiskinan;

Upaya-upaya dilakukan dengan memberikan akses ke sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha mereka, maka mereka akan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Tidak kalah penting, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, perumahan yang layak, dan air bersih sangat berpengaruh dalam mengurangi beban kemiskinan.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;

Pemerintahan yang efektif memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dan setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, integritas memastikan bahwa seluruh proses

pemerintahan dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip moral yang tinggi. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus dapat menghasilkan dampak yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat, tanpa pemborosan anggaran atau penyalahgunaan wewenang. Pemerintahan yang efektif juga memprioritaskan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, integritas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang berintegritas menuntut para pejabat dan aparatnya untuk selalu bertindak dengan jujur, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;

Dukungan Kualitas lingkungan hidup adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai tidak merusak keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat dan produktif, sehingga dapat terus mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya dalam jangka panjang.

7. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya;

Kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan berbudaya merupakan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera. Keharmonisan memungkinkan saling menghargai meski ada perbedaan, sehingga setiap individu merasa diterima dan dihargai. Keamanan juga penting, karena masyarakat yang aman memungkinkan semua orang beraktivitas tanpa rasa takut, menjaga ketertiban, dan meningkatkan kualitas hidup. Keamanan mencakup perlindungan fisik serta stabilitas sosial, memastikan kenyamanan emosional dan psikologis bagi setiap anggota masyarakat. Penguatan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat. Melestarikan tradisi, seni, dan adat istiadat lokal tidak hanya memberikan kekayaan budaya,

tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan rasa memiliki yang mendalam di antara masyarakat.

4.2.3 Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2026

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 menetapkan dua arah utama dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Penetapan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian sasaran strategis pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nyata dan terukur.

Pertama, program prioritas diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Program ini fokus pada sektor-sektor yang menjadi pengungkit utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan dan pertanian, pembangunan infrastruktur strategis, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berkelanjutan. Program-program ini disusun secara terintegrasi dengan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Provinsi Lampung, sehingga pelaksanaannya dapat mendorong percepatan capaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kedua, program prioritas diarahkan untuk menghasilkan dampak terbaik dalam waktu cepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah menitikberatkan pada efektivitas program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti penyederhanaan birokrasi layanan, digitalisasi pelayanan, serta percepatan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, dan layanan kesehatan primer. Tujuannya adalah menciptakan transformasi layanan publik yang lebih responsif, mudah diakses, dan berkualitas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

4.2.3.1 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Tahun 2026

4.2.3.2 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

4.2.4 Pokok – pokok Pikiran DPRD

DPRD memiliki peran strategis sebagai perwakilan langsung dari rakyat. Setiap anggotanya dipilih melalui proses demokratis dalam pemilihan umum, mencerminkan keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Karena itu, DPRD tidak hanya menjadi simbol representasi, tetapi juga harus menjadi saluran yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang mereka wakili.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, kontribusi DPRD sangat penting, khususnya melalui penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD (pokir). Sesuai ketentuan dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, DPRD diberikan ruang untuk menyampaikan saran dan pendapat berdasarkan hasil kegiatan reses—yakni penjangkaran aspirasi yang dilakukan langsung di tengah masyarakat. Pokok-pokok pikiran ini menjadi masukan penting dalam perumusan kegiatan, penentuan lokasi, dan sasaran program pembangunan yang harus selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

Di Provinsi Lampung, kegiatan reses telah dilaksanakan secara aktif oleh anggota DPRD. Melalui kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing, para legislator tidak hanya menyampaikan informasi pembangunan, tetapi juga membuka ruang komunikasi dua arah. Reses menjadi momentum penting untuk memperkuat kedekatan antara wakil rakyat dengan masyarakat, sekaligus memperdalam pemahaman terhadap realitas dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Dari berbagai hasil penjangkaran aspirasi selama masa reses, ditemukan bahwa masyarakat Lampung masih menghadapi beragam tantangan, terutama di sektor infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Persoalan-persoalan ini menjadi catatan penting yang perlu direspons dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah. Kehadiran DPRD dengan suara dan pokok pikirannya menjadi salah satu pilar penting dalam menjembatani antara kebutuhan rakyat dan arah kebijakan pembangunan.

Berdasarkan usulan yang masuk dalam aplikasi Sipd.ri sampai dengan 1 minggu sebelum Musrenbang Provinsi dilakukan telah dilakukan desk pembahasan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Bersama Perangkat Daerah

terkait yang telah dilaksanakan tanggal 2-5 Juni 2025 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah Usulan POKIR	DITERIMA	DITOLAK	PERANGKAT DAERAH

Kriteria usulan Pokir DPRD adalah kegiatan yang diusulkan adalah kewenangan provinsi dan diusulkan sebagai respon terhadap isu strategis dan permasalahan sektoral perangkat daerah. Usulan diinput ke dalam aplikasi system informasi pembangunan daerah Kemendagri dengan alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> sampai dengan 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan.

4.2.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Tahun 2026 menjadi momentum awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung periode 2025–2029. Pada saat penyusunan perubahan RKPD ini, dokumen RPJMD 2025–2029 masih berada pada tahap perumusan, yakni dalam bentuk Rancangan RPJMD. Namun demikian, arah kebijakan yang termuat dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah telah mulai diintegrasikan ke dalam substansi Perubahan RKPD Tahun 2026.

Sebagai landasan pembangunan jangka menengah, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2029, yaitu **“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”**, menjadi arah utama pembangunan daerah. Visi ini tidak hanya mencerminkan semangat kemandirian dan kemajuan Lampung, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi nyata daerah dalam mewujudkan cita-cita besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan memperhatikan posisi strategis tahun 2026 sebagai tahun transisi dan awal RPJMD, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2026 diarahkan untuk menyelaraskan antara agenda pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Integrasi ini mencakup sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, dan pelaksanaan program yang berbasis pada prinsip kolaboratif dan hasil nyata. Oleh karena itu, RKPD 2026 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lampung, tetapi juga menjadi wujud nyata peran Provinsi Lampung dalam mengakselerasi pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Tabel 4. 2 Keselarasan RPJMD 2025-2029, Prioritas Pembangunan Daerah 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2026

Visi Pembangunan Lampung Tahun 2025-2029 :
“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

Keselarasan

Misi / Cita Pembangunan Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2025
Misi 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Prioritas Daerah 1. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Prioritas Daerah 2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Misi 2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	Prioritas Daerah 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan	Prioritas Daerah 4. Pengentasan Kemiskinan secara tepat sasaran	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Visi Pembangunan Lampung Tahun 2025-2029 :
“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

Keselarasan

Misi / Cita Pembangunan Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2025
Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Prioritas Daerah 5. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Prioritas Daerah 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Prioritas Daerah 7. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan pembangunan nasional menjadi acuan utama dalam merumuskan prioritas, sasaran, serta rencana program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan bersifat dua arah, yaitu *bottom-up* dan *top-down*, sehingga tercipta sinergi antara kebutuhan riil masyarakat di daerah dengan agenda strategis nasional.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Setiap capaian program, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari implementasi nyata kebijakan di tingkat daerah, yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Berikut adalah sinkronisasi program prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 terhadap prioritas nasional Tahun 2026 telah disusun secara sistematis dan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2026

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
1	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
					Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Rumah Sakit
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
3	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan RTRW Provinsi
					Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
4	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
5	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
					Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
					Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
6	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
7	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
8	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
					peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
					Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
10	Prioritas Nasional 3 :Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
11	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
					Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan sampah Regional
					Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
12	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
					Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
13	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
14	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
					Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
					Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
15	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
16	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
					Pelayanan Informasi Publik
	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Penyediaan Akses Internet
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
17	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
18	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengawasan Penanaman Modal
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
19	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Seleksi Atlet Daerah
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
20	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
					Peningkatan kualitas statistik sektoral
21	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
22	Prioritas Nasional 3 :Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
					Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Pengembangan Cagar Budaya
					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
23	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
					Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
24	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
25	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
					Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
26	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
					Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
					Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
					Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
					Fasilitasi Kekayaan Intelektual
					Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
					Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
27	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
28	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
					Fasilitasi BPBBH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HBBK) dan Pasar
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
					Penyiapan Perhutanan Sosial
29	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pencapaian Ketahanan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
					Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
					Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
30	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran Dagang Internasional/Nasional
					Peningkatan Citra Produk Ekspor
31	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
32	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
					Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
33	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				

4.2.6 Rencana Pengembangan Wilayah

4.2.7 Rencana Pembangunan Rendah Karbon (Emisi Gas Rumah Kaca)

4.2.8 Dukungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4.2.9 Dukungan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

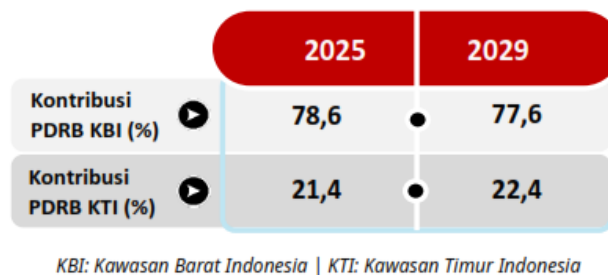
Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 mencakup arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan pencapaian indikator makro pembangunan, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kewilayahan, dan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam program-program prioritas.

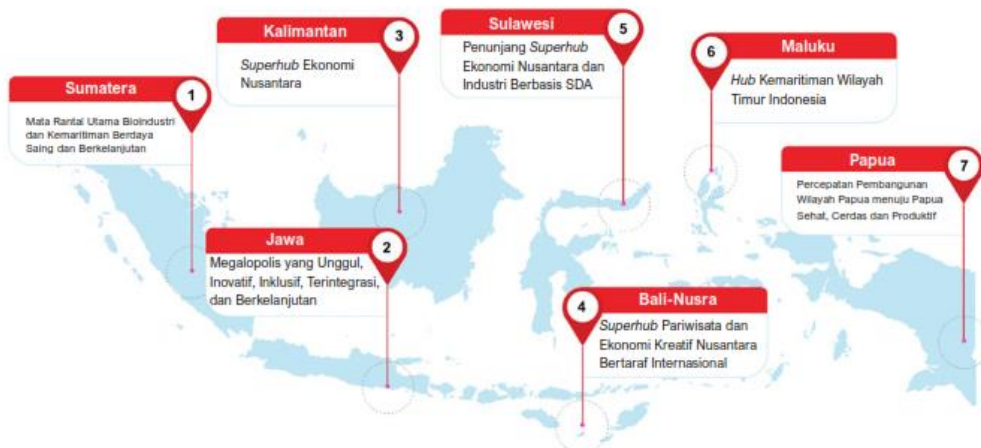
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera dalam RKP 2026

Pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju **Indonesia Emas 2045**. Pembangunan wilayah ditujukan juga untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Tema dan sasaran pembangunan wilayah periode 2025-2029 disampaikan pada infografis di bawah ini.

Gambar 5. 1 Kontribusi PDRB per Wilayah



Gambar 5.2 Tema Wilayah Tahun 2025-2029



Gambar 5.3 Sasaran Pembangunan Wilayah Sumatera

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025 (Rata-rata 2025-2029)	6,3	22,1	85,0	4,48-4,73	7,49-8,49
2029	7,2 (2029)	22,5	124,4	3,82-4,42	4,24-5,24

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung target di tahun 2029 yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan Indeks Modal Manusia mencapai 0,59, penurunan kemiskinan mencapai 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan *highlight* intervensi umum. Sedangkan, untuk intervensi khusus pembangunan wilayah tahun 2025-2029 per provinsi.

(1) Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

(2) Pendekatan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Untuk itu, didorong pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi wilayah serta pembangunan di daerah afirmasi.

Selain itu terdapat wilayah otonomi khusus yang menggambarkan kebijakan kewilayahan asimetris. Prioritas intervensi Kebijakan pembangunan Perdesaan dan Daerah Afiriasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, Peningkatan Pengelolaan Urbanisasi, Perkotaan, dan Pusat Pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Pusat menargetkan sasaran makro pembangunan nasional tahun 2026 di Provinsi Lampung. Target sasaran Nasional di Provinsi Lampung, Prioritas Nasional dan *Highlight* Indikasi Intervensi di Provinsi Lampung ditunjukkan oleh Matrik dibawah ini.

Gambar 5.4 Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025 (Rata-rata 2025-2029)	6,3	55,1	2,2	9,50 - 10,00	0,318 - 0,321	0,55	62,79	70,99	3,86 - 4,00
2029 (2029)	7,2	80,6	2,2	5,79 - 6,79	0,271 - 0,275	0,58	72,13	71,84	3,25 - 3,73

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Lampung

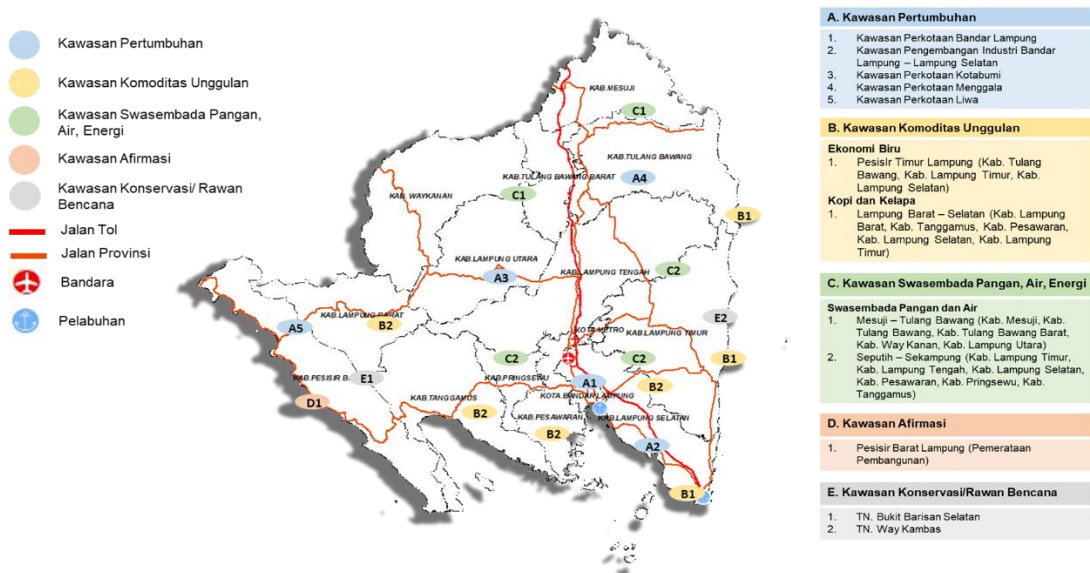
Arah pembangunan kewilayahan sangat penting karena menjadi landasan bagi pembangunan yang adil, berkelanjutan dan berkesinambungan di berbagai wilayah. Pembangunan yang berarah ini memastikan bahwa setiap daerah dapat memanfaatkan potensi uniknya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Arah pembangunan kewilayahan yang jelas dan terukur sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan arah pembangunan kewilayahan yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun

2025-2045 dilaksanakan melalui pembiayaan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pembiayaan lainnya.

Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN di Provinsi Lampung yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Arah pengembangan kewilayahan Provinsi Lampung pada RPJMN dibagi menjadi 5 (lima) kawasan, yaitu: Kawasan Pertumbuhan; Kawasan Komoditas Unggul; Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi; Kawasan Afirmasi serta Kawasan Konservasi/Rawan Bencana, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.5 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Lampung yang Tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Dukungan program dan kegiatan pada Arah Pengembangan Kewilayahan RPJMN 2025-2029, tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 pada bab IV. Lokasi prioritas rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan highlight indikasi intervensi antara lain:

Tabel 5.2 Lokasi Prioritas Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan Highlight Indikasi Intervensi

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
A. KAWASAN PERTUMBUHAN		
1	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung	a. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung antara lain melalui: • Penyusunan master plan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
2	Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Selatan	b. Pengembangan koridor industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, dan industri makanan & minuman)
		c. Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu a.l. VCO, tepung kelapa dan arang tempurung serta produk hilirisasi lanjutankelapa a.l. krimer nabati, santan instan dan karbon aktif
		d. Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu a.l. raw sugar, GKP, molase, bagasse serta produk hilirisasi lanjutan tebu a.l. bioetanol, sirup glukosa dan bioplastik
		e. Pengembangan pelabuhan Panjang
		f. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (PHTC)
		g. Pengembangan SPAM Regional Pesawaran-Bandar Lampung-Lampung Selatan
		h. Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang
		i. Preservasi jalan ruas Bandar Lampung- Gedongtataan-Pringsewu-Kota Agung dan Bandar Lampung-Metro-Sukadana
		j. Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Interkoneksi Sumatera-Jawa (Jembatan Selat Sunda)
		k. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 Kv Kalianda-Merak (Interkoneksi 500 Kv Sumatera-Jawa)
		l. Pembangunan TPST Regional Bandar Lampung-Metro-Lampung Selatan
		m. Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bandar Lampung
		n. Pengembangan Kawasan Kota Baru Lampung
		o. Pembangunan Infrastruktur PLTP Rajabasa

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		p. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Serta Kotabumi produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
3	Kawasan Perkotaan Kotabumi	a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kotabumi, antara lain melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan /pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan b. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC)
		c. Pengembangan SPAM Perkotaan Kotabumi
		d. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Kotabumi–Terbanggi Besar dan Kotabumi–Bukit kemuning–Blambangan Umpu
		e. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Mayor Jenderal HM Ryacudu Kotabumi (PHTC)
		f. Pengembangan kota agropolitan Kotabumi
4	Kawasan Perkotaan Menggala	a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Menggala, antara lain melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan b. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC)
		c. Pengembangan SPAM Perkotaan Menggala
		d. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Menggala– Wiralaga Mulya dan Menggala–Panaragan
		e. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu- anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Menggala Tulang Bawang (PHTC)

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		f. Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala) g. Pengembangan kota agropolitan Menggala
5	Kawasan Perkotaan Liwa	a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Liwa, antara lain melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan b. Pengembangan SPAM Perkotaan Liwa c. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Liwa–Bukit Kemuning dan Liwa–Krui d. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/ Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa (PHTC) e. Pengembangan kota agropolitan Liwa f. Pengembangan kota agropolitan Liwa
B. KAWASAN KOMODITAS UNGGULAN		
1	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab.Lampung Selatan)	a. Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai b. Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan c. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap d. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan tangkap e. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat f. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan g. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan h. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
2	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa yaitu Lampung	a. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (kopi, kelapa) b. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, kelapa) c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, kelapa)

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
	Barat - Selatan (Kab.Lampung Barat, Kab. Tanggamus. Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur)	d. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, kelapa)
		e. Pengembangan Produk Bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
		f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan kelapa
C. KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR DAN ENERGI		
1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Mesuji-Tulangbawang (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Rawajitu, D.I. Way Rarem, D.I. Way Umpu, D.I. Rawapitu, dan D.I.R. Rawa Mesuji Ata b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah c. Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi) d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan perternakan) e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura g. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu h. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, Sub-DAS Way Umpu i. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik j. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern /benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pasca panen melalui peningkatan prasarana pascapanen k. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama l. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
2	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Seputih-Sekampung (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus)	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I. Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, D. I. Way Tulungmas, D. I. Way Tebu Sistem b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah c. Peningkatan luas lahan pertanian (Ekstensifikasi) d. Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi) e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) f. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura g. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura h. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, DAS Way Jepara, dan DAS Way Kambas i. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, dan DAS Way Jepara j. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/ pakan organik k. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas;

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen
		l. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		m. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
D. KAWASAN AFIRMASI		
1	Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan)	a. Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan b. Peningkatan ketahanan bencana c. Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah d. Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perkebunan (kopi) dan pariwisata bahari e. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah f. Peningkatan 6A pariwisata di Pesisir Barat g. Peningkatan Bandar Udara Taufik Kiemas Krui h. Pengembangan SPAM Perkotaan Krui i. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan Krui (PHTC) j. Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi & akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital k. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan l. Peningkatan tips RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Pesisir Barat

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
E. KAWASAN KONSERVASI DAN RAWAN BENCANA		
1	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana yaitu: TN Bukit Barisan Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat) dan TN Way Kambas (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah)	a. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi b. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi c. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik d. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri e. Penguatan Hutan Lestari Perlindungan dan Pengamanan Hutan f. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi g. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana h. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
2	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Lampung (Kab. Tanggamus, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Lampung Barat)	a. Penerapan Nature Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kawasan Perkotaan Bandarlampung dan Pesisir Selatan Lampung (Megathrust Selat Sunda) b. Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
PROVINSI LAMPUNG		a. Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita b. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: • Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran • Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah • Revitalisasi pendidikan nonformal • Penguatan pengetahuan dan eksplorasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas c. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: • Penurunan kematian ibu dan anak • Pencegahan dan Penurunan stunting • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro • Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis d. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui:

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	• Penuntasan TBC • Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa • Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
	e. Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: • Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
	f. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: • Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan • Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	g. Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: • Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan • Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi • Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik • Penerapan Internet of things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time • Perluasan penggunaan kendaraan listrik
	h. Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: • Perluasan infrastruktur digital • Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital • Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
	i. Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: • Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital • Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN • Digitalisasi layanan publik prioritas • Pengembangan ekosistem layanan Publik digital
	j. Memperkuat reformasi hukum, terutama di Lampung, antara lain melalui: • Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	• Penanggulangan judi dan penyelundupan • Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2025-2029, 2025

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap wilayah memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda—baik dari segi sumber daya alam, letak geografis, budaya, maupun sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur yang selaras dengan potensi tersebut akan memberikan nilai tambah yang signifikan. Pada daerah dengan potensi pariwisata tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas pendukung wisata akan membuka akses, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, wilayah dengan potensi pertanian atau perikanan memerlukan infrastruktur irigasi, jalan produksi, dan sarana logistik yang memadai untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat konektivitas antar wilayah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur berbasis potensi akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih resilient, inklusif, dan mandiri. Pada dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 telah tercantum kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung berdasarkan potensi wilayahnya. Rencana pembangunan ini merupakan kewenangan provinsi dimana pembangunannya bersumber pada alokasi dana APBD Provinsi ataupun diusulkan melalui pembiayaan APBN. Berikut adalah rencana pembangunan infrastruktur berdasarkan potensi wilayah di Provinsi Lampung.

Tabel 5.3 Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah

No.	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
Koridor Ekonomi Wilayah I : Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi		
1	Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur	• Kawasan Pendidikan Terpadu Kota Metro • Kawasan Agropolitan Metro • WPPI Kawasan Industri Lampung Tengah • Terminal Tipe A Betan Subing Lampung Tengah • WPPI Lampung Timur

No.	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
		• Jalan akses KSPN • Dukungan perwujudan Sistem Prasarana Jaringan Perkeretaapian Pringsewu-Rejosari-Metro-Sukadana • Pembangunan jalan penghubung/lingkar Kawasan Metropolitan Lampung Raya
2	Bandar Lampung – Pesawaran	• Rencana Jaringan KA Tanjung Karang – Pringsewu • Kawasan Industri Tegineneng • Kawasan Pangkalan Utama TNI AL Pesawaran • Terminal Barang Tegineneng • Pembangunan Jalur Lintas Kereta Api Tegineneng – Bandar Lampung - Tarahan
3	Bandar Lampung – Pesawaran – Lampung Selatan	• Kawasan Waterfront City • Kawasan Pendidikan UNILA-ITERA-UIN RIL • Kawasan Industri Tegineneng • Kawasan sekitar bandara Radin Inten II • Kawasan Kota Baru Jatiagung • Kawasan Industri Lampung • Pengembangan Jalan Tol Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung • Pembangunan Stasiun Relung Helok, Karangsari, Sabah Balau, dan Stasiun Bandara
Koridor Ekonomi Wilayah II : Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism		
1	Lampung Utara – Way Kanan	• Rencana pelabuhan Dermaga Waduk Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara; • Bendung Way Besai dan Bendungan Way Bumi Agung di Kabupaten Lampung Utara • Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan • Pengembangan Panas Bumi Way Umpu
2	Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji	• Kawasan industri Tulang Bawang • Kawasan industri Tulang Bawang Barat • Kawasan industri Mesuji • Dermaga Gunung Terang di Kabupaten Tulang Bawang Barat • Pelabuhan Pengumpan regional • Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;

No.	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
		• Pelabuhan perikanan pantai Teladas di Kabupaten Tulang Bawang; • Pengembangan Dermaga Gunung Terang • Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Megow Pak yang melintasi sungai Tulang Bawang –Tulang Bawang Barat – Mesuji
Koridor Ekonomi Wilayah III : Hub Ekonomi Biru, Branding Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis Sumber Daya Alam		
1	Tanggamus	• Kawasan Industri Maritim • Kawasan geothermal ulu belu • Pelabuhan Perikanan • Sentra industri kelautan • Sentra industri pengolahan ikan • Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Padang Cermin – Sp. Kota Agung • Pembangunan Dermaga di Pematang Sawa • Pembangunan Pelabuhan di Pekon Martanda dan Pekon Tampang Tua • Pengembangan Pelabuhan Laut Batu Balai, Kecamatan Kota Agung Timur
2	Pringsewu	• Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang – Pringsewu dan Rejosari-Pringsewu • Bagian dari pengembangan Jalan Tol Bandar Lampung (SS Natar) – Kota Agung – BTS. Bengkulu
3	Pesisir Barat	• Bandar Udara Muhamad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat • Sistem jaringan air bersih terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. • Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Pisang • Pengembangan Kawasan Industri • Jalan Tol Bengkunt – Batas Provinsi Lampung – • Pembangunan Jalan Lingkar Exit Tol Wilayah Barat
4	Lampung Barat	• Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung di Kabupaten Lampung Barat; • Rencana pelabuhan Heni Arong di Kabupaten Lampung Barat • Penyediaan Infrastruktur Hijau seperti Kebun Raya Liwa

No.	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
		• Pengembangan Akses menuju Geopark • Revitalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Dermaga Lumbok, sebagai pelabuhan pengumpan pada perairan berdasarkan Potensi Wilayah Danau Ranau, yang melayani antar Provinsi dan Kabupaten maupun lokal • Penataan kawasan permukiman tradisional, guna meningkatkan nilai tambah KSPN Danau Ranau • Restorasi ekosistem taman TNBBS

5.3 Arah Kebijakan Indikator Makro Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Lampung berupaya untuk melakukan intervensi terhadap pembangunan kabupaten/kota. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung diharapkan dapat mendukung pencapaian 6 (enam) indikator kinerja makro Provinsi Lampung yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

5.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah.

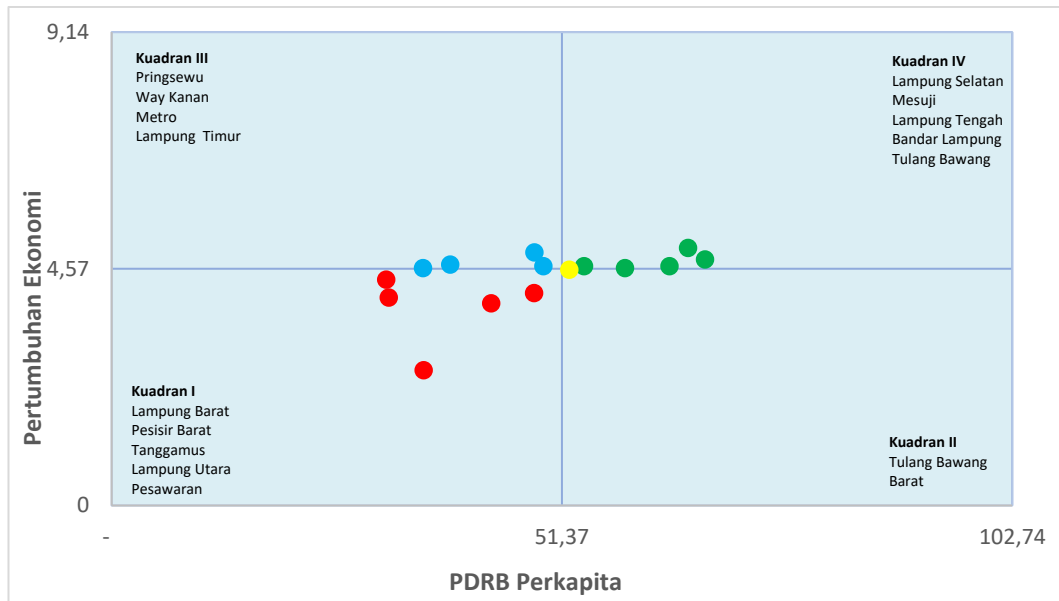
Tabel 5. 4 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi
Lampung Barat	28.86	4.36
Tanggamus	29.60	4.01
Lampung Selatan	50.46	4.62
Lampung Timur	46.28	4.62
Lampung Tengah	59.72	4.62
Lampung Utara	44.75	4.10
Way Kanan	35.58	4.65
Tulang Bawang	63.34	4.75
Pesawaran	40.90	3.90
Pringsewu	33.39	4.58
Mesuji	54.42	4.58
Tulang Bawang Barat	48.70	4.55
Pesisir Barat	33.78	2.61
Bandar Lampung	61.65	4.97
Metro	45.24	4.88
Provinsi Lampung	48.19	4.57

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian PE kabupaten/kota dan PDRB Per Kapita tahun 2024, maka capaian PE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 5. 1 Analisis Kuadran Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024



Tabel 5. 5 Analisis Kuadran PDRB per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per Kapita dan PE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Utara dan Pesawaran.
	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita LEBIH TINGGI dan PE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Tulang Bawang Barat.
	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita LEBIH RENDAH dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih rendah dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Pringsewu, Way

		Kanan, Kota Metro dan Lampung Timur.
	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Selatan, Mesuji, Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung dan Tulang Bawang.

Berdasarkan peta di atas, dapat dilihat bahwa struktur dan pola pertumbuhan ekonomi 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih menunjukkan adanya disparitas yang cukup tajam. Kelompok kabupaten/kota yang berwarna merah merupakan kelompok kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang lebih rendah dari capaian provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, prioritas intervensi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan perlu diarahkan ke kabupaten/kota tersebut, Intervensi kebijakan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. Mengoptimalkan sektor unggulan agar dapat mendongkrak PDRB perkapita;
2. Mendorong investasi di sektor industri padat karya; dan
3. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2024 pada hakekatnya merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Lampung menggambarkan pula percepatan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Lampung, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Lampung.

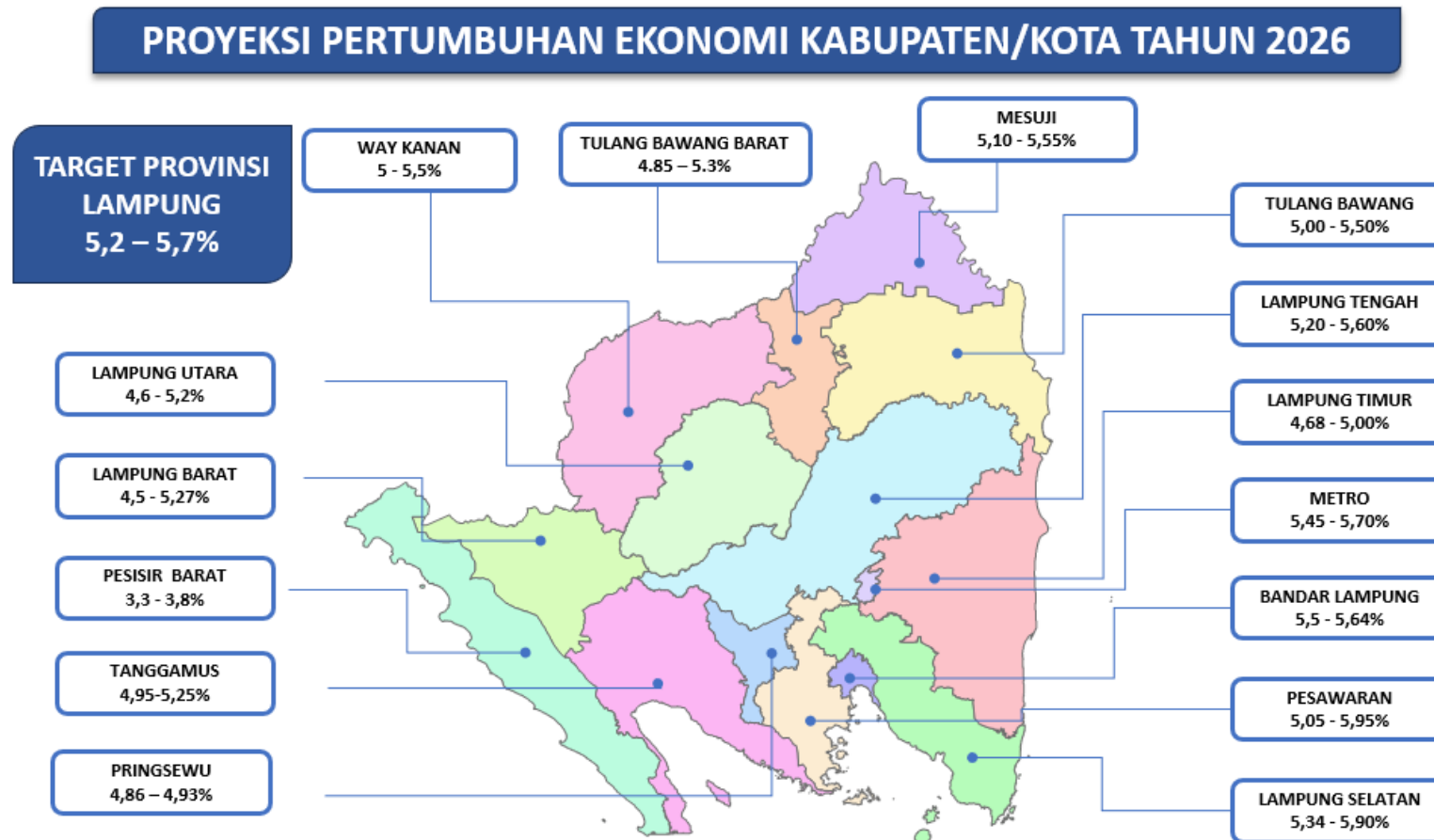
Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita pada Tahun 2024 melebihi capaian Provinsi Lampung, yaitu: Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang. Namun demikian, masih terdapat 5 (lima) kabupaten yang capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita masih dibawah capaian Provinsi Lampung,

yaitu: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

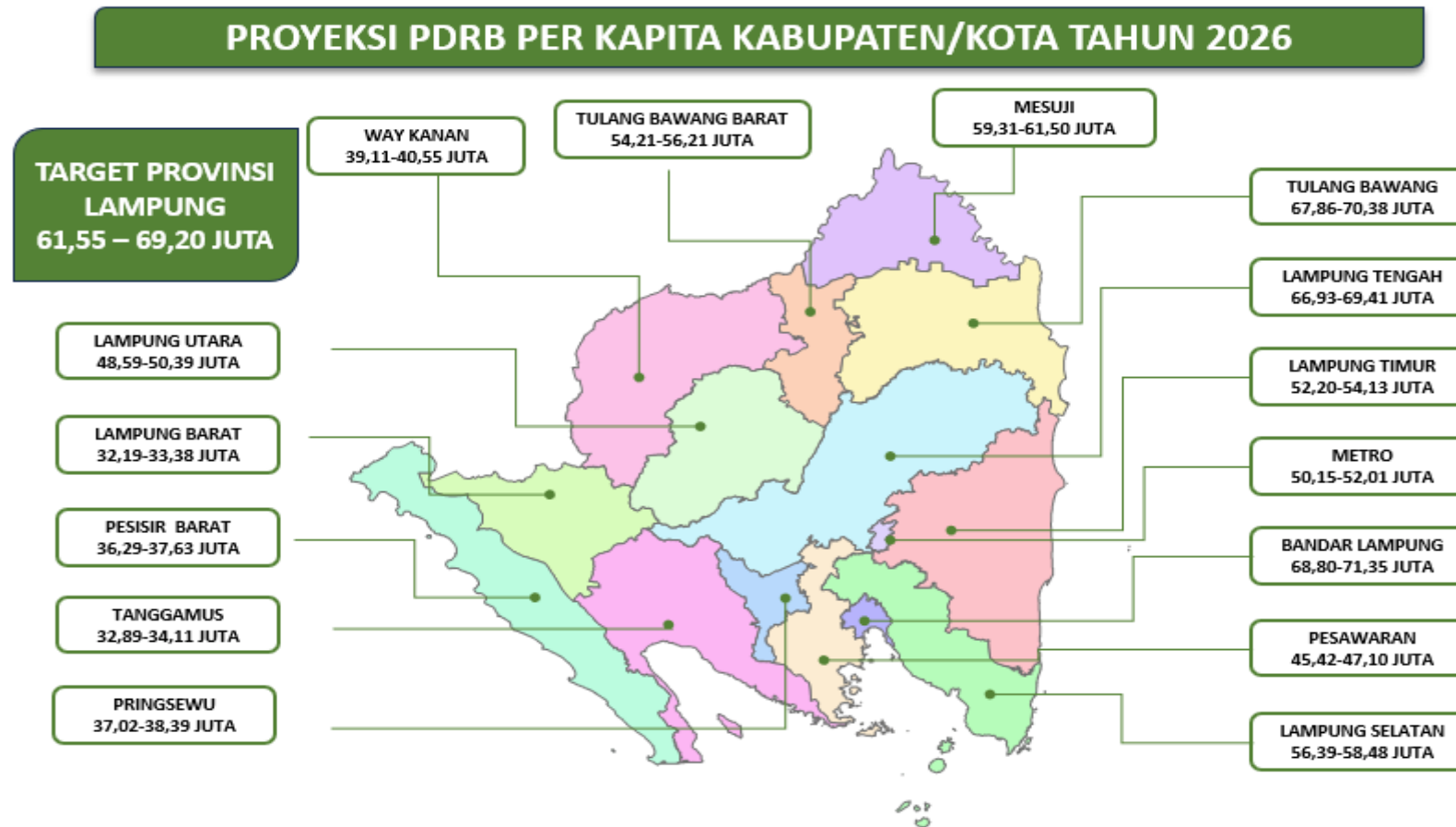
Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Lampung, telah direncanakan program-program Pembangunan berbasis kewilayahan guna pengembangan kawasan pariwisata, kawasan industri, infrastruktur dasar dan jaringan transportasi. Ke depan diharapkan, program-program tersebut dapat menjadi pengungkit pertumbuhan sumber-sumber ekonomi baru. Program-program tersebut meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Kota Baru dan sekitarnya.
2. Pengembangan Kawasan Industri Katibung dan KAIL.
3. Pengembangan Pelabuhan Sebalang di Lampung Selatan.
4. Pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC) di Lampung Selatan.
5. Pengembangan Pelabuhan Panjang dan Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Lematang.
6. Pengembangan Kawasan Pariwisata Teluk Lampung.
7. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Ekonomi Lampung.
8. Pengembangan Jalur Kereta Api Tarahan–Bakauheni dan jalur logistik Tegineneng-Tarahan.
9. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri.
10. Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto di Way Kanan.
11. Pembangunan/peningkatan Sarana dan Prasarana Bandar Udara pada Daerah Afiriasi 3TP, terutama di Pesisir Barat (Bandara Taufik Kiemas).
12. Pengembangan Jalur KA Tarahan – Bakauheni dan jalur logistik Tegineneng – Tarahan.
13. Revitalisasi Tambak Perikanan dan Udang di Kawasan Pantai Timur Lampung.
14. Pembangunan dan Pengembangan Terminal type B Lampung.
15. Pengembangan Pemanfaatan Bendungan Way Sekampung.

Gambar 5. 5 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2026



Gambar 5. 6 Penetapan Target PDRB per kapita Kabupaten/Kota Tahun 2026



5.3.2 Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang berkualitas akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Gambaran capaian dan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 6 Capaian dan Laju Pertumbuhan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Tahun		Laju Pertumbuhan
	2023	2024	
Lampung Barat	71,72	72,41	0,96
Tanggamus	69,93	70,54	0,87
Lampung Selatan	71,55	72,15	0,84
Lampung Timur	72,44	73,05	0,84
Lampung Tengah	73,39	74,16	1,05
Lampung Utara	70,78	71,42	0,90
Way Kanan	70,51	71,17	0,94
Tulang Bawang	71,56	72,24	0,95
Pesawaran	69,46	70,24	1,12
Pringsewu	73,11	73,84	1,00
Mesuji	67,79	68,59	1,18
Tulang Bawang Barat	69,38	70,04	0,95
Pesisir Barat	70,40	71,04	0,91
Kota Bandar Lampung	79,86	80,46	0,75
Kota Metro	79,85	80,41	2,52
Provinsi Lampung	72,48	73,13	2,03

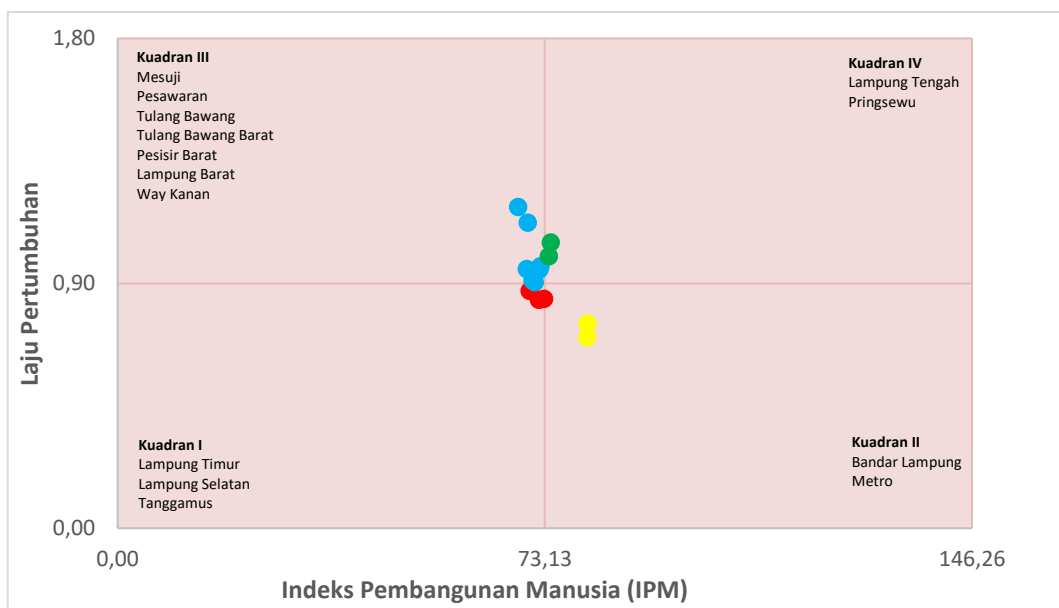
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi, Capaian IPM kabupaten/kota berkisar antara 68,59 (Kabupaten Mesuji) hingga 80,46 (Kota Bandar Lampung). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, terdapat 2 (dua) kota dengan status “Sangat Tinggi” (capaian IPM ≥ 80), yaitu Kota Bandar Lampung (80,46) dan Kota Metro (80,41), 12 kabupaten dengan status

“Tinggi” (capaian $70 \leq \text{IPM} < 80$. Sedangkan 1 (satu) kabupaten lainnya berstatus “Sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) yaitu Kabupaten mesuji (68,59), dan sudah tidak ada lagi yang berstatus “Rendah” ($\text{IPM} < 60$),

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten dan kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Grafik 5.2 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024



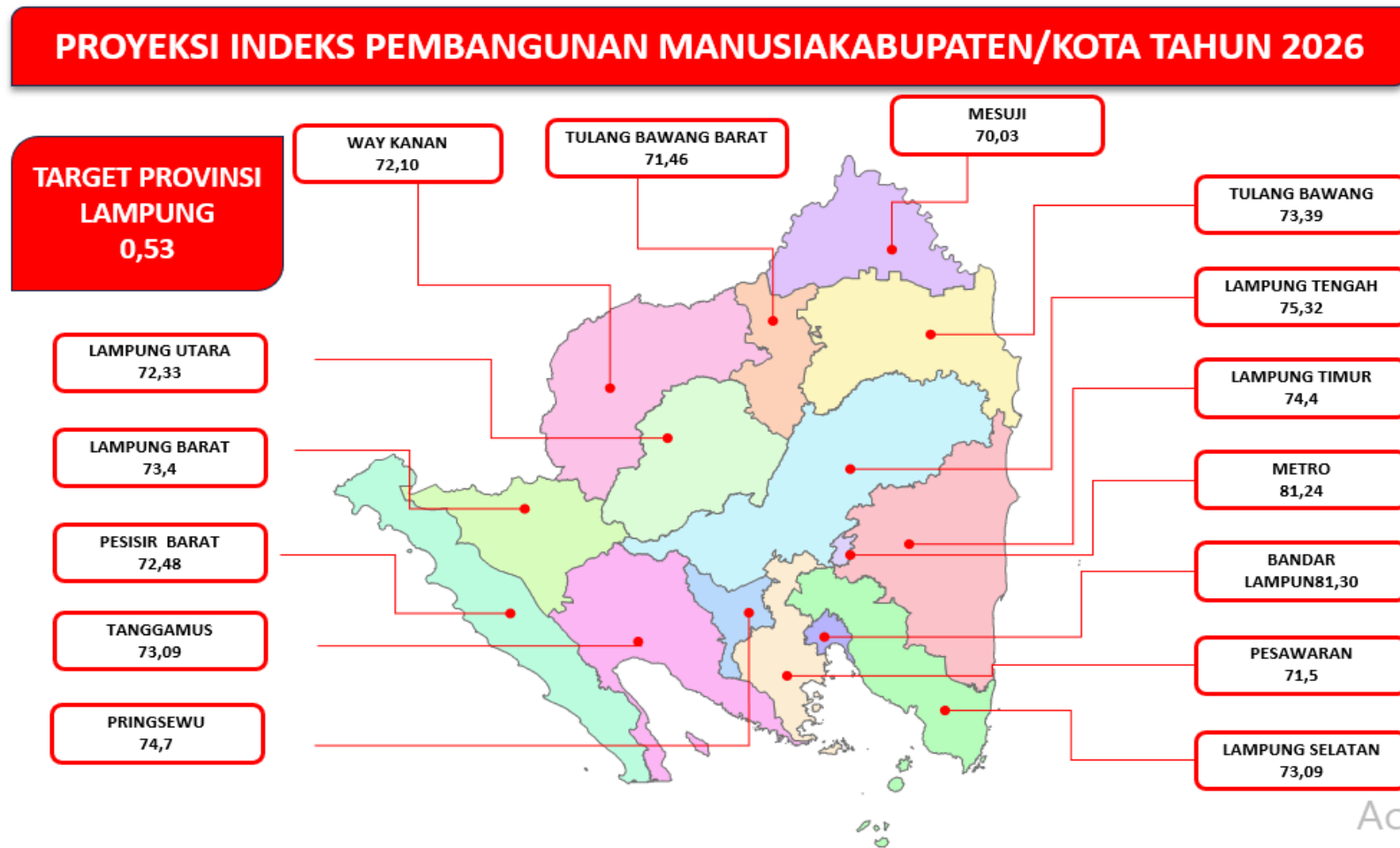
Tabel 5. 7 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus.
	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan dan Laju	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan IPM lebih rendah

	Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	dibanding capaian provinsi, Kelompok kota tersebut adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.
●	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan Laju Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Way Kanan.
●	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM Status “Sedang”, antara lain melalui peningkatan akses Pendidikan dan pelayanan Kesehatan serta pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antarwilayah kabupaten/kota, sehingga mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah,

Gambar 5, 2 Penetapan Target IPM Kabupaten/Kota Tahun 2026



5.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

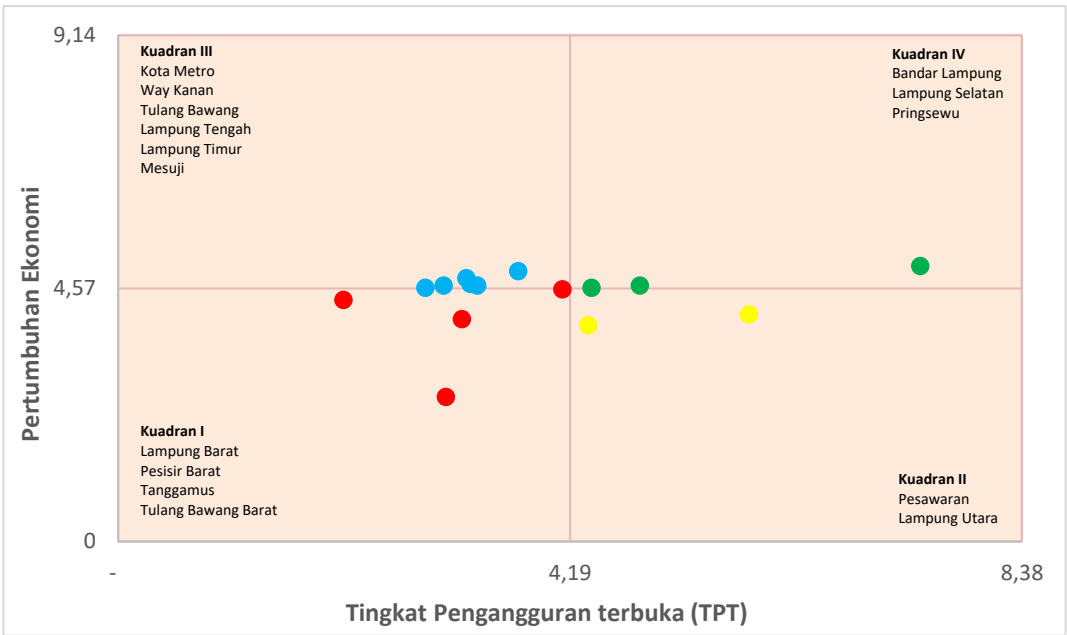
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja, Persentase TPT di suatu wilayah menunjukkan kemampuan ekonomi wilayah tersebut untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja, Dalam hal ini, aspek yang diukur yaitu persentase TPT dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, dinilai terhadap capaian Provinsi Lampung, Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan dengan PE tahun 2024, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini,

Tabel 5. 8 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Lampung Barat	2,09	4,36
Tanggamus	3,19	4,01
Lampung Selatan	4,84	4,62
Lampung Timur	3,02	4,62
Lampung Tengah	3,33	4,62
Lampung Utara	5,85	4,10
Way Kanan	3,27	4,65
Tulang Bawang	3,23	4,75
Pesawaran	4,36	3,90
Pringsewu	4,39	4,58
Mesuji	2,85	4,58
Tulang Bawang Barat	4,12	4,55
Pesisir Barat	3,04	2,61
Bandar Lampung	7,44	4,97
Metro	3,71	4,88
Provinsi Lampung	4,19	4,57

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 5, 3 Analisis Kuadran Capaian TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024



Tabel 5. 9 Analisis Kuadran Capaian Persentase TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT dan PE TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian TPT dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan PE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Utara.

●	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Metro, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji.
●	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pringsewu.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran bersifat negatif, dalam arti pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap penurunan jumlah pengangguran, Berdasarkan peta di atas, dapat dilihat bahwa kabupaten/kota dengan warna merah mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu menciptakan lapangan kerja yang luas sehingga belum berdampak pada penurunan jumlah pengangguran secara signifikan, Dampak dari pengangguran yang tinggi berimbas pada penurunan tingkat perekonomian, Oleh karena itu, prioritas intervensi kebijakan dapat diarahkan pada kelompok kabupaten/kota tersebut,

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota, Angka TPT kabupaten/kota berkisar antara 2,09 persen (Kabupaten Lampung Barat) hingga 7,44 persen (Kota Bandar Lampung), Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan tingkat penyerapan angkatan kerja antara kabupaten/kota satu dengan lainnya,

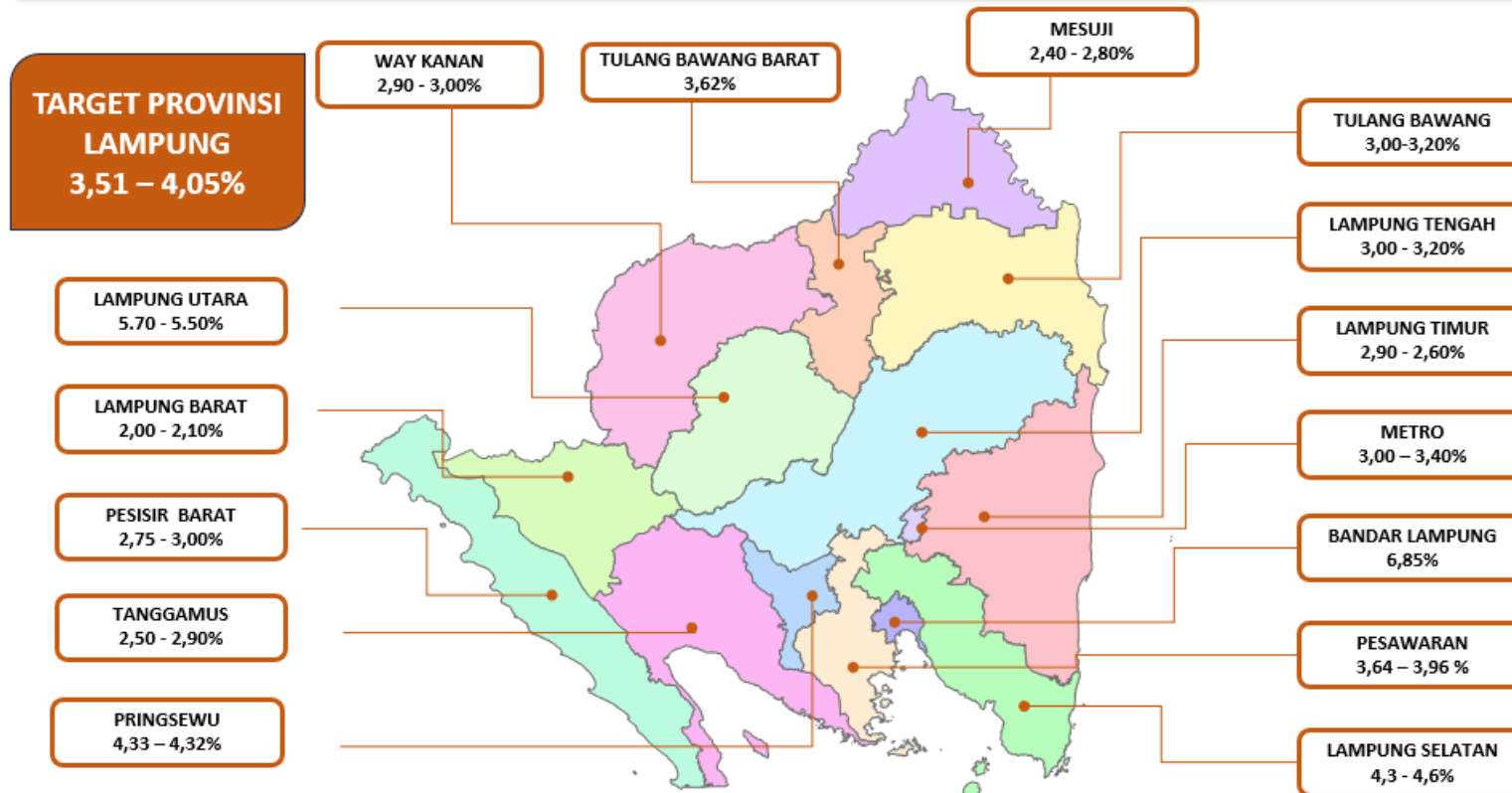
Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada,

Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja, Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Lampung sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi,

Berdasarkan hasil capaian TPT tahun 2024 dan berbagai pembentuk lainnya, ditargetkan angka TPT Provinsi Lampung sebesar 3,51-4,05 persen pada tahun 2026, Sementara di tingkat kabupaten/kota, ditargetkan TPT kabupaten/kota pada tahun 2026 berkisar antara 1,54 persen (Kabupaten Lampung Barat) hingga 7 persen (Kota Bandar Lampung), Secara rinci, target capaian TPT kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2026 dapat disimak pada gambar di bawah ini,

5. 9 Target Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Tahun 2026

PROYEKSI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

5.3.4 Persentase Penduduk Miskin

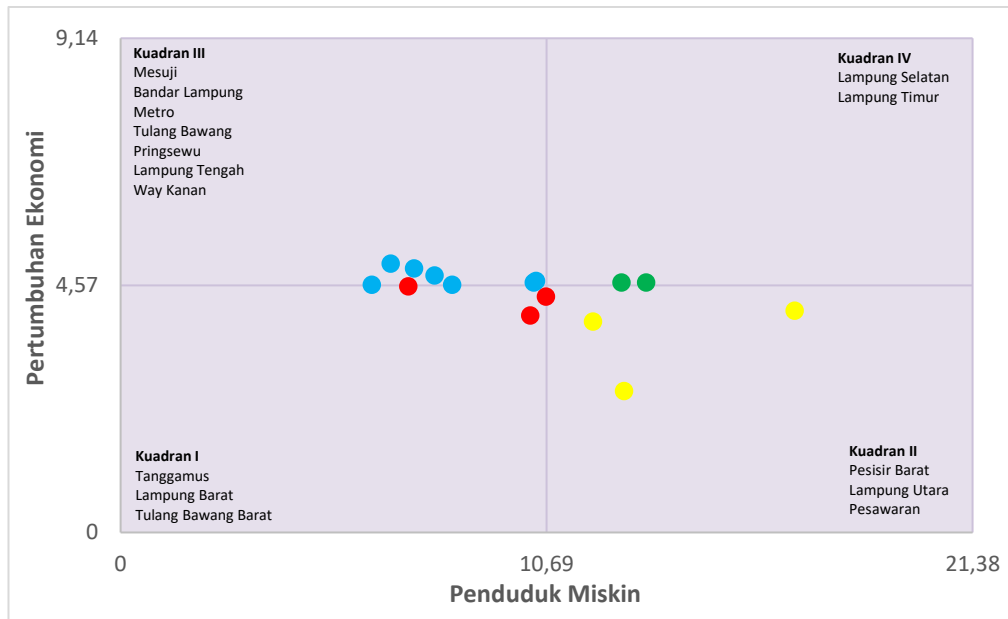
Penduduk miskin didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, aspek yang diukur yaitu persentase penduduk miskin dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, dinilai terhadap capaian Provinsi Lampung, Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 10 Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin	Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Lampung Barat	10,68	4,36
Tanggamus	10,28	4,01
Lampung Selatan	12,57	4,62
Lampung Timur	13,19	4,62
Lampung Tengah	10,37	4,62
Lampung Utara	16,92	4,10
Way Kanan	10,43	4,65
Tulang Bawang	7,88	4,75
Pesawaran	11,86	3,90
Pringsewu	8,32	4,58
Mesuji	6,31	4,58
Tulang Bawang Barat	7,22	4,55
Pesisir Barat	12,64	2,61
Bandar Lampung	7,37	4,97
Metro	6,78	4,88
Provinsi Lampung	10,69	4,57

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 5. 4 Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024



Tabel 5. 11 Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH TINGGI dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

●	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH RENDAH dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dan Pertumbuhan Ekonomi lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mesuji, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Way Kanan.
●	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH TINGGI dan dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur.

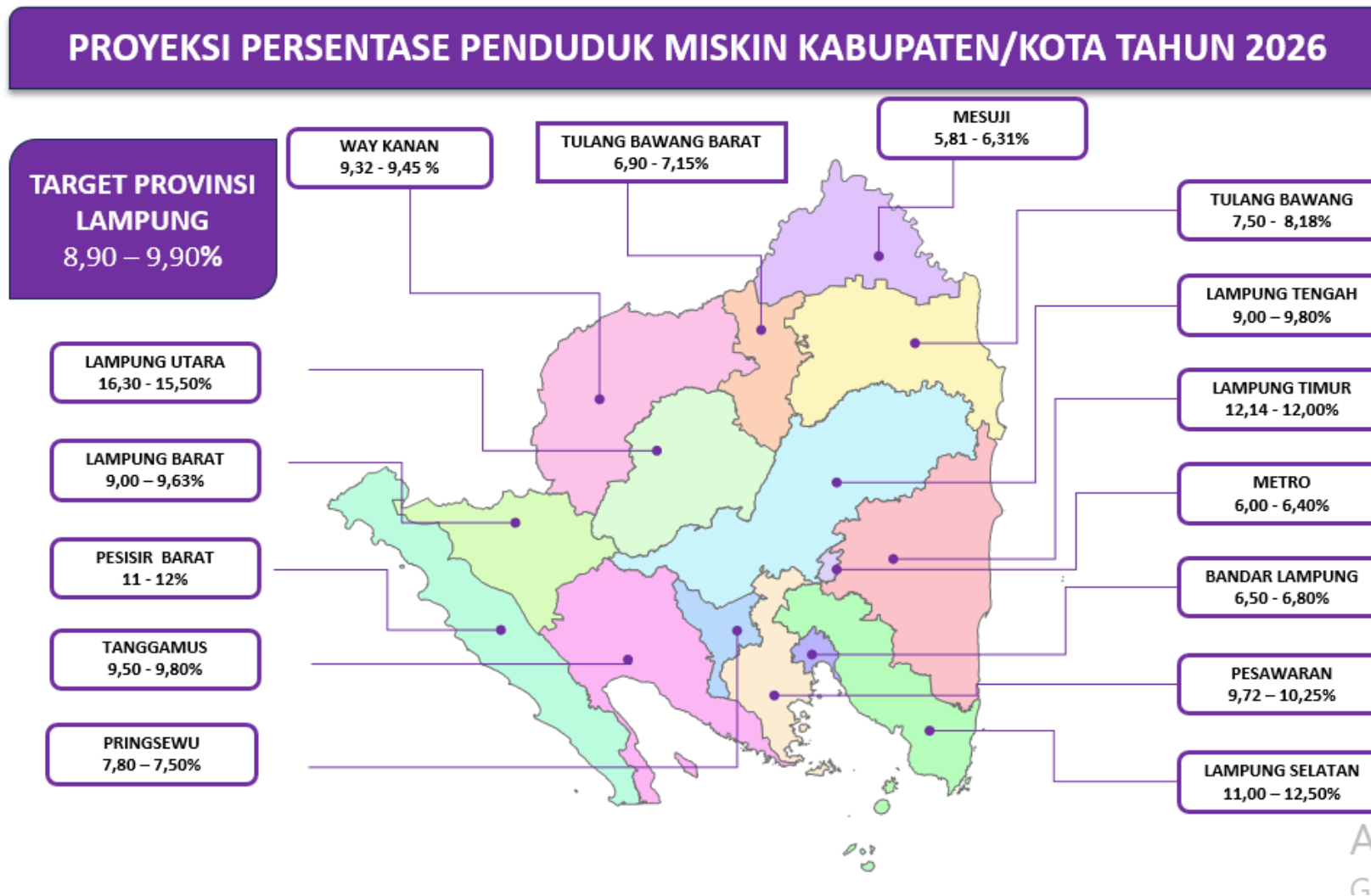
Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren terus menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana persentase penduduk miskin masih lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding provinsi terutama di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap capaian indikator pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin tahun 2024, terdapat 3 (tiga) kelompok kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada provinsi dan persentase penduduk miskin lebih tinggi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan diprioritaskan pada kelompok kabupaten/kota yang berwarna kuning. Salah satu strateginya adalah dengan mendorong peningkatan investasi sehingga dapat menurunkan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Investasi tidak hanya di sektor swasta tetapi juga investasi publik atau pemerintah.

Untuk itu Provinsi Lampung fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Provinsi

Lampung terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2024 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia. Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024.

Gambar 5. 10 Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2026



5.3.5 Ketimpangan Wilayah (Rasio Gini)

Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan salah satu alat ukur tingkat ketimpangan pendapatan antar individu di satu wilayah yang mencerminkan sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi *Gini Ratio* di suatu wilayah, berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut.

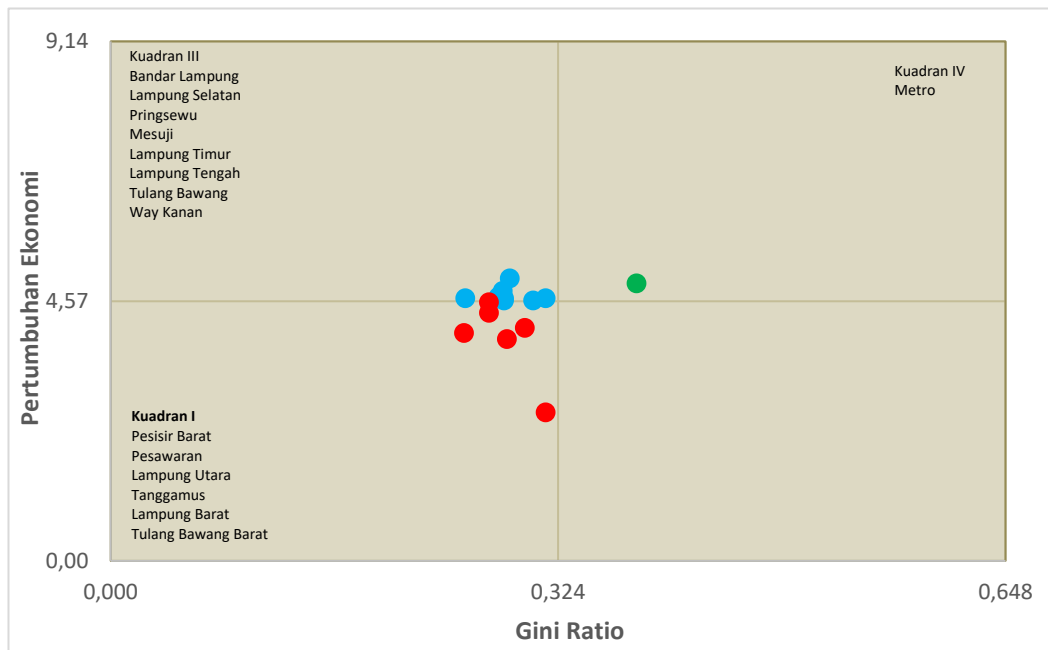
Dalam hal ini, aspek yang diukur yaitu nilai *Gini Ratio* serta tingkat pertumbuhan ekonomi, dinilai terhadap capaian Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian *Gini Ratio* kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024, maka kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 12 Capaian *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	<i>Gini Ratio</i>	Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Lampung Barat	0,274	4,36
Tanggamus	0,256	4,01
Lampung Selatan	0,257	4,62
Lampung Timur	0,315	4,62
Lampung Tengah	0,285	4,62
Lampung Utara	0,300	4,10
Way Kanan	0,281	4,65
Tulang Bawang	0,284	4,75
Pesawaran	0,287	3,90
Pringsewu	0,306	4,58
Mesuji	0,285	4,58
Tulang Bawang Barat	0,274	4,55
Pesisir Barat	0,315	2,61
Bandar Lampung	0,289	4,97
Metro	0,381	4,88
Provinsi Lampung	0,324	4,57

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 5. 4 Analisis Kuadran Capaian *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

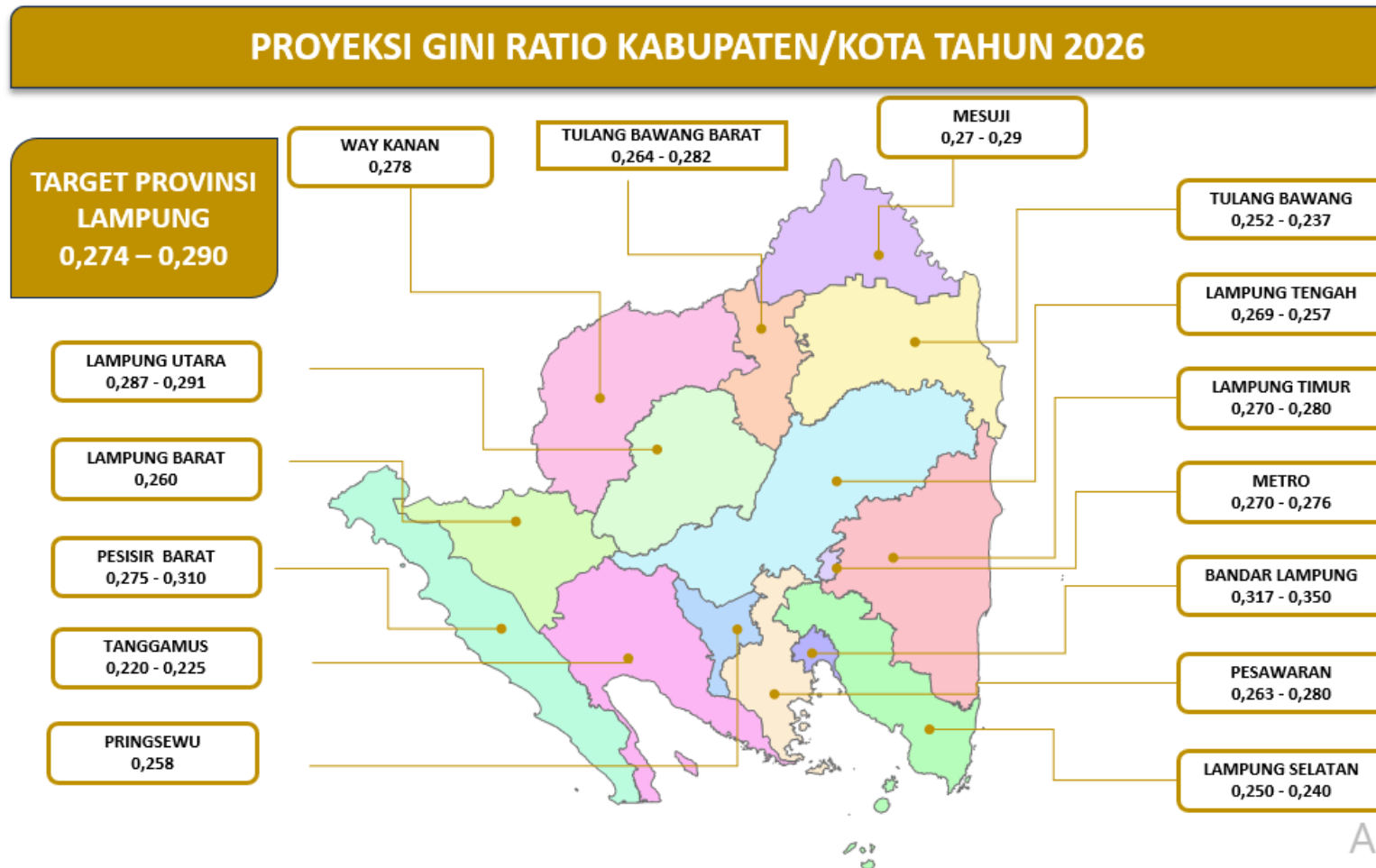


Tabel 5. 13 Analisis Kuadran Capaian *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian <i>Gini Ratio</i> dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian <i>Gini Ratio</i> dan Pertumbuhan Ekonomi lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan dengan capaian <i>Gini Ratio</i> LEBIH TINGGI dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian <i>Gini Ratio</i> lebih tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi lebih rendah dibanding capaian provinsi.

●	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian <i>Gini Ratio</i> LEBIH RENDAH dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten dengan capaian <i>Gini Ratio</i> lebih rendah dan Pertumbuhan Ekonomi lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan.
●	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian <i>Gini Ratio</i> LEBIH TINGGI dan dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian <i>Gini Ratio</i> lebih tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Metro.

5. 10 Penetapan Target *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2026



5.4 Sinergi Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di Provinsi Lampung, terus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar subsektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Pendekatan sinergis yang dimaksud yaitu adanya keterpaduan antara satu dengan yang lain dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan dalam memperdayakan kelompok masyarakat. Artinya, upaya pembangunan ini diorientasikan untuk memperdayakan kualitas kehidupan berkelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam aspek pendidikan, daya beli dan kesehatan. Upaya untuk membangun sinergitas ini, berdasarkan kepada 2 (dua) pendekatan yaitu sinergitas horizontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horizontal yaitu adanya kepaduan antara upaya peningkatan daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan, sinergitas vertikal yaitu adanya keterpaduan strategis antara kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan Provinsi Lampung dan kabupaten/kota, penyusunan RKPD Tahun 2026 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung pada RPD periode Tahun 2025-2026, Berikut tabel Sinergi Pembangunan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan.

**Tabel 5. 14 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pendidikan**

No.	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
1.	Outcome: Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	73,63%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	70,92%	
		3	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	70,12 Nilai	
		4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	62,03 Nilai	
		5	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	67,13 Nilai	
		6	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	60,60 Nilai	

No.	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		7	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	69,67 Nilai
		8	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	80,07 Nilai
		9	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	-	75,84 Nilai
		10	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	64,62 Nilai
		11	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		71,67 Nilai
		12	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	-	71,25 Nilai
		13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	89,91%
		14	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	-	84,93%
		15	Iklim keamanan SMA	-	81,54 Nilai

No.	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		16	Iklm keamanan SMK	-	69,59 Nilai
		17	Iklm keamanan SDLB	-	76,43 Nilai
		18	Iklm keamanan SMPLB	-	74,63 Nilai
		19	Iklm keamanan SMALB	-	73,67 Nilai
		20	Iklm kebinekaan SMA	-	72,75 Nilai
		21	Iklm kebinekaan SMK	-	71,01 Nilai
		22	Iklm kebinekaan SDLB	-	71,64 Nilai
		23	Iklm kebinekaan SMPLB	-	73,98 Nilai
		24	Iklm kebinekaan SMALB	-	74,47 Nilai
		25	Iklm Inklusivitas SMA	-	61,16 Nilai
		26	Iklm Inklusivitas SMK	-	60,01 Nilai
		27	Iklm Inklusivitas SDLB	-	68,60 Nilai
		28	Iklm Inklusivitas SMPLB	-	71,72 Nilai
		29	Iklm Inklusivitas SMALB	-	72,60 Nilai

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

2. Kesehatan

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan Kesehatan, Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju

cakupan kesehatan semesta, Berikut tabel sinergi pembangunan kabupaten/kota di bidang kesehatan.

Tabel 5. 15 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan

No,	Asta Cita/Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
1,	Outcome: Kesehatan Untuk Semua	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	109 per 100.000 kelahiran hidup	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	-	98,9%	
		3	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	0 kab/kota	
		4	Angka Kematian Balita	Angka Kematian Balita	13,80 Per 100.000 Kelahiran Hidup	
		5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	12,80%	
		6	Presentase lanjut usia yang mandiri	-	87 %	
		7	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	-	0,5 %	
		8	Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	-	12%	
		9	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	5%	

No,	Asta Cita/Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		10	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	85%
		11	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	76%
		12	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	50%
		13	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	-	23,4%
		14	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	15 kab/kota
		15	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	40%
		16	Insidensi Tuberkulosis	Insidensi Tuberkulosis	26.853 kasus

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi salah satu urusan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat, Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan strategi dan kebijakan yang dilakukan, Berikut tabel sinergi pembangunan kabupaten/kota untuk urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tabel 5.15 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No,	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri						
1.	Outcome: Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1	Rumah tangga dengan akses air minum aman	-	10,20%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	19.925 Ha	
2	Outcome: Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	3	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Kasus	
		4	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	1 Provinsi	
		5	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	2 Materi Teknis	
		6	Penetapan RTRW	Penetapan RTRW	2 Perda/Perkada	
		7	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	1 Materi Teknis	
		8	Penetapan RDTR	Penetapan RDTR	2 Perda/Perkada	
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
3	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	9	Rumah tangga dengan akses air minum aman	-	10,20 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		10	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	19.925 Ha	
4	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	11	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 kasus	

No,	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		12	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	1 provinsi
		13	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	2 Materi Teknis
		14	Penetapan RTRW	Penetapan RTRW	2 Perda/Perkada
		15	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	1 Materi Teknis
		16	Penetapan RDTR	Penetapan RDTR	2 Perda/Perkada

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk kabupaten/kota dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 16 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No.	Asta Cita/Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan						
1.	Outcome: Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	63,81 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada; Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat; Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat; dan Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 17 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)						
1	Outcome: Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	100	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	100	
		3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	100	
Asta Cita: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						
2	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam	4	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	100	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		5	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	100	
		6	Indeks Penvelenggaraan	Indeks Penyelenggaraan	100	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
	kebakaran sesuai standar	Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran		

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

6. Urusan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Provinsi Lampung yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang sosial dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 18 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Sosial

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan						
1	Outcome: Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	-	Keluarga	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	-	100 Orang	
		3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	-	60 Lembaga	
		4	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
		5	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		6	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		7	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		8	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		9	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
Asta Cita: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas						
2	Outcome: Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	10	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	-	Keluarga	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
11		SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	-	100 Orang		
12		Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	-	60 Lembaga		
13		Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100%		

Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		14	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
		15	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
		16	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
		17	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
		18	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan, Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal, Beberapa indikator dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan, Peningkatan Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang tenaga kerja dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5. 19 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Tenaga Kerja**

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan						
1	Outcome: Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	32%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	6.250 Orang	
		3	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	1.600 Orang	
		4	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	1 Dokumen	
Asta Cita: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas						
2	Outcome: Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	32%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		6	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	6.250 Orang	
		7	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	1.600 Orang	
		8	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	1 Dokumen	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu berkualitas dan berdaya saing. Dalam mendukung peningkatan SDM

yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui kegiatan prioritas diantaranya pemenuhan hak dan perlindungan anak, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kualitas pemuda. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 202 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
1	Outcome: Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,42 Indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Persentase ARG Daerah	Persentase ARG Daerah	3,4 %	
		3	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	901 Nilai	
		4	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	100%	
		5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,94 Indeks	
		6	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	
		7	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,8%

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

3. Urusan Pangan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pangan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 21 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pangan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
1	Outcome: Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	95 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	40%	
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	92,8 Nilai	
		Persentase daerah rentan rawan pangan	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	11%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

4. Urusan Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi melalui indikator Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi dan Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria sehingga Tujuan Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat secara menyeluruh dapat terwujud. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pertanahan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 22 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan

No	Kinerja	Indikator		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi						
1	Outcome: Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	1	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	500 Bidang Tanah	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	1000 Kepala Keluarga	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*) serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 23 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
1	Outcome: Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,20 Poin	Target Provinsi dan Kabupaten/ Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	30,45%	
		3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan pengumpulan Sampah	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan pengumpulan Sampah	29,70%	
Asta Cita: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						
2	Outcome: Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,20 Poin	
		2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	30,45%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Di tahun 2026 diharapkan terdapat peningkatan kualitas layanan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.24 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kinerja	Indikator		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.					
1	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan	1	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang	99% Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil

No	Kinerja	Indikator		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
	kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2	memiliki akta kelahiran Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	memiliki akta kelahiran Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	70 % Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa digunakan indikator yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.25 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	15 Desa	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	425 Orang	
		Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	0 Desa	
		Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	2,337 Desa	

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	1,000 Lembaga	
2,	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	1,51 %	
3,	Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	10 %	
4,	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa	Persentase BUM Desa Maju	Persentase BUM Desa Maju	6 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Provinsi Lampung termasuk provinsi yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal itu ditunjukkan dari tren laju pertumbuhan penduduk yang berangsur menurun dari tahun ke tahun. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.26 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
1	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,71 Indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil
		2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age	19 Kelahiran per	Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
			Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	1000 WUS 15-19 tahun	kemampuan keuangan daerah
		3	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,11 Rata-rata Anak per Wanita	
		4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	85,3%	
		5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	65 Indeks	
		6	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	10,9%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

9. Urusan Perhubungan

Sektor Perhubungan adalah salah satu sektor yang penting dan menentukan dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan, Efisiensi transportasi manusia dan barang akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian suatu daerah. Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kinerja pelayanan perhubungan. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang perhubungan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 37 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perhubungan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: 1. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
1	Outcome: Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	1	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	0,35 Rasio	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	27,73%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari semakin membaiknya indeks SPBE Provinsi Lampung. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 28 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 2. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						
1	Outcome: Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	1	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	2 level	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta
		2	Nilai tingkat kematangan	Nilai tingkat kematangan	2 level	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
			penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		3	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	4 level	
		4	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	20%	
		5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	75 Nilai	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sebagai salah satu urusan bidang yang paling tinggi menyerap angkatan kerja serta menjadi ujung tombak perekonomian apalagi pasca pandemi di Provinsi Lampung, tentunya indikator-indikator yang tersaji harus dapat memenuhi target. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 294 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Kinerja	Indikator		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
1	Outcome: Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,12 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Update dan pengumpulan Data UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM	5%	
		3	Proporsi Jumlah UKM	Proporsi Jumlah UKM	2,70%	
		4	Rasio Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan	2,93%	
		5	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	6,90%	
		6	Peningkatan	Peningkatan	2%	

No	Kinerja	Indikator		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi		

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

12. Urusan Penanaman Modal

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang penanaman modal dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.30 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal

No	Kinerja	Indikator		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri					
1	Outcome: Pencapaian Target Realisasi Penanaman Modal	1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp 10,2 T Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kepemudaan dan olahraga dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.31 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas						
1	Outcome: Meningkatnya Kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	1	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	-	71,38%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	-	8,78%	
		3	Indeks Pembangunan Pemuda	-	53,68 Nilai	
		4	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	-	23,79%	
		5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	-	39,41%	
		6	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	-	12 Kegiatan	
		7	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	-	99%	
		8	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	-	79%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

14. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang statistik dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.32 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Statistik

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan						
1	Outcome: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,9 Poin	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

15. Urusan Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang persandian dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.33 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Persandian**

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: 1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
1	Outcome: Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	40 % Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

16. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Provinsi Lampung yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kebudayaan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.34 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kebudayaan**

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: 1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur					
1	Outcome: Peningkatan Indeks Pemajuan	1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertuniukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertuniukan seni	81,09% Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
	Kebudayaan (IPK)	2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	8,50 %	Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni	2,64%	
		4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat dalam setahun terakhir	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat dalam setahun terakhir	17,05%	
		5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	28,97%	
		6	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekstrakurikuler kesenian	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekstrakurikuler kesenian	41,59%	
		7	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	0,45%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

17. Urusan Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang perpustakaan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.35 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perpustakaan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: 1. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur					
1	Outcome: Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70 Indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil
		2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72 Nilai	Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

18. Urusan Kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Lampung, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kearsipan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.36 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kearsipan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						
1	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan	1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di	67 Nilai	Daerah menyesuaikan besaran target

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
	Memori Kolektif Bangsa	lingkup Pemerintahan Daerah	lingkup Pemerintahan Daerah		dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi prioritas dan focus perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Lampung. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Untuk mendukung peningkatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing serta pengawasan perikanan yang integrative maka dibutuhkan beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.37 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
1	Outcome: Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	1	Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	39,27 Kg/KAP/TH	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Produksi Garam	Produksi Garam	110 Ton	
		3	Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	166.068 Ton	
		4	Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	198.982 Ton	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		5	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	83%
		6	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Kawasan konservasi daerah yang operasional	152.096 Ha
		7	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	1 Dokumen

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata telah lama menjadi tulang punggung dari ekonomi kreatif di Indonesia. Pembangunan pariwisata haruslah berbasis pemberdayaan masyarakat yang utuh dan berkelanjutan. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang baik dapat mendorong akselerasi pemasaran pariwisata Indonesia. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.38 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pariwisata

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi						
1	Outcome: Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan	1	Jumlah devisa sektor pariwisata	-	Rp 11.615.250.000	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	-	20.500.000 Perjalanan	
		3	Rasio PDB Pariwisata	-	1,65%	
		4	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	-	590.000 Orang	

	Ekonomi Nasional	5	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	-	580.000 Orang	
		6	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	-	7,4%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

3. Urusan Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah, diantaranya: penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pertanian dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.39 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
1	Outcome: Meningkatnya Produksi Pertanian	1	Jumlah Produksi Jagung	Jumlah Produksi Jagung	2.887.502 Ton	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	2.875.716 Ton	
		3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	39.337 Ton	
		4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	1.678 Ton	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		5	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	85.143 Ton
		6	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	47.722 Ton
		7	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	156.866.08 Ton
		8	Jumlah Produksi Telur	Jumlah Produksi Telur	256.456.47 Ton
		9	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	312.872 Ha

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

4. Urusan Kehutanan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kehutanan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.40 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
1	Outcome: Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan	1	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat	6.500 Ha	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan
		2	Nilai transaksi ekonomi kelompok	Nilai transaksi ekonomi kelompok	Rp 339.000.000.000	

Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
	baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi		masyarakat kehutanan		kemampuan keuangan daerah
		3	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	50 Ha	
		4	Peningkatan sumbangan PDRB subsektor Kehutanan	0,01%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

5. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang energi dan sumber daya mineral dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.41 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
1	Outcome: Pencapaian Ketahanan Energi	1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	36,6 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Konsumsi Listrik per Kapita	Konsumsi Listrik per Kapita	685 Kwh/Kapita	
		3	Intensitas Energi Primer	Intensitas Energi Primer	145,4 (SBM/Rp Milyar)	
		4	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,90%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

6. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan diantaranya terkait dengan peningkatan dan pengembangan ekspor. Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari meningkatnya kinerja ekspor bernilai tambah tinggi, meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah serta terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Perdagangan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.42 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perdagangan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri						
1	Outcome: Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik danGlobal	1	Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi	-	6,2 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Pertumbuhan Total Perdagangan Dengan Provinsi Lainnya	-	5 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

7. Urusan Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Provinsi Lampung. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Beberapa arahan pembangunan dalam Bidang Perdagangan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.43 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perindustrian

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri						
1	Outcome: Tercapainya Pertumbuhan	1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan	Rp, 5,7	Daerah menyesuaikan besaran target

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
	Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		Non Migas (Rp, Triliun)		dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	71%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

8. Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Transmigrasi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.44 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Transmigrasi

No	Ast cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan					
1,	Outcome: Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	5%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

9. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Badan Kesbangpol. Secara uraian tugas, berfungsi membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan

sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang kesbangpol dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.45 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kesbangpol

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan	
		Provinsi	Kab/Kota			
Asta Cita: 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 3. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						
1	Outcome: Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja Ormas	68 Nilai	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

5.5 Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

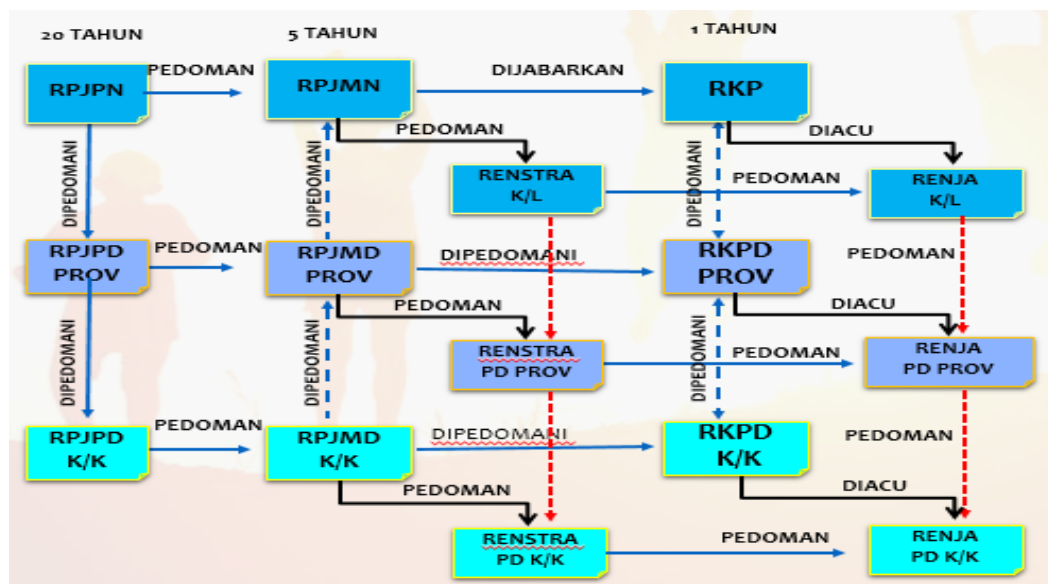
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat tersebut, maka dokumen perencanaan daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan hubungan dokumen perencanaan pusat dan dokumen perencanaan daerah sebagaimana, selain mengatur tentang tata cara penyusunan perencanaan juga memberikan penjelasan keterkaitan antar dokumen perencanaan, sebagai berikut :

Gambar 5. 11 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Lebih lanjut, Pasal 75 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : “Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD”.

Dalam rangka sinergitas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada Tahun 2026 diarahkan untuk sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Tabel 5. 46 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		
	01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
	01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat DPRD
	01.04 PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	01.05 PP: Pengarustamaan, Pemajuan dan Pengehakan HAM	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,		

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru		
	02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	02.02 PP: Pembangunan dan Industri Pertahanan	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	02.03 PP: Komponen Cadangan dan Pendukung	==	==
	02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
	02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Program Pengaturan Pertahanan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau	Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya
	02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	==	==
	02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	==	==
	02.10 PP: Swasembada Pangan	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan - Program Penanganan Kerawanan Pangan	- Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		• Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
	02.11 PP: Swasembada Energi	• Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan • Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	02.12 PP: Swasembada Air	• Program Pengelolaan Aspek Kegeologian • Program Pengelolaan Sumber Daya Air • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	• Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air • Dinas Kehutanan • Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
	02.13 PP: Ekonomi Syariah	• Program Perekonomian dan Pembangunan • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Biro Perekonomian • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	02.14 PP: Ekonomi Digital	• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM	• Badan Pendapatan Daerah • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Koperasi dan UMKM
	02.15 PP: Ekoistem Ekonomi Sirkular	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya • Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
	02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies dan Genetik	• Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	• Dinas Kehutanan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Lingkungan Hidup
	02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.20 PP: Pekerjaan Hijau/ <i>Green Jobs</i>	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	• Program Pengelolaan Hutan • Program Pengelolaan Hutan Adat	Dinas Kehutanan
	02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	sebagai Sumer Pertumbuhan Baru		
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.		
	03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimedia	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLAJ) • Program Pengelolaan Pelayaran • Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
	03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata & Ekraf
	03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektuan	Dinas Pariwisata & Ekraf

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Kekayaan Intelektual		
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas		
	04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
	04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
	04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Kesejahteraan Rakyat	• Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung • Biro Kesejahteraan Rakyat
	04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
	04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
	04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Pengembangan <i>Science, Teknologi, Engineering, Art and Mathematic (STEAM)</i>		
	04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tenaga Kerja	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Pemuda dan Olahraga • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	04.08 PP: Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah • Program Riset dan Inovasi Daerah	• Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	• Program Kepegawaian Daerah • Program Penataan Organisasi	• Badan Kepegawaian Daerah • Biro Organisasi
	04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	• Program Pengembangan Kurikulum • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pembinaan Perpustakaan	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Pemuda dan Olahraga • Dinas Perpustakaan dan Arsip
	04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	• Dinas Kesehatan • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	04.12 PP: Pemberian makan Gratis untuk pemenuhan Gizi	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian	- Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
	04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Abdul Moeloek
	04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	- Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Abdul Moeloek - Rumah Sakit Jiwa
	04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	- Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Abdul Moeloek - Rumah Sakit Jiwa
	04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	- Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
	04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dari Kekerasan	- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang	- Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Penempatan Tenaga Kerja	- Dinas Sosial - Dinas Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Disabilitas dan Lanjut Usia		
	04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
	05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor	• Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Pengembangan Ekspor • Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura • Dinas Perkebunan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	• Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi • Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
	05.03 PP: Optimalisasi <i>Backbone</i> Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasiona	• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi • Dinas Perhubungan • Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		- Program Pengelolaan Pelayaran - Program Pengelolaan Perkeretaapian - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
	05.04 PP: Peningkatan Investigasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	- Program Pengendalian Izin Usaha Industri - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Pengembangan Ekspor - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Kerja Sama Penanaman Modal	- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	05.06 PP: Optimisasi Investasi Strategis Negara	- Program Kerja Sama Penanaman Modal - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		
	06.01 PP: Sistem Pendapatan Ekonomi Terintegrasi	- Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pendaftaran Penduduk	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Sosial

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		• Program Pengelolaan Profil Kependudukan • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	• Program Pemberdayaan Sosial • Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Hubungan Industrial • Program Pengawasan Ketenagakerjaan	• Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • Dinas Tenaga Kerja
	06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi	• Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	• Dinas Tenaga Kerja • Dinas Pemuda dan Olahraga • Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Lampung
	06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	• Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	==	==
	06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	- Program Pengembangan Perumahan - Program Pengembangan Permukiman - Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
	06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan		
	07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	07.02 PP: Reformasi Hukum	- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Biro Hukum - Inspektorat
	07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	- Program Penataan Organisasi - Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Biro Organisasi - Biro Hukum - Inspektorat
	07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan <i>Advocaat General</i>	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
	07.05	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	07.06 PP: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	07.10 PP: Pemerintah Digital	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Badan Pendapatan Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Badan Pendapatan Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Badan Pendapatan Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Badan Pendapatan Daerah Lampung - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	07.15 PP: Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	07.16 PP: Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
8	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		
	08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformasi untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Muslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	• Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	• Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penanggulangan Bencana • Program Pengelolaan Sumber Daya Air	• Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		• Program Penanggulangan Bencana	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Adapun tema dan prioritas pembangunan serta beberapa program unggulan kabupaten/kota dalam menunjang pembangunan provinsi pada Tahun 2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sebagai berikut :

1. KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TEMA : ***“Penguatan Ketahanan Pangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
- b) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;
- c) Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Ekonomi dan Sosial;
- d) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan;
- e) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
- f) Penguatan Ketahanan Pangan; dan
- g) Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Aman dan Berbudaya.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Seragam Sekolah Gratis;
- b) Sekolah Kopi;
- c) Beasiswa S1 Bahasa Lampung;
- d) Sekolah Kopi Masuk Pekon;
- e) Puskesmas Pembantu Pekon; dan
- f) Rehabilitasi Wisma Sindalapa.

2. KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TEMA : ***“Memperkokoh Struktur Ekonomi yang Ditopang oleh Tata Kelola Pemerintahan Inovatif dan Berbasis Teknologi Informasi serta Perluasan Pembangunan Infrastruktur”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Penguatan Transformasi Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;
- b) Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia;
- c) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
- d) Meningkatnya Infrastruktur untuk Konektivitas Wilayah, Pelayanan Dasar dan Energi;
- e) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan
- f) Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,

PROGRAM UNGGULAN :

a) Bapak Asuh Stunting

Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian seluruh instansi di Kabupaten Lampung Utara terhadap stunting, setiap Perangkat Daerah memiliki daerah binaan stunting,

b) Jemput Bola

Program pemberian pelayanan pencatatan sipil ke desa dan kecamatan, diutamakan bagi masyarakat lansia dan memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke kabupaten,

3. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TEMA : ***“Penguatan Fondasi Transformasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila;
- b) Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai;
- c) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*;
- d) Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan;

- e) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan;
- f) Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju; dan
- g) Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar Daerah dan Nasional.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Swasembada WC

Lampung Selatan berkomitmen untuk meningkatkan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Program ini diampu oleh Dinas Pendidikan dengan melakukan beberapa inovasi yang diantaranya berupa peningkatan honorarium bagi tenaga pengajar, beasiswa bagi pelajar, dan pembelajaran malam hari dalam upaya program kejar paket A, B, dan C,

b) Program Jalan Lancar dan Terhubung

Program ini merupakan upaya Lampung Selatan untuk meningkatkan akses jalan lancar dan terhubung antar desa, kecamatan hingga pusat kabupaten, Program diampu oleh Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan serta sinergitas dengan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa untuk menangani jalan lingkungan,

c) Program Rumah Layak Huni

Program ini merupakan upaya Lampung Selatan dalam meningkatkan akses masyarakat Lampung Selatan untuk menikmati rumah layak huni, Program ini diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, Program ini juga didukung oleh organisasi seperti Baznas Kabupaten Lampung Selatan,

d) Program Pemberdayaan UMKM

Program pengembangan UMKM diampu oleh Dinas UMKM dan salah satunya fasilitatornya adalah Dekranasda Lampung Selatan, Produk UMKM juga selalu ditampilkan dalam berbagai event yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan seperti Event Pariwisata, Event Musik bahkan pada Musrenbang RKPD, termasuk upaya digitalisasi UMKM,

e) Program Pengembangan Pariwisata Unggulan

Program pengembangan pariwisata salah satunya melalui Program Gerakan Gotong Royong Terpadu (GEROT) Pariwisata dalam upaya mempersiapkan suatu wilayah untuk menjadi destinasi wisata, Pengembangan ini meliputi wisata alami, berupa pantai, air panas, air terjun dan lainnya hingga wisata dan wahana buatan seperti pengembangan agrowisata, motocross dan lainnya, Serta berbagai upaya pengembangan event-event seperti musik, olahraga hingga hobi baik skala lokal, domestik hingga Nasional,

f) Program Swasembada Gizi

Program ini salah satu tujuan utamanya adalah pengentasan stunting yang ditargetkan pada Tahun 2024 ini sebesar 0%, Program ini merupakan program lintas sektor yang diantaranya diampu oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, Bappeda dan lain sebagainya, Program ini memberikan jaminan kesehatan kepada ibu hamil dan bayi, yang meliputi sosialisasi, pendampingan hingga penanganan stunting,

g) Program Hilirisasi Produk Pertanian

Program ini merupakan upaya Lampung Selatan dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan peternakan, Pengembangan BUMD Lampung Selatan Maju yang mengembangkan salah satu produknya yaitu Beras Lampung Selatan Maju yang didistribusikan kepada sebagian besar Pegawai di Lingkungan Pemerintah Lampung Selatan setiap bulannya,

h) Program Pelayanan Terpadu

Program ini merupakan upaya Lampung Selatan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan aktivitas administrasinya, Pengembangan dan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik menjadi prioritas utama, Mal Pelayanan Publik

telah memberikan pelayanan untuk 260 pelayanan perizinan yang meliputi Pemerintah Daerah hingga instansi vertikal,

i) **Program Lampung Selatan Damai dan Tenteram**

Program yang melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat dan instansi vertikal serta Forkopimda, Sinergitas dengan Forkopimda dilakukan dalam berbagai kesempatan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan daerah,

4. **KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

TEMA : ***“Penguatan Sumber Daya Manusia, Ketahanan Pangan dan Infrastruktur guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Pemantapan Keunggulan dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
- b) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter;
- c) Pemantapan Kebersamaan dalam Mengisi Pembangunan dan Menjaga Kondusifitas Wilayah;
- d) Pemantapan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Pertumbuhan Wilayah dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat; dan
- e) Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima (Profesional, Progresif, Bersih dan Akuntabel).

PROGRAM UNGGULAN :

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan upaya strategis dan perlu dikedepankan sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai visi dan misi, Program unggulan tersebut, meliputi:

a) **Pendidikan Berjaya**

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berjaya adalah:

1. Memperluas akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM tenaga pendidik dan tenaga honorer;
4. Pemerataan keunggulan tempat pendidikan;
5. Pemberian beasiswa bagi pelajar dan santri yang berprestasi dan kurang mampu;
6. Bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam upaya peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Tengah; dan
7. Memberdayakan pondok pesantren serta memberikan insentif bagi guru ngaji dan marbot masjid,

b) **Kesehatan Berjaya**

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kesehatan berjaya adalah:

1. Mendorong peran serta kader-kader kesehatan dan bidan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan pemerataan jangkauan penanganan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di wilayah timur dan di wilayah barat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelengkapan alat kesehatan serta ketersediaan obat di puskesmas;
4. Meningkatkan pelayanan puskesmas pembantu (Pustu); dan
5. Menjadikan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya sebagai rumah sakit yang ramah dan berkualitas,

c) **Pemuda Milenial Berjaya**

Agenda Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan wadah yang menghimpun, mengakomodir ragam kreatifitas dan inovasi untuk menunjang peningkatan UMKM serta ekonomi kreatif,

d) **SIJALU Berjaya**

Untuk mewujudkan SIJALU Berjaya, agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat akan melakukan :

1. Percepatan perbaikan seluruh jalan kabupaten, kecamatan, dan kampung-kampung yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun; dan
2. Pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan/kampung sebagai akses transportasi hasil bumi,

e) Petani Berjaya

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan petani berjaya adalah :

1. Memberikan bantuan usaha bagi kelompok tani;
2. Memberikan bantuan bibit tanaman produktif kepada KWT, Gapoktan, dan Petani Mandiri;
3. Memberikan bantuan bibit peternakan kepada kelompok masyarakat;
4. Menjamin kelancaran distribusi pupuk bersubsidi; dan
5. Penguatan regional Sentra Produk Pertanian dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada petani mulai dari pra panen, saat panen, dan pasca panen,

f) BUNKAM Berjaya

Agenda pemerintah daerah dalam upaya mendorong peran BUNKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam rangka menekan angka kemiskinan,

g) Keberagaman Umat Berjaya

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keberagaman umat berjaya adalah:

1. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya serta golongan;
2. Meningkatkan dana bagi pengelola keamanan di kampung (Linmas dan Perangkat Kampung);
3. Bekerja sama dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat untuk Bersama

Meningkatkan Keamanan Daerah guna menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

4. Memfasilitasi agar terjadi komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan untuk meminimalisir potensi konflik di masyarakat;
5. Mendorong dan menjaga upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal; dan
6. Penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada agama, budaya, dan adat istiadat,

h) Pelayanan Berjaya

Agenda pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan berjaya adalah:

1. Menjaring aspirasi dan melayani masyarakat secara langsung setiap dua hari dalam satu minggu;
2. Melakukan jejak pendapat dengan turun langsung dan berkantor di Kampung dan kecamatan yang telah dijadualkan;
3. Memangkas rantai birokrasi demi terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat;
4. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan (skrining) Kesehatan gratis di di Kampung dan kecamatan secara berkala;
5. *DPMPT mobile* yang terjadwal di setiap Kecamatan;
6. Memudahkan segala aspek perizinan usaha sampai ke tingkat kampung/kelurahan, menggratiskan perizinan SIUP dan TDP dan selesai dalam satu hari; dan
7. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat guna terciptanya pemenuhan hak masyarakat dalam hal bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum,

5. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TEMA : ***“Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasar, Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Lampung Timur Makmur”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah;
- b) Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan;
- c) Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
- d) Peningkatan Perekonomian Daerah; dan
- e) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Pemerataan dan Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Universal;
- b) Pemerataan dan Peningkatan Akses Pendidikan;
- c) Perlindungan Sosial Adaptif, Terintegrasi, dan Inklusif;
- d) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Usia Produktif;
- e) Peningkatan Keterkaitan UMKM pada Rantai Nilai Industri Domestik dan Global;
- f) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing Produk Pertanian Yang Terintegrasi Dengan Upaya Penguatan Ketahanan & Kemandirian Pangan;
- g) Pengembangan Ekonomi Biru Berbasis Keunggulan Wilayah;
- h) Percepatan Penyediaan Infrastruktur Transportasi Dan Logistik Yang Andal Untuk Mendukung Tumbuhnya Sektor Industri Manufaktur;
- i) Peningkatan Pelayanan Publik Dan Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
- j) Pengembangan Tata Ruang Berbasis Wilayah Kesatuan Lansekap Ekologis;
- k) Peningkatan Ketahanan Bencana,

6. KABUPATEN TANGGAMUS

TEMA : ***“Peningkatan Infrastruktur untuk Penguatan Ketahanan Pangan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- b) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Produktifitas Sektor Pertanian serta Daya Saing Produk Unggulan;
- c) Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur yang merata dan Konektivitas Kewilayahan;
- d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Pelayanan Publik Berkualitas; dan
- e) Peningkatan Stabilitas Kamtibmas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Semua Bisa Sekolah
Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari sisi Pendidikan, kelompok sasaran dari program ini adalah penduduk yang mengalami putus sekolah, Program ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Pemerintah Pekon antara lain melalui penganggaran anak putus sekolah dimasing-masing Pekon untuk mengikuti Program Kejar Paket A, B dan C yang dibiayai oleh APBPekon,
- b) Penyediaan jamban sehat bagi masyarakat miskin;
- c) Program Inovasi GEMA PENTING (Gerakan Bersama Penanggulangan dan Pencegahan Stunting);
- d) Program Penguatan Peran Pelayanan Kesehatan berdasarkan *Academic Health System* (AHS) dan Peningkatan Akreditasi RSUD dan Puskesmas menjadi Pelayanan Paripurna;
- e) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, melakukan pembinaan Unit Kompetensi Pelatihan Pelaksana Tenaga

Kerja (UKP22TK) yang terintegrasi dengan SMK, melaksanakan Job Canvassing/Pemasaran Tenaga Kerja ke Perusahaan dalam rangka memasarkan tenaga kerja, memberdayakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Satuan SMK dan Lembaga Pelatihan dalam rangka memasarkan alumninya ke Dunia Usaha dan Dunia Industri;

- f) Program Anjungan Dukcapil Mandiri;
- g) Program Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan terpadu untuk Publik (SiCANTIK) *Cloud* dan Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- h) Program Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Pelayanan Publik dan Pengembangan Sentra-Sentra Produksi;
- i) Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- j) Program GERTAK MATA BABE (Gerakan Serentak Masyarakat Tanam Bawang dan Cabe);
- k) Program Pemberdayaan UMKM dan IKM melalui Standarisasi Produk, Kemasan, Pemasaran dan Akses Keuangan;
- l) Program Hilirisasi Sumber Daya Alam Produk Unggulan Daerah secara Inklusif;
- m) Program Akselerasi Pengembangan Pariwisata sebagai Objek Destinasi Wisata;
- n) Program Sipesta Ratu (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Tanggamus Ramah, Amanah, Tangguh dan Unggul);
- o) Penguatan Manajemen Bencana terutama pada saat Tanggap Darurat,

7. KABUPATEN WAY KANAN

TEMA : ***“Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang didukung oleh Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;
- b) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- d) Peningkatan Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- e) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Penanggulangan Kemiskinan

Untuk itu Pemerintah Daerah berupaya mempercepat penurunan kemiskinan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan fokus memberdayakan masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan dengan melibatkan tidak hanya Organisasi Perangkat Daerah tetapi juga Pemerintah Kampung melalui dana desanya dan pemangku kepentingan lainnya,

- b) Program Pendidikan Non Formal melalui pendidikan kesetaraan dengan akses yang terjangkau dan berkualitas

Merupakan program yang dilaksanakan untuk Meningkatkan serta memperluas akses pelayanan pendidikan NonFormal yang berkualitas dan merata melalui UPT SKB Way Kanan, PKBM, dan Pondok Pesantren menjadi wadah pendidikan kesetaraan,

- c) Program Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah

Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk unggulan di Sektor Pertanian yang menjadi kontibutor terbesar dalam PDRB Kabupaten Way Kanan, khususnya Kopi dan Lada,

8. KABUPATEN TULANG BAWANG

TEMA : ***“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Tulang Bawang Maju dan Berkelanjutan”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat, dunia usaha dan pemanfaatan potensi;
- b) Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan mitigasi bencana;
- c) Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- d) Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
- e) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas, Bersih dan Transparan;
- f) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas dan Berkelanjutan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis dan Berbudaya.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Pemberian Insentif Tenaga Pendidikan dan Kesehatan;
- b) Program Pemberian Insentif Aparatur Keamanan;
- c) Program Percepatan Pelayanan Publik;
- d) Program Pemberian Bantuan Sosial;
- e) Program Pemberian Bantuan Bedah Rumah;
- f) Program Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin;
- g) Program Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan;
- h) Program Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan;
- i) Program Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian;
- j) Program Penyediaan Sarana Prasarana Infrastruktur;
- k) Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidikan;
- l) Program Peningkatan Pendapatan Aparatur Kampung,

9. KABUPATEN PESAWARAN

TEMA : ***“Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Desa serta Daya Saing Daerah”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif;
- b) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, dan Berdaya Saing;
- c) Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal;
- d) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas;
- e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi;

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- d) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- f) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- g) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- h) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS),

10. KABUPATEN PRINGSEWU

TEMA : ***“Memantapkan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- b) Penguatan Daya Saing Daerah;
- c) Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial;
- d) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah;
- e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan; dan
- f) Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat,

PROGRAM UNGGULAN :

Berlakunya otonomi daerah, menjadi penanda bagi pemerintah daerah dalam hal kesempatan seluas-luasnya untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat di daerahnya, Permasalahan klasik desa-desa hampir di seluruh Indonesia adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam mengelola desanya sehingga potensi sumber daya alam tidak dapat dikelola secara mandiri, Solusi dari permasalahan tersebut adalah harus adanya program, sistem, kebijakan, aturan, undang-undang yang terintegrasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah untuk desa, Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan hal pertama yang harus dilakukan, Tata kelola yang baik memerlukan sumber daya manusia yang kompeten serta campur tangan berbagai stakeholder diantaranya pemerintah, komunitas, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan media, Karena bagaimanapun, berhasil tidaknya pengelolaan sumber daya dan potensi desa akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan kemampuan para stakeholder dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, Memahami hal ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggagas inovasi berjudul WISATA JEJAMA (Wisata Jelajah Edukasi seJarah budAya dan alaM desA), yakni sebuah gerakan optimalisasi sektor strategis pariwisata dengan berbasis potensi unggulan desa melalui kolaborasi dengan berbagai pihak/ stakeholder agar terkelola dengan baik hingga memberikan hasil yang optimal,

Dalam inovasi ini, melalui kolaborasi berbagai stakeholder, satu desa dengan wilayah yang relatif kecil akan memiliki beragam konsep wisata sebagai daya tarik bagi wisatawan, Dimana desa pertama yang dipilih dalam penerapan inovasi ini adalah Pekon Lugusari, Pekon Lugusari merupakan salah satu pekon di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, SDM yang ulet dan kompeten, sehingga sejak awal Pekon ini cukup menonjol dalam hal pemberdayaan, Lokasi Pekon Lugusari juga cukup strategis, yaitu berjarak 5 km dari Ibukota Kecamatan Pagelaran, 25 km dari Ibukota Kabupaten Pringsewu, dan 45 km dari ibukota Provinsi Lampung,

Secara administrasi, Pekon Lugusari terbagi menjadi lima dusun yaitu dusun I Lugusari, Dusun II Sridadi, Dusun Rejosari, Dusun Solo, dan Dusun Ngadirejo, Pada tanggal 02 September 2021 Presiden Joko Widodo meresmikan salah satu Proyek Strategis Nasional Bendungan Way Sekampung yang terletak di Pekon Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran, Jembatan Way Sekampung menghubungkan Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran dengan Pekon Fajarbaru Kecamatan Pagelaran Utara, Bendungan Way Sekampung dengan genangan airnya yang berdaya tampung 68,06 juta m³ dan luas genangan 800 Hektar menjadikannya sebagai salah satu bendungan terbesar di Provinsi Lampung, dan Jembatan Way Sekampung ini memiliki panjang 400 meter, menjadikannya sebagai jembatan terpanjang di Provinsi Lampung dengan hamparan air dan pegunungan yang indah, Dengan adanya Proyek Strategis Nasional yang dibangun di Kabupaten Pringsewu berupa Bendungan Way Sekampung dan Jembatan Way Sekampung ini, mendorong Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Kecamatan Pagelaran dan Pekon Lugusari untuk memanfaatkannya sebagai sebuah potensi wisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,

Disamping itu, Pekon Lugusari juga memiliki sejumlah potensi wisata lain, seperti Ledeng Pendem, Pura, Sentra Kerajinan Tapis, Sentra Ikan

Air Tawar, Wisata Agro, industri makanan ringan tradisional, modern, dan lain-lain, Potensi-potensi inilah yang dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya melalui program inovasi Wisata Jejama, guna memberi hasil maksimal, terutama bagi kesejahteraan masyarakat,

11. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TEMA : ***“Peningkatan SDM yang Adaptif dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Produktivitas Daerah Berkelanjutan”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan SDM Berkarakter yang Adaptif dan Inovatif;
- b) Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah;
- c) Peningkatan Infrastruktur;
- d) Penanggulangan Kemiskinan; dan
- e) Peningkatan Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi;
- f) Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang aman dan berbudaya; dan
- g) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Pengelolaan Pendidikan;
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c) Program Pelatihan Kerja
- d) Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian
- e) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
- f) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- g) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- h) Program Penyelenggaraan Jalan;
- i) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- j) Program Penyelenggaraan Pengawasan;

- k) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- l) Program Peningkatan Ketertiban Umum;
- m) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya,

12. KABUPATEN MESUJI

TEMA : ***“Penguatan Infrastruktur dalam Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah;
- b) Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan;
- c) Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
- d) Peningkatan Perekonomian Daerah; dan
- e) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Bergerak Bersama Maju Semua

Merupakan program yang dimotori oleh Penjabat Bupati Mesuji dengan semangat membangun Kabupaten Mesuji, berkolaborasi dan sinergi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji, instansi vertikal, akademisi dan stakeholder terkait, Proses pembangunan akan berjalan dengan baik manakala seluruh pihak dapat bekerja bersama dalam harmoni dan dinamika, saling mengisi kekosongan untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan,

- b) Geber Mas (Gerakan Bersama Mengatasi Stunting)

Merupakan program yang berfokus pada upaya menekan laju angka prevalensi stunting dengan kolaborasi, elaborasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan termasuk berbagai inovasi daerah di lingkup sektoral, Stunting telah menjadi isu penting mengingat Pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi di bawah 14% pada 2024, Untuk itu, target

penurunan prevalensi stunting setiap tahun harus berkisar 2,7%, Sementara intervensi yang telah dilakukan tahun 2022 belum menunjukkan hasil yang optimal, Hal tersebut terlihat dari angka prevalensi stunting Kabupaten Mesuji yang berada di atas angka rata-rata nasional yaitu 22,8% mengalami lonjakan di banding tahun 2021 yang berada pada angka 21,8%,

c) E-Signature

Merupakan program yang mendukung tata kelola pemerintahan utamanya arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Aplikasi ini memberikan kemudahan proses paraf koordinasi dan penandatanganan naskah dinas oleh pejabat berwenang karena dapat dilakukan secara Rilltime dimanapun dan kapanpun, Aplikasi yang digunakan dibangun dengan platform berbasis website dan aplikasi android, dimana semua proses mulai dari penyampaian hingga penandatanganan naskah dinas dilakukan dalam bentuk digital, pemanfaatan aplikasi Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) proses pengadministrasian naskah dinas lebih efisien dan efektif,

d) Senja (Sistem Elektronifikasi Kerja)

Program ini merupakan terobosan baru yang merupakan pengembangan dari pola absensi elektronik yang sebelumnya diterapkan di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji, Hadirnya aplikasi Senja merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap perkembangan industry era industri 4,0 yang dikenal dengan istilah internet of things (IoT), sekaligus memperkuat arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Eksekutif (SPBE), Mulai di uji coba pada Bulan November dan Desember tahun 2022, Aplikasi ini secara resmi telah mulai diterapkan pada Januari 2023, Aplikasi Senja ini terintegrasi dengan GPS yang menunjukkan lokasi pada saat aplikasi diakses, Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu Tools yang bermanfaat dalam

memberikan berkontribusi besar terhadap upaya peningkatan disiplin ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji,

e) Pak KUR

Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam memulihkan perekonomian yang pada beberapa tahun belakangan ini mengalami degradasi diakibatkan oleh pandemic COVID-19 sekaligus menekan maraknya praktik penawaran kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh entitas ilegal, seperti rentenir dan pinjaman online ilegal, Upaya tersebut di mulai dengan beberapa prioritas yang salah satunya adalah peningkatan produktivitas masyarakat melalui strategi inovasi perluasan akses kredit usaha rakyat (Pak Kur) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekaligus mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan basis pada kearifan lokal di Kabupaten Mesuji, Inovasi “Pak Kur” berisi rangkaian kegiatan yang berfokus meningkatkan layanan keteraksesan masyarakat terutama pelaku UMKM terhadap kredit/pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan formal,

13. KABUPATEN PESISIR BARAT

TEMA : ***“Akselerasi Peningkatan Kualitas Infrastruktur Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Pesisir Barat Sebagai Pusat Pariwisata;
- b) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
- c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- d) Peningkatan Infrastruktur Daerah;
- e) Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel; dan
- f) Penguatan Nilai-Nilai Religius Terdepan di Provinsi Lampung

PROGRAM UNGGULAN :

a) Program Sai Batin

Merupakan program yang ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kependudukan bagi masyarakat, Program ini berbentuk Aplikasi Sistem Informasi Adminduk Berbasis Teknologi Terintegrasi yang menyediakan layanan online kependudukan bagi seluruh masyarakat, Sehingga pelayanan dapat dilakukan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan,

b) Program Pipit Cuping

Merupakan program yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk pelaporan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintahan Desa/Pekon yang dilakukan oleh para aparat Desa/Pekon, Diharapkan melalui aplikasi ini pelaksanaan perencanaan pemerintahan Desa/Pekon dapat dilaksanakan secara real dan akuntabel, dan dapat terpantau sepenuhnya oleh APIP,

c) Program Pesisir Barat Sehat

Merupakan program yang ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan ambulance di setiap pekon, baik di daerah dekat dengan fasilitas kesehatan terlebih untuk daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan, Dimana setiap pekon diminta untuk menyediakan ambulance untuk layanan kepada masyarakat, penganggaran menggunakan Dana Desa/Alokasi Dana Desa,

d) Program Si Prio RTLH

Merupakan program untuk melakukan bedah rumah tidak layak huni masyarakat, dimana bedah rumah dilakukan berdasarkan pada urutan prioritas kondisi rumah berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan, Tujuan akhir dari program ini adalah mengentaskan jumlah Rumah Tidak Layak Huni daerah,

e) Program Petani Sejahtera

Merupakan program pemberdayaan petani melalui pembinaan dan pelatihan serta pemberian bantuan bibit tanaman pangan, tanaman perkebunan dan peternakan, Tujuan program ini adalah meningkatkan dan mempertahankan keberdayaan petani dalam ekonomi untuk mencapai Nilai Tukar Petani yang optimal, Program ini juga bentuk dukungan terhadap program petani berjaya,

f) Program Nelayan Sejahtera

Merupakan program pemberdayaan nelayan melalui pembinaan dan pelatihan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, Tujuan program ini adalah meningkatkan dan mempertahankan keberdayaan petani dalam ekonomi untuk mencapai Nilai Tukar Nelayan yang optimal, program ini juga bentuk dukungan terhadap program nelayan berjaya,

g) Program Pekan Fest UMKM

Merupakan program yang memberikan wadah kepada seluruh pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produk unggulannya kepada masyarakat, Program dilaksanakan rutin pertriwulan dengan lokasi yang berbeda-beda di Seluruh Pesisir Barat

h) Program Krui Pro Surfing

Merupakan program yang menggabungkan antara olahraga Surfing dengan even kebudayaan daerah, Dimana tujuan dari program ini adalah mengenalkan pariwisata sekaligus adat istiadat krui, lampung dan nasional, Program ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap even Festival Krakatau,

14. KOTA BANDAR LAMPUNG

TEMA : ***“Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur dan Lingkungan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi;
- b) Memacu Perekonomian Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan;
- c) Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas;
- d) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah;
- e) Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal; dan
- f) Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan,

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Program Pengelolaan Pendidikan
 - Pendidikan Gratis untuk Jenjang SMP
 - Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa SD dan SMP
 - Bantuan Biaya Pendidikan Siswa jenjang SMA SMK Perguruan Tinggi
 - Bantuan Billing Siswa Di Pesantren
- b) Program Pemberdayaan Sosial
 - Bantuan Kelembagaan Pondok Pesantren
 - Bantuan Rekening Listrik Masjid
- c) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Pelayanan Kesehatan/Berobat/Melahirkan/Ambulan Gratis
- e) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pinjaman Tanpa Bunga Bagi UMKM
- e) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- f) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Insentif RT, Kepala Lingkungan, Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas
- g) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Insentif Guru Ngaji dan Marbot
- h) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- i) Program Pengendalian Penduduk
 - Insentif Operator Pelayanan Faskes, Kader Posyandu, PPKBD dan BKB
- j) Program Penanganan Bencana
- k) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 - Bantuan Beras bagi Penduduk Kurang Mampu
- l) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- m) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- n) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- o) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- p) Program Pengembangan Permukiman
- q) Program Penataan Bangunan Gedung
- r) Program Penyelenggaraan Jalan
- s) Program Pengembangan Perumahan
- t) Pembangunan Infrastruktur

15. KOTA METRO

TEMA : ***“Penguatan Infrastruktur untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN:

- a) Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial;
- b) Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
- c) Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi serta Pengendalian Inflasi Daerah;

- d) Penataan Ruang, Infrastruktur dan Utilitas Kota yang Terpadu;
- e) Menjaga Harmoni Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
- f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penguatan Sistem ketahanan Pangan dan Ketahanan Bencana;
- g) Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Kualitas layanan Publik; dan
- h) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Peningkatan Layanan Masyarakat melalui Kartu Metro Ceria (KMC) dari keluarga tidak mampu dan berprestasi melalui program Gemerlang (Generasi Emas Metro Cemerlang);
- b) Pemerintah Kota Metro juga telah memberikan insentif bagi para pamong (Ketua RT dan Ketua RW) Penggiat Keagamaan yang terdiri dari Kaum, Guru TPA, Guru Sekolah Minggu, Marbot/Penjaga Rumah Ibadah semua Agama dan Juru Kunci Makam, LPM dan Linmas di masing-masing kelurahan, para kader Kesehatan, Pekerja Sosial (TKSK dan PSM) serta pengelola perpustakaan kelurahan, Selain itu di berikan juga Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan;
- c) Pembebasan iuran BPJS Kelas III, dengan pelayanan yang berkualitas melalaui program BKD (Bawa KTP Dilayani);
- d) Pemerintah Kota Metro juga telah menetapkan RSUD Jenderal Ahmad Yani sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK,01,07/MENKES/1309/2022;
- e) Penyediaan Mall Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Melesat) adalah upaya Pemerintah Kota Metro dalam menghadirkan layanan masyarakat yang terpadu dan cepat;
- f) Peningkatan Sarana Prasarana Jalan, Lampu/Penerangan Jalan dan IOT (*Internet Of Things*),
- g) Revitalisasi Fasilitas Olahraga dan Budaya;

- h) Bantuan Saranan Produksi Pertanian (Saprota) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk Petani ;
- i) Membangun *Creative-Hub*, yaitu merupakan Program Kemitraan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat untuk Riset dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang berlokasi di Sentra Kreatif Metro (SEKAM),

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun sebagai bagian integral dari upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Dalam rangka menjamin konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan, seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RKPD difokuskan pada program prioritas yang memiliki relevansi strategis terhadap arah pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, dilakukan melalui pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : pendekatan partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), politik, dan teknokratik. **Pendekatan partisipatif** dilakukan dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak/pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk mencapai kesepakatan atau keputusan Bersama terhadap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. **Pendekatan bottom up** dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan hasil dari Musrenbang Provinsi. **Pendekatan top down** dilakukan dengan menjabarkan dan menyelaraskan arah-kebijakan pemerintah pusat, dalam setiap dokumen perencanaan daerah, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah. Sedangkan **pendekatan teknokratik** dilakukan melalui evaluasi dan penelaahan dokumen perencanaan sebelumnya, melakukan analisis dan diskusi dengan para ahli, serta elaborasi referensi dan data-data yang relevan.

Selanjutnya **pendekatan politik** dilakukan dengan menjabarkan dan menajamkan visi dan misi kepala daerah ke dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif setiap tahun, disamping itu juga memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran dari DPRD Provinsi Lampung. Oleh karenanya pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan pula sinkronisasi program-program prioritas daerah berdasarkan aspek pendekatan perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut.

Disisi yang lain, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang disampaikan pada Forum Musrenbang Nasional, strategi penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan tematik- holistik, integratif, dan spasial, dimana:

- Tematik- holistik yaitu pendekatan pembangunan yang memandang pentingnya mempertimbangkan sumber daya pembangunan sebagai satu kesatuan faktor (hulu – hilir) yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- Integratif yaitu pendekatan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses teadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
- Spasial yaitu pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi pemanfaatan ruang dan indikasi lokasi sesuai dengan kewenangan masing-masing hierarki pemerintahan, dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pemerintahan pada tingkat pemerintah provinsi mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu : 1) Urusan Pemerintahan Wajib, meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; serta 2) Urusan Pemerintahan Pilihan.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021, pemutakhiran Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir melalui pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang memuat Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari CSR, dan hibah.

6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun transisi pembangunan dan tahun kedua kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 serta sekaligus periode limatahunan pertama pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Pada tahun kedua RPPJMD Tahun 2025-2029, kebijakan pembangunan tahun 2026 diarahkan pada tema ***“Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dengan prioritas daerah difokuskan tujuh prioritas pembangunan sebagai arah strategis untuk mendukung visi pembangunan daerah dan selaras dengan kebijakan nasional. Fokus utama mencakup: peningkatan nilai tambah ekonomi dan hilirisasi; pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; penguatan SDM unggul dan inovatif; percepatan pengentasan kemiskinan; tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas; peningkatan kualitas lingkungan hidup; serta penguatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan berbudaya. Prioritas ini dirancang untuk mempercepat transformasi daerah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pembangunan daerah tahun 2026 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Tahun 2026, kerangka pendanaan daerah Provinsi Lampung dihadapkan pada tantangan dan risiko dari faktor global/nasional/regional baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis.

Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Lampung tahun 2026. Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,114 triliun, belanja daerah sebesar Rp7,139 triliun, dan pembiayaan netto sebesar Rp25 Milyar.

Tabel 6. 1 Kerangka Pendanaan Provinsi Lampung Tahun 2026

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4	PENDAPATAN DAERAH	7.114.050.629.066,21
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.710.910.739.734,21
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	2.817.166.899.379,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	419.450.084.328,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	61.148.941.374,21
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	413.144.814.653,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.389.348.990.597,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.354.664.317.597,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3.339.582.362.597,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.081.955.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	34.684.673.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	34.684.673.000,00
4.2.2.2.4	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemkab/Pemkot	34.684.673.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.790.898.735,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	13.790.898.735,00
4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-
4.3.1.5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-
5	BELANJA DAERAH	7.139.050.629.066,21
5.1	BELANJA OPERASI	5.364.896.299.500,91
5.1.1	Belanja Pegawai	2.396.919.427.785,08
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.967.976.871.715,83
5.1.3	Belanja Bunga	
5.1.4	Belanja Subsidi	
5.1.5	Belanja Hibah	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	
5.2	BELANJA MODAL	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.455.240.740.088,00
	Selisih Pendapatan dan Belanja	25.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	25.000.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-
	Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Serentak Tahun 2029 (tahap 1)	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-
	PEMBIAYAAN NETTO	25.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

6.2 Rencana Program Prioritas Provinsi Lampung tahun 2026

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam enam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, enam unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan satu unsur pemerintahan umum.

Rencana program prioritas dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 adalah sebagaimana matrik di bawah ini.

Tabel 6. 2 Rencana Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2026

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Pertanian		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan lumbung pangan masyarakat.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, rehabilitasi gudang cadangan pangan pemerintah, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penanganan Kerawanan Pangan.	Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan penanganan desa stunting dan pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan higiene sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.	Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, pembentukan food estate, optimalisasi fungsi Kartu Tani sebagai database petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih,	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			serta perbanyak/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran	
		Program Penyuluhan Pertanian	Program diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pertanian		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB) dan fasilitasi <i>good breeding practices</i> (GBP)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV).	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Program ini diarahkan untuk kegiatan peningkatan unit usaha peternakan yang memiliki izin edar.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Penyuluhan Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Perkebunan		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Program ini diarahkan untuk kegiatan peningkatan aksesibilitas petani dalam menjalankan usaha taninya dengan memanfaatkan Kartu Petani Berjaya (KPB)	Dinas Perkebunan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan	Program ini diarahkan untuk kegiatan pengendalian dan penggulungan bencana serta ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan lahan	Dinas Perkebunan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Program ini diarahkan untuk Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan.	Dinas Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh perkebunan.	Dinas Perkebunan
		Penanaman Modal		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Lampung dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kelautan dan Perikanan		
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana usaha ekonomi bagi masyarakat pesisir; pengelolaan kawasan konservasi melalui penenggelaman terumbu karang buatan/TKB, penanaman bibit mangrove.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan.	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi prasarana dan sarana loka budi daya; dan penanganan hama penyakit ikan.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Lampung melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) melalui kerja sama dengan stakeholders; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/certificate of analysis); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pariwisata		
		Program Pemasaran Pariwisata	Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi event pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik wisata unggulan;	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Perindustrian		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran online-offline dan jejaring	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Perdagangan		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			produk UKM melalui e-commerce, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara online dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Lampung, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Lampung dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta one on one meeting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			dengan atase perdagangan (Atdag)/Indonesian trade promotion center (ITPC).	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Sekretariat Daerah		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).	Biro Perekonomian
2.	Peningkatan kualitas hidup SDM			
		Pendidikan		
		Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kebudayaan		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelestarian seni, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan dalam rangka pengembangan ekspresi budaya.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Program ini diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan permuseuman.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kesehatan		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan warga lanjut usia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit khusus mata, serta peningkatan mutu pelayanan di RSUD/RSJD	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif.	
		Kesehatan		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan Rumah Sakit Abdul Muluk melalui peningkatan fasilitas Gedung pelayanan dan peralatan medis rumah sakit.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini diarahkan untuk kegiatan peningkan kualitas SDM kesehatan yang sesuai standar kompetensi	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Kesehatan		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan program unggulan pelayanan Kesehatan Jiwa (Rehabilitasi Psikososial, Rehabilitasi Napza dan Personal Development Center (PDC)	Rumah Sakit Jiwa Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis dan non-medis di RSJD	Rumah Sakit Jiwa Daerah
		Perpustakaan		
		Program Pembinaan Perpustakaan	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Lampung.	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Lampung	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kearsipan		
		Program Pengelolaan Arsip	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi dan perangkat daerah, serta lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten/kota.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.	
		Program Perlindungan Perempuan	Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengendalian Penduduk	Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pendaftaran Penduduk	Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan online admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten/kota.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan server di kabupaten/kota.	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program ini diarahkan untuk Pembinaan Sumber daya aparatur serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemudaan dan Olahraga		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program ini diarahkan untuk Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Sekretariat DPRD		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.	Sekretariat DPRD
3.	Penanggulangan Kemiskinan	Tenaga Kerja		
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online e-makaryo, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; job canvassing, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif;	Dinas Tenaga Kerja

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.	
		Program Hubungan Industrial	Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta	Dinas Tenaga Kerja

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan housekeeping, tour guide, waiters, barista, pelatihan SSW (specified skilled worker), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah	Dinas Tenaga Kerja
		Sosial		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pemberdayaan Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).	Dinas Sosial

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Penanganan Bencana	Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Dinas Sosial
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
		Transmigrasi		
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Program ini diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program ini diarahkan untuk peningkatan koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Lampung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Program ini diarahkan untuk peningkatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang memiliki katagori sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umk)	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Umkm	Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Program ini diarahkan untuk peningkatan koperasi yang berbadan hukum	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.	Pembangunan Infrastruktur			

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Sekretariat DPRD		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program ini diarahkan terkait dengan pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (Pokir), serta pembahasan kerja sama daerah.	Sekretariat DPRD
		Kesehatan		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur untuk pelayanan Kesehatan masyarakat.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Program Pengembangan Perumahan	Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB backlog), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Kawasan Permukiman	Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengembangan Permukiman	Program ini diarahkan untuk Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, serta penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, hibah prasarana dan sarana SPAM perdesaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui penyediaan prasarana dan sarana sistem	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), hibah prasarana dan sarana SPAL-D skala komunal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program ini diarahkan untuk pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional yang saat ini baru pada tahap penyediaan dok. perencanaan pengembangan system pengelolaan persampahan.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program ini diarahkan untuk pembangunan MCK pada daerah rawan sanitasi.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Penataan Bangunan Gedung	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Pertanahan		
		Program Penatagunaan Tanah	Program ini diarahkan untuk Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Program ini diarahkan untuk Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan flood forecasting and warning system (FFWS); koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan	
		Perhubungan		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan provinsi.	
		Program Pengelolaan Pelayaran	Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai dan pengadaan/pemasangan lampu penerangan pada penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota; penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Lampung.	Dinas Perhubungan
		Energi dan Sumber Daya Mineral		
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Program ini diarahkan pada peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk menjaga keseimbangan neraca konservasi air tanah, penyusunan kajian studi kelayakan dalam perizinan air tanah, serta penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah .	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral dan penetapan harga patokan mineral,	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			penyusunan statistik pertambangan, dan rekonsiliasi data produksi. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (good mining practice), terwujudnya tertib usaha pertambangan dan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI), dan peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan pertambangan di Lampung.	
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi melalui pengembangan prasarana dan sarana EBT, meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif, serta pengembangan desa mandiri energi dengan pengembangan potensi energi lokal.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program ini diarahkan untuk meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan, peningkatan keselamatan ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kehandalan pasokan listrik, peningkatan peran energi listrik dalam perekonomian daerah, dan pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Reformasi Birokrasi			
		Sekretariat DPRD		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.	Sekretariat DPRD

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Perencanaan		
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Keuangan		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Keuangan		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.	Badan Pendapatan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Badan Kepegawaian Daerah		
		Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan assestment test; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui talent scouting maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	
		Pendidikan dan Pelatihan		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Penelitian dan Pengembangan		
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penghubung		
		Program Pelayanan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui	Badan Penghubung

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.	
		Inspektorat		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Inspektorat
		Sekretariat Daerah		
		Program Kesejahteraan Rakyat	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi,	Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.	
		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundangundangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.	Biro Hukum
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarpemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Penataan Organisasi	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.	Biro Organisasi
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.	Biro Administrasi Pembangunan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Administrasi Umum	Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah.	Biro Umum
		Statistik		
		Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang diarahkan pada perwujudan big data melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Persandian		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi dan digital forensik.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			
		Sekretariat Daerah		
		Program Kesejahteraan Rakyat	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Kesbangpol		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	Badan Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.	Badan Kesbangpol

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.	Badan Kesbangpol
		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program ini diarahkan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan penanganan gangguan trantibummas	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Peningkatan kualitas Lingkungan hidup			
		Kelautan dan Perikanan		
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program ini diarahkan untuk Penerapan blue ekonomi dan pembangunan berketahanan iklim sektor kelautan dan perikanan.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program ini diarahkan untuk mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terpadu.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kehutanan		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengelolaan Hutan	Program ini diarahkan pada kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi.	Dinas Kehutanan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, kawasan pelestarian alam melalui perencanaan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE), pendampingan masyarakat penyangga KEE; perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES melalui penanganan konflik satwa liar dan pengendalian pemanfaatan TSL, serta pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah.	Dinas Kehutanan
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Program ini diarahkan pada penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan dan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM kehutanan; pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan	Dinas Kehutanan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			sosial dengan sosialisasi, pendampingan penguatan pengelolaan untuk kelembagaan, kawasan dan usaha, serta penguatan pokja percepatan perhutanan sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial; serta pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)/pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (kulin KK)/izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS).	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Program ini diarahkan pada pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan DAS dalam satu kabupaten/kota melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS, gerakan pemulihan DAS, serta peningkatan peran badan usaha dan lembaga masyarakat dalam rehabilitasi DAS.	Dinas Kehutanan
		Lingkungan Hidup		
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) UMKM dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim di lokasi super prioritas kerentanan iklim.	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/ DELH, dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
			pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program ini diarahkan untuk pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan.	Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) regional.	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Uraian Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4
		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
		Program Penanggulangan Bencana	Program ini diarahkan untuk peningkatan Kapasitas Daerah terhadap Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 6. 3 Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2026 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2026

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.239.619.018.711,70
2	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pengelolaan Pendidikan	746.489.102.000,00
3	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Pengembangan Kebudayaan	2.500.000.000,00
4	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	500.000.000,00
5	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	500.000.000,00
6	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Pengelolaan Permuseuman	4.500.000.000,00
7	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	86.501.143.704,40

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
8	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	203.291.568.180,00
9	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.833.215.215,00
10	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	195.000.000,00
11	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	625.000.000,00
12	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19.652.911.999,60
13	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.611.272.209,58
14	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan,	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.549.802.225,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas			
15	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	60.531.440.466,05
16	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	441.322.801.000,59
17	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	5.535.597.000,00
18	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	46.622.690.410,00
19	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.000.000,00
20	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.152.805.200,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
21	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.749.136.940,00
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.452.355.400,00
23	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Gedung	14.739.520.400,00
24	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	260.479.600,00
25	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.440.000.000,00
26	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan	Pembangunan Infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.248.514.618,83

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
27	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan	300.000.000,00
28	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Kawasan Permukiman	2.700.000.000,00
29	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	3.645.702.460,00
30	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	260.000.000,00
31	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penatagunaan Tanah	300.000.000,00
32	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.136.058.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
33	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penanggulangan Bencana	1.925.740.600,00
34	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.136.296.900,55
35	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	320.000.000,00
36	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	185.999.500,00
37	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial	7.791.159.389,00
38	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	520.000.000,00
39	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan	Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanganan Bencana	1.117.505.677,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas			
40	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penanggulangan Kemiskinan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	294.171.000,00
41	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.600.000.000,00
42	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	3.325.000.000,00
43	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Pelayaran	950.000.000,00
44	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.902.016.328,00
45	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	9.449.127.000,00
46	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	10.314.000.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru			
47	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	350.876.400,00
48	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	305.000.000,00
49	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	350.000.000,00
50	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	150.000.000,00
51	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	200.000.000,00
52	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	5.161.677.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
53	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	350.000.000,00
54	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	600.000.000,00
55	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	450.000.000,00
56	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000,00
57	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	525.000.000,00
58	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.077.200.000,00
59	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi,	Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	75.000.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Narkoba, Judi Dan Penyeludupan			
60	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.730.675.024,85
61	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pembinaan Perpustakaan	930.000.000,00
62	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Hidup Sdm	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	175.000.000,00
63	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Arsip	805.000.000,00
64	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	640.000.000,00
65	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	12.345.000.000,00
66	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.760.366.000,00
67	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	665.000.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pemerataan Pembangunan		
68	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.350.000.000,00
69	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.640.000.000,00
70	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pemasaran Pariwisata	2.500.000.000,00
71	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.593.047.491,32
72	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	575.000.000,00
73	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.385.880.000,00
74	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	550.000.000,00
75	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000,00
76	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penyuluhan Pertanian	2.987.562.500,00
77	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	130.000.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan Pembangunan		
78	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	965.000.000,00
79	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Perizinan Usaha Pertanian	100.000.000,00
80	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.500.000.000,00
81	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	929.000.000,00
82	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	65.871.632.087,85
83	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Hutan	2.482.076.000,00
84	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	991.216.000,00
85	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.634.539.300,00
86	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	123.915.000,00
87	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	Pembangunan Infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.167.328.523,40

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru			
88	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	553.410.000,00
89	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	1.019.250.000,00
90	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.053.715.000,00
91	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.903.624.999,50
92	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.000.000,00
93	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.378.611.300,00
94	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Kesejahteraan Rakyat	60.710.042.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
95	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.355.082.000,00
96	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	1.220.259.000,00
97	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	871.251.000,00
98	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	2.628.749.000,00
99	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	913.719.000,00
100	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.086.281.000,00
101	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.608.198.500,00
102	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penataan Organisasi	1.591.801.500,00
103	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	145.671.254.826,90
104	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	128.406.206.417,97

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
105	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.726.103.000,00
106	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.349.229.455,70
107	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.590.916.000,00
108	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.586.653.157,12
109	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.490.556.251,00
110	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Penghubung	1.939.985.000,00
111	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.721.700.787,32
112	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	877.945.000,00
113	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.750.000.000,00
114	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan	1.000.000.000,00

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
		Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
115	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	525.000.000,00
116	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Demokratis	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.000.000.000,00

**Tabel 6. 4 Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Lampung
Tahun 2026**

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.992.118.120.711,70	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.992.118.120.711,70	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.239.619.018.711,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	746.489.102.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.500.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.500.000.000,00	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	292.445.927.099,40	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	292.445.927.099,40	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	86.501.143.704,40	DINAS KESEHATAN
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	203.291.568.180,00	DINAS KESEHATAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.833.215.215,00	DINAS KESEHATAN
12	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	494.027.732.829,38	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	494.027.732.829,38	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	473.868.220.829,78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.652.911.999,60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	506.600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51.719.174.834,58	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	51.719.174.834,58	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.611.272.209,58	RUMAH SAKIT JIWA
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.549.802.225,00	RUMAH SAKIT JIWA
19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	558.100.400,00	RUMAH SAKIT JIWA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	507.389.838.466,64	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	507.389.838.466,64	
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.531.440.466,05	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	441.322.801.000,59	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
22	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.535.597.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	101.854.793.265,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	101.854.793.265,00	
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.232.102.855,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
24	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.622.690.410,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49.738.514.618,83	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.844.297.540,00	
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
			PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.152.805.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
27	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.749.136.940,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
28	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.452.355.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.739.520.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
30	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	260.479.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.894.217.078,83	
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.248.514.618,83	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
33	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
34	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
35	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.645.702.460,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	560.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	560.000.000,00	
36	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
37	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	58.552.953.583,90	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	58.552.953.583,90	
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.416.895.583,90	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
39	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.136.058.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.077.188.631,57	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.077.188.631,57	
40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.151.448.031,57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
41	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.925.740.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.818.329.187,35	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30.818.329.187,35	
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.136.296.900,55	DINAS SOSIAL
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	320.000.000,00	DINAS SOSIAL
44	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	185.999.500,00	DINAS SOSIAL
45	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.791.159.389,00	DINAS SOSIAL
46	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	520.000.000,00	DINAS SOSIAL
47	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.117.505.677,00	DINAS SOSIAL
48	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	294.171.000,00	DINAS SOSIAL
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33.466.566.619,65	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	33.466.566.619,65	
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.745.170.669,65	DINAS TENAGA KERJA
50	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
51	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
52	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	920.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
53	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.271.395.950,00	DINAS TENAGA KERJA
54	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	755.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.128.091.760,80	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.850.621.760,80	
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.512.122.560,80	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
56	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	618.098.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
57	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	888.904.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
58	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	110.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
59	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.849.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
60	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	422.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
61	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	147.595.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	277.470.000,00	
62	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	44.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
63	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	53.470.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	179.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.611.680.724,40	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	17.611.680.724,40	
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.403.618.724,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
66	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	282.197.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
67	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	447.208.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
68	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	163.924.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
69	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	188.518.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
70	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	139.020.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
71	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	66.524.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
72	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	90.057.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
73	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
74	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	700.614.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.265.095.352,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.265.095.352,00	
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.131.852.352,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
76	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	685.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
77	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	157.556.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
78	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	159.261.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
79	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	131.426.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16.269.775.280,05	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.269.775.280,05	
80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.484.710.280,05	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
81	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	170.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
82	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.438.745.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
83	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.175.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	500.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	500.000.000,00	
84	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.831.681.351,21	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.831.681.351,21	
85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.526.681.351,21	DINAS PERHUBUNGAN
86	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.325.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
87	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
88	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.321.019.728,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	34.665.143.328,00	
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.902.016.328,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
90	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.449.127.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
91	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	10.314.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	350.876.400,00	
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	350.876.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	305.000.000,00	
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	305.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19.757.368.968,96	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	19.757.368.968,96	
94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.377.291.968,96	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
95	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
96	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
97	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
98	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	5.161.677.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
100	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
101	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	568.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.181.560.966,86	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	20.181.560.966,86	
102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.854.360.966,86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
103	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
104	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
105	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	525.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
106	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.077.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
107	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	61.693.252.616,45	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	61.693.252.616,45	
108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.193.252.616,45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA
109	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA
110	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	12.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
111	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.640.675.024,85	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.835.675.024,85	
112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.730.675.024,85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
113	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	930.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
114	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	805.000.000,00	
115	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	805.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39.411.861.638,80	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.411.861.638,80	
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.651.495.638,80	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
117	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	640.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
118	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12.345.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
119	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.760.366.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
120	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	665.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
121	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.779.612.318,88	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21.779.612.318,88	
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.830.235.218,88	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
123	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.640.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
124	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
125	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	978.097.100,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
126	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.831.280.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25.341.489.991,32	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	25.341.489.991,32	
127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.593.047.491,32	DINAS PERKEBUNAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
128	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	575.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
129	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.385.880.000,00	DINAS PERKEBUNAN
130	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
131	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
132	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.987.562.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30.069.084.327,16	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	30.069.084.327,16	
133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.819.084.327,16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
134	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.645.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
135	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
136	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	965.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
137	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
138	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	409.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.900.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.900.000.000,00	
139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
140	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
141	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
142	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
143	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	56.944.649.688,75	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	56.944.649.688,75	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
144	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.745.554.696,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
145	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	929.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
146	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.520.094.992,75	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
147	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
148	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	71.103.378.387,85	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	71.103.378.387,85	
149	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.871.632.087,85	DINAS KEHUTANAN
150	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.482.076.000,00	DINAS KEHUTANAN
151	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	991.216.000,00	DINAS KEHUTANAN
152	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.634.539.300,00	DINAS KEHUTANAN
153	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	123.915.000,00	DINAS KEHUTANAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	22.697.328.522,90	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.697.328.522,90	
154	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.167.328.523,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
155	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	553.410.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
156	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.019.250.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
157	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.053.715.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
158	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.903.624.999,50	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23.996.753.621,40	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.260.968.621,40	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
159	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.555.968.621,40	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
160	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
161	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	640.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
162	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
163	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.060.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
164	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.735.785.000,00	
165	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.385.785.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
166	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
167	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.500.000.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	2.500.000.000,00	
168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.121.388.700,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
169	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.378.611.300,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	61.553.651.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	61.553.651.000,00	
170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	843.609.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
171	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	60.710.042.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.575.341.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	2.575.341.000,00	
172	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.355.082.000,00	BIRO HUKUM
173	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.220.259.000,00	BIRO HUKUM
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3.060.279.800,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.060.279.800,00	
174	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.187.643.500,00	BIRO PEREKONOMIAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
175	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.872.636.300,00	BIRO PEREKONOMIAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3.500.000.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.500.000.000,00	
176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	871.251.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
177	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.628.749.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.000.000.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000.000,00	
178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	913.719.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
179	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.086.281.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3.200.000.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	3.200.000.000,00	
180	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.608.198.500,00	BIRO ORGANISASI
181	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.591.801.500,00	BIRO ORGANISASI
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	145.671.254.826,90	
	SEKRETARIAT DAERAH	145.671.254.826,90	
182	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	145.671.254.826,90	BIRO UMUM
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	6.000.000.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH	6.000.000.000,00	
183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	390.000.000.000,00	
	SEKRETARIAT DPRD	390.000.000.000,00	
184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.932.114.712,00	SEKRETARIAT DPRD
185	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	217.067.885.288,00	SEKRETARIAT DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	40.098.270.391,00	
	PERENCANAAN	40.098.270.391,00	
186	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.165.746.291,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
187	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.996.458.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
188	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.986.065.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.913.355.913.758,42	
	KEUANGAN	1.913.355.913.758,42	
189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	121.329.341.571,12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
190	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.784.579.683.667,30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
191	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.446.888.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN	145.132.309.417,97	
		145.132.309.417,97	
192	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	128.406.206.417,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH
193	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	16.726.103.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN	116.137.261.386,00	
		116.137.261.386,00	
194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	113.636.661.386,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
195	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.500.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	28.940.145.455,70	
		28.940.145.455,70	
196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.349.229.455,70	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
197	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.590.916.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.077.209.408,12	
		12.077.209.408,12	
198	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.586.653.157,12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
199	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.490.556.251,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGELOLAAN PENGHUBUNG	20.876.159.885,84	
		20.876.159.885,84	
200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.936.174.885,84	BADAN PENGHUBUNG
201	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.939.985.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH	58.412.533.787,32	
		58.412.533.787,32	
202	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.721.700.787,32	INSPEKTORAT
203	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.812.888.000,00	INSPEKTORAT
204	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	877.945.000,00	INSPEKTORAT
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.649.995.549,78	
		24.649.995.549,78	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu	Perangkat Daerah
205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.899.995.549,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
206	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
207	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
208	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	475.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
209	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	525.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
210	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Tabel 6. 5 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2026

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.239.619.018.711,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.217.318.652.161,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.017.544.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.818.612.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.726.134.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.370.661.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	Peningkatan kualitas hidup SDM	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.492.414.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
11	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	746.489.102.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	359.293.351.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	370.373.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengelolaan Pendidikan Khusus	16.822.111.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	6.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
18	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
21	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
26	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pengelolaan Museum Provinsi	4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
28	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	86.501.143.704,40	DINAS KESEHATAN
29	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
30	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.852.636.918,40	DINAS KESEHATAN
31	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
32	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.768.000,00	DINAS KESEHATAN
33	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.514.638.450,00	DINAS KESEHATAN
34	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.481.256.293,00	DINAS KESEHATAN
35	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.394.492.340,00	DINAS KESEHATAN
36	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.511.451.703,00	DINAS KESEHATAN
37	Peningkatan kualitas hidup SDM	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.470.900.000,00	DINAS KESEHATAN
38	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	203.291.568.180,00	DINAS KESEHATAN
39	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.570.844.000,00	DINAS KESEHATAN
40	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	190.668.504.180,00	DINAS KESEHATAN
41	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
42	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	552.220.000,00	DINAS KESEHATAN
43	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.833.215.215,00	DINAS KESEHATAN
44	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	279.820.000,00	DINAS KESEHATAN
45	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.553.395.215,00	DINAS KESEHATAN
46	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
47	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
48	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
49	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
50	Peningkatan kualitas hidup SDM	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
51	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
52	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
53	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	473.868.220.829,78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
54	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.341.088.829,78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
55	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.027.132.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
56	Peningkatan kualitas hidup SDM	Peningkatan Pelayanan BLUD	379.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
57	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.652.911.999,60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
58	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.352.911.999,60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
59	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
60	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	506.600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
61	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	506.600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
62	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.611.272.209,58	RUMAH SAKIT JIWA
63	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.122.600,00	RUMAH SAKIT JIWA
64	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.431.353.006,31	RUMAH SAKIT JIWA
65	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	822.279.170,27	RUMAH SAKIT JIWA
66	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.854.774.433,00	RUMAH SAKIT JIWA
67	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.743.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
68	Peningkatan kualitas hidup SDM	Peningkatan Pelayanan BLUD	18.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
69	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.549.802.225,00	RUMAH SAKIT JIWA
70	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.167.266.125,00	RUMAH SAKIT JIWA
71	Penanggulangan Kemiskinan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	382.536.100,00	RUMAH SAKIT JIWA

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
72	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	558.100.400,00	RUMAH SAKIT Jiwa
73	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	558.100.400,00	RUMAH SAKIT Jiwa
74	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.531.440.466,05	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
75	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	740.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
76	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.598.504.566,05	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
77	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	410.300.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
78	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.180.649.100,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
79	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.101.187.300,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
80	Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.951.444.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
81	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.475.140.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
82	Pembangunan Infrastruktur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.073.715.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
83	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	441.322.801.000,59	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
84	Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	441.322.801.000,59	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
85	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.535.597.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
86	Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	3.632.791.400,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
87	Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	368.523.900,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
88	Pembangunan Infrastruktur	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.534.281.700,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
89	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.622.690.410,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
90	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.987.311.700,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
91	Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35.635.378.710,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
92	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
93	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
94	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.152.805.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
95	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.152.805.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
96	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.749.136.940,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
97	Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.749.136.940,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
98	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.452.355.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
99	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.452.355.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
100	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.739.520.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
101	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	14.739.520.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
102	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	260.479.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
103	Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	260.479.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
104	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
105	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
106	Pembangunan Infrastruktur	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
107	Pembangunan Infrastruktur	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
108	Pembangunan Infrastruktur	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
109	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.248.514.618,83	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
110	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
111	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.430.377.339,88	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
112	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
113	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.074.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
114	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.393.255.678,95	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
115	Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
116	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.294.385.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
117	Pembangunan Infrastruktur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.422.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
118	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
119	Pembangunan Infrastruktur	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
120	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
121	Pembangunan Infrastruktur	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
122	Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
123	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.645.702.460,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
124	Pembangunan Infrastruktur	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	3.645.702.460,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
125	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
126	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
127	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
128	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
129	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.416.895.583,90	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
130	Pemantapan kehidupan masyarakat yang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409.933.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	aman, berbudaya dan demokratis			
131	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.811.731.574,90	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
132	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
133	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	843.503.199,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
134	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.474.761.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
135	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.011.624.780,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
136	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	815.341.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
137	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.136.058.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
138	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4.494.742.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
139	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	460.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
140	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	181.316.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
141	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.925.740.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
142	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	146.510.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
143	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	725.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
144	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	615.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
145	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	439.110.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
146	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.136.296.900,55	DINAS SOSIAL
147	Penanggulangan Kemiskinan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
148	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.893.724.605,20	DINAS SOSIAL
149	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
150	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.000.000,00	DINAS SOSIAL
151	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.079.680.482,00	DINAS SOSIAL
152	Penanggulangan Kemiskinan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.176.856.000,00	DINAS SOSIAL
153	Penanggulangan Kemiskinan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.414.534,15	DINAS SOSIAL
154	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	320.000.000,00	DINAS SOSIAL
155	Penanggulangan Kemiskinan	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	DINAS SOSIAL
156	Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	280.000.000,00	DINAS SOSIAL
157	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	185.999.500,00	DINAS SOSIAL
158	Penanggulangan Kemiskinan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	185.999.500,00	DINAS SOSIAL
159	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.791.159.389,00	DINAS SOSIAL
160	Penanggulangan Kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.078.562.599,00	DINAS SOSIAL

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
161	Penanggulangan Kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3.588.691.325,00	DINAS SOSIAL
162	Penanggulangan Kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.552.940.279,00	DINAS SOSIAL
163	Penanggulangan Kemiskinan	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	527.674.726,00	DINAS SOSIAL
164	Penanggulangan Kemiskinan	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.043.290.460,00	DINAS SOSIAL
165	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	520.000.000,00	DINAS SOSIAL
166	Penanggulangan Kemiskinan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	520.000.000,00	DINAS SOSIAL
167	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.117.505.677,00	DINAS SOSIAL
168	Penanggulangan Kemiskinan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.117.505.677,00	DINAS SOSIAL
169	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	294.171.000,00	DINAS SOSIAL
170	Penanggulangan Kemiskinan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	294.171.000,00	DINAS SOSIAL
171	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
172	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
173	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
174	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
175	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.271.395.950,00	DINAS TENAGA KERJA
176	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.001.395.950,00	DINAS TENAGA KERJA
177	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Provinsi	356.745.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
178	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	888.904.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
179	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	503.424.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
180	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	110.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
181	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	110.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
182	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.403.618.724,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
183	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.676.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
184	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.746.067.959,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
185	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
186	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
187	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	876.965.365,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
188	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	28.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
189	Reformasi Birokrasi	Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.000.000,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
190	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.609.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
191	Reformasi Birokrasi	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
192	Reformasi Birokrasi	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	282.197.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
193	Reformasi Birokrasi	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	126.467.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
194	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	155.729.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
195	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	447.208.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
196	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	347.381.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
197	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56.673.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
198	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	43.154.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
199	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	163.924.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
200	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	163.924.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
201	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	188.518.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
202	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	188.518.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
203	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	139.020.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
204	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	139.020.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
205	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	66.524.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
206	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	66.524.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
207	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	90.057.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
208	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	90.057.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
209	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
210	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
211	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	700.614.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
212	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	700.614.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
213	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.131.852.352,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
214	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
215	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.922.351.052,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
216	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
217	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	306.869.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
218	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.025.070.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
219	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.668.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
220	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.354.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
221	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.539.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
222	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	685.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
223	Reformasi Birokrasi	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
224	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	570.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
225	Reformasi Birokrasi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
226	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	157.556.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				DAN PENCATATAN SIPIL
227	Reformasi Birokrasi	Pelayanan Pencatatan Sipil	29.556.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
228	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	63.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
229	Reformasi Birokrasi	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
230	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	159.261.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
231	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	72.099.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
232	Reformasi Birokrasi	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	87.162.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
233	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	131.426.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
234	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Profil Kependudukan	131.426.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
235	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.484.710.280,05	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
236	Penanggulangan Kemiskinan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
237	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.566.877.131,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
238	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
239	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
240	Penanggulangan Kemiskinan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.880.893.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
241	Penanggulangan Kemiskinan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1.032.440.149,05	DINAS PEMBERDAYAAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Pemerintahan Daerah		MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
242	Penanggulangan Kemiskinan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
243	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	170.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
244	Penanggulangan Kemiskinan	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	170.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
245	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.438.745.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
246	Penanggulangan Kemiskinan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.438.745.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
247	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.175.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
248	Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.175.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
249	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
250	Penanggulangan Kemiskinan	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
251	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.526.681.351,21	DINAS PERHUBUNGAN
252	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
253	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.216.385.249,26	DINAS PERHUBUNGAN
254	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Barang Milik Daerah pada	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Perangkat Daerah		
255	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	509.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
256	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	887.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
257	Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
258	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.493.896.101,95	DINAS PERHUBUNGAN
259	Pembangunan Infrastruktur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
260	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.325.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
261	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
262	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
263	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
264	Pembangunan Infrastruktur	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
265	Pembangunan Infrastruktur	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
266	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	575.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
267	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
268	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
269	Pembangunan Infrastruktur	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
270	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
271	Pembangunan Infrastruktur	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
272	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
273	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
274	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.902.016.328,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
275	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
276	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.816.571.828,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
277	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
278	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
279	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	811.282.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
280	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
281	Reformasi Birokrasi	Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.090.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
282	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	723.862.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
283	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.449.127.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
284	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	9.449.127.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
285	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	10.314.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
286	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
287	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	10.214.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
288	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	350.876.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
289	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	350.876.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
290	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	305.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
291	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
292	Reformasi Birokrasi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
293	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
294	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
295	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
296	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
297	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
298	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
299	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pemerataan pembangunan			
300	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
301	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	5.161.677.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
302	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.161.677.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
303	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
304	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
305	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
306	Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
307	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	568.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
308	Penanggulangan Kemiskinan	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	568.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
309	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.854.360.966,86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
310	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.241.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
311	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.177.070.966,86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
312	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
313	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
314	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.394.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
315	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
316	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.261.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
317	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.449.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
318	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
319	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
320	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
321	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
322	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
323	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	525.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
324	Reformasi Birokrasi	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	525.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
325	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.077.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
326	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.077.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
327	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
328	Reformasi Birokrasi	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
329	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.193.252.616,45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
330	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
331	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.645.754.616,20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
332	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
333	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.411.700.000,25	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
334	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.721.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
335	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
336	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
337	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi	1.100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		
338	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
339	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4.185.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
340	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.465.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
341	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	2.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
342	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
343	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
344	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
345	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.730.675.024,85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
346	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
347	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.704.575.024,85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
348	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
349	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
350	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
351	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.349.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
352	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
353	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	930.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
354	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
355	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	280.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
356	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
357	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
358	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
359	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	805.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
360	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
361	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
362	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	465.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
363	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.651.495.638,80	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
364	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
365	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.257.173.107,80	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
366	Reformasi Birokrasi	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
367	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	640.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
368	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	430.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
369	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
370	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
371	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12.345.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pemerataan pembangunan			
372	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	825.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
373	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
374	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	320.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
375	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	10.550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
376	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
377	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.760.366.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
378	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
379	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	730.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
380	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.990.366.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
381	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	665.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
382	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	590.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
383	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
384	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
385	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	145.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
386	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	555.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
387	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
388	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.830.235.218,88	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
389	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
390	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.734.034.618,88	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
391	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
392	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.450.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
393	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.094.921.600,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
394	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.127.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
395	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.672.702.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
396	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
397	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.640.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
398	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
399	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.115.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
400	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
401	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
402	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
403	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	978.097.100,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
404	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	746.097.100,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
405	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	232.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pemerataan pembangunan			
406	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.831.280.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
407	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.407.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
408	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	423.580.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
409	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.593.047.491,32	DINAS PERKEBUNAN
410	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.698.337,92	DINAS PERKEBUNAN
411	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.911.911.153,40	DINAS PERKEBUNAN
412	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
413	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
414	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	941.956.000,00	DINAS PERKEBUNAN
415	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
416	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.980.000,00	DINAS PERKEBUNAN
417	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	906.502.000,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pemerataan pembangunan			
418	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	575.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
419	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
420	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	425.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
421	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.385.880.000,00	DINAS PERKEBUNAN
422	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penataan Prasarana Pertanian	3.385.880.000,00	DINAS PERKEBUNAN
423	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
424	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
425	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
426	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
427	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.987.562.500,00	DINAS PERKEBUNAN
428	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.887.562.500,00	DINAS PERKEBUNAN
429	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pemerataan pembangunan			
430	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.819.084.327,16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
431	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.943.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
432	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.393.008.227,49	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
433	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
434	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.832.599,67	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
435	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	884.800.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
436	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
437	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.645.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
438	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
439	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	690.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
440	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.130.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
441	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
442	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
443	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penataan Prasarana Pertanian	130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
444	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	965.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
445	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
446	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	90.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
447	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	425.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
448	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
449	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
450	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
451	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	409.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
452	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
453	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	409.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
454	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
455	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
456	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
457	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
458	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
459	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
460	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
461	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
462	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
463	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
464	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
465	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
466	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
467	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.745.554.696,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
468	Peningkatan kualitas hidup SDM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
469	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.087.472.696,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
470	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
471	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
472	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
473	Peningkatan kualitas hidup SDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
474	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
475	Peningkatan kualitas hidup SDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.940.040.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
476	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.042.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
477	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	929.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
478	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	379.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
479	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
480	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
481	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.520.094.992,75	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
482	Pembangunan Infrastruktur	Penataan Prasarana Pertanian	10.520.094.992,75	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
483	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
484	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
485	Peningkatan kualitas hidup SDM	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
486	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
487	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
488	Peningkatan kualitas hidup SDM	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
489	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.871.632.087,85	DINAS KEHUTANAN
490	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
491	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.855.540.042,85	DINAS KEHUTANAN
492	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada	45.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Perangkat Daerah		
493	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
494	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.377.881.045,00	DINAS KEHUTANAN
495	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
496	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.620.800.000,00	DINAS KEHUTANAN
497	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.322.411.000,00	DINAS KEHUTANAN
498	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.482.076.000,00	DINAS KEHUTANAN
499	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	282.076.000,00	DINAS KEHUTANAN
500	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	90.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
501	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	325.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
502	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	515.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
503	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.015.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
504	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	160.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
505	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
506	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perbenihan Tanaman Hutan	35.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
507	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	991.216.000,00	DINAS KEHUTANAN
508	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	879.336.000,00	DINAS KEHUTANAN
509	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk	75.789.000,00	DINAS KEHUTANAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Kewenangan Daerah Provinsi		
510	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	36.091.000,00	DINAS KEHUTANAN
511	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.634.539.300,00	DINAS KEHUTANAN
512	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.634.539.300,00	DINAS KEHUTANAN
513	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	123.915.000,00	DINAS KEHUTANAN
514	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	123.915.000,00	DINAS KEHUTANAN
515	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.167.328.523,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
516	Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.356.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
517	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.583.075.122,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
518	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
519	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
520	Pembangunan Infrastruktur	Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.908.486,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
521	Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	713.493.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
522	Pembangunan Infrastruktur	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	967.661.915,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
523	Pembangunan Infrastruktur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	787.634.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
524	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	553.410.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
525	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	248.755.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
526	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	304.655.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
527	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.019.250.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
528	Pembangunan Infrastruktur	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
529	Pembangunan Infrastruktur	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	419.250.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
530	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.053.715.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
531	Pembangunan Infrastruktur	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	223.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
532	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	572.975.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
533	Pembangunan Infrastruktur	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	33.540.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
534	Pembangunan Infrastruktur	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	111.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
535	Pembangunan Infrastruktur	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	111.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
536	Pembangunan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.903.624.999,50	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
537	Pembangunan Infrastruktur	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	180.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
538	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
539	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	210.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
540	Penanggulangan Kemiskinan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.163.624.999,50	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
541	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
542	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
543	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
544	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
545	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	625.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
546	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
547	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
548	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
549	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
550	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.385.785.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
551	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.385.785.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
552	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
553	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
554	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
555	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
556	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.121.388.700,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
557	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.350.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
558	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	828.469.900,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
559	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.568.800,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
560	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.378.611.300,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
561	Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	365.593.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
562	Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Otonomi Daerah	741.815.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
563	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	271.203.300,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
564	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	843.609.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
565	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.700.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
566	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.797.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
567	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.950.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
568	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.172.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
569	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.990.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
570	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	60.710.042.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
571	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	57.530.042.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
572	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1.950.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
573	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1.230.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
574	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.355.082.000,00	BIRO HUKUM
575	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.663.000,00	BIRO HUKUM
576	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.118.739.000,00	BIRO HUKUM
577	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.680.000,00	BIRO HUKUM
578	Reformasi Birokrasi	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.220.259.000,00	BIRO HUKUM
579	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	581.120.400,00	BIRO HUKUM
580	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Bantuan Hukum	639.138.600,00	BIRO HUKUM
581	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.187.643.500,00	BIRO PEREKONOMIAN
582	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.435.800,00	BIRO PEREKONOMIAN
583	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
584	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.004.438.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
585	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.769.700,00	BIRO PEREKONOMIAN
586	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.872.636.300,00	BIRO PEREKONOMIAN
587	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	392.905.200,00	BIRO PEREKONOMIAN
588	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	833.009.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
589	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	646.722.100,00	BIRO PEREKONOMIAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pemerataan pembangunan			
590	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	871.251.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
591	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.383.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
592	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	240.784.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
593	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.309.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
594	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.123.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
595	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.987.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
596	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.665.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
597	Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.628.749.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
598	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	903.994.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
599	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	845.047.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
600	Reformasi Birokrasi	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	879.708.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
601	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	913.719.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
602	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.832.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
603	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	183.563.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
604	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
605	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.078.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
606	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	594.246.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
607	Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.086.281.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
608	Reformasi Birokrasi	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	407.968.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
609	Reformasi Birokrasi	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	678.313.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
610	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.608.198.500,00	BIRO ORGANISASI

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
611	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.744.700,00	BIRO ORGANISASI
612	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.002.477.000,00	BIRO ORGANISASI
613	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.976.800,00	BIRO ORGANISASI
614	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.591.801.500,00	BIRO ORGANISASI
615	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	513.198.300,00	BIRO ORGANISASI
616	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.078.603.200,00	BIRO ORGANISASI
617	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	145.671.254.826,90	BIRO UMUM
618	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.544.801.050,00	BIRO UMUM
619	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.342.992.132,40	BIRO UMUM
620	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.339.892.100,00	BIRO UMUM
621	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	982.246.100,00	BIRO UMUM
622	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.336.294.250,00	BIRO UMUM
623	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.005.556.000,00	BIRO UMUM
624	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.354.735.400,00	BIRO UMUM
625	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.439.147.200,00	BIRO UMUM
626	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.286.436.394,50	BIRO UMUM
627	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	9.039.154.200,00	BIRO UMUM
628	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
629	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.785.300,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
630	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.785.600,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
631	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.491.789.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
632	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.021.442.100,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
633	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	149.558.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
634	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	502.527.700,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
635	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Keprotokolan	681.111.500,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
636	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.932.114.712,00	SEKRETARIAT DPRD
637	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.865.165.500,00	SEKRETARIAT DPRD
638	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.988.420.893,00	SEKRETARIAT DPRD
639	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.971.519.400,00	SEKRETARIAT DPRD
640	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.915.027.249,00	SEKRETARIAT DPRD
641	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.422.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
642	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.521.055.800,00	SEKRETARIAT DPRD
643	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.313.237.900,00	SEKRETARIAT DPRD
644	Reformasi Birokrasi	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74.583.204.470,00	SEKRETARIAT DPRD
645	Reformasi Birokrasi	Layanan Administrasi DPRD	31.351.913.500,00	SEKRETARIAT DPRD
646	Reformasi Birokrasi	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	217.067.885.288,00	SEKRETARIAT DPRD
647	Reformasi Birokrasi	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	12.681.572.600,00	SEKRETARIAT DPRD
648	Reformasi Birokrasi	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.140.525.800,00	SEKRETARIAT DPRD
649	Reformasi Birokrasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.088.167.600,00	SEKRETARIAT DPRD
650	Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas DPRD	143.053.432.288,00	SEKRETARIAT DPRD
651	Reformasi Birokrasi	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	46.682.814.800,00	SEKRETARIAT DPRD
652	Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.165.376.200,00	SEKRETARIAT DPRD
653	Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Tugas DPRD	2.255.996.000,00	SEKRETARIAT DPRD
654	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.165.746.291,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
655	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	744.374.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
656	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.956.379.803,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
657	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	152.563.492,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
658	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	261.399.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
659	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	829.433.496,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
660	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.312.680,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
661	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.247.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
662	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.946.458.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
663	Reformasi Birokrasi	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.598.902.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
664	Reformasi Birokrasi	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.495.514.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
665	Reformasi Birokrasi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.439.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
666	Reformasi Birokrasi	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	412.922.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
667	Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.986.065.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
668	Reformasi Birokrasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.673.458.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
669	Reformasi Birokrasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.565.209.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
670	Reformasi Birokrasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.747.397.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
671	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	121.329.341.571,12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
672	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	493.006.998,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
673	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.861.757.373,12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
674	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
675	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.021.971.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
676	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.459.007.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
677	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	219.547.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
678	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.316.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
679	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907.450.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
680	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.784.579.683.667,30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
681	Reformasi Birokrasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.163.080.490,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
682	Reformasi Birokrasi	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.328.155.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
683	Reformasi Birokrasi	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.565.456.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
684	Reformasi Birokrasi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.904.016.655,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
685	Reformasi Birokrasi	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.774.283.929.565,30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
686	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2.335.045.707,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
687	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.446.888.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
688	Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.446.888.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
689	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	128.406.206.417,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH
690	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
691	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	106.689.596.194,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH
692	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.675.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
693	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
694	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.385.548.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
695	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.053.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
696	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.264.060.023,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
697	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.621.327.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
698	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	16.726.103.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
699	Reformasi Birokrasi	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.726.103.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
700	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	113.636.661.386,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
701	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
702	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.876.231.622,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
703	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	791.350.309,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
704	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.269.948.055,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
705	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.131.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
706	Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.500.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
707	Reformasi Birokrasi	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	805.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
708	Reformasi Birokrasi	Mutasi dan Promosi ASN	789.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
709	Reformasi Birokrasi	Pengembangan Kompetensi ASN	780.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
710	Reformasi Birokrasi	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	126.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
711	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.349.229.455,70	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
712	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
713	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.962.750.255,80	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
714	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.990.500,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
715	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	192.256.800,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
716	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.990.001.200,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
717	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.126.500,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
718	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.767.734.199,90	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
719	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.206.370.000,00	BADAN PENGEMBANGAN

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
720	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.590.916.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
721	Reformasi Birokrasi	Pengembangan Kompetensi Teknis	983.010.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
722	Reformasi Birokrasi	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	7.607.906.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
723	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.586.653.157,12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
724	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.384.885,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
725	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.298.434.472,12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
726	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.120.100,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
727	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.700.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
728	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.041.842.100,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
729	Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
730	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	820.435.600,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
731	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.736.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
732	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.490.556.251,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
733	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	507.319.767,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
734	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	320.417.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
735	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.127.640.984,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
736	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	535.178.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
737	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.936.174.885,84	BADAN PENGHUBUNG
738	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.137.500,00	BADAN PENGHUBUNG
739	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.591.467.585,84	BADAN PENGHUBUNG
740	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.232.800,00	BADAN PENGHUBUNG
741	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
742	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.490.685.200,00	BADAN PENGHUBUNG
743	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.981.997.800,00	BADAN PENGHUBUNG
744	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.736.654.000,00	BADAN PENGHUBUNG
745	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.939.985.000,00	BADAN PENGHUBUNG
746	Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.939.985.000,00	BADAN PENGHUBUNG
747	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.721.700.787,32	INSPEKTORAT
748	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000,00	INSPEKTORAT
749	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.412.538.787,32	INSPEKTORAT
750	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	INSPEKTORAT
751	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	984.239.000,00	INSPEKTORAT
752	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.714.294.000,00	INSPEKTORAT
753	Reformasi Birokrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	899.599.000,00	INSPEKTORAT

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Pemerintahan Daerah		
754	Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.030.000,00	INSPEKTORAT
755	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.812.888.000,00	INSPEKTORAT
756	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.092.460.000,00	INSPEKTORAT
757	Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	720.428.000,00	INSPEKTORAT
758	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	877.945.000,00	INSPEKTORAT
759	Reformasi Birokrasi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	150.000.000,00	INSPEKTORAT
760	Reformasi Birokrasi	Pendampingan dan Asistensi	727.945.000,00	INSPEKTORAT
761	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.899.995.549,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
762	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.738.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
763	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.588.020.949,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
764	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.962.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
765	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.650.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
766	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.088.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
767	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.254.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
768	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.281.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
769	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
770	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
771	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
772	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
773	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	475.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
774	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	475.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
775	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	525.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
776	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	525.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
777	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
778	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Tabel 6. 6 Alokasi Dukungan Pagu Per Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp)
1	Reformasi Birokrasi	3,068,126,169,777.39
2	Peningkatan kualitas hidup SDM	2,943,815,062,937.51
3	Pembangunan Infrastruktur	660,360,148,362.33
4	Penanggulangan Kemiskinan	790,175,378,276.50
5	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	115,264,818,500.00
6	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	153,556,600,133.68
7	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	9,723,351,900.00

6.3 Program Prioritas Berdasarkan SPM

Tabel 6. 7 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5,210,000,000.00
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	800,000,000.00
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,600,027,000.00
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,787,000,000.00
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	2,150,000,000.00
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600,000,000.00
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	18,314,572,000.00
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	5,758,000,000.00
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	19,201,767,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,600,027,000.00
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	24,227,742,300.00
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,787,000,000.00
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	400,000,000.00
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600,000,000.00
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	25,280,556,700.00
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	8,721,500,000.00
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	3,431,385,000.00
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	7,820,625,000.00
19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru	438,373,000.00
20	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	180,000,000.00
21	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300,000,000.00
22	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	250,000,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
23	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3,720,000,000.00
24	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	225,000,000.00
25	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1,000,000,000.00
26	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,000,000,000.00
27	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,152,805,200.00
28	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2,452,355,400.00
29	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	300,000,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
30	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14,850,000.00
31	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyanggah Disabilitas	1,000,000.00
32	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	15,884,000.00
33	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	296,435,399.00
34	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4,740,000.00
35	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5,000,000.00
36	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	1,000,000.00
37	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	23,000,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
38	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	53,109,000.00
39	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	573,637,500.00
40	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	89,906,700.00
41	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	587,469,800.00
42	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	7,450,000.00
43	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	174,465,820.00
44	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	349,572,810.00
45	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16,580,000.00
46	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12,160,142.00
47	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan	373,038,050.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
48	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	186,145,600.00
49	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	1,590,405,000.00
50	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	50,917,103.00
51	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	240,487,000.00
52	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7,100,000.00
53	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2,500,000.00
54	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	12,960,000.00
55	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	169,934,300.00
56	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5,000,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
57	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5,000,000.00
58	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	20,452,000.00
59	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	14,250,000.00
60	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	294,126,000.00
61	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	35,153,700.00
62	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	920,852,000.00
63	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	65,612,279.00
64	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7,225,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
65	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	2,000,000.00
66	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	5,000,000.00
67	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	122,911,597.00
68	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	51,570,000.00
69	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	24,611,200.00
70	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	5,000,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		pengemis di dalam panti				
71	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	10,000,000.00
72	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	6,304,429.00
73	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	273,750,000.00
74	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	19,302,500.00
75	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	363,800,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
76	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	417,810,377.00
77	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	28,500,000.00
78	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang	19,640,000.00
79	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	287,755,300.00

6.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, terdapat 48 perangkat daerah yang melaksanakan 214 program yang terdiri dari 663 kegiatan. Secara rinci program dan kegiatan tahun 2026 terdapat pada buku II RKPD Provinsi Lampung tahun 2025.

Tabel 6. 8 Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
1	Dinas Pendidikan	8	19	2,000,618,120,711.70
2	Dinas Kesehatan	5	20	292,445,927,099.40
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	3	6	494,027,732,829.38
4	Rumah Sakit Jiwa	4	11	51,719,174,834.58
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	3	12	507,389,838,466.64
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	10	101,854,793,265.00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	12	23	50,298,514,618.83
8	Satuan Polisi Pamong Praja	2	11	58,552,953,583.90
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	11,077,188,631.57
10	Dinas sosial Provinsi Lampung	7	18	31,365,132,466.55
11	Dinas Tenaga Kerja	6	20	33,466,566,619.65
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	23	14,128,091,760.80
14	Dinas Lingkungan Hidup	10	21	17,611,680,724.40
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	17	8,265,095,352.00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	5	11	16,769,775,280.05
17	Dinas Perhubungan	4	20	22,831,681,352.21
18	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	5	14	35,321,019,728.00
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8	17	19,757,368,968.96
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	20,181,560,966.86
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	15	61,693,252,616.45

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	18	15,640,675,024.85
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	25	39,411,861,638.80
24	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	16	21,779,612,318.88
26	Dinas Perkebunan	6	15	25,341,489,991.32
25	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6	20	30,069,084,327.16
13	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura	9	23	59,844,649,688.75
27	Dinas Kehutanan	5	21	71,103,378,387.85
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	21	22,697,328,522.90
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	19	23,996,753,621.40
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	6	2,500,000,000.00
31	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	8	61,553,651,000.00
32	Biro Hukum	2	5	2,575,341,000.00
33	Biro Perekonomian	2	7	3,060,279,800.00
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2	9	3,500,000,000.00
35	Biro Administrasi Pembangunan	2	7	2,000,000,000.00
36	Biro Organisasi	2	5	3,200,000,000.00
37	Biro Umum	1	10	145,671,254,826.90
38	Biro Administrasi Pimpinan	1	7	6,000,000,000.00
39	Sekretariat DPRD	2	16	390,000,000,000.00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	15	40,148,270,391.00
41	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3	15	1,913,355,913,758.42
42	Badan Pendapatan Daerah	2	9	145,132,309,417.97
43	Badan Kepegawaian Daerah	2	9	116,137,261,386.34
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	2	10	28,940,145,455.70
45	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	12	12,077,209,408.12
46	Badan Penghubung	2	8	20,876,159,885.84
47	Inspektorat	3	11	58,412,533,787.32
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	6	12	24,649,995,549.78
JUMLAH		210	672	7,139,050,629,066.23

6.5 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2025

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut ini akan disajikan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2025 yang akan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil kesepakatan di Forum Rakortekabang dan Musrenbangnas Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 6. 9 Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang Didanai oleh APBN untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 berdasarkan hasil pembahasan Rakortekbang dan Musrenbangnas Tahun 2024

No.	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional Tahun 2025	Sasaran Visi Nasional Tahun 2025	Usulan Daerah	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024	Dukungan Sub Kegiatan Daerah pada RKPD 2025
1.	Transformasi Ekonomi	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Pengembangan Kawasan Padi Mendukung peningkatan produksi/produktivitas	98.300 ha	1. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dinas KPTPH Provinsi Lampung) 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dinas KPTPH Provinsi Lampung)
3.	Transformasi Sosial	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Pembangunan Rusmah Susun Hunian ASN	1 paket	Penetapan RTRW Provinsi (Dinas PKPCK Provinsi Lampung)

No.	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional Tahun 2025	Sasaran Visi Nasional Tahun 2025	Usulan Daerah	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024	Dukungan Sub Kegiatan Daerah pada RKPD 2025
3.	Transformasi Ekonomi	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Daya saing sumberdaya manusia meningkat	Pelatihan Dasar SDM bagi masyarakat disekitar destinasi wisata	150 orang	Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi (Dinas Pariwisata dandan Ekonomi kreatif Provinsi Lampung)
4.	Transformasi Sosial	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Daya saing sumberdaya manusia meningkat	Pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar industri	300 orang	Pembinaan kelompok dan manajemen asekolah Menengah Kejuruna (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

No.	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional Tahun 2025	Sasaran Visi Nasional Tahun 2025	Usulan Daerah	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024	Dukungan Sub Kegiatan Daerah pada RKPD 2025
		penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas				
5.	Transformasi Ekonomi	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Sarana Pasca panen untuk mendukung pengembangan Kawasan padi	132 unit	1. Pengawasan sebaran pupuk, pestisida dan sarana pendukung pertanian (Dinas KPTPH Provinsi Lampung) 2. Pengawasan sebaran sarana pasca panen Tanam,an pangan (Dinas KPTPH Provinsi Lampung) 3. Perencanaan pengembangan prasarana, Kawasan dan komoditas pertanian (Dinas KPTPH Provinsi Lampung).

No.	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional Tahun 2025	Sasaran Visi Nasional Tahun 2025	Usulan Daerah	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024	Dukungan Sub Kegiatan Daerah pada RKPD 2025
6.	Transformasi Sosial	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Pemberdayaan masyarakat miskin untuk pengurangan beban terkait kebutuhan dasar	300 KPM	Fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga (Dinas Sosial)
7.	Transformasi Sosial	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Pemberdayaan masyarakat miskin untuk peninghkatan pendapatan	500 orang	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (Dinas Sosial)
8.	Transformasi Ekonomi	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan	Penge,mbangan Kawasan kambing berbasis korporasi di Provinsi Lampung	5 titik di kab Pringsewu	Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Lampung)

No.	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional Tahun 2025	Sasaran Visi Nasional Tahun 2025	Usulan Daerah	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024	Dukungan Sub Kegiatan Daerah pada RKPD 2025
		ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
9.	Transformasi Ekonomi	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pendapatan per kapita setara negara maju	Pengembangan Kawasan tanaman semusim dan tahunan	6 hektar	1. Pengawasan sebaran pupuk, pestisida dan sarana pendukung pertanian (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung) 2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani (Dinas Perkebunan Prov. Lampung)

Selanjutnya disajikan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Lampung yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2024, yang sudah diinput dalam aplikasi Krisna Selaras sedangkan DAK Tahun 2025 sampai saat ini belum disampaikan ke Pemerintah Daerah. Alokasi pagu anggaran DAK Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024, sesuai tematik pada bidang Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. **267.357.679.000** dengan 6 bidang sektoral, yaitu; Bidang Pendidikan, Kesehatan, jalan, Irigasi, Pertanian dan Kelautan Perikanan.

Tabel 6. 10 Alokasi Pagu DAK Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024

Bidang	Tematik	Pagu
Pendidikan	SMA	84.895.521.000
	SLB	2.089.191.000
	SMK	114.132.390.000
		201.117.102.000
Kesehatan	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	7.884.512.000
	Penguatan Sistem Kesehatan	4.500.000.000
		12.384.512.000
Jalan	Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	7.402.158.000
	Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	12.222.953.000
		19.625.111.000
Irigasi	Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	14.844.497.000
Pertanian	Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	7.896.091.000
Kelautan Perikanan	Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	11.490.366.000
TOTAL		267.357.679.000

Sumber; DJPK Kemenkeu RI

Alokasi pagu anggaran DAK Non Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024, sesuai tematik pada bidang Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. **870.882.305.000** dengan 5 (lima) bidang sektoral, yaitu; Bidang Pendidikan, Kesehatan, Koperasi UMKM, PP dan PA serta Penanaman Modal. Berikut tabel alokasi anggaran DAK Non Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024.

Tabel 6. 11 Alokasi Anggaran DAK Non Fisik Provinsi Lampung Tahun 2024

BIDANG	PAGU
PENDIDIKAN	
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)	522.742.500.000
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	
REGULER	512.420.000.000
KINERJA	10.322.500.000
TUNJANGAN GURU ASN DAERAH	326.395.311.000
TUNJANGAN PROFESI GURU	324.027.455.000
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	1.927.161.000
TUNJANGAN KHUSUS GURU	440.695.000
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	5.500.000.000
MUSEUM	3.500.000.000
TAMAN BUDAYA	2.000.000.000
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	
BOK PROVINSI	9.659.617.000
KOPERASI dan UMKM	
DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UMK	4.851.677.000
PP dan PA	
DANA PELAYANAN PERLINDUNGA N PEREMPUAN DAN ANAK	406.000.000
PENANAMAN MODAL	
DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	1.327.200.000
TOTAL ALOKASI DAK NON FISIK	870.882.305.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2024 serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini. Evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merancang langkah-langkah pembangunan yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mencakup indikator kinerja utama daerah yang mencerminkan kinerja Kepala Daerah, serta indikator kinerja daerah yang merepresentasikan kinerja Kepala Perangkat Daerah. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur penting untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja dilakukan untuk menyediakan informasi kinerja yang relevan dan akurat, guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada pencapaian hasil. Indikator kinerja ini berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung, Indikator Kinerja Daerah (IKD) penyelenggaraan pemerintahan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintah daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Selain penetapan IKU, IKD dan IKK Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indek Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan, Gini Rasio, Inflasi, Tingkat Kemantapan Jalan, Nilai Tukar Petani (NTP), Persentase Peningkatan PAD, dan Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca (GRK). Target Indikator Kinerja Makro tahun 2026 tercantum pada tabel pada tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7. 1 Asumsi Makro Provinsi Lampung Tahun 2026

INDIKATOR MAKRO		Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,81 (TW-III 2024)	5,2 - 5,7
2.	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	48,19 (2023)*	54,0-56,0
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,13	73,80-74,4
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	3,51 - 4,05
5.	Kemiskinan (%)	10,62 (Sept 2024)	8,90 - 9,90
6.	Gini Rasio (Nilai)	0,301	0,274 - 0,290
7.	Inflasi (%)	1,50	2,5 -/+ 1,0
8.	Tingkat Kemantapan Jalan (%)		
9.	Nilai Tukar Petani (NTP) (Nilai)	124,97	125-127
10.	Persentase Peningkatan PAD (%)		
11.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	60,64	62,41 – 64,03

Berdasarkan pada Tabel 7.1, Provinsi Lampung memiliki potensi untuk mencapai pembangunan daerah yang maksimal dengan mempertimbangkan hasil realisasi capaian pada Bab II. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memproyeksikan indikator makro tahun 2026, dengan memperhatikan capaian tahun 2024 untuk mencapai target-target tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tumbuh positif meskipun saat ini masih dibayangi ekonomi dunia yang diperkirakan akan mengalami pelambatan. Upaya peningkatan nilai tambah ekonomi penting dilakukan dengan pemaksimalan potensi daerah seperti pertanian, pariwisata hingga pengelolaan sumber daya alam lainnya (perikanan dan kelautan) sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung lebih baik lagi. Hal ini memicu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Lampung pada tahun 2026.

Kenaikan IPM tahun 2024 dibanding tahun 2023 juga sangat baik. Capaian Lampung Tahun 2023 menjadikan Lampung masuk dalam daerah dengan kategori IPM “tinggi”. Dengan meningkatnya IPM, diindikasikan kualitas pendidikan meningkat. Indek kualitas Kesehatan juga meningkat

serta daya beli atau indeks pengeluaran yang merupakan komponen penyusun IPM diperkirakan meningkat dan dapat tumbuh signifikan.

TPT tahun 2025 dan 2026 diperkirakan akan terus menurun sejalan dengan meningkatnya perekonomian dan kepercayaan investor untuk berinventasi di Lampung. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung. Penurunan TPT akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pengeluaran yang merupakan komponen garis kemiskinan. Hal ini akan mendorong penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Lampung.

NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2024 sebesar 124,97. Angka ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2024 dibanding tahun 2023 yang sebesar 109,36. Hal ini menunjukkan Daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang dapat menggambarkan salah satu indikator peningkatan kesejahteraan petani.

Selama ini capaian penurunan intensitas emisi GRK terus menurun dan upaya yang dilakukan penurunan intensitas emisi GRK menjadi perhatian pemerintah daerah: ekonomi hijau (menyediakan pupuk organik), program prioritas gubernur (inisiasi lumbung energi terbarukan yang akan mulai di tahun 2026 keatas), menurunkan kebijakan pemerintah pusat yakni mendukung kegiatan ekonomi biru untuk memaksimalkan potensi sektor perikanan, serta menciptakan sektor pariwisata yang ramah lingkungan.

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. IKU menggambarkan secara langsung kinerja kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai instrumen pengukuran, IKU bersifat strategis dan berorientasi pada hasil. Artinya, IKU tidak sekadar mengukur banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi lebih menekankan pada capaian nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui IKU, dapat diketahui sejauh mana program dan kebijakan daerah mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Penetapan IKU menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, serta menjadi dasar evaluasi kinerja kepala daerah. Capaian terhadap indikator ini menjadi ukuran utama dalam menentukan keberhasilan atau perlunya perbaikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kontribusi seluruh perangkat daerah berbeda-beda sesuai dengan cascading kinerja terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung. Target capaian indikator pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 merupakan target RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET	
				2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,55 (2023)	4,9-5,3	5,2-5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,19	4,0-3,86	4,05-3,51
3	Gini Rasio	indeks	0,301	0,300 - 0,301	0,297 - 0,298
4	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,46	3,31-3,34	3,26-3,32
5	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	indeks	56,35 (2023)	59,19	60,16
6	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	21,53441 (2023),	23,71622	24,80712
7	Pertumbuhan PMTB	persen	4,14 (2023)	2,9-4,9	5-Mar
8	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	persen	1,4 (2023)	10-Jul	11-Aug
9	Nilai Tukar Petani	nilai	124,97	125-130	126-131
10	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	81,56 (2023)	83,07	83,58
11	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	persen	8,81 (2023)	8,5	7,56
12	Persentase Desa Maju dan Mandiri (%)	persen	62,26	64,55	66,6
13	Persentase BUMDES berkembang dan maju	persen	32,86	35,47	37,94
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan & Minum	persen	1,61	1,62	1,65

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET	
				2025	2026
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	ribu	83.723	85.000	90.000
16	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara	ribu	17.919.504	19.000.000	20.500.000
17	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	35,22	36	36,6
18	Kemantapan Jalan	persen	78,08	76,6	81,5
19	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	persen	-	0,35	0,47
20	Tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar PKP (Kawasan kumuh yang tertangani, rumah tidak layak huni yang tertangani, akses air minum aman, akses sanitasi aman)	persen	0	19,45	20,17
21	Peningkatan Fungsi Infrastruktur Sumber Daya Air	persen	0	35	39
22	Indeks modal manusia	indeks	0,52 (2023)	0,53	0,53
23	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	73,13	73,40-73,80	73,80-74,4
24	Rata rata lama sekolah	tahun	8,36	8,46	8,55
25	Harapan Lama sekolah	tahun	12,78	12,82	12,83
26	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	59,25 (2023)	65,77	69,03
27	Persentase Pemuda Wirausaha (16-30 Tahun) *Komposit IPP	persen	0,39 (2023)	0,69	0,99
28	Jumlah Usaha Menurut Umur Pengusaha (17-40 tahun)	jumlah	191136	193047	194978
29	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	53,17 (2023)	53,51	53,68
30	Umur Harapan Hidup	tahun	74,39	74,55	74,74
31	Prevalensi Stunting	persen	14,9 (2023)	13,2	12,8
32	Indeks Inovasi Daerah	indeks	58,7	59	59,5
33	Indeks Pembangunan TIK	indeks	5,78 (2023)	5,85	5,9
34	Tingkat kemiskinan	persen	10,62	10,00-9,5	9,9-8,9
35	Kemiskinan Ekstrem	persen	0,9	0,45	0,36
36	Tingkat inflasi	persen	1,5	2,5 + 1	2,5 + 1
37	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	indeks	61,21 (2023)	64,21	64,71
38	Indeks Perlindungan Anak	indeks	64,78 (2022)	66,22	66,94
39	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,43 (2023)	0,422	0,42
40	Persentase Disabilitas Tertangani	persen	-	16	18
41	Indeks Lansia Tangguh	indeks	58,0 (2023)	58,5	59

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET	
				2025	2026
42	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,68	83,00-84,00	84,01-85,00
43	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,27	4,3	4,4
44	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	indeks	85	95,3	95,33
45	Nilai Survei Penilaian Integritas	indeks	65,83	67,33	68,83
46	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks	3,5	4,1	4,2
47	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,68	83,00-84,00	84,01-85,00
48	Tingkat ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kawasan (%) (ketersediaan gedung pemerintahan, infrastruktur dasar permukiman, dan akses jalan dalam kawasan)	persen	10	10	15
49	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	60,64	62,79	64,03
50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	70,57 (2023)	70,99	71,2
51	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	indeks	0,537	0,537	0,537
52	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	4.616,32 (2023)	4.719,02	4.765,79
53	Indeks Resiko Bencana	Indeks	130,1	129,97	129,01
54	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	persen	9,15	9,52	9,95
55	Indeks pembangunan Kebudayaan	indeks	57,82 (2023)	58,5	59,6
56	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	78,32 (2022)	79-80	80-81
57	Ekspresi Budaya	persen	26,14 (2023)	37,31	38,71
58	Ketahanan Sosial Budaya	persen	74,72 (2023)	81,81	83,81
59	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	78,32 (2022)	79-80	80-81

7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) sangat penting untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristik yang unik, yang memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan. IKD dibagi berdasarkan beberapa aspek yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang kinerja daerah tersebut. Indikator kinerja daerah diukur berdasarkan empat aspek utama: Geografi dan

Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Pelayanan Umum.

Dalam konteks geografi dan demografi, kinerja daerah diukur berdasarkan kondisi fisik dan sosial masyarakat yang memengaruhi pembangunan. Distribusi penduduk menjadi salah satu hal yang penting. Jika penduduk terdistribusi tidak merata, misalnya sebagian besar tinggal di daerah perkotaan, maka akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi bisa jadi tidak merata. Pemerintah daerah perlu mengatasi tantangan ini agar semua wilayah, termasuk daerah terpencil, dapat menikmati fasilitas yang memadai. Selain itu, angka pertumbuhan penduduk dan tingkat pelayanan dasar juga menjadi indikator utama. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memerlukan kebijakan yang lebih matang dalam merencanakan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik, sementara tingkat layanan dasar menggambarkan seberapa efektif upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aksesibilitas terhadap layanan dasar juga menjadi hal yang sangat penting di daerah dengan kondisi geografis yang menantang.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, indikator yang mengukur kesejahteraan masyarakat, seperti Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan menjadi sangat penting. IPM menggabungkan aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran juga menjadi indikator yang tidak kalah penting. Pengentasan kemiskinan memerlukan upaya pemerintah daerah dalam memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan yang memadai juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa akses terhadap layanan ini merata, tanpa ada yang tertinggal.

Daya saing daerah mencerminkan seberapa kompetitif sebuah daerah di tingkat nasional bahkan internasional. Besarnya nilai tambah perekonomian daerah menjadi indikator utama dalam aspek ini. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin besar pula potensi

daerah tersebut untuk berkembang dan menarik perhatian investor. Diversifikasi ekonomi juga sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Dengan keberagaman sektor ekonomi, daerah lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi dan dapat menciptakan peluang baru bagi masyarakat. Indeks daya saing daerah mengukur kualitas faktor-faktor seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kebijakan ekonomi, dan iklim investasi yang ada di daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi dan teknologi, akan semakin meningkatkan daya saing daerah dan menjadikannya lebih menarik bagi investasi.

Kinerja pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh seberapa baik **pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat**. Pelayanan publik yang efisien dan berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan publik. Indeks ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Kecepatan respon terhadap permohonan dan keluhan masyarakat juga menjadi indikator yang penting. Jika pemerintah daerah mampu merespons dengan cepat dan menyelesaikan masalah secara efisien, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penggunaan indikator kinerja daerah berorientasi pada outcome, yakni perubahan atau manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai hasil dari intervensi pemerintah daerah. Dengan demikian, IKD tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan program, tetapi juga menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah Per Aspek Pemerintahan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	2025	2026	Sumber Data
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,07	83,58	Dinas KPTPH
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	8,5	7,56	Dinas KPTPH
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	680	685	Dinas ESDM
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	18,72	21,2896	Dinas PKPCK

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	2025	2026	Sumber Data
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	70,99	71,2	DLH, Kehutanan
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5	6,8	Dinas PKPCK
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	4.719,02	4.765,79	Dinas Lingkungan Hidup
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah	Persen	14,46	17,8816	Dinas PKPCK
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	62,79	65,35	Dinas LH, Kehutanan, KPTPH, ESDM, PKPCK, Perhubungan, DKP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PSDA, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Bappeda
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	129,97	129,01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,48	0,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,17	1,12	BPS/ Didsukcapil
13	Rasio Penduduk	Persen	104,12	104	BPS/ Didsukcapil
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	283,67	286	BPS/ Didsukcapil
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,9-5,3	5,2-5,7	BPS
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,00-9,5	9,9-8,9	Dinsos
		Persen			BPS
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	56,46-60,28	61,55-69,20	KPTPH, Disbun, Disnak, DKP, Dispar, Diskop, Disperindag, dll
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,0-3,86	4,05-3,51	Disnaker
5	Indeks Gini	Angka	0,300 - 0,301	0,297 - 0,298	BPS
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Angka	0,53	0,53	Dinkes, Disdikbud
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,55	74,74	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,27	0,29	Dinkes

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	2025	2026	Sumber Data
9	Prevalensi Stunting	Persen	13,2	12,8	Dinkes
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.46	8.55	Disdikbud
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.82	12.83	Disdikbud
12	Angka Literasi	Persen	69,26	70,12	Disdikbud
13	Angka Numerasi	Persen	66,23	68,53	Disdikbud
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	65.77	69.03	Dinas Perpustakaan dan Arsip
15	Indeks Literasi Digital	Angka	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Kominfo
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	35	40	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,1	74,5	Kemenag
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	58,5	59,6	Disdikbud
19	Indeks Perlindungan Anak	Angka	66,22	66,94	Dinas PPPA
20	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	64,21	64,71	Dinas PPPA
21	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,422	0,42	Dinas PPPA
22	Indeks Pembangunan Gender	Angka	90,94	91,08	Dinas PPA
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	53.51	53.68	Dispora
III ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)	Persen	47,3	47	BPS
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	19,25-19,36	19,57-19,80	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,62	1,65	Disparekraf
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	4	4,5	Disparekraf
5	Rasio Kewirausahaan	Persen	3,5	3,8	Diisi PIC
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,6	70,7	Dinas Tenaga Kerja
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	59	59,5	Balitbangda
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	59,19	60,16	Dinas LH, Dinas ESDM, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	23,71622	24,80712	DKP
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	36	36,6	Dinas ESDM
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	5,85	5,9	Dinas Kominfo
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	2,9-4,9	3,0-5,0	DPM PTSP

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	2025	2026	Sumber Data
13	Ekspor Barang dan Jasa	Triliun Rupiah	95	100,5	Disperindag
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,95	70,192	Dinas PKPCK
16	Persentase Desa Mandiri	%	15,58	16,39	Dinas PMDT
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,8	2	BPKAD
18	Tingkat Inflasi	%	2,5 + 1	2,5 + 1	Biro Perekonomian, BPS
IV ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	87,5	87,8	Kemenkumham/ Biro Hukum
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	4,1	4,2	Dinas Kominfo
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,3	4,4	Bapenda, DPM PTSP, RSAM, RSJ, RSBNI
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia
5	Persentase Penegakan Perda	%	82	83	SatPol PP
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	85	88	Badan Kesbangpol
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	79-80	80-81	Badan Kesbangpol
8	Indeks Rasa Aman (Rasa Aman Berjalan sendirian)	Angka	73	73,5	Badan Kesbangpol
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,31-3,34	3,26-3,32	Balitbangda

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029

7.3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk menilai sejauh mana suatu pemerintah daerah berhasil dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Setiap urusan atau sektor pemerintahan memiliki tantangan dan tujuan yang berbeda, sehingga dibutuhkan indikator yang relevan untuk mengevaluasi kinerjanya. Penetapan indikator kinerja kunci per urusan penyelenggaraan pemerintahan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam berbagai bidang, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	Pendidikan				
1	Skor Literasi	Persen	69,26	70,12	Disdikbud
2	Skor Numerasi	Persen	66,23	68,53	Disdikbud
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.82	12.83	Disdikbud
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.46	8.55	Disdikbud
5	Persentase Anak Usia 16–18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persen	72,95	73,63	Disdikbud
6	Persentase anak usia 4–18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	70,72	70,92	Disdikbud
7	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	Disdikbud
8	Indeks Pemerataan Guru	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Disdikbud
9	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	60,5	62,75	Disdikbud
10	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Disdikbud
11	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Disdikbud
	Kesehatan				

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,55	74,74	Dinkes, RSUAM, RSJ, RSBNH
2	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,27	0,29	Dinkes
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	122	109	Dinkes
4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	13,2	12,8	Dinkes
5	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	45	45	Dinkes, RSUAM, RSJ, RSBNH
6	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	100	Dinkes
7	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	10	20	Dinkes
8	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	66,67	66,67	Dinkes, RSUAM, RSJ, RSBNH
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK, BMBK, PSDA
2	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	27,63	28,34	Dinas PSDA
3	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen	24,86	26,1	Dinas PSDA
4	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	71	76	Dinas PSDA
5	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
6	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Belum memiliki TPA/TPST	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
7	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi	Belum memiliki SPALD Regional	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
	(Air Limbah Domestik Layak dan Aman)				
8	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	0	2,50%	Diisi PIC
9	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	Dinas PKPCK
10	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	Dinas PKPCK
11	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	100	100	Dinas PKPCK
12	Tingkat Kemantapan Jalan	%	76.06	81.5	Dinas BMBK
13	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Org	400	420	Dinas BMBK
14	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Persen	100	100	Dinas PKPCK
	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	68,95	70,192	Dinas PKPCK
2	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
3	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	2	4	Dinas PKPCK
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	60%	65%	Dinas PKPCK

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
6	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persen	0	1	Dinas PKPCK
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Indikator Kementerian
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Pesentase	82	83	Pol PP
3	Persentase Penyelenggaraan Trantibun dan Pelindungan masyarakat	Pesentase	82	83	Pol PP
4	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
5	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	BPSDM
6	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	BPBD, Dinas Sosial
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	BPBD, Dinas Sosial
	Sosial				
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
2	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
3	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
4	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
5	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Diisi PIC
6	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Diisi PIC
7	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Diisi PIC
8	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Asal Lampung yang Tertangani	Persen	100%	100%	Diisi PIC
9	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100%	100%	Diisi PIC
10	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100%	100%	Dinas Sosial
11	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100%	100%	Dinas Sosial
12	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang	Persen	100%	100%	Dinas Sosial

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
	Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya				
13	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
14	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
15	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
16	Indeks Peranan Sosial	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
17	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
18	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
19	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70	80	Dinas Sosial
20	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
21	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Sosial
22	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	5	5	Dinas Sosial
23	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	Persen	100%	100%	Dinas Sosial
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	Tenaga Kerja				
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase Kabupaten/Kota yang	Persentase	26,67	46,67	Dinas Tenaga Kerja

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
	Menyusun Rencana Tenaga Kerja				
3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persentase	65	68	Dinas Tenaga Kerja
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	*data belum tersedia	95	96	Dinas Tenaga Kerja
5	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Ribu Orang	450	500	Dinas Tenaga Kerja
6	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Ribu Orang	450	500	Dinas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,94	91,11	Dinas PPPA
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	4,2	4,1	Dinas PPPA
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	68,87	69,55	Dinas PPPA
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	5,7	5,8	Dinas PPPA
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55,34	56,24	Dinas PPPA
6	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	Dinas PPPA
7	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PPPA
8	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PPPA
9	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	indeks	61,78	61,98	Dinas PPPA
10	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	Dinas PPPA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
11	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	indeks	76	76,54	Dinas PPPA
	Pangan				
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Index	83,07	83,58	Dinas KPTPH
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	ton	92,28	108,28	Dinas KPTPH
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,6	92,8	Dinas KPTPH
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	5,24	4,37	Dinas KPTPH
5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	95	95	Dinas KPTPH
	Pertanahan				
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
2	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persen	0	0	Dinas PKPCK
3	Persentase terselesainya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
4	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
5	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Angka	1	1,25	Dinas PKPCK
6	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
7	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Angka	1	1,25	Dinas PKPCK

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
9	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
10	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
11	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
12	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
13	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
14	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas PKPCK
	Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	70.99	71.20	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	93,00733	100	BappedaDinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Air	Persen	70,47	70.67	Dinas Lingkungan Hidup
4	Indeks Kualitas Udara	Persen	71,39	71.69	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase RTH	Persen	1,006	1,007	Dinas Lingkungan HidupDinas PKPCK
6	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	90	91	Dinas Lingkungan Hidup
7	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
10	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skala (0-100)	82	84	Disdukcapil
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	35	50	Disdukcapil
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	45	55	Disdukcapil
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	85	88	Disdukcapil
5	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	92	94	Disdukcapil
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	75	80	Disdukcapil
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	70	75	Disdukcapil
8	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	50	60	Disdukcapil
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	40	55	Disdukcapil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Index	62,26	64,55	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	60	70	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	64,6	66,3	Kemendukbangga/ BKKBN
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	Rata-rata anak per Wanita	2,2	2,2	Kemendukbangga/ BKKBN
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15–19)	Kelahiran per 1000 Wanita Usia Subur 15-19 Tahun	19	18,6	Kemendukbangga/ BKKBN
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	Persen	67,9	68,7	Kemendukbangga/ BKKBN
5	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	9	8,7	Kemendukbangga/ BKKBN
6	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Kemendukbangga/ BKKBN/PPPA
	Perhubungan				
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,35	0,47	Dinas Perhubungan
2	Konektivitas Darat	%	50	67	Dinas Perhubungan
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	24,79	27,73	Dinas Perhubungan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
4	Konektivitas Laut	%	0	0	Dinas Perhubungan
5	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	0	17	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika				
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Nilai	58,33	59,01	Dinas Kominfotik
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	100	100	Dinas Kominfotik
3	Indeks SPBE	Indeks	4,1	4,2	Dinas Kominfotik
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	16,81	17,7	Dinas Koperasi UKM
3	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	100	100	Dinas Koperasi UKM
4	Persentase Koperasi Aktif	%	12,39	13,27	Dinas Koperasi UKM
5	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	2,53	3,25	Dinas Koperasi UKM
6	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	5,95	7,44	Dinas Koperasi UKM
7	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia
8	Pertumbuhan Wirausaha	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia
9	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	3,41	4,31	Dinas Koperasi UKM
10	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	*hanya untuk daerah tertinggal	*hanya untuk daerah tertinggal	*hanya untuk daerah tertinggal	*hanya untuk daerah tertinggal
	Penanaman Modal				

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	2,60%	3,50%	DPM-PTSP
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Total	650.000.000	450.000.000	DPM-PTSP
3	Peringkat Tujuan Investasi Nasional	Peringkat	Peringkat 26	Peringkat 25	DPM-PTSP
4	Jumlah Proyek investasi pada LKPM	Proyek investasi	14.500 Proyek	15.000 Proyek	DPM-PTSP
5	Persentase Penyelesaian Izin yang Tepat Waktu kewenangan Daerah Provinsi	Persen	100%	100%	DPM-PTSP
6	Peningkatan Mutu Prosedur Pelayanan	Nilai	BB	BB	DPM-PTSP
7	Persentase Kerja Sama Penanaman modal yang tidak dilanjutkan	(Karena Indikator baru, baru mau dihitung oleh PTSP)	*data belum tersedia	*data belum tersedia	DPM-PTSP
	Kepemudaan dan Olahraga				
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	53,51	53,68	Dispora
2	Indeks Pembangunan Olahraga	Point	0,37	0,39	Dispora
3	Wirasaha Kerah Putih	%	0,69	0,99	Dispora
4	Persentase Atlet Non Pelajar Yang Berprestasi Pada Event-event Nasional dan Internasional		35,92	38,42	Dispora
5	Jumlah Anggota dan Peserta Didik Kepramukaan (Kwartir Daerah Prov. Lampung) yang terfasilitasi dalam rangka Pembinaan dan pengembangan	Orang	1,199,106	1,223,088	Dispora
	Statistik				
1	Indeks Pembangunan Statistik UPS)	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,7	2,9	Dinas Kominfotik
	Persandian				

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
1	Indeks SPBE (terkait keamanan)	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Kominfo
2	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks	300	310	Dinas Kominfo
	Kebudayaan				
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	58,5	59,6	Disdikbud
2	Persentase seni budaya yang dikembangkan	%	35	45	Disdikbud
3	Persentase satuan pendidikan yang mengadakan pembelajaran muatan lokal nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan	%	20	40	Disdikbud
4	Persentase Sumberdaya sejarah lokal yang dilakukan pembinaan	%	33	64	Disdikbud
5	Persentase cagar budaya yang dilakukan pengkajian ilmiah	%	44	50	Disdikbud
6	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Permuseuman	%	100	100	Disdikbud
	Perpustakaan				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi
3	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
4	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di bidang Perpustakaan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
	Kearsipan				
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
2	Tingkat Ketersediaan Arsip	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
4	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
5	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	Kelautan dan Perikanan				
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	111,45	111,73	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Persen	100,12	100,47	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	5,19%	5,43%	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	190,609	194,421	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	180,616	186,034	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Luasan Kawasan Konservasi	Ha	152.096	152,096	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Angka Konsumsi Ikan	Ton	39,5	40,69	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pariwisata				
1	Rasio PDRB Penvediaan Akomodasi, Makan, Minum	persen	1,60%	1,65%	Dinas Pariwisata dan Ekraf
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	persen	10	13	Dinas Pariwisata dan Ekraf
3	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	persen	10	15	Dinas Pariwisata dan Ekraf
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	persen	12	12	Dinas Pariwisata dan Ekraf
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	persen	12	12	Dinas Pariwisata dan Ekraf
	Pertanian				
1	Nilai Tukar Petani NTP	Persen	125-130	126-131	Diisi PIC

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
2	Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	100	100	Dinas KPTPH
3	Persentase Capaian Produksi Hortikultura	Persen	100	100	Dinas KPTPH
4	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	1,36	1,72	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	hektar	357.350	357.350	Dinas KPTPH
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	87	88	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Unit Usaha	125	137	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	99,5	99,5	Dinas KPTPH
9	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	70	70	Dinas KPTPH
10	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	50	50	Dinas KPTPH
12	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia
Kehutanan					
1	Persentase Tutupan Lahan	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Kehutanan
2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Kehutanan
3	Indeks Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,537	0,546	Dinas Kehutanan
4	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kelompok	148	155	Dinas Kehutanan
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Kehutanan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
6	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	*data belum tersedia	*data belum tersedia	*data belum tersedia	Dinas Kehutanan
	Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	36	36,6	Dinas ESDM
2	Rasio Elektrifikasi	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas ESDM
3	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas ESDM
4	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas ESDM
5	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas ESDM
6	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas ESDM
7	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas ESDM
8	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas ESDM
9	Rasio Elektrifikasi	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas ESDM
	Perdagangan				
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	11,96	12,1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Nilai Ekspor Barang	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
6	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
7	Persentase Promosi Produk Lokal yang	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
	Difasilitasi/Dilaksanakan				
	Perindustrian				
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	18,97	19,15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
3	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
4	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
	Transmigrasi				
1	Pendapatan Perkapita di wilayah Transmigrasi	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
2	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
3	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
4	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
IV	UNSUR PENDUKUNG				
	Sekretariat Daerah				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83,00-85,00	84,01-85,00	Biro Organisasi
2	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	41,5	42,5	Biro Organisasi
3	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
4	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
6	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
7	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
8	Tingkat Kematangan UKPBJ	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
9	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
	Sekretariat DPRD				
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
4	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
V	UNSUR PENUNJANG				
	Perencanaan				
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	94	94,5	Bappeda
2	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Nilai	25	25,2	Bappeda
3	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Nilai	21	22	Bappeda
	Keuangan				
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
5	Persentase Penurunan SILPA	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
6	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
7	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
8	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
9	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
10	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
	Kepegawaian				
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,46 (Sedang)	81,10 (Tinggi)	Badan Kepegawaian Daerah
2	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	91,24	92,3	Badan Kepegawaian Daerah
3	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	60	65	Badan Kepegawaian Daerah
4	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	61,53	65,38	Badan Kepegawaian Daerah
5	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	71,25	73,23	Badan Kepegawaian Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan				
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	
2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	BPSDM
3	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	BPSDM
4	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	BPSDM
5	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	BPSDM
	Penelitian dan Pengembangan				

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,9	76,1	Balitbangda
2	Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	60	61	Balitbangda
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	60	61	Balitbangda
4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	100	100	Balitbangda
5	Persentase Produk Inovasi yang Diterapkan/ Dimanfaatkan	Persen	59	59,5	Balitbangda
6	Persentase fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen	100	100	Balitbangda
VI UNSUR PENGAWASAN					
	Inspektorat Daerah				
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,17	3,18	APIP
2	Tindakanlanjutan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal	Persen	75,8	76	INSPEKTORAT
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,17	3,18	APIP
4	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	3,14	3,16	BPKP
VII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	79-80	80-81	Diisi PIC

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	SUMBER DATA
2	Indeks Harmoni Indonesia	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
3	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
4	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
6	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC
7	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC	Diisi PIC



BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2045. RPJPD ini mengusung visi besar **Lampung SMART 2045: "Sejahtera, Maju, Merata, dan Berkelanjutan"**, sebagai landasan utama pembangunan jangka panjang daerah menuju masa depan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tahun 2026 juga menjadi tahun awal pelaksanaan program-program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, yang berlandaskan pada visi **"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"**. Visi ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong kemajuan daerah secara kolaboratif dan berkontribusi aktif dalam mempercepat pembangunan nasional.

Tema Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 adalah **"Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. RKPD Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan

pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah mewujudkan masyarakat Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL